



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Pertanian adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Bagian Anggaran (BA 018) Tahun 2018 (*Audited*) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan negara pada Kementerian Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pimpinan dalam pengambilan keputusan serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Jakarta, Mei 2019
Menteri Pertanian,



A. AMRAN SULAIMAN

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	x
Pernyataan Tanggung Jawab	xi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	97
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	207
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	225
F. Pengungkapan Penting Lainnya	229
VI. Lampiran dan Daftar	



DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran B.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018
Lampiran B.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Pertanian Tahun 2018
Lampiran B.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kementerian Pertanian Tahun 2018
Lampiran B.4	Rekapitulasi Target dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Benih Tahun 2018
Lampiran B.5	Daftar Rincian Belanja Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pemda Pada Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Berbentuk Barang Tahun 2018
Lampiran B.6	Rincian Realisasi Kegiatan Percontohan Pembangunan Embung/Dam Parit/Longstorage (Pusat) Tahun 2018
Lampiran B.7	Rincian Realisasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2018
Lampiran B.8	Rincian Realisasi SID Cetak Sawah Tahun 2018
Lampiran B.9	Daftar Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana P4S
Lampiran B.10	Daftar Penerima Bantuan Praktik Siswa Tahun 2018
Lampiran B.11	Perkembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2018
Lampiran B.12	Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pemberdayaan Pekarangan Pangan dalam Bentuk Uang Tahun 2018
Lampiran B.13	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kementerian Pertanian Tahun 2018
Lampiran C.1	Monitoring Penyelesaian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 yang dilakukan di Tahun 2019
Lampiran C.2	Monitoring Penyelesaian Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 yang dilakukan di Tahun 2019
Lampiran C.3	Rincian Satuan Kerja Yang Mempunyai Saldo Kas Lainnya Dan Setara Kas Kementerian Pertanian Tahun 2018
Lampiran C.4	Rincian Belanja Dibayar Dimuka Pada Badan Karantina Pertanian Tahun 2018
Lampiran C.5	Rincian Belanja Dibayar Dimuka Pada Satker Konsolidasi Kementerian Pertanian Tahun 2018
Lampiran C.6	Daftar Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak
Lampiran C.7	Daftar Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Lampiran C.8	Rincian Mutasi Persediaan MAK 526 Per Eselon I atas Pencatatan Persediaan
Lampiran C.9	Rincian Jenis Aset Tak Berwujud Tahun 2018
Lampiran D.1	Rincian Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Tahun 2018
Lampiran D.2	Rincian Penjelasan Perbedaan Nilai atas LRA Pendapatan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada LO per 31 Desember 2018
Lampiran D.3	Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Lampiran D.4	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Akun per

	Eselon I Tahun 2018
Lampiran E.1	Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018 dan 2017
Lampiran E.2	Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Lampiran E.3	Transfer Keluar Periode 31 Desember 2018
Lampiran E.4	Transfer Masuk Periode 31 Desember 2018
Lampiran E.5	Rincian Selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar
Lampiran F.1	Monitoring Daftar Temuan dan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Tindak Lanjut atas Temuan BPK Tahun 2018
Lampiran F.2	Monitoring Hibah dan Data Donor Pemberi Hibah Tahun 2018 kepada Kementerian Pertanian
Lampiran F.3	Monitoring Penyelesaian Satker Inaktif Kementerian Pertanian Per 31 Desember 2018 (Intrakomptabel)
Lampiran F.4	Penjelasan atas Pengembalian Belanja Pegawai Tanpa Pagu
Lampiran F.5	Daftar Jurnal Tidak Lazim Pada Inspektorat Jenderal, Badan Karantina TA 2018
Lampiran F.6	Rincian Tunggak Bayar Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang diusulkan/masuk dalam DIPA 2019
Lampiran F.7	Daftar Jurnal Koreksi Takeout Revaluasi BMN Pada Satker Konsolidasi Tahun 2018
Lampiran F.8	Monitoring Daftar Penghapusan Tahun 2018
Lampiran F.9	Monitoring Daftar Persetujuan Pemindahtanganan BMN Kementerian Pertanian Tahun 2018
Lampiran F.10	Monitoring Daftar Pemanfaatan BMN Kementerian Pertanian Tahun 2018
Lampiran F.11	Monitoring Daftar Perkara Gugatan BMN Kementerian Pertanian Tahun 2018
Lampiran F.12	Monitoring Tunggakan DPM-LUEP berdasarkan Hasil Rekon KPKNL pada Badan Ketahanan Pangan
Lampiran F.13	Rincian Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK PHLN) Tahun 2018
Lampiran F.14	Rincian Barang Milik Negara Tahun 2018
Lampiran F.15	Rincian Barang Milik Negara Henti Guna Tahun 2018



DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel A.1	Rincian Perbandingan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Tahun 2018	10
Tabel A.2	Pagu Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja Tahun Anggaran 2016 s.d 2018	11
Tabel A.3	Rincian Satuan Kerja di Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018	11
Tabel A.4	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih	14
Tabel A.5	Masa Manfaat Aset Tetap Ditentukan Dengan Berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013	17
Tabel A.6	Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	18
Tabel B.1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per Eselon I	19
Tabel B.2	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	20
Tabel B.3	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-lain	21
Tabel B.4	Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	21
Tabel B.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018	23
Tabel B.6	Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2018	24
Tabel B.7	Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	24
Tabel B.8	Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	25
Tabel B.9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I	25
Tabel B.10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Per Eselon I	26
Tabel B.11	Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	27
Tabel B.12	Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang Per Eselon I	31
Tabel B.13	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemdapada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2018	32
Tabel B.14	Perbandingan Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	89
Tabel B.15	Rincian Realisasi Belanja Modal Per Eselon I	90
Tabel B.16	Perbandingan Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	90
Tabel B.17	Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Per Eselon I	91
Tabel B.18	Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	91
Tabel B.19	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Eselon I Tahun 2018	92
Tabel B.20	Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	92
Tabel B.21	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Eselon I Tahun 2018	93
Tabel B.22	Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	93
Tabel B.23	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Eselon I Tahun 2018	94
Tabel B.24	Perbandingan Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	95

Tabel B.25	Realisasi Belanja Modal Lainnya Per Eselon 1 Tahun 2018	95
Tabel B.26	Perbandingan Belanja Modal BLU Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	96
Tabel C.1	Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	96
Tabel C.2	Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran	96
Tabel C.3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 pada Ditjen Hortikultura	97
Tabel C.4	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 Ditjen Peternakan dan Keswan	97
Tabel C.5	Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	98
Tabel C.6	Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan	99
Tabel C.7	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	99
Tabel C.8	Rincian Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon 1 per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	99
Tabel C.9	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I	100
Tabel C.10	Kas Lainnya dan Setara Kas Badan Litbang Pertanian per 31 Desember 2018	102
Tabel C.11	Rincian Penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas Kementan	102
Tabel C.12	Perbandingan Rincian Kas dan Bank pada BLU	103
Tabel C.13	Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I	104
Tabel C.14	Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Satker	104
Tabel C.15	Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I	105
Tabel C.16	Perbandingan Rincian Jenis Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	106
Tabel C.17	Perbandingan Piutang PNPB per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	106
Tabel C.18	Piutang Bukan Pajak dari Satker Ditjen Hortikultura per 31 Desember 2018	107
Tabel C.19	Piutang Bukan Pajak dari Satker Ditjen Peternakan dan Keswan per 31 Desember 2018	108
Tabel C.20	Piutang Bukan Pajak dari Satker Badan Litbang Pertanian per 31 Desember 2018	109
Tabel C.21	Piutang Bukan Pajak dari Satker Badan Karantina Pertanian per 31 Desember 2018	110
Tabel C.22	Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I	116
Tabel C.23	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 pada Satker Ditjen Hortikultura	117
Tabel C.24	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 pada Satker Badan Litbang Pertanian	118
Tabel C.25	Pelunasan TGR pada Satker Ditjen Hortikultura per 31 Desember 2018	120
Tabel C.26	Pelunasan TGR pada Satker Ditjen Perkebunan per 31 Desember 2018	120
Tabel C.27	Pelunasan TGR pada Satker Ditjen Peternakan dan Keswan per 31 Desember 2018	121
Tabel C.28	Pelunasan TGR pada Satker Badan Litbang per 31 Desember 2018	121
Tabel C.29	Rincian Penyisihan Piutang Lancar	123

Tabel C.30	Rincian Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	124
Tabel C.31	Pembagian Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2018	124
Tabel C.32	Rincian Persediaan per Eselon I per tanggal 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017	125
Tabel C.33	Persediaan Taman Teknologi Pertanian	126
Tabel C.34	Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	126
Tabel C.35	Persediaan Benih Tanaman Perkebunan	134
Tabel C.36	Rincian Mutasi Persediaan MAK 526 per Eselon I atas Pencatatan Persediaan	132
Tabel C.37	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon 1	135
Tabel C.38	Mutasi Tambah TP/TGR pada Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, dan Balitbangtan	135
Tabel C.39	Mutasi Kurang TP/TGR (pelunasan/setoran) pada Itjentan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan dan Badan Litbang Pertanian	136
Tabel C.40	Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih - Piutang Jangka Panjang TA 2018	136
Tabel C.41	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017	137
Tabel C.42	Rincian Tanah berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2018 dan 2017	144
Tabel C.43	Rincian Peralatan dan Mesin berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	154
Tabel C.44	Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	164
Tabel C.45	Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	176
Tabel C.46	Rincian Aset Tetap Lainnya per Eselon 1 per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	180
Tabel C.47	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Eselon I per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	183
Tabel C.48	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	184
Tabel C.49	Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018	184
Tabel C.50	Aset Tak Berwujud per Eselon 1 per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	184
Tabel C.51	Rincian Mutasi Tambah Pembelian Satker Barantan	186
Tabel C.52	Rincian Mutasi Tambah Transfer Masuk Satker Barantan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	187
Tabel C.53	Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	190
Tabel C.54	Rincian Aset Tetap yang Tidak Diketahui Keberadaannya	191
Tabel C.55	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018	194
Tabel C.56	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	194
Tabel C.57	Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	195
Tabel C.58	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2018	195

Tabel C.59	Rincian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Per Eselon I	195
Tabel C.60	Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Per Eselon I	198
Tabel C.61	Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	204
Tabel D.1	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2018	207
Tabel D.2	Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	208
Tabel D.3	Rincian Mutasi Beban Pegawai 31 Desember 2018	208
Tabel D.4	Perbandingan Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	209
Tabel D.5	Perbedaan atas Beban Persediaan dengan Pemakaian Barang Persediaan Per 31 Desember 2018	210
Tabel D.6	Perbandingan Beban Pemeliharaan Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	213
Tabel D.7	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	215
Tabel D.8	Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	216
Tabel D.9	Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	216
Tabel D.10	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	217
Tabel D.11	Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	218
Tabel D.12	Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	218
Tabel D.13	Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	219
Tabel D.14	Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2018	220
Tabel D.15	Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	220
Tabel D.16	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	222
Tabel D.17	Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2018	223
Tabel D.18	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	224
Tabel E.1	Koreksi Nilai Persediaan Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	225
Tabel E.2	Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	226
Tabel E.3	Rincian Pengesahan Hibah Tahun 2018	227
Tabel F.1	Perbandingan Aset antara Pelaporan SA1BA Dengan SIMAK BMN	239
Tabel F.2	Neraca Percobaan Per 31 Desember 2018	240

Tabel F.3	Rekap Data Tagihan Kontrak Pengadaan Bantuan Alsintan Pembayaran Tunda Bayar	243
-----------	------------------------------------------------------------------------------	-----



DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

Gambar B.I Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018



DAFTAR GAMBAR



**PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2019

Menteri Pertanian,



A. AMRAN SULAIMAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2018 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp703.694.122.290,00 atau mencapai 183,06% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp384.408.110.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp21.836.602.837.694,00 atau mencapai 90,84% dari alokasi anggaran sebesar Rp24.038.510.833.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp26.060.200.342.169,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp8.303.486.661.386,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp9.066.921.191,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp17.205.901.659.170,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp541.745.100.422,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp252.880.609.242,00 dan Rp25.807.319.732.927,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp505.882.376.741,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp14.573.879.499.378,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp(14.067.997.122.637,00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp234.481.678.168,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(13.833.515.444.469,00).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp18.462.335.723.500,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(13.833.515.444.469,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp(58.343.604.406,00) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp21.236.843.058.302,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp25.807.319.732.927,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk sampai dengan 31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



**RINGKASAN LAPORAN
KEUANGAN**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KEMENTERIAN PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017
(AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018		% THD ANGGARAN	31 DESEMBER 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	384.408.110.000	703.694.122.290	183,06	584.791.408.644
JUMLAH PENDAPATAN		384.408.110.000	703.694.122.290	183,06	584.791.408.644
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	2.530.327.123.000	2.430.897.301.335	96,07	2.165.578.779.483
Belanja Barang	B.4	20.570.035.536.000	18.536.529.810.452	90,11	19.056.638.955.021
Belanja Modal	B.5	938.148.174.000	869.175.725.907	92,65	688.340.119.480
JUMLAH BELANJA		24.038.510.833.000	21.836.602.837.694	90,84	21.910.557.853.984



**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN**

II. NERACA

KEMENTERIAN PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	348.601.261	6.915.057.587
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	1.400.000	651.711.457
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	16.728.092.179	31.942.760.365
Kas pada Badan Layanan Umum	C.4	90.650.947.758	98.303.035.727
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.5	7.199.940.494.192	1.183.182.121
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	39.400.000	798.368.000
Piutang Bukan Pajak	C.7	101.880.036.002	1.308.819.636
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.8	24.227.611.824	25.046.109.301
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.9	508.804.231	2.355.596.525
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar	C.10	(20.195.157.639)	(20.435.540.754)
Persediaan	C.11	889.356.431.578	553.130.416.941
JUMLAH ASET LANCAR		8.303.486.661.386	701.199.516.906
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan	C.12	9.199.782.860	927.024.746
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	(132.861.669)	(77.866.372)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		9.066.921.191	849.158.374

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
ASET TETAP			
Tanah	C.14	11.608.949.370.893	11.628.839.367.360
Peralatan dan Mesin	C.15	6.225.890.240.250	6.007.283.535.144
Gedung dan Bangunan	C.16	4.734.934.884.794	4.758.157.681.267
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	608.350.078.280	606.318.041.651
Aset Tetap Lainnya	C.18	72.295.320.166	79.520.885.958
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	14.198.879.909	22.236.085.173
Akumulasi Penyusutan	C.20	(6.058.717.115.122)	(5.551.532.836.882)
JUMLAH ASET TETAP		17.205.901.659.170	17.550.822.759.671
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	92.020.243.837	91.781.280.244
Aset Lain-lain	C.22	716.975.689.013	366.970.350.022
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(267.250.832.428)	(206.095.769.075)
JUMLAH ASET LAINNYA		541.745.100.422	252.655.861.191
JUMLAH ASET		26.060.200.342.169	18.505.527.296.142
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	247.540.754.802	29.986.921.676
Pendapatan Diterima Dimuka	C.25	4.991.253.179	4.111.131.341
Uang Muka dari KPPN	C.26	348.601.261	6.915.057.587
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.27	0,00	2.178.462.038
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		252.880.609.242	43.191.572.642
JUMLAH KEWAJIBAN		252.880.609.242	43.191.572.642
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	25.807.319.732.927	18.462.335.723.500
JUMLAH EKUITAS		25.807.319.732.927	18.462.335.723.500
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		26.060.200.342.169	18.505.527.296.142



NERACA

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	505.882.376.741	513.287.349.153
JUMLAH PENDAPATAN		505.882.376.741	513.287.349.153
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.436.911.825.470	2.165.764.949.246
Beban Persediaan	D.3	534.795.883.074	701.571.383.247
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.642.207.825.041	3.383.036.449.039
Beban Pemeliharaan	D.5	269.415.153.972	284.451.167.210
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.907.412.856.604	1.704.224.647.603
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	5.009.427.912.150	11.790.239.712.182
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	771.362.654.956	727.631.536.035
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	2.345.388.111	11.066.680.048
JUMLAH BEBAN		14.573.879.499.378	20.767.986.524.610
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(14.067.997.122.637)	(20.254.699.175.457)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(144.572.660.209)	(110.916.251.759)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		379.054.338.377	(152.236.427.376)
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		234.481.678.168	(263.152.679.135)
SURPLUS/ (DEFISIT) - LO		(13.833.515.444.469)	(20.517.851.854.592)



LAPORAN OPERASIONAL

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
EKUITAS AWAL	E.1	18.462.335.723.500	16.763.445.775.459
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(13.833.515.444.469)	(20.115.684.106.107)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	779.470.625	7.162.870.680
Selisih Revaluasi Aset	E.3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4	(18.361.046.098)	304.524.144.719
Lain-lain	E.3.5	(40.762.028.933)	636.352.573
Jumlah		(58.343.604.406)	312.323.367.972
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	21.236.843.058.302	21.502.250.686.176
EKUITAS AKHIR	E.5	25.807.319.732.927	18.462.335.723.500



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Entitas berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kementerian Pertanian berkomitmen dengan visi ***“Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”***, dengan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
- Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
- Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Kelembagaan Kementerian Pertanian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.
4. Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.
5. Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya.
6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.
7. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.

9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
10. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.
11. Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Pertanian.

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2018 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Pertanian termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah Kementerian Pertanian seperti Eselon I, Sekretariat Wilayah, serta Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan Kementerian Pertanian disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-Rekon LK per tanggal 27 April 2019.

Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan yaitu dengan cara:

1. Proses kapitalisasi aset tetap dilakukan melalui pengiriman secara elektronik dari aplikasi SIMAK-BMN secara berjenjang.
2. Satker melakukan unggah (*upload*) data berupa Arsip Data Komputer (ADK) SAIBA berbentuk file kirim ke KPPN yang sudah melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikator dan reviu oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
3. Pengumpulan data melalui pengunduhan dari Aplikasi e-Rekon-LK keluaran Kementerian Keuangan, dimana Satker melakukan upload data berupa Arsip Data Komputer (ADK) ke Aplikasi e-Rekon-LK untuk kemudian diunduh secara berjenjang melalui Aplikasi e-Rekon-LK tingkat konsolidasi. Pada penyusunan LK Tahun 2018 ini diunduh berdasarkan Aplikasi e-Rekon-LK tanggal 27 April 2019.

Pada Tahun 2018, Kementerian Pertanian menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN senilai Rp23.730.031.248.000,00. Selama periode berjalan, Kementerian Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2018 jumlah pagu anggaran yang tercatat senilai Rp24.038.510.833.000,00. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran Awal dan Revisi yang tercatat Laporan Keuangan (SAIBA) pada Tahun 2018 pada Tabel A.1

Tabel A.1 Rincian Perbandingan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Laporan Keuangan (SAIBA) Tahun 2018

(dalam rupiah)

NO	ESELON I	NILAI PAGU AWAL	REVISI PAGU	SELISIH
1	SETJEN	1.492.092.430.000,00	1.730.087.799.000,00	237.995.369.000,00
2	ITJEN	97.134.000.000,00	97.134.000.000,00	0,00
3	DITJEN TAN PANGAN	6.474.323.504.000,00	6.675.409.495.000,00	201.085.991.000,00
4	DITJEN HORTIKULTURA	1.371.906.750.000,00	1.242.629.794.000,00	(129.276.956.000,00)
5	DITJEN PERKEBUNAN	1.624.600.919.000,00	1.636.354.054.000,00	11.753.135.000,00
6	DITJEN PKH	2.036.715.615.000,00	2.028.956.742.000,00	(7.758.873.000,00)
7	DITJEN PSP	5.997.548.817.000,00	5.834.734.749.000,00	(162.814.068.000,00)
8	BADAN LITBANG	2.084.560.880.000,00	2.092.710.111.000,00	8.149.231.000,00
9	BADAN PPSDMP	1.253.200.373.000,00	1.264.588.172.000,00	11.387.799.000,00
10	BKP	524.662.970.000,00	600.286.783.000,00	75.623.813.000,00
11	BARANTAN	773.284.990.000,00	835.619.134.000,00	62.334.144.000,00
	JUMLAH	23.730.031.248.000,00	24.038.510.833.000,00	308.479.585.000,00

Berdasarkan tabel di atas perubahan pagu pada Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal, secara signifikan dipengaruhi penambahan pagu belanja pegawai akibat kenaikan nilai index tunjangan kinerja (Tukin) senilai total Rp257.000.000.000,00.
2. Ditjen Tanaman Pangan, secara signifikan dipengaruhi penambahan pagu belanja barang akibat penambahan pagu anggaran dari Ditjen Hortikultura dan PKH berupa bantuan benih padi, jagung dan alsintan ke masyarakat senilai total Rp195.000.000.000,00.
3. Ditjen Hortikultura, secara signifikan dipengaruhi pelimpahan pagu belanja barang ke Ditjen Tanaman Pangan senilai total Rp100.000.000.000,00 dan senilai Rp13.300.000.000,00 ke Sekretariat Jenderal untuk kenaikan nilai index tunjangan kinerja (Tukin).
4. Ditjen Perkebunan, secara signifikan dipengaruhi penambahan alokasi pagu belanja barang dari BA 999 untuk collecting fee penyelesaian kredit petani senilai Rp4.400.000.000,00.
5. Ditjen PKH, secara signifikan dipengaruhi pelimpahan pagu belanja barang ke Ditjen Tanaman Pangan.
6. Ditjen PSP, secara signifikan dipengaruhi pelimpahan pagu belanja pegawai ke Sekretariat Jenderal untuk kenaikan nilai index tunjangan kinerja (Tukin) senilai Rp160.000.000.000,00.
7. Balitbang, secara signifikan dipengaruhi penambahan pagu belanja barang akibat penambahan pagu yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri senilai total Rp8.135.000.000,00.
8. BPSDMP, secara signifikan dipengaruhi penambahan pagu belanja modal senilai total Rp11.405.000.000,00.
9. BKP, secara signifikan dipengaruhi penambahan pagu belanja barang dari Kementerian Keuangan senilai Rp72.000.000.000,00 untuk membayar kerugian Bulog dalam menyerap gabah dari petani.

10. Barantan, secara signifikan dipengaruhi penambahan pagu belanja modal yang berasal dari revisi alokasi PNBPN.

Tabel A.2 Pagu Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja yang Terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Tahun 2018

Tahun Anggaran	Jumlah Satker	JENIS SUMBER DANA
		APBN
2018	632	24.038.510.833.000,00
2017	768	22.112.685.629.000,00
2016	1.106	27.727.362.119.000,00

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Pertanian tahun 2018 sebanyak 632 satker (DIPA), termasuk Satker Konsolidasi yang dibentuk dalam rangka menyajikan jumlah nilai koreksi atas hasil penilaian kembali (revaluasi) barang milik negara seluruh satker di Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada TA 2017 dan 2018, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-182/PB/2019 tanggal 11 Februari 2018 perihal Petunjuk Teknis Koreksi Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2018 (Audited). Pembentukan satker konsolidasi mengacu pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 perihal Pembentukan Satker Konsolidasi. Pada Laporan keuangan TA 2018 (Audited) selain menyajikan nilai koreksi atas hasil penilaian kembali (revaluasi) barang milik negara seluruh satker di Kementerian Pertanian juga menyajikan nilai koreksi akun Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat (526) ke akun Belanja Dibayar Dimuka berdasarkan kesepakatan BPK dengan Kementerian Pertanian dikarenakan dokumen pendukung pertanggungjawaban dalam proses pemenuhan.

Tabel A.3 Rincian Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pertanian TA 2018

No	Kode Eselon I	Nama Eselon I	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
1	01	Sekretariat Jenderal	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
2	02	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	03	Ditjen Tanaman Pangan	1	-	2	-	33	-	34	-	-	70
4	04	Ditjen Hortikultura	1	-	-	-	35	-	68	-	-	104
5	05	Ditjen Perkebunan	1	-	4	-	33	-	33	-	-	71
6	06	Ditjen Peternakan	1	-	23	-	33	-	-	-	-	57
7	08	Ditjen Prasarana & Sarana Pertanian	1	-	-	-	55	-	37	-	-	93
8	09	Badan Litbang	1	-	63	-	-	-	-	-	-	64
9	10	Badan PPSDMP	1	-	20	-	34	-	-	-	-	55
10	11	BKP	1	-	-	-	36	-	11	-	-	48
11	12	Badan Karantina	1	-	52	-	-	-	-	-	-	53
12	55	Satker Konsolidasi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah			26	-	164	-	259	-	183	-	-	632

Keterangan:

M : Menyampaikan LK

TM : Tidak Menyampaikan LK

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan

oleh Kementerian Pertanian. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban yang berasal dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (526) dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa (57) diakui dan disajikan sebagai beban apabila sudah diterbitkan berita acara serah terima (BAST).

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

- a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Tabel A.4 Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Kementerian Pertanian

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- 5) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:

70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

Pada peraturan tersebut pada Pasal 12 Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

1. Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526111);
2. Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526112);
3. Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526113);
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526114);
5. Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526115);
6. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemda (526211);
7. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemda (526212); dan
8. Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Sedangkan pada Pasal 36 bahwa persediaan yang langsung diserahkan kepada pihak penerima, transaksi penyerahan/dijual kepada masyarakat/pemda dibuktikan dengan dokumen sumber pengeluaran persediaan untuk:

- a) Satuan Kerja Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dapat berupa:
 - a. BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja;
 - b. BAST Persediaan antara kepala satuan kerja atau PPK dengan penerima;
 - c. BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD; atau
 - d. Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.
- b) Kantor Pusat dan Kantor Daerah dapat berupa:
 - (1) Surat Keputusan Hibah;
 - (2) BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD;
 - (3) BAST Persediaan antara kepala satuan kerja/PPK dengan penerima;
 - (4) BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja; atau
 - (5) Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.

Disamping itu, Pasal 43 menjelaskan bahwa seluruh pelaporan persediaan pada tanggal pelaporan dicatat berdasarkan *opname* fisik. Persediaan dilakukan untuk mengetahui jumlah Persediaan dan kondisi catatan dalam pembukuan pengelolaan Persediaan yang belum dipakai. *Opname* fisik Persediaan sebagaimana dimaksud dilakukan secara sensus per semester atau periode laporan.

b. Aset Tetap

- 1) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- 5) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- 6) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- 7) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan.

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Tabel A.5 Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka

Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

Tabel A.6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- 5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp703.694.122.290,00 atau mencapai 183,06% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp384.408.110.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per Eselon I
(dalam Rupiah)

ESELON I	NILAI ESTIMASI	NILAI REALISASI	% REALISASI
SEKRETARIAT JENDERAL	10.553.740.000,00	17.923.389.081,00	169,83
INSPEKTORAT JENDERAL	15.000.000,00	114.127.113,00	760,85
DITJEN TAN. PANGAN	4.706.436.000,00	131.243.072.739,00	2.788,59
DITJEN HORTIKULTURA	2.230.661.000,00	6.991.470.086,00	313,43
DITJEN PERKEBUNAN	1.716.770.000,00	8.097.488.032,00	471,67
DITJEN PKH	77.461.996.000,00	125.010.126.723,00	161,38
DITJEN PSP	100.000.000,00	26.318.242.637,00	26.318,24
BADAN LITBANG	36.693.246.000,00	52.962.950.000,00	144,34
BADAN PPSDMP	11.439.156.000,00	14.897.608.725,00	130,23
BADAN KET. PANGAN	25.000.000,00	5.950.629.922,00	23.802,52
BADAN KARANTINA	239.466.105.000,00	314.185.017.232,00	131,20
JUMLAH	384.408.110.000,00	703.694.122.290,00	183,06

Berdasarkan Tabel B.1 terdapat pendapatan yang secara signifikan realisasinya melebihi estimasi pendapatan, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal karena meningkatnya Pendapatan dari pelunasan TP/TGR, pengembalian belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)
2. Inspektorat Jenderal karena meningkatnya Pendapatan dari pelunasan TP/TGR, pengembalian belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
3. Ditjen Tanaman Pangan karena meningkatnya pengembalian belanja Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebagai tindak lanjut temuan BPK tahun 2017.
4. Ditjen Hortikultura karena meningkatnya pengembalian belanja Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebagai tindak lanjut temuan BPK tahun 2017.
5. Ditjen Perkebunan karena meningkatnya pengembalian belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).
6. Ditjen PKH karena sulit memprediksi pendapatan yang berasal dari hak dan perizinan dalam rangka onsite reviu atau audit ke negara asal.
7. Ditjen PSP karena meningkatnya Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan dan meningkatnya pengembalian belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) .
8. Badan Ketahanan Pangan karena meningkatnya PNPB atas penerimaan kembali belanja barang TAYL (Pengembalian perjalanan dinas, pengembalian belanja mak 526, pengembalian DPM-LUEP, dll), pendapatan dari pemindahtangan BMN Lainnya, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan dari penyelesaian tuntutan

ganti rugi non bendahara dan Pendapatan dari penyelesaian tuntutan ganti rugi pihak ketiga.

- Badan Karantina Pertanian karena sulit memprediksi pendapatan yang berasal dari perjalanan Tindak Karantina berupa pemeriksaan karantina diluar tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan.

Tabel B.2 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
(dalam Rupiah)

URAIAN	NILAI ESTIMASI	NILAI REALISASI	% REALISASI
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	921.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa	11.200.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	25.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum	31.232.332.000,00	35.861.793.181,00	114,82
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0,00	1.157.147.834,00	~
Pendapatan BLU Lainnya	0,00	3.674.955.220,00	~
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	45.484.006.000,00	74.931.681.662,00	164,74
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	23.385.569.000,00	43.353.773.589,00	185,39
Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	231.921.468.000,00	267.498.449.217,00	115,34
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. Dan Teknologi	29.107.634.000,00	30.673.919.399,00	105,38
Pendapatan Jasa Lainnya	11.130.601.000,00	54.656.001.030,00	491,04
Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan	500.000,00	31.568.808.072,00	6.313.761,61
Pendapatan Denda	0,00	7.294.322.319,00	~
Pendapatan Lain-Lain	0,00	153.628.528.347,00	~
Pendapatan Bruto	384.408.110.000,00	704.299.379.870,00	183,22
Pengembalian		(605.257.580,00)	
Jumlah Pendapatan Netto	384.408.110.000,00	703.694.122.290,00	183,06

Berdasarkan Tabel B.2 terdapat pendapatan yang secara signifikan realisasinya melebihi estimasi pendapatan, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan Denda merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- Pendapatan BLU Lainnya pada Ditjen Peternakan dan Keswan merupakan pendapatan dari jasa perbankan berupa penyimpanan uang BLU di bank.
- Pendapatan Jasa Lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari perjalanan Tindak Karantina berupa pemeriksaan karantina diluar tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan.
- Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan yang berasal dari angsuran dan pelunasan TP/TGR
- Pendapatan lain-lain yang dapat dijelaskan pada Tabel B.3.

Tabel B.3 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-lain
(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	NILAI ESTIMASI	NILAI REALISASI
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA yang Lalu	0,00	1.986.773.116,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA yang Lalu	0,00	142.026.744.123,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TA yang Lalu	0,00	2.418.618.599,00
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi TA yang Lalu	0,00	2.250.000,00
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TA yang Lalu	0,00	7.090.964.721,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	8.100.165,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	25.154.813,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	69.922.810,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	153.628.528.347,00

Penerimaan Kembali Belanja Barang TA yang Lalu pada tabel di atas sebesar Rp142.026.744.123,00 merupakan penerimaan kembali atas belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (Bantuan Pemerintah) berupa uang yang kegiatannya dilaksanakan pada TA 2017. Kementerian Pertanian menyajikan nilai estimasi pendapatan lain-lain sebesar Rp0,00 karena belum dapat menyajikan populasi keluaran informasi yang dihasilkan dari peristiwa setiap jenis pendapatan lain-lain tersebut sebagaimana tercantum dalam CaLK Kementerian Pertanian pada Lampiran B.1 (pendapatan lain-lain)

Tabel B.4 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

URAIAN PENDAPATAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	%NAIK (TURUN)
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0,00	78.248.753.200,00	(100,00)
Pendapatan Jasa	0,00	363.925.025.680,00	(100,00)
Pendapatan Pendidikan	0,00	99.913.000,00	(100,00)
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	0,00	186.165.000,00	(100,00)
Pendapatan Iuran dan Denda	0,00	9.779.518.040,00	(100,00)
Pendapatan Lain-lain	0,00	58.681.360.915,00	(100,00)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	35.861.793.181,00	37.367.405.005,00	(4,03)
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	0,00	32.684.648.553,00	(100,00)
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.157.147.834,00	1.249.854.878,00	(7,42)
Pendapatan BLU Lainnya	3.674.955.220,00	2.571.374.373,00	42,92
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan	74.931.681.662,00	0,00	~
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	43.353.773.589,00	0,00	~
Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	267.498.449.217,00	0,00	~

URAIAN PENDAPATAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	%NAIK (TURUN)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, Dan Teknologi	30.673.919.399,00	0,00	~
Pendapatan Jasa Lainnya	54.656.001.030,00	0,00	~
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	31.568.808.072,00	0,00	~
Pendapatan Denda	7.294.322.319,00	0,00	~
Pendapatan Lain-Lain	153.628.528.347,00	0,00	~
Pendapatan Bruto	704.299.379.870,00	584.794.018.644,00	20,44
Pengembalian	(605.257.580,00)	(2.610.000,00)	
Jumlah Pendapatan Netto	703.694.122.290,00	584.791.408.644,00	20,33

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp118.902.713.646,00 atau 20,33% dibandingkan TA 2017. Hal tersebut disebabkan antara lain.

1. Meningkatnya pendapatan dari pengelolaan BMN dan penjualan dimana sebagian besar merupakan PNBP yang dikelola oleh Biro Umum dan Pengadaan.
2. Meningkatnya Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan yang berasal dari pendapatan jasa karantina dan peternakan
3. Terealisasinya pendapatan jasa lainnya karena meningkatnya penerimaan PNBP yang berasal dari perjalanan tindak karantina ke tempat Instalasi Karantina Hewan dan Tumbuhan pada Badan Karantina Pertanian. Tindakan Karantina dapat dilakukan di daerah Pabean/pelabuhan dan diluar daerah pabean/pelabuhan (gudang pengguna jasa) untuk pemeriksaan di luar daerah pabean/pelabuhan.
4. Meningkatnya pendapatan lain-lain yang merupakan penerimaan kembali belanja atas tahun anggaran sebelumnya, terutama merupakan penerimaan kembali atas belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (Bantuan Pemerintah) berupa uang pada Ditjen TP dan Ditjen PSP.

Kementerian Pertanian merealisasikan PNBP Tahun 2018 sebesar Rp703.694.122.290,00, terdapat nilai sebesar Rp2.440.409.937,00 merupakan pendapatan yang diakui dan telah dicatat Tahun 2017 (Tahun 2017 tercatat sebagai akun Piutang PNBP). Untuk penjelasan secara rinci Piutang PNBP Tahun 2017 yang diterima pada Tahun 2018 sebagai pendapatan yaitu:

1. Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Tahun 2017 senilai Rp798.368.000,00 seluruhnya telah diterima dan disetor pada Tahun 2018. Piutang Bukan Pajak total senilai Rp1.308.819.636,00, telah disetor senilai Rp882.394.261,00, telah dihapuskan senilai Rp371.397.730,00, telah direklasifikasi ke Piutang Tagihan TP/TGR senilai Rp7.714.000,00. Sehingga saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2017 yang masih tercatat per 31 Desember 2018 senilai Rp47.313.645,00.
2. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR senilai Rp25.046.109.301,00, telah disetor senilai Rp1.138.759.406,00, telah direklasifikasi ke Piutang Tagihan TP/TGR senilai Rp4.084.223.712,00, telah direklasifikasi ke Piutang PNBP senilai Rp1.427.748.068,00, telah dihapuskan senilai Rp3.063.924.212,00 dan telah ditransfer keluar senilai

Rp264.366.636,00. Sehingga saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR TA 2017 yang masih tercatat per 31 Desember 2018 senilai Rp15.067.087.267,00.

- Piutang dari Kegiatan Operasional BLU senilai Rp2.355.596.525,00 seluruhnya telah diterima dan disetor.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBP per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1**.

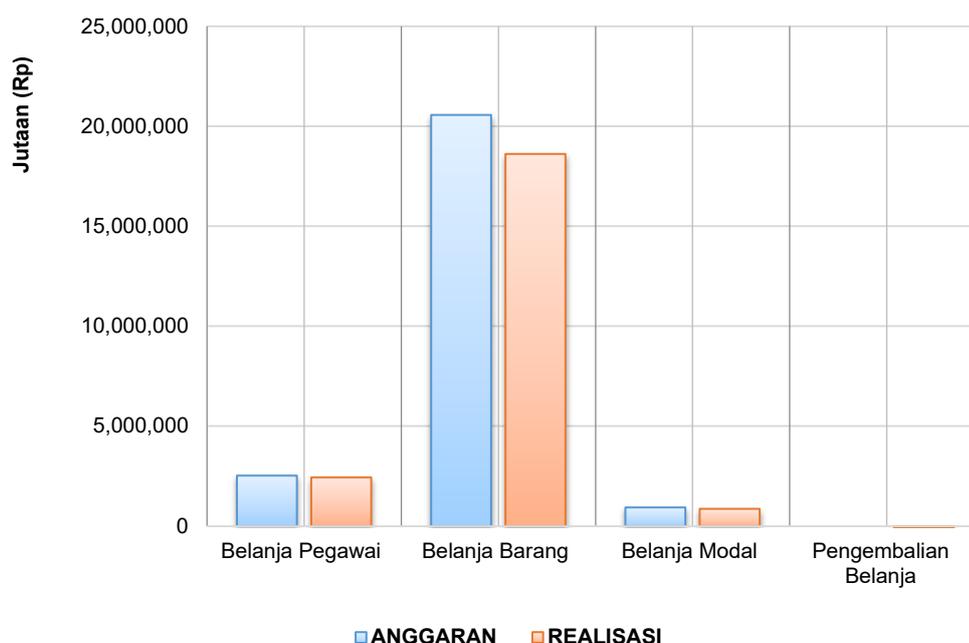
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp21.836.602.837.694,00 atau 90,84% dari anggaran belanja sebesar Rp24.038.510.833.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel B.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2018		% Real Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	2.530.327.123.000,00	2.438.138.343.544,00	96,36
Belanja Barang	20.570.035.536.000,00	18.618.501.208.677,00	90,51
Belanja Modal	938.148.174.000,00	869.530.698.463,00	92,69
Pengembalian Belanja		(89.567.412.990,00)	
Jumlah Belanja	24.038.510.833.000,00	21.836.602.837.694,00	90,84

Komposisi anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Gambar B.1



Sedangkan realisasi belanja kotor (*bruto*) berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2018 ditunjukkan pada Tabel B.6

Tabel B.6 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program per 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

Uraian Program Kementerian Pertanian	Anggaran	Realisasi	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.730.087.799.000,00	1.664.825.022.530,00	96,23
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	97.134.000.000,00	92.247.744.073,00	94,97
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	6.675.409.495.000,00	6.168.356.984.721,00	92,40
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1.242.629.794.000,00	1.126.405.896.209,00	90,65
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	1.636.354.054.000,00	1.415.645.206.640,00	86,51
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	2.028.956.742.000,00	1.853.987.720.287,00	91,38
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	5.834.734.749.000,00	5.122.013.869.600,00	87,78
Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	2.092.710.111.000,00	1.886.936.693.932,00	90,17
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	858.086.942.000,00	791.158.085.027,00	92,20
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	600.286.783.000,00	587.591.785.845,00	97,89
Program Peningkatan Kualitas Pengkaramintanaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	835.619.134.000,00	830.957.931.640,00	99,44
Program Pendidikan Pertanian	406.501.230.000,00	386.043.310.180,00	94,97
Pengembalian Belanja		(89.567.412.990,00)	
Jumlah Belanja	24.038.510.833.000,00	21.836.602.837.694,00	90,84

Dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2017 sebesar Rp21.910.557.853.984,00 makarealisasi belanja Tahun 2018 sebesar Rp21.836.602.837.694,00 mengalami penurunan sebesar Rp73.955.016.290,00 atau 0,34%. Hal ini disebabkan secara signifikan adalah terlambatnya realisasi anggaran belanja bantuan pemerintah program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA). Program BEKERJA merupakan bantuan kepada rumah tangga miskin (RTM) berupa paket bantuan ayam dan bebek KUB, pakan dan kandangnya. Selain itu berupa paket bantuan benih, pupuk, dan pestisida, program ini baru diluncurkan pada bulan Mei tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018. Program BEKERJA secara nyata baru dapat dilaksanakan mulai bulan September 2018, dan dilaksanakan oleh Eselon I Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen PKH, Ditjen PSP, Badan Litbang Pertanian, Badan PPSDMP, dan BKP.

Tabel B.7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	%NAIK (TURUN)
Belanja Pegawai	2.438.138.343.544,00	2.168.085.195.886,00	12,46

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	%NAIK (TURUN)
Belanja Barang	18.618.501.208.677,00	19.089.958.688.413,00	(2,47)
Belanja Modal	869.530.698.463,00	689.159.543.753,00	26,17
Pengembalian Belanja	(89.567.412.990,00)	(36.645.574.068,00)	
JUMLAH	21.836.602.837.694,00	21.910.557.853.984,00	(0,34)

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.430.897.301.335,00 dan Rp2.165.578.779.483,00. Realisasi belanja per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp265.318.521.852,00 atau 12.25% dibandingkan per 31 Desember 2017. Hal ini secara signifikan disebabkan kenaikan belanja tunjangan kinerja pegawai (Tukin) dari indeks 70% naik menjadi 80%.

Tabel B.8 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

URAIAN BELANJA PEGAWAI	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	%NAIK (TURUN)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	1.267.820.088.362,00	1.284.077.136.424,00	(1,27)
Belanja Gaji & Tunjangan Non PNS	516.126.000,00	473.320.000,00	9,04
Belanja Honorarium	2.480.400.000,00	2.078.160.000,00	19,36
Belanja Lembur	38.819.325.350,00	34.654.808.740,00	12,02
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transit	1.128.502.403.832,00	846.801.770.722,00	33,27
Jumlah Bruto	2.438.138.343.544,00	2.168.085.195.886,00	12,46
Pengembalian	(7.241.042.209,00)	(2.506.416.403,00)	
Jumlah Netto	2.430.897.301.335,00	2.165.578.779.483,00	12,25

Tabel B.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per Eselon I
(dalam Rupiah)

ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN BELANJA	REALISASI NETTO	% REALISASI
SEKRETARIAT JENDERAL	1.241.256.472.000,00	1.215.561.086.878,00	6.479.536.863,00	1.209.081.550.015,00	97,41
INSPEKTORAT JENDERAL	23.727.000.000,00	21.832.841.523,00	13.758.198,00	21.819.083.325,00	91,96
DITJEN TAN. PANGAN	49.516.144.000,00	43.534.127.170,00	37.811.681,00	43.496.315.489,00	87,84
DITJEN HORTIKULTURA	24.459.908.000,00	23.152.657.034,00	6.272.015,00	23.146.385.019,00	94,63
DITJEN PERKEBUNAN	78.000.000.000,00	69.533.510.690,00	16.989.804,00	69.516.520.886,00	89,12
DITJEN PETERNAKAN & KH	145.584.209.000,00	138.481.003.091,00	39.087.874,00	138.441.915.217,00	95,09
DITJEN PSP	26.000.501.000,00	22.465.105.402,00	2.710.522,00	22.462.394.880,00	86,39

ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN BELANJA	REALISASI NETTO	% REALISASI
BADAN LITBANG	501.269.866.000,00	476.122.947.660,00	474.065.189,00	475.648.882.471,00	94,89
BADAN PPSDMP	148.469.193.000,00	141.204.617.792,00	17.104.809,00	141.187.512.983,00	95,10
BADAN KET. PANGAN	23.695.850.000,00	19.510.245.250,00	1.104.774,00	19.509.140.476,00	82,33
BADAN KARANTINA	268.347.980.000,00	266.740.201.054,00	152.600.480,00	266.587.600.574,00	99,34
JUMLAH	2.530.327.123.000,00	2.438.138.343.544,00	7.241.042.209,00	2.430.897.301.335,00	96,36

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.2**.

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp18.536.529.810.452,00 dan Rp19.056.638.955.021,00. Realisasi belanja barang per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp520.109.144.569,00 atau 2,73% dibandingkan per 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan secara signifikan oleh terlambatnya realisasi anggaran belanja bantuan pemerintah program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) yang secara nyata baru dapat dilaksanakan mulai bulan September 2018. Selain itu disebabkan oleh kontrak pengadaan alat dan mesin pertanian yang tidak terealisasi karena ada penolakan dari KPPN Jakarta V sebesar Rp159.110.189.954,00 sesuai surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S.9914/PB.2018 tanggal 31 Desember 2018 dan terdapat tagihan ongkos kirim tahun 2016 dan tahun 2017 yang tidak terbayarkan karena belum terselesaikannya review BPKP.

Tabel B.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per Eselon I
(dalam Rupiah)

ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN BELANJA	REALISASI NETTO	% REALISASI
SEKRETARIAT JENDERAL	429.125.677.000,00	399.422.171.300,00	1.215.424.235,00	398.206.747.065,00	92,79
INSPEKTORAT JENDERAL	70.556.110.000,00	67.601.094.959,00	361.583.298,00	67.239.511.661,00	95,30
DITJEN TAN. PANGAN	6.582.781.439.000,00	6.107.862.845.605,00	67.794.863.045,00	6.040.067.982.560,00	91,76
DITJEN HORTIKULTURA	1.213.826.726.000,00	1.100.852.252.575,00	303.170.224,00	1.100.549.082.351,00	90,67
DITJEN PERKEBUNAN	1.507.080.045.000,00	1.298.738.832.954,00	545.128.697,00	1.298.193.704.257,00	86,14
DITJEN PKH	1.713.666.559.000,00	1.548.797.280.167,00	4.225.086.217,00	1.544.572.193.950,00	90,13
DITJEN PSP	5.797.735.357.000,00	5.090.098.623.760,00	2.622.060.909,00	5.087.476.562.851,00	87,75
BADAN LITBANG	1.286.577.813.000,00	1.124.698.375.108,00	1.974.828.108,00	1.122.723.547.000,00	87,26
BADAN PPSDMP	998.716.895.000,00	921.433.188.196,00	1.524.306.070,00	919.908.882.126,00	92,11
BADAN KET. PANGAN	572.832.083.000,00	564.383.566.246,00	1.312.089.240,00	563.071.477.006,00	98,30
BADAN KARANTINA	397.136.832.000,00	394.612.977.807,00	92.858.182,00	394.520.119.625,00	99,34
JUMLAH	20.570.035.536.000,00	18.618.501.208.677,00	81.971.398.225,00	18.536.529.810.452,00	90,51

Tabel B.11 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

URAIAN BELANJA BARANG	TAHUN 2018	TAHUN 2017	%NAIK (TURUN)
Belanja Barang Operasional	410.978.570.275,00	373.820.008.368,00	9,94
Belanja Barang Non Operasional	2.599.994.296.791,00	2.634.101.249.947,00	(1,29)
Belanja Barang Persediaan	407.421.341.401,00	384.779.449.398,00	5,88
Belanja Jasa	534.214.508.951,00	456.570.316.479,00	17,01
Belanja Pemeliharaan	239.209.936.727,00	260.915.011.288,00	(8,32)
Belanja Perjalanan DN	1.885.088.633.698,00	1.685.691.674.423,00	11,83
Belanja Perjalanan LN	29.875.892.325,00	26.621.005.842,00	12,23
Belanja Barang BLU	16.734.369.307,00	17.361.754.654,00	(3,61)
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	12.494.983.659.202,00	13.250.098.218.014,00	(5,70)
Jumlah Bruto	18.618.501.208.677,00	19.089.958.688.413,00	(2,47)
Pengembalian	(81.971.398.225,00)	(33.319.733.392,00)	
Jumlah Netto	18.536.529.810.452,00	19.056.638.955.021,00	(2,73)

Rincian Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN BELANJA BARANG	TAHUN 2018	TAHUN 2017	%NAIK (TURUN)
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	6.976.639.114.340,00	7.649.078.959.246,00	(8,79)
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	3.886.900.166,00	6.904.306.319,00	(43,70)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	5.514.457.644.696,00	5.594.114.952.449,00	(1,42)
Jumlah Bruto	12.494.983.659.202,00	13.250.098.218.014,00	(5,70)

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3**.

Salah satu program Bantuan yang diserahkan kepada masyarakat/pemda di Kementerian Pertanian yang dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Barang Non 526 adalah:

1. Kegiatan Asuransi Usaha Tani (AUT)

Salah satu realisasi kegiatan yang dibiayai dengan Belanja Non Operasional adalah Kegiatan Asuransi Usaha Tani. Realisasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp116.092.748.160,00. Kegiatan Asuransi Usaha Tani yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) ada dua yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha

Ternak Sapi (AUTS). Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut pada tahun 2018 ditunjukkan pada Tabel:

Kegiatan	Anggaran		Realisasi		Keterangan
	Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)	
AUTS	120.000 (ekor)	19.200.000.000	88.673	14.187.680.000	
AUTP	1.000.000 (ha)	144.000.000.000	806.199,64	116.092.748.160	

a. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Asuransi Usaha Tani/Ternak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai kedaulatan pangan sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Hal ini dilatarbelakangi fakta bahwa pangan, termasuk didalamnya produk pangan asal ternak merupakan kebutuhan dasar warga negara yang harus dijamin ketersediaannya oleh Pemerintah. Dalam rangka penguatan skala ekonomi dan kelembagaan peternak, Pemerintah mengupayakan serangkaian kebijakan, antara lain melalui Ditjen PSP yaitu memfasilitasi Asuransi Ternak Sapi (AUTS) yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan usaha dan memungkinkan sapi dapat digunakan sebagai agunan bila memerlukan pinjaman uang untuk modal. Bantuan AUTS adalah melalui pembayaran bantuan premi dari pemerintah Rp160.000,00 (80%) dari premi yang harus dibayar sebesar Rp200.000,00 sehingga peternak hanya membayar 20% atau Rp40.000/ekor untuk masa pertanggungan satu tahun dengan uang pertanggungan sebesar Rp10.000.000/ekor.

Pada Tahun 2018, capaian jumlah asuransi ternak sapi (AUTS) adalah sebanyak 88.673 ekor atau sebesar 73% dari target sejumlah 120.000 ekor. Sedangkan capaian realisasi keuangan adalah senilai Rp14.187.680.000,00 atau 73 % dari target senilai Rp19.200.000.000,00. Kegiatan asuransi ternak sapi ini mulai dilaksanakan sebagai program kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2016.

b. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP merupakan salah satu program yang dikembangkan untuk mewujudkan peranan pemerintah dalam aspek perlindungan dan pemberdayaan petani. Pada tahun 2018, capaian jumlah asuransi pertanian (AUTP) sesuai target kinerja tercapai seluas 806.199,64 ha dari target seluas 1.000.000 ha. Sedangkan capaian realisasi keuangan adalah senilai Rp116.092.748.160,00 dari target senilai Rp144.000.000.000,00 (80,06%).

Kontribusi dari kegiatan asuransi pertanian dalam mendukung program swasembada pangan adalah melakukan mitigasi gagal panen dari usaha tani padi seluas 806.199,64 Ha, melalui pemberian bantuan premi dari pemerintah 80% senilai Rp116.092.748.160,00 untuk usaha tani padi seluas 806.199,64 Ha. Dari alokasi AUTP pada tahun 2018, jumlah klaim yang dilakukan oleh kelompok tani adalah sebesar Rp73.165.741.993,29 yang selanjutnya digunakan oleh kelompok tani untuk melakukan budidaya padi pada musim tanam berikutnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT oleh BPK atas Bantuan Pemerintah masih terdapat permasalahan: Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi dan Ternak Sapi Senilai Rp253.642.693.056,00 belum sepenuhnya dikelola berdasarkan analisis risiko dalam rangka

keberlangsungan usaha tani diantaranya pembayaran premi belum seluruhnya didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp6.441.242.880,00. Atas permasalahan tersebut Kementerian Pertanian akan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan alokasi AUTP dan AUTS/K tahun 2019 dilakukan oleh Ditjen PSP bersama Ditjen TP dan Ditjen PKH berdasarkan realisasi tahun 2018, data serangan OPT, terkena banjir dan kekeringan tahun 2013 s.d 2018, serta dilakukan verifikasi dan klarifikasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
- 2) Temuan BPK tahun 2016-2018 senilai Rp6.441.242.880,00 telah ditindaklanjuti dengan verifikasi Itjentan senilai Rp260.993.798,00 (merupakan temuan BPK LK TA 2017 senilai Rp388.047.807,00) pada bulan Agustus 2018, selanjutnya akan dilakukan verifikasi lanjutan oleh Tim Itjen dari tahun 2016 sd 2018 senilai Rp6.180.249.082,00;
- 3) Pelaksanaan AUTP dan AUTS/K telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) yang digunakan untuk proses pendaftaran oleh petugas peternakan maupun penyuluh pertanian, penerbitan polis oleh pihak PT Jasindo, penerbitan SK DPD oleh Dinas Pertanian/Peternakan Kabupaten/Kota dan pengajuan klaim oleh petugas Pertanian dan Peternakan dan pemantauan pemanfaatan klaim;
- 4) Aplikasi SIAP akan terus disempurnakan sesuai dengan rekomendasi BPK dan peningkatan kualitas SPI.

2. Kegiatan Perbenihan Perkebunan

Terdapat kegiatan swakelola pada Direktorat Jenderal Perkebunan yang menghasilkan barang untuk diserahkan kepada masyarakat namun dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Barang Non 526 sebagai berikut:

Persiapan produksi/perbanyak benih siap tanam komoditas tanaman perkebunan (kelapa, karet, kakao, kopi, teh, lada, cengkeh, pala, jambu mete, sagu, dan kemiri sunan) dilaksanakan melalui proses pembenihan/pembibitan secara bertahap pada kawasan pengembangan perkebunan, sehingga benih unggul bermutu dan bersertifikat siap tanam menjadi relatif lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh petani pekebun. Dalam mewujudkan serta mendukung kemandirian benih di setiap wilayah kawasan pengembangan perkebunan, maka diperlukan dukungan perbenihan untuk memenuhi kebutuhan benih tanaman perkebunan sampai dengan siap tanam di sentra-sentra kawasan pengembangan tanaman perkebunan. Pada Tahun Anggaran 2018 melalui dukungan APBN baik untuk kegiatan di Pusat maupun di Daerah telah dialokasikan dukungan pendanaan dalam rangka pelaksanaan penyediaan benih siap tanam tanaman perkebunan. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Kegiatan lanjutan APBN-P 2017 berupa pemeliharaan lanjutan produksi benih untuk memenuhi benih siap tanam tahun 2018;
- b. Kegiatan produksi benih untuk memenuhi penyediaan benih siap tanam tahun 2018.

Prinsip pendekatan pelaksanaan kegiatan penyediaan benih unggul siap tanam Tahun 2018 dapat dilaksanakan secara swakelola. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaan swakelola terdapat komponen pengadaan barang yang proses pengadaannya tetap mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- a. Pemeliharaan Lanjutan Produksi Benih Tanaman Perkebunan (komoditas kelapa, karet, kakao, kopi, lada, pala, dan jambu mete) APBN-P Tahun 2017. Untuk pemeliharaan lanjutan Benih Tanaman Perkebunan (komoditas kelapa, karet, kakao, kopi, lada, pala,

dan jambu mete) dari kegiatan awal persiapan produksi Benih Tanaman Perkebunan APBN-P 2017 dilaksanakan oleh penyedia yang sama dengan pola produksi/perbanyak Benih Tanaman Perkebunan sesuai perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan pada tahap persiapan/pertama pada tahun 2017, pemeliharaan dilanjutkan pada tahun 2018 sampai benih mencapai umur benih siap salur untuk memenuhi kebutuhan pengembangan tahun 2018.

b. Penyediaan benih unggul siap tanam tanaman perkebunan (kelapa, karet, kakao, kopi, lada, cengkeh, pala, teh, jambu mete, sagu, dan kemiri sunan) tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan beberapa pilihan:

1) Pelaksana oleh Satker Dinas

Bagi satker dinas yang memiliki UPTD yang menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Produksi Benih Tanaman Perkebunan dapat melaksanakan secara swakelola kegiatan Penyediaan benih unggul siap tanam tanaman perkebunan (kelapa, karet, kakao, kopi, lada, cengkeh, pala, teh, jambu mete, sagu, dan kemiri sunan) dengan melibatkan masyarakat. Dalam pelaksanaan Penyediaan benih unggul siap tanam tanaman perkebunan satker dinas berkoordinasi dengan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja masing-masing.

2) Pelaksanaan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat

Satker Dinas Provinsi yang melaksanakan urusan bidang perkebunan dapat menunjuk kelompok masyarakat (Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi) yang telah memiliki Izin Usaha Produksi Benih sebagai pelaksana swakelola. Pelaksanaan kegiatan dukungan perbenihan tanaman perkebunan (kelapa, karet, kakao, kopi, teh, lada, cengkeh, pala, jambu mete, sagu, dan kemiri sunan) dapat dilakukan dengan kerjasama produksi benih melalui pola swakelola. Dalam pola swakelola yang mengacu Perppres No. 54 Tahun 2010, Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dengan perubahan Perpres Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012, dilaksanakan dalam 3 tahapan kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan. Secara rinci sebagai berikut:

- a) Perencanaan kegiatan, dilakukan oleh Satker Dinas yang membidangi Perkebunan;
- b) Pengawasan, dilakukan oleh Satker Dinas terhadap kemajuan pekerjaan produksi benih pelaksanaan swakelola;
- c) UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih terhadap sertifikasi benih;
- d) Penyerahan pekerjaan baik berupa pengadaan bahan maupun berupa pelaksanaan pekerjaan penyiapan benih siap tanam di lokasi penyediaan benih unggul, dilengkapi dengan Berita Acara (BA) serah terima barang dan hasil pekerjaan.

Rekapitulasi target dan realisasi Kegiatan Penyediaan Benih Tahun 2018 dapat dilihat pada **Lampiran B.4.**

Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Berdasarkan tabel B.11 nilai jumlah realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda(MAK 526)per 31 Desember 2018 sebesar Rp12.494.983.659.202,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp69.519.923.539,00 sehingga realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda(MAK 526) netto adalah sebesar Rp12.425.463.735.663,00 atau 90% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp13.806.453.459.000,00. Proses pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dapat dilihat pada Catatan No C.5 (Belanja dibayar Dimuka) dan D.7 (Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda).

Dari jumlah realisasi belanja MAK 526, dapat dikelompokkan untuk belanja bantuan pemerintah berupa barang senilai Rp9.478.015.928.034,00 dan belanja bantuan pemerintah berupa uang senilai Rp2.947.447.807.629,00.

Tabel B.12 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Eselon 1

Eselon I	Banper Uang		Banper Barang		Grand Total	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Ditjen Tan. Pangan	1.989.775.806.500	1.775.778.459.359	4.059.852.348.500	3.785.775.138.332	6.049.628.155.000	5.561.553.597.691
Ditjen Hortikultura	175.000.000	174.475.000	977.064.499.000	877.425.313.662	977.239.499.000	877.599.788.662
Ditjen Perkebunan			791.007.633.000	705.751.471.545	791.007.633.000	705.751.471.545
Ditjen PKH			684.412.743.000	605.827.396.766	684.412.743.000	605.827.396.766
Ditjen PSP	1.085.842.621.000	931.217.058.787	3.633.120.642.000	3.268.490.262.702	4.718.963.263.000	4.199.707.321.489
Badan Litbang			293.875.748.000	190.908.735.793	293.875.748.000	190.908.735.793
Badan PPSDMP			47.081.357.000	41.162.257.634	47.081.357.000	41.162.257.634
Badan Ket.Pangan	241.560.000.000	240.277.814.483	2.685.061.000	2.675.351.600	244.245.061.000	242.953.166.083
Total	3.317.353.427.500	2.947.447.807.629	10.489.100.031.500	9.478.015.928.034	13.806.453.459.000	12.425.463.735.663

Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526) pada Kementerian Pertanian dialokasikan padamasing-masing Eselon I dan dibaca sebagai suatu kesatuan dengan Catatan No C.5 (Belanja dibayar Dimuka), C.11 (Persediaan) dan D.7 (Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda). Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda masing-masing Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Alokasi Belanja bantuan pemerintah (526) pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2018 yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan realisasi sebesar Rp5.628.248.120.095,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp66.694.522.404,00 sehingga realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat netto adalah sebesar Rp5.561.553.597.691,00 atau 91,93% dari pagu anggarannya sebesar Rp6.049.628.155.000,00. Rincian belanja barang 526 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel B.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemdapada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2018

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PENGEMBALIAN BELANJA	REALISASI NETTO	%
Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masy/Pemda	-	-	0	0	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kpd masy/Pemda	1.581.645.179.000	1.443.865.537.313	0	1.443.865.537.313	91,29
Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kpd masy/Pemda	60.596.005.000	48.537.133.835	0	48.537.133.835	80,10
Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kpd masy/Pemda	8.876.046.000	8.382.720.000	0	8.382.720.000	94,44
Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kpd masy/Pemda bentuk uang	20.636.726.000	14.640.273.808	0	14.640.273.808	70,94
Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kpd masy/Pemda bentuk uang	274.001.174.000	237.279.825.726	1.468.044.255	235.811.781.471	86,06
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kpd masy/Pemda bentuk uang	6.054.700.000	3.860.337.677	0	3.860.337.677	63,76
Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi untuk diserahkan ke Pemda	913.895.000	906.807.397	0	906.807.397	99,22
Belanja barang penunjang tugas pembantuan untuk diserahkan ke Pemda	404.845.000	393.988.800	0	393.988.800	97,32
Belanja barang lainnya untuk diserahkan kpd masyarakat/Pemda	2.407.416.378.500	2.285.172.441.982	1.483.490.995	2.283.688.950.987	94,86
Belanja barang untuk bantuan lainnya yang mempunyai karakteristik bantuan pemerintah	1.689.083.206.500	1.585.209.053.557	63.742.987.154	1.521.466.066.403	90,08
Jumlah Belanja	6.049.628.155.000	5.628.248.120.095	66.694.522.404	5.561.553.597.691	91,93

Dari total realisasi belanja MAK 526 secara netto senilai Rp5.561.553.597.691,00 tersebut, dapat dikelompokkan menjadi belanja bantuan pemerintah berupa barang senilai Rp3.785.775.138.332,00 dan belanja bantuan pemerintah berupa uang senilai Rp1.775.778.459.359,00.

Adapun penjelasan kegiatan Banpem masing-masing Direktorat teknis pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan pengelolaan produksi tanaman sereal terdiri atas belanja dalam bentuk barang dan uang, meliputi padi dan jagung dengan rincian belanja sebagai berikut:

No	Kegiatan (Padi)	Volume		Realisasi Bantuan Barang	Realisasi Bantuan Uang	Jumlah Keltan
1	Budidaya Padi Inbrida Eks Cetak Sawah	2,842	Ha	0	1,697,069,810	114
2	Peng. Budidaya Padi Khusus Lainnya	2,430	Ha	0	2,041,200,000	97
3	Peng. Bud. Padi Sub Optimal Spesifik Lokasi	50,000	Ha	0	150,978,139,110	2,000
4	Mina Padi	1,484	Ha	0	3,209,545,250	59
5	Peng. Ds. Pert. Organik Padi	7,170	Ha	0	3,533,690,000	184
6	Padi Lahan Kering	793,488	Ha	0	338,628,561,570	31,740
7	Budidaya Padi Rawa	3,000	Ha	0	6,776,400,000	83
8	Budidaya Padi Korporasi	250	Ha	0	454,195,600	10
9	UPPO	890	Unit	0	142,237,024	986
10	Budidaya Padi Inbrida Sawah	167,000	Ha	41,434,539,700	-	6,680
11	Padi Lahan Kering	52,449	Ha	19,312,989,500	-	2,098
12	UPPO	97	Unit	52,619,072,758	-	-
J u m l a h					113,366,601,958	507,461,038,364

Sumber: Direktorat Serealia (data diolah)

Nilai Realisasi Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan pengelolaan produksi tanaman padi berupauang masih terdapat selisih dengan e Rekon LK, dan sampai dengan saat ini masih dalam proses pengumpulan dan validasi pertanggungjawaban.

No	Kegiatan	Volume		Realisasi Bantuan Barang	Realisasi Bantuan Uang	Jumlah Keltan
1	Jagung Hibrida Umum-2	373,996	Ha	0	33,792,304,528	-
2	Jagung Hibrida Umum-3/Litbang	618,982	Ha	0	55,391,710,755	-
3	Jagung Komposit	1,500	Ha	0	135,000,000	-
4	Pupuk	1,640,050	Ha	0	147,602,281,689	-
5	Jagung Hibrida Lahan Eks Tambang	-	Ha	0	0	-
6	Jagung Hibrida Lahan Marjinal	1,200	Ha	0	1,035,000,000	-
7	Jagung Pilot Project Berbasis Korporasi	1,000	Ha	0	485,000,000	-
8	VUB	1,100	Ha	0	866,500,000	-
9	Sorgum	-	Ha	0	0	-
10	Gandum	-	Ha	0	0	-
11	Jagung Hibrida Umum-2	1,163,762	Ha	769,919,827,721	0	-
12	Jagung Hibrida Umum-3/Litbang	1,525,685	Ha	839,057,414,372	0	-
13	Jagung Komposit	8,932	Ha	1,601,466,500	0	-
14	Jagung Hibrida Lahan Marjinal	1,135	Ha	697,440,000	0	-
15	Jagung Pilot Project Berbasis Korporasi	1,000	Ha	641,604,375	0	-
16	VUB	1,700	Ha	923,190,000	0	-
J u m l a h					1,612,840,942,968	239,307,796,972

Sumber: Direktorat Serealia (data diolah)

Nilai Realisasi Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan pengelolaan produksi tanaman jagung berupauang masih terdapat selisih dengan e Rekon LK, dan sampai dengan saat ini masih dalam proses pengumpulan dan validasi pertanggungjawaban.

b. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi semua dalam bentuk uang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Volume		Realisasi Bantuan Barang	Realisasi Bantuan Uang	Jumlah Keltan
1	Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai Tahun 2018	543,473	Ha	0	516,988,625,000	25,290
2	Penerapan Teknologi Tanaman Terpadu Kacang Hijau	4,975	Ha	0	3,103,400,000	282
3	Penerapan Teknologi Tanaman Terpadu Ubi Kayu	1,500	Ha	0	900,000,000	125
4	Penerapan Teknologi Tanaman Terpadu Ubi Jalar	500	Ha	0	300,000,000	39
5	Penerapan Teknologi Tanaman Terpadu Talas	500	Ha	0	300,000,000	98
Jumlah				0	521,592,025,000	

Sumber: Direktorat Akabi (data diolah)

Nilai Realisasi Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi berupauang masih terdapat selisih dengan e Rekon LK, dan sampai dengan saat ini masih dalam proses pengumpulan dan validasi pertanggungjawaban.

c. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan OPT dan DPI

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda untuk kegiatan penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI terdiri atas:

No	Kegiatan	Volume		Realisasi Bantuan Barang	Realisasi Bantuan Uang	Jumlah Keltan
1	Mobil fungsional LPHP	83	Ha	15,544,406,000	0	31
2	Motor Fungsional POPT	1,037	Ha	24,445,201,000	0	1,037
3	Pestisida	198,028	Ha	17,576,500,000	0	50
4	Rodentisida Pengasapan	174	Ha	195,000,000	0	1
5	Herbisida	2,790	Ha	150,000,000	0	3
6	Insektisida bakteri	220	Ha	195,000,000	0	2
7	Insektisida cendawan	220	Ha	195,000,000	0	2
8	Handsprayer	1,700	Ha	901,000,000	0	5
9	Pestisida Setdit	115,700	Ha	15,000,000,000	0	18
10	Laptop	0	Unit	40,000,000	0	1
11	Printer	0	Unit	9,600,000	0	1
12	Tunda Bayar Dem Area 2017	3,485	Ha		5,805,160,000	99
13	Dem Area BTS I	23,000	Ha		39,100,000,000	581
14	Dem Area BTS II	10,000	Ha		19,580,000,000	321
15	Dem Area PDPI	1,000	Ha		2,000,000,000	22
16	Herbisida	-	-		700,000,000	-
Jumlah				74,251,707,000	67,185,160,000	

Sumber: Direktorat Perlindungan TP (data diolah)

Nilai Realisasi Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan pengelolaan produksi tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI berupauang masih terdapat selisih dengan e Rekon LK, dan sampai dengan saat ini masih dalam proses pengumpulan dan validasi pertanggungjawaban.

d. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda untuk kegiatan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan meliputi belanja bentuk barang dan uang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Volume		Realisasi Bantuan Barang	Realisasi Bantuan Uang	Jumlah Keltan
1	Benih Padi Inbrida	647,328	Ha	154,538,577,307	-	
2	Benih Padi inbrida Lahan Kering	69,257	Ha	16,457,991,970	-	
3	Benih Padi Hibrida	101,872	Ha	88,398,776,230	-	
4	Benih Tumpangsari	22,694	Ha	15,842,608,738	-	
5	Benih Pengganti Subsidi	1,023,873	Ha	236,760,559,948	-	
6	Desa Mandiri Benih	1,990	Ha	8,423,554,108	-	
7	Benih Padi Inbrida	260,737	Ha	-	65,481,429,100	
8	Budidaya Padi VUB	5,000	Ha	-	15,262,500,000	
9	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi	7,776	Ha	-	13,951,050,000	
10	Benih Pengganti Subsidi	81,050	Ha	-	794,290,000	
11	Desa Mandiri Benih	1,990	Ha	-	25,012,619,000	
J u m l a h				520,422,068,301	120,501,888,100	

Sumber: Direktorat Perbenihan (data diolah)

e. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat/pemda pada kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan berbentuk barang dapat dilihat pada **Lampiran B.5**.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Bantuan Pemerintah Tahun 2016-2018 Nomor 6/LHP/XVII/02/2019 masih terdapat permasalahan: Bantuan Benih Pajale Belum Efektif Senilai Rp1.013.905.450.841,00 dan Belum Dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban Senilai Rp7.622.270.327.199,00. Atas permasalahan tersebut Kementerian Pertanian akan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Bekerjasama dengan Itjen untuk menghimpun dokumentasi pertanggungjawaban 2016-2018 dengan supervisi Inspektorat Jenderal untuk memverifikasi pertanggungjawaban tersebut;
- b. Melakukan evaluasi keberhasilan kegiatan perluasan lahan dengan indikator produksi, produktivitas dan IP;
- c. Mengimplementasikan mekanisme perencanaan, penyaluran, pembayaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban bantuan berdasarkan data yang terintegrasi (*online*).

2. Direktorat Jenderal Hortikultura

Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura dengan pagu APBN sebesar Rp1.242.629.794.000,00. Dengan realisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.126.096.453.970,00 (90,62%).

Bantuan Pemerintah yang telah diserahkan ke kelompok tani (526) untuk menunjang pembangunan tanaman Hortikultura TA 2018 sebesar Rp877.599.788.662,00 dari anggaran sebesar Rp977.239.499.000,00 atau 89,82%. Jumlah tersebut seluruhnya dalam bentuk barang pada kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan
- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan meliputi berbagai kegiatan pengembangan komoditas buah. Target awal kegiatan Kawasan buah lainnya Semester II TA 2018 seluas 27.997 Ha, namun realisasi fisik outputnya sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 27.096 Ha. Bantuan Pemerintah yang telah diserahkan ke kelompok tani sebesar Rp41.368.667.803,00 atau 74,41% dari anggaran sebesar Rp55.596.899.000,00. Adapun target 27.997 Ha dengan realisasi output sebesar 27.096 Ha yaitu berupa Bantuan Pemerintah dengan belanja barang fisik lainnya berupa pemberian sarana produksi untuk menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah lainnya, kawasan jeruk, kawasan florikultura, kawasan mangga, kawasan manggis, dan kawasan pisang.

PROGRAM/ KEGIATAN/ KOMPONEN	Volume		RealisasiBantuanB arang	RealisasiBan tuan Uang
5886.024 Kawasan Buah Lainnya	213	Ha	2.916.753.491	0
5886.027 Kawasan Jeruk	1.895	Ha	15.605.117.750	0
5886.054 Kawasan Florikultura	22.100	M2	2.092.405.400	0
5886.066 Kawasan Mangga	1.674	Ha	9.196.347.796	0
5886.067 Kawasan Manggis	1.013	Ha	7.399.745.778	0
5886.068 Kawasan Pisang	201	Ha	4.158.297.588	0

- b. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Kegiatan ini untuk peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat. Bantuan Pemerintah yang diberikan untuk kawasan bawang merah, aneka cabai, tanaman obat, dan sayuran lain. Sasaran kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat TA 2018 seluas 26.286 Ha dengan realisasi fisik sebesar 25.854 Ha. Bantuan Pemerintah yangtelah diserahkanke kelompok tani sebesar Rp773.206.580.008,00 atau 91,60% dari anggaran sebesar Rp844.112.432.000. Bantuan Pemerintah dilaksanakan berupa fasilitasi bantuan sarana produksi berupa barang fisik lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pemda melalui belanja bantuan dalam bentuk barang pada kawasan bawang merah, kawasan sayuran lainnya, kawasan aneka cabai, kawasan sayuran, dan tanaman obat di wilayah perbatasan.

PROGRAM/ KEGIATAN/ KOMPONEN	Volume		Realisasi Bantuan Barang	Realisasi Bantuan Uang
1771.024 Kawasan Bawang Merah	5.426	Ha	199.929.399.222	0
1771.025 Kawasan Sayuran Lainnya	7.373	Ha	210.638.143.409	0
1771.051 Kawasan Aneka Cabai	13.043	Ha	361.888.547.595	0
1771.073Fasilitasi teknis dukungan produksi sayuran dan tanaman obat	12	Ha	386.870.000	0
1771.080 Kawasan Sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	25	Ha	363.619.782	0

c. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Kegiatan ini untuk pengembangan sistem perbenihan hortikultura. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi bantuan sarana produksi. Bantuan Pemerintah yang telah diserahkan ke kelompok tani sebesar Rp45.287.156.994,00 atau 76,31% dari anggaran sebesar Rp59.344.768.000,00. Adapun target output sebesar 3.954.205 buah/batang/unit dengan realisasi fisik sebesar 3.320.127 buah/batang/unit. Bantuan Pemerintah ini berupa fasilitasi bantuan sarana produksi yang dilaksanakan oleh Pusat dan Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten dalam bentuk pemberian bantuan kepada produsen/penangkar/kelompok penangkar yang membutuhkan sarana dan prasarana dengan akun belanja barang fisik lainnya yang diserahkan kepada masyarakat yang terdiri dari benih buah lainnya, benih bawang merah, benih jeruk, benih sayuran lainnya, benih cabai, dan sarana prasarana benih hortikultura.

PROGRAM/ KEGIATAN/ KOMPONEN	Volume		Realisasi Bantuan Barang	Realisasi Bantuan uang
1772.022 Benih Buah Lainnya	1.181.356	Batang	18.462.402.644	0
1772.024 Benih Bawang Merah	460.128	kg	5.616.792.000	0
1772.027 Benih Jeruk	625.776	Batang	6.809.381.050	0
1772.060 Sertifikasi Benih Hortikultura	1.528	Unit	367.392.180	0
1772.072 Benih Sayuran Lainnya	135.000	kg	3.007.247.360	0
1772.074 Sarana Prasarana Benih Hortikultura	43	Unit	10.088.739.260	0
1772.075 Benih Cabai	916.296	Batang	935.202.500	0

d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas hortikultura melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pasca panen, pengolahan dan pemasaran. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi sarana prasarana pasca panen, sarana prasarana pengolahan dan fasilitasi pemasaran. Bantuan Pemerintah yang telah diserahkan ke kelompok tani sebesar Rp13.993.906.142,00 atau 97,94% dari anggaran sebesar Rp14.288.012.000,00. Adapun target output sebesar 249 Unit dengan realisasi fisik sebesar 220 Unit. Bantuan Pemerintah ini berupa fasilitasi bantuan sarana

produksi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten dalam bentuk pemberian bantuan kepada kelompok tani/gapoktan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota berupa Fasilitas pasca panen cabai dan bawang merah dan fasilitas pasca panen dan pengolahan hortikultura lainnya.

PROGRAM/ KEGIATAN/ KOMPONEN	Volume		Realisasi Bantuan Barang	Realisasi Bantuan uang
5887.053 Sarana Prasarana Pengolahan	1	Unit	89.950.000	0
5887.055 Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura	74	Unit	56.811.010	0
5887.062 Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	139	Unit	13.320.357.382	0
5887.064 Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	6	Unit	526.787.750	0

e. Pengembangan sistem perlindungan hortikultura dan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya

Kegiatan ini dimaksudkan dengan melakukan pendampingan untuk mendukung pemberian bantuan pemerintah yang berupa pengendalian OPT cabai dan bawang merah serta desa pertanian organik. Pengembangan kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam rangka mendukung operasional teknis kegiatan meliputi layanan perkantoran dan layanan dukungan manajemen eselon I. Bantuan Pemerintah yang telah diserahkan ke kelompok tani sebesar Rp3.431.379.715,00 atau 95,77% dari anggaran sebesar Rp3.582.684.000,00. Adapun target output sebesar 2.004 Ha/Desa dengan realisasi fisik sebesar 1.758 Ha/Desa.

PROGRAM/ KEGIATAN/ KOMPONEN	Volume		Realisasi Bantuan Barang	Realisasi Bantuan uang
1773.061 Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah	1.556	Ha	1.022.346.075	0
1773.063 Desa Pertanian Organik	202	Desa	2.409.033.640	0

f. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam rangka mendukung operasional teknis kegiatan meliputi: monitoring evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, serta dukungan sarana produksi untuk kawasan perbatasan/daerah tertinggal dari Anggaran sebesar Rp314.704.000,00 dan realisasi sebesar Rp312.098.000,00.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Bantuan Pemerintah Tahun 2016-2018 Nomor 6/LHP/XVII/02/2019 masih terdapat permasalahan: Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Saprodi Hortikultura Belum Memadai Senilai Rp1.806.815.990.114,00. Atas permasalahan tersebut Kementerian Pertanian akan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Ditjen Hortikultura dan Inspektorat Jenderal bersama satker Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat telah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap 38 kelompok di 5 kota/kabupaten dengan hasil terdapat kurang salur senilai Rp37.511.547,00.
- b. Sesditjen Hortikultura telah memerintahkan Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan verifikasi dan validasi BAST ke seluruh kelompok tani penerima bantuan surat No:P-205/KU.310/D.1/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 dan No:P-205/KU.310/D.1/02/2019 tanggal 19 Februari 2019.
- c. Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat telah menindaklanjuti dengan bersurat ke Kepala Dinas di 12 Kab/Kota yang menerima Bantuan surat No:521.232/244/Horti/2019 tanggal 19 Februari 2019 dan Dinas pertanian Kab/Kota sedang proses verifikasi ke kelompok tani di lapangan.
- d. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat telah melakukan revisi juknis Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat TA 2019 dengan menambahkan point d pada kriteria penerima manfaat yang berbunyi “bersedia dan mampu membuat catatan kegiatan budidaya (*log book*) yang dilakukan.
- e. Ditjen Hortikultura telah mengalokasikan anggaran senilai Rp110.000.000,00 pada DIPA TA 2019 No.SP DIPA-018.04.1.625785/2019 tanggal 5 Desember 2018 untuk membangun Pembuatan Aplikasi Penatausahaan BMN dan Pembantu Persediaan (BAST dan laporan).
- f. Ditjen Hortikultura akan melaksanakan bimbingan dan pelatihan proses pengadaan (penyusunan HPS) untuk PPK seluruh satker.
- g. Ditjen Horti akan bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal untuk memverifikasi dan validasi BAST dan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
- h. Akan Mengevaluasi pencapaian tujuan berdasarkan indikator yang diatur dalam pedoman terkait.
- i. Akan mengimplementasikan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan secara online yang memuat data kelompok sasaran, besar dan jenis bantuan, bukti pembayaran, BAST, penggunaan, dan pelaporannya serta kelengkapan lainnya.

3. Direktorat Jenderal Perkebunan

Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Perkebunan yang setiap tahunnya mendapatkan alokasi anggaran dari ABPN. Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan dimaksud, Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan bentuk bantuan berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok tani pekebun. Belanja 526 berbentuk barang untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar, dengan nama bantuan:
 - 1) Bantuan pengembangan tanaman kopi lokasi 21 Provinsi (Bengkulu, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Jawa Barat, NTT, Jawa Tengah, Gorontalo, Riau, Sulawesi Tengah, Papua, Kalimantan Barat, Papua Barat, Babel);
 - 2) Bantuan pengembangan tanaman kakao lokasi 17 Provinsi (Aceh, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung,

- Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, Gorontalo, Riau, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, NTB, Banten);
- 3) Bantuan pengembangan tanaman karet lokasi 10 Provinsi (Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Papua, Kalimantan Barat, Jawa Barat);
 - 4) Bantuan pengembangan tanaman kelapa lokasi 23 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku, Gorontalo, Papua Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara);
 - 5) Bantuan pengembangan tanaman teh lokasi 3 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY);
 - 6) Bantuan pengembangan tanaman sagu lokasi 1 Provinsi (Papua);
 - 7) Bantuan pengembangan tanaman jambu mete lokasi 6 Provinsi (Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, Maluku);
 - 8) Bantuan pengembangan tanaman kemiri sunan lokasi 1 Provinsi (NTT);
 - 9) Bantuan pengembangan tanaman aren lokasi 7 Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah);
 - 10) Pengembangan perkebunan di wilayah perbatasan;
 - 11) Fasilitasi pengembangan tanaman tahunan dan penyegar.

Kegiatan	Volume		Realisasi Bantuan Barang
1777 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar			
1777.001 Pengembangan Tanaman Kopi	17.600	Ha	85.647.503.435
1777.002 Pengembangan Tanaman Kakao	18.655	Ha	135.306.392.437
1777.003 Pengembangan Tanaman Karet	5.450	Ha	28.781.011.887
1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa	25.970	Ha	59.946.073.562
1777.005 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	8.460	Ha	50.620.366.707
1777.006 Pengembangan Perkebunan di Wilayah Perbatasan	8	Lokasi	11.774.114.403
1777.007 Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	12	Bulan	5.738.297.438

- b. Kegiatan dukungan perlindungan perkebunan berlokasi di 33 Provinsi (Jawa Barat, Aceh, Bali, NTB, Bengkulu, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, DIY, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTT, Papua, Babel, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Kep. Riau, dan Kalimantan Utara). Rincian output sebagai berikut:

Kegiatan	Volume		Realisasi Bantuan Barang
1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan			
1779.001 Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman	8.325	Ha	2.337.308.300

Kegiatan	Volume		Realisasi Bantuan Barang
Perkebunan			
1779.002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	25	KT	2.567.213.600
1779.003 Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	155	Desa	7.495.621.531
1779.004 Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan	12	Bulan	4.472.088.800

c. Kegiatan pengembangantanaman semusim dan rempah

- 1) Bantuan pengembangan tanaman tebu lokasi 16 Provinsi (Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, Gorontalo, Jawa Barat, Jambi, Lampung, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, NTT, Maluku),
- 2) Bantuan pengembangan tanaman kapas lokasi 7 Provinsi (Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur)
- 3) Bantuan pengembangan tanaman nilam lokasi 10 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Bali, Gorontalo)
- 4) Bantuan pengembangan tanaman tembakau lokasi 10 Provinsi (Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Di Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur)
- 5) Bantuan pengembangan tanaman gambir lokasi 3 Provinsi (Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan)
- 6) Bantuan pengembangan tanaman lada lokasi 7 Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Lampung)
- 7) Bantuan pengembangan tanaman pala lokasi 12 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, Lampung, Maluku, Papua)
- 8) Bantuan pengembangan tanaman cengkeh lokasi 18 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Gorontalo, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Lampung, Papua Barat, Sulawesi Barat)
- 9) Bantuan pengembangan tanaman vanili lokasi 2 Provinsi (NTT, NTB)
- 10) Fasilitasi pengembangan tanaman semusim dan rempah.

Kegiatan	Volume		Realisasi Bantuan Barang
5888 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah			
5888.001 Pengembangan Tanaman Tebu	9.399	Ha	28.503.589.850

Kegiatan	Volume		Realisasi Bantuan Barang
5888.002 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	57.396	Ha	167.361.118.810
5888.003 Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	12	Bulan	15.784.964.410

- d. Dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan lokasi 33 Provinsi (Jawa Barat, Aceh, Bali, NTB, Bengkulu, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, DIY, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTT, Papua, Babel, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Kep. Riau, Kalimantan Utara)
- 1) Pengembangan pascapanen komoditas perkebunan,
 - 2) Pengembangan pengolahan hasil perkebunan,
 - 3) Pengembangan penerapan standarisasi, mutu, dan pembinaan usaha perkebunan.

Kegiatan	Volume		Realisasi Bantuan Barang
5889 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan			
5889.001 Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan	163	KT	21.115.618.307
5889.002 Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	12	Bulan	2.409.159.000
5889.003 Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	90	Unit	26.550.613.156
5889.004 Pengembangan Penerapan Standarisasi. Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan	84	Keg	183.080.600

- e. Dukungan perbenihan tanaman perkebunan lokasi 33 Provinsi (Jawa Barat, Aceh, Bali, NTB, Bengkulu, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, DIY, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTT, Papua, Babel, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Kep. Riau, Kalimantan Utara)
- 1) Penyediaan benih unggul tanaman perkebunan,
 - 2) Fasilitasi penyediaan benih unggul tanaman perkebunan.

Kegiatan	Volume		Realisasi Bantuan Barang
5890 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan			
5890.001 Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	3.310	Ha	30.614.274.896
5890.002 Fasilitas Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	12	Bulan	7.929.959.701

- f. Manajemen dan dukungan teknis lainnya
- 1) Layanan Dukungan Manajemen, Layanan Internal, Layanan Perkantoran

Kegiatan	Volume	Realisasi Bantuan Barang
1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan		
1780.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12 Bulan	2.659.286.000

g. Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman.

- 1) Pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan,
- 2) Pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan.

Kegiatan	Volume	Realisasi Bantuan Barang
1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan		
1781.001 Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	88.734.620 Batang	3.564.522.485
1781.002 Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	37 Pkt Tek	484.537.500
1781.003 Fasilitas Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	12 Bulan	3.376.755.400
1781.951 Layanan Internal (Overhead)	12 Bulan	527.999.330

Berikut ini rincian belanja MAK 526 per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	% REALISASI ANGGARAN
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda					
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masy/Pemda	Rp 68.772.611.000	Rp 65.336.248.473	Rp -	Rp 65.336.248.473	95,00%
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masy/Pemda	Rp 27.146.350.000	Rp 25.612.936.895	Rp -	Rp 25.612.936.895	94,35%
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masy/Pemda	Rp 694.839.172.000	Rp 614.565.835.177	Rp -	Rp 614.565.835.177	88,45%
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	Rp 790.758.133.000	Rp 705.515.020.545	Rp -	Rp 705.515.020.545	89,22%
5262	Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah					
526211	Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan kepada Pemda	Rp 164.900.000	Rp 161.421.000	Rp -	Rp 161.421.000	97,89%
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemda	Rp 84.600.000	Rp 75.030.000	Rp -	Rp 75.030.000	88,69%
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5262	Rp 249.500.000	Rp 236.451.000	Rp -	Rp 236.451.000	94,77%
	TOTAL 526	Rp 791.007.633.000	Rp 705.751.471.545	Rp -	Rp 705.751.471.545	89,22%

Berikut ini per kegiatan belanja MAK 526 di Ditjen Perkebunan sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	DIPA	Realisasi 526
1777	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Rp 413.799.449.000	Rp 377.813.759.869
1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan	Rp 17.474.213.000	Rp 16.872.232.231
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Rp 2.670.800.000	Rp 2.659.286.000
1781	Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	Rp 16.771.329.000	Rp 7.953.814.715
5888	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	Rp 242.341.638.000	Rp 211.649.673.070
5889	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Rp 53.233.517.000	Rp 50.258.471.063
5890	Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Rp 44.716.687.000	Rp 38.544.234.597
	Grand Total	Rp 791.007.633.000	Rp 705.751.471.545

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah salah satunya Kementerian Pertanian. Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Sebagai implementasinya Kementerian Pertanian dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan mengacu Permentan Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian.

Pelaksanaan bantuan pemerintah untuk program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera yang selanjutnya disebut BEKERJA mencakup 4 tahapan yaitu penetapan penerima bantuan, pengadaan, penyaluran, dan pendampingan.

Dalam rangka mendukung program tersebut maka Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian melaksanakan Program Bekerja melalui bantuan benih kopi, kelapa, kakao, pala, dan karet siap tanam.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan Program Bekerja dilaksanakan sosialisasi secara terpadu oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian dengan Program Bekerja. Khusus Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2018 dilakukan sosialisasi secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan calon penerima kegiatan serta pemangku kepentingan terkait, pada lokasi sasaran penerima bantuan. Sosialisasi dapat dilaksanakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui koordinasi yang dilakukan oleh pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sedangkan secara tidak langsung dilaksanakan melalui publikasi.

Lokasi Program Bekerja Bidang Perkebunan Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 27/PERMENTAN/RC.120/6/2018 yaitu pada 10 provinsi dan 21 kabupaten sebagai berikut:

- Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, dan Garut.
- Jawa Tengah, Kabupaten Brebes, Banyumas, dan Purbalinga.
- Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Jember dan Lumajang.
- Banten, Kabupaten Pandeglang.
- Sumatera Utara, Kabupaten Langkat.

- f) Lampung, Kabupaten Lampung Selatan.
- g) Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- h) Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- i) Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, Tana Toraja, Toraja Utara, Takalar, dan Soppeng.
- j) Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Kriteria penerima bantuan Program #Bekerja adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang terdaftar dan tinggal didesa pada kecamatan yang telah ditetapkan sebagai lokasi penerima kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 dan perubahan Nomor 27/PERMENTAN/RC.120/6/2018.

Program Bekerja dirancang dengan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk menciptakan cluster ekonomi dengan memberikan bantuan kepada RTM berdasarkan agro klimat, kultur tanaman serta memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas serta adanya dukungan pemerintah kabupaten yang ditetapkan sebagai prioritas nasional.

Jenis bantuan yang diberikan kepada RTM dalam Program Bekerja Bidang Perkebunan Tahun 2018 berupa benih kopi, kakao, kelapa, pala, dan karet siap salur yang bersertifikat dan berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan masing-masing komoditas, dan pupuk dasar berupa pupuk organik yang telah terdaftar di Kementerian Pertanian.

Bantuan Program Bekerja bidang perkebunan untuk RTM diberikan benih berupa benih kopi, kakao, kelapa, pala, dan karet siap salur minimal 2 (dua) batang disesuaikan terhadap luasan lahan yang dimiliki RTM. Sedangkan bantuan pupuk dasar berupa pupuk organik sebanyak 0,5 kg/batang

Capaian fisik Program Bekerja TA. 2018

No	Provinsi	Kec.	Desa	RTM-P	Target Penyaluran Program Bekerja					Realisasi (btg)	Persentase (btg)
					Komoditi	Benih Launching Bekerja	Pupuk Organik Bekerja (Kg)	Benih Cluster Kawasan	Total Benih		
1	Jawa Barat	17	192	40.161	Kopi	10.000	5.000	500.000	510.000	510.000	100
2	Jawa Tengah	12	190	48.915	Kelapa	4.000	2.000	176.000	180.000	180.000	100
3	Jawa Timur	9	91	48.885	Kopi	12.500	6.250	500.000	512.500	512.500	100
4	Banten	3	36	3.162	Kelapa	3.000	1.500	-	3.000	3.000	100
5	Sumatera Utara	2	22	3.595	Kakao	2.000	1.000	547.800	549.800	549.800	100
6	Lampung	2	43	9.866	Pala	9.000	4.500	12.000	21.000	21.000	100
7	Sumatera Selatan	2	30	5.932	Karet	6.000	3.000	1.650	7.650	-	-
8	Kalimantan Selatan	2	54	1.693	Karet	6.000	3.000	299.200	305.200	305.200	100
9	Sulawesi Selatan	10	129	16.658	Kakao	15.200	7.750	2.608.700	2.623.900	2.623.900	100
					Kopi	13.000	6.500	2.000.000	2.013.000	2.013.000	100
					Kelapa	9.300	4.600	48.000	57.300	57.300	100
10	Nusa Tenggara Barat	2	20	13.173	Kelapa	15.000	7.500	64.800	79.800	79.800	100
Total		61		192.040		105.000	52.600	6.758.150	6.863.150	6.855.500	100

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Bantuan Pemerintah Tahun 2016-2018 Nomor 6/LHP/XVII/02/2019 masih terdapat permasalahan: Pengelolaan Bantuan Benih Perkebunan Belum Memadai Senilai Rp4.465.017.259,00 dan Belum Sepenuhnya Dapat Diidentifikasi Penyalurannya Senilai Total Rp14.282.204.845,00. Atas permasalahan tersebut Kementerian Pertanian akan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Ditjen Perkebunan akan menginstruksikan kepada Dinas Perkebunan Prov.Papua untuk memungut dan menyetorkan ke kas Negara denda keterlambatan dari sisa pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp77.661.550,00 (Kopi pegunungan Bintang Rp30.940.000,00 + Kakao Kepulauan Yapen Rp46.721.550,00) secara bertahap.
- b. Ditjen Perkebunan akan menghimpun dokumentasi pertanggungjawaban dan membuat surat permohonan kepada Itjen Kementan untuk melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban TA 2016-2018 di empat Provinsi (Prov. Riau, Papua, Kalimantan Barat dan Sumatera Barat).
- c. Ditjen Perkebunan akan membuat Sistem yang bisa mengimplementasikan perencanaan, penyaluran, pembayaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban bantuan berdasarkan data yang terintegrasi (*online*) dengan rencana kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pembahasan rencana pembuatan aplikasi
 - 2) Mengusulkan RAB
 - 3) Pembuatan Aplikasi

Adapun aksi yang sudah dilakukan oleh Eselon I yaitu:

- a. Ditjen Perkebunan telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua melalui surat No.2949/PW.130/E1/3/2019 tanggal 19 Maret 2019 untuk menyetorkan denda keterlambatan sebesar Rp77.661.550,00 ke kas negara paling lambat minggu ke 3 bulan April 2019 a.n. CV Wistara Aruna Papua sebesar Rp30.940.000,00 dan a.n. Sinas Sempurna sebesar Rp46.721.550,00.
- b. Dalam proses pengumpulan dokumentasi pertanggungjawaban 2016-2018 oleh Tim Gabungan Ditjen Perkebunan dan itjen Kementerian Pertanian.
- c. Ditjen Perkebunan telah mengalokasikan anggaran tahun 2019 dan saat ini dalam proses pembentukan tim dan pengembangan sistem *online*.

4. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada Tahun 2018 DitjenPeternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai 2 program utama yaitu Upaya khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) dengan menganggarkan anggaran sebesar Rp684.412.743.000,00 dan terealisasi sebesar Rp605.827.396.766,00 keseluruhan realisasi belanja 526 adalah dalam bentuk barang. Berdasarkan kegiatan Utama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
Kegiatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas ternak ruminansia pada lokasi kegiatan melalui penanaman dan pemanfaatan tanaman pakan ternak yang berkualitas yang dapat diakses oleh kelompok ternak, untuk mendukung peningkatan produksi ternak ruminansia dalam rangka peningkatan produksi pangan asal hewan khususnya sapi dan kerbau.
Bantuan Pemerintah yang telah diserahkan Rp7.902.352.998,00 atau 99,03% dari anggaran sebesar Rp8.138.824.000,00. Bantuan Pemerintah ini bantuan berupa Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT), Sarana dan Prasarana Unit Pengolah Pakan

(Choper), Pembuatan embung Pakan, Pembangunan Pagar Padang Penggembala yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Propinsi dimana penerima bantuan sudah ditetapkan oleh Dinas Peternakan Provinsi.

b. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan asal ternak serta peningkatan daya saing peternakan melalui kegiatan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (PHMSZ), bantuan yang diserahkan sebesar Rp19.795.730.484 atau sebesar 99,01% dari anggaran sebesar Rp20.075.001.000 bantuan berupa bantuan Vaksin dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM/ KEGIATAN/ KOMPONEN	Volume		Realisasi Bantuan Barang
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	4.422.400	Dosis	Rp19.795.730.484

c. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

Kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan populasi ternak baik ternak ruminansia maupun non ruminansia, bantuan yang diberikan sebesar Rp577.262.518.625 atau sebesar 88,29% dari total anggaran sebesar Rp653.804.083.000, bentuk bantuan yang diberikan berupa ternak sapi indukan impor dan lokal, ternak non ruminansia berupa ayam dan itik, sarana dan prasarana inseminasi buatan (IB) seperti Nitrogen (N₂) cair, Kontainer N₂ cair, hormon vitamin dan obat-obatan.

d. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)

Kegiatan dalam rangka dukungan terhadap pelaksanaan pemotongan hewan qurban yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) maka pada tahun 2018 dialokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut, bantuan yang diberikan sebesar Rp354.617.620 atau sebesar 98,51% dari pagu anggaran sebesar Rp359.967.000 berupa bantuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pemotongan hewan kurban dan pengadaan peralatan dan mesin fasilitasi model sarana penerapan kesehatan hewan kurban.

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Kegiatan dalam rangka dukungan terhadap pelaksanaan pemotongan hewan qurban pada kantor pusat kementerian pertanian berupa bantuan pembangunan tempat pemotongan hewan qurban beserta sarana dan prasarannya, dari anggaran sebesar Rp1.900.900.000 terealisasi sebesar Rp379.941.438.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Bantuan Pemerintah Tahun 2016-2018 Nomor 6/LHP/XVII/02/2019 masih terdapat permasalahan: Pengelolaan Bantuan Bibit dan Pakan Ternak Belum Memadai. Atas permasalahan tersebut Kementerian Pertanian akan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

- Akan memerintahkan satker bersangkutan untuk menyetorkan sisa kekurangan pembayaran ke Kas Negara;
- Akan melengkapi surat perjanjian pemeliharaan ternak sapi indukan Brahman Cross antara kab/kota dengan kelompok penerima;
- Melakukan pemeriksaan gangguan reproduksi pada sapi indukan Brahman Cross;

- d. Telah disampaikan teguran kepada satker terkait untuk melaksanakan pedoman teknis untuk melakukan pengujian status reproduksi (SKSR) pada pengadaan indukan sapi dan kerbau;
- e. Telah dilakukan pengujian Kualitas pakan konsentrat sapi potong induk sebanyak 3 kali dan pada saat pakan diterima dikelompok dilakukan uji organoleptik;
- f. Akan disusun Laporan Perkembangan Ternak yang memuat data pengukuran ternak sampai berumur 24 bulan serta catatan kelahiran yang memuat antara lain: jenis kelamin, ID induk, dan ID bapak;
- g. Akan membuat / mengembangkan aplikasi yang sudah ada untuk mengintegrasikan mekanisme perencanaan, penyaluran, pembayaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

5. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Realisasi belanja dan pagu MAK 526 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018 sebesar Rp4.199.707.321.489 atau 89,00% dari pagu anggaran sebesar Rp4.718.963.263.000. Dari realisasi tersebut, yang berbentuk bantuan berupa barang sebesar Rp3.268.490.262.702 atau 77,96%, sedangkan yang berupa uang sebesar Rp931.217.058.787 atau 85,76%

- a. **Belanja 526 berbentuk barang, pagu sebesar Rp3.633.120.642.000. Dengan realisasi sebesar Rp3.268.490.262.702 (89,96%) untuk kegiatan Bantuan Alat dan mesin pertanian (alsintan), dukungan operasional dana dekonstrasi, tugas pembantuan, dan fiber.**

SATKER PUSAT

Belanja 526 berbentuk barang dengan realisasi sebesar Rp2.483.736.717.527,00 atau 87,55% dari pagu sebesar Rp2.836.825.500.000, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Alat dan mesin pertanian (alsintan) memiliki peranan penting dalam kegiatan usaha tani untuk memberikan mutu hasil yang lebih baik dan dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Dalam kegiatan pengolahan tanah, traktor roda 2, pompa air, transplanter yang merupakan Unit Pelayanan Jasa Alsintan dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan intensitas pertanaman di berbagai ekologi lahan. Selain itu melalui pemanfaatan alsintan akan mendukung upaya pemecahan masalah kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian yang banyak terjadi di daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan penyediaan ketiga jenis alsintan tersebut di daerah agar tidak terjadi permasalahan yang dapat menghambat terealisasinya bantuan tersebut, diperlukan pedoman teknis bagi petugas di daerah maupun penerima bantuan.

Kegiatan Bantuan Alsintan Hadiah bagi UPJA/Kelompok, GP3A, P3A bagi kelompok yang berprestasi diantaranya adalah bantuan alsintan antara lain berupa alat mesin pertanian antara lain yang berupa *hand tractor*, *hand sprayer*, traktor roda dua, *Cornplanter*, dan traktor roda empat. Pada tahun 2018 Realisasi penyediaan alsintan Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Capaian Penyediaan Alat Mesin Pertanian TA 2018 (Pusat)

No	Jenis Alsintan	PAGU		Kontrak		Realisasi	
		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp
	PUSAT						
1	Traktor Roda 4 TP	3,459	1,179,519,000,000	3,459	1,126,423,550,381	3,459	1,011,762,213,968
2	Traktor Roda 4 Multiguna	95	54,150,000,000	95	52,989,638,000	95	52,989,638,000
3	Traktor Roda 2	17,435	488,180,000,000	17,435	467,127,825,419	17,435	465,989,341,419
4	Pompa Air	21,179	444,759,000,000	21,179	397,146,364,723	21,179	380,200,524,523
5	Rice Transplanter	1,512	103,572,000,000	1,512	99,764,210,300	1,512	99,764,210,300
6	Rice Transplanter Riding	18	5,760,000,000	18	5,308,200,000	18	5,308,200,000
7	Excavator Mini	64	52,480,000,000	64	47,823,594,912	64	26,637,910,038
8	Excavator Standar	200	370,000,000,000	200	329,212,000,000	200	329,212,000,000
9	Sprayer Pertanian	19,000	22,800,000,000	19,000	17,372,377,517	19,000	17,372,377,517
10	Alat Tanam Jagung Dorong	5,091	19,600,350,000	5,091	16,811,413,105	5,091	11,632,569,025
11	Alat Tanam Jagung (Implement TR4)	140	4,858,000,000	140	4,492,428,500	140	4,492,428,500
12	Rotatanam	58	24,070,000,000	58	22,778,249,000	58	22,778,249,000
13	Cultivator	2,638	38,514,800,000	2,638	37,226,987,638	2,638	37,226,987,638
14	Grain Seeder	4	1,562,350,000	4	1,026,400,000	4	1,026,400,000
	SubJumlah Alsintan Pusat	70,893	2,809,825,500,000	70,893	2,625,503,239,495	70,893	2,466,393,049,928
1	Seeding Tray	100,000	4,000,000,000	71,800	2,891,843,200	71,800	2,891,843,200
	SubJumlah Alsintan Pusat + Tray	170,893	2,813,825,500,000	142,693	2,628,395,082,695	142,693	2,469,284,893,128

- 2) Belanja Bantuan Pemerintah berbentuk barang untuk Kegiatan penyediaan dan pengembangan fiber (Dana Pusat) sebagai sarana pendukung peningkatan produksi, pada tahun 2018 telah teralisasi sebesar Rp14.451.824.399,00 (62,8%) dari Pagu sebesar Rp23.000.000.000,00. Kegiatan bantuan pemerintah ini dilaksanakan untuk kegiatan Penyediaan dan pengembangan fiber sebagai sarana pendukung peningkatan produksi yang dilaksanakan pada propinsi 8 propinsi sebagai berikut: Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Selatan.

SATKER DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Belanja 526 berbentuk barang dengan realisasi sebesar Rp784.753.545.274 atau 98,06% dari pagu sebesar Rp800.295.142.000, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Alat dan Mesin Pertanian

Alokasi dana Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Ditjen PSP pada satker TP Provinsi khususnya penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian adalah sebesar 781.181.912.415 atau 98,06 % dari pagu sebesar Rp796.641.347.000. Dari sebagian realisasi Alsintan tersebut yaitu sebesar Rp253.950.000 merupakan pembayaran pengadaan Alsintan TA.2017 di Provinsi Jambi.

No	Jenis Alsintan	PAGU		Kontrak		Realisasi	
		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp
	TP PROVINSI						
1	Traktor Roda 4	65	21.132.570.000	63	19.697.700.500	63	19.697.700.500
2	Traktor Roda 2	12.244	325.504.115.000	12.242	321.299.885.158	12.242	321.299.885.158
3	Pompa Air	12.860	251.297.520.365	12.853	247.588.740.928	12.853	247.588.740.928
4	Rice Transplanter	1.623	111.268.689.500	1.623	110.512.615.203	1.623	110.512.615.203
5	Excavator	2	2.698.270.000	1	1.349.133.456	1	1.349.133.456
6	Sprayer Pertanian	21.010	20.976.144.500	21.012	19.260.701.550	21.012	19.260.699.550
7	Alat Tanam Jagung Semi Manual	5.216	17.346.025.635	5.216	17.105.983.203	5.216	17.105.983.203
8	Cultivator	2.980	44.891.877.000	2.969	43.449.060.417	2.969	43.449.060.417
9	Alat Penyiang Gulma (Power Weeder)	13	195.000.000	13	183.040.000	13	183.040.000
	SubJumlah Alsintan TP Provinsi	56.013	795.310.212.000	55.992	780.446.860.415	55.992	780.446.858.415
1	Seeding Tray	9.100	492.185.000	9.100	481.104.000	9.100	481.104.000
	Tunggakan Pembayaran Alsintan TA. 2017 di Prov Jambi		253.950.000				253.950.000
	SubJumlah Alsintan TP Provinsi+Tray	65.113	796.056.347.000	65.092	780.927.964.415	65.092	781.181.912.415

2) Barang Penunjang DK/TP (526112,526211, 526212,526115,526311)

Barang penunjang DK/TP adalah alat dan mesin pertanian berupa Laptop, printer, kendaraan roda tiga, motor roda dua, drone dan scanner dengan total sebesar Rp3.427.128.859.

3) Belanja barang saprodi (526311)

Merupakan belanja tunda bayar tahun 2017 yang dibayarkan tahun 2018, kegiatan cetak sawah pada Dinas Pertanian TPH Kepulauan Riau dengan pagu dan realisasi sebesar Rp144.504.000. atau 100%.

b. Belanja 526 Satker Pusat berbentuk uang dengan realisasi sebesar Rp931.217.058.787 atau 85,76% dari pagu sebesar Rp1.085.842.621.000 untuk kegiatan:

1) Pilot Percontohan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian (Dana Pusat)

Kegiatan Kegiatan percontohan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, pada tahun 2018 ini telah terealisasi sebesar Rp65.392.224.150,00 atau 60,43% dari pagu sebesar Rp132.099.141.000,00 Kegiatan bantuan pemerintah dilaksanakan untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pengembangan Irigasi Perpipaan/Perpompaan, Jalan usaha Tani di 14 propinsi sebagai berikut: Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Selatan,

Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.

REALISASI BELANJA KEGIATAN PILOT PERCONTOHAN

NO.	NAMA KELOMPOK TANI	TRANSFER (UANG) NOMINAL (Rp)	PENGUNAAN (Rp)	SISA DANA YG BELUM DIGUNAKAN	PENYETORAN SISA DANA YG BELUM DIGUNAKAN	KET
I.	PROPINSI JAWA TIMUR	25,648,596,150	25,648,596,150	-	-	
II.	PROPINSI JAWA TENGAH	6,738,139,000	6,738,139,000	-	-	
III.	PROPINSI KALIMANTAN SELATAN	1,172,661,000	1,172,661,000	-	-	
IV.	PROPINSI SULAWESI SELATAN	11,648,758,000	11,648,758,000	-	-	
V.	PROPINSI NTB	6,057,846,000	6,057,846,000	-	-	
VI.	PROPINSI LAMPUNG	405,250,000	405,250,000	-	-	
VII.	PROPINSI JAMBI	997,000,000	997,000,000	-	-	
VIII.	PROPINSI GORONTALO	105,295,000	105,295,000	-	-	
IX.	PROPINSI JAWA BARAT	3,643,227,000	3,643,227,000	-	-	
X.	PROPINSI SUMATERA SELATAN	870,687,000	870,687,000	-	-	
XI.	PROPINSI NTT	526,700,000	526,700,000	-	-	
XII.	PROPINSI SULAWESI BARAT	3,356,095,000	3,356,095,000	-	-	
XIII.	PROPINSI ACEH	378,000,000	378,000,000	-	-	
XIV.	PROPINSI BANTEN	2,960,000,000	2,960,000,000	-	-	
XV.	PROPINSI BALI	883,970,000	883,970,000	-	-	
	JUMLAH	65,392,224,150	65,392,224,150	-	-	

2) Model Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi Tahun Anggaran 2018 (Dana Pusat)

Pada kegiatan penyediaan sarana pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian, dimana kegiatan ini adalah termasuk dalam program Bekerja adalah Program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah, salah satunya Kementerian Pertanian. Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan, maka secara implementasi Kementerian Pertanian telah menetapkan Program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) yang dipayungi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian.

Program BEKERJA dilaksanakan untuk memastikan pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan berbasis pertanian. Hal ini selaras dengan Nawacita ke-5, yaitu peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Bentuk kegiatan #BEKERJA diantaranya adalah melalui bantuan benih padi, jagung dan kedelai, bantuan alsintan, bantuan benih jeruk dan mangga, bantuan benih cabai, rambutan dan hortikultura, bantuan ternak ayam, itik, kambing, kelinci dan lainnya, bantuan benih kelapa, kopi, pala dan lainnya, Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta Penguat Investasi dan Modal Kerja. Untuk menciptakan *cluster* ekonomi, bantuan jangka menengah dilakukan dengan penyediaan ayam 10 juta ekor, pakan ayam dan penyediaan kandang (50 ekor bantuan ayam dan ternak unggas lainnya per rumah tangga).

Program pengentasan kemiskinan ini bersinergi dengan Kemensos, BUMN, Kemendes, BKKBN dan pemerintah daerah, bantuan untuk 10 Provinsi dan 20 Kabupaten yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan NTB.

Dalam rangka mendukung program #BEKERJA, maka Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan bantuan *penyediaan sarana kandang ayam/itik* di lokasi penerima bantuan. Agar pelaksanaan kegiatan bantuan *penyediaan sarana kandang ayam/itik* mendukung program #BEKERJA dapat terlaksana dengan baik, maka perlu disusun Pedoman Teknis Kegiatan Penyediaan Sarana Kandang Ayam/Itik mendukung Program #BEKERJA Tahun 2018.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan alokasi anggaran Program Bekerja sebesar Rp100.000.000.000,00 dalam kegiatan penyediaan sarana kandang ayam/itik mendukung Program Bekerja berupa Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang untuk keperluan pembuatan sarana kandang ayam/itik. Hasil verifikasi Tim Bekerja Ditjen PSP dengan Dinas Pertanian yang membidangi Peternakan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebesar 169.131, yang terbagi menjadi 1.997 UPKK dengan realisasi keuangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp84.635.000.000,00 atau 84,64% dari pagu sebesar Rp100.000.000.000.

Dalam hal ini, terdapat Belanja MAK 526 yang digunakan untuk perjalanan dinas bantuan transport senilai Rp395.550.000,00 kegiatan program bekerja.

NO	PROVINSI	KABUPATEN	HASIL PEMBERKASAN		SPM	SP2D	%	PEMBUATAN KANDANG AYAM
			RTM	UPKK				
1	BANTEN	PANDEGLANG	2.254	24	1.127.000.000	1.127.000.000	100	2.254
2	JABAR	CIREBON	4.788	73	2.394.000.000	2.394.000.000	100	4.788
		GARUT	8.127	92	4.063.500.000	4.063.500.000	100	8.127
		INDRAMAYU	11.414	119	5.707.000.000	5.707.000.000	100	11.414
		TASIKMALAYA	11.802	145	5.901.000.000	5.901.000.000	100	11.802
		CIANJUR	445	5	222.500.000	222.500.000	100	445
3	JATENG	BANYUMAS	9.244	120	4.622.000.000	4.622.000.000	100	9.244
		BREBES	28.560	318	14.280.000.000	14.280.000.000	100	28.560
		PURBALINGGA	8.806	134	4.403.000.000	4.403.000.000	100	8.806

NO	PROVINSI	KABUPATEN	HASIL PEMBERKASAN		SPM	SP2D	%	PEMBUATAN KANDANG AYAM
			RTM	UPKK				
4	JATIM	BONDOWOSO	11.365	125	5.682.500.000	5.682.500.000	100	11.365
		JEMBER	12.698	141	6.349.000.000	6.349.000.000	100	12.698
		LUMAJANG	11.067	130	5.533.500.000	5.533.500.000	100	11.067
5	KALSEL	HSU	1.575	53	787.500.000	787.500.000	100	1.575
6	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	8.173	90	4.086.500.000	4.086.500.000	100	8.173
7	NTB	LOMBOK TENGAH	13.258	132	6.629.000.000	6.629.000.000	100	13.258
8	SULSEL	BONE	4.298	41	2.149.000.000	2.149.000.000	100	4.298
		TANA TORAJA	3.800	41	1.900.000.000	1.900.000.000	100	3.800
		TORAJA UTARA	1.400	19	700.000.000	700.000.000	100	1.400
		SOPPING	4.508	56	2.254.000.000	2.254.000.000	100	4.508
		TAKALAR	2.500	31	1.250.000.000	1.250.000.000	100	2.500
9	SUMSEL	OKI	5.613	76	2.806.500.000	2.806.500.000	100	5.613
10	SUMUT	LANGKAT	3.575	37	1.787.500.000	1.787.500.000	100	3.575
TOTAL			169.270	2.002	84.635.000.000	84.635.000.000	100,00	169.270

3) Pembangunan Dam Parit/Long storage (Dana Pusat)

Dilaksanakan pada kegiatan Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage pada TA. 2018 dialokasikan untuk 292 unit dengan pagu total senilai Rp35.040.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp30.707.393.000,00 (87,64 %) yang tersebar pada 17 Propinsi di 55 Kabupaten/Kota dengan total unit terealisasi 268 unit (91,78 %) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kab. Aceh Besar 6 unit,
2. Kab. Sijunjung 5 unit,
3. Kab. Musi Rawas Utara 1 unit,
4. Kab. Musi Rawas 1 unit,
5. Kab. Lampung Selatan 4 unit,
6. Kab. Sungai Penuh 1 unit,
7. Kab. Pandeglang 2 unit,
8. Kab. Lebak 6 unit,
9. Kab. Tasikmalaya 10 unit,
10. Kab. Garut 9 unit,
11. Kab. Subang 5 unit,
12. Kab. Bandung 3 unit,
13. Kab. Bogor 14 unit,
14. Kab. Kuningan 5 unit,
15. Kab. Bandung Barat 1 unit,
16. Kab. Karawang 2 unit,
17. Kab. Ponorogo 4 unit,
18. Kab. Trenggalek 5 unit,
19. Kab. Malang 1 unit,
20. Kab. Jember 6 unit,

21. Kab. Probolinggo 5 unit,
22. Kab. Bangkalan 2 unit,
23. Kab. Bondowoso 2 unit,
24. Kab. Ngawi 3 unit,
25. Kab. Lumajang 1 unit,
26. Kab. Temanggung 2 unit,
27. Kab. Semarang 4 unit,
28. Kab. Kendal 2 unit,
29. Kab. Jepara 5 unit,
30. Kab. Kebumen 2 unit,
31. Kab. Kapuas 7 unit,
32. Kab. Paser 2 unit,
33. Kab. Kutai Kartanegara 3 unit,
34. Kab. Bima 15 unit,
35. Kab. Sumbawa 5 unit,
36. Kab. Lombok Barat 5 unit,
37. Kab. Lombok Timur 1 unit,
38. Kab. Sabu Raijua 4 unit,
39. Kab. Pangkep 10 unit,
40. Kab. Sinjai 12 unit,
41. Kab. Takalar 4 unit,
42. Kab. Enrekang 14 unit,
43. Kab. Pinrang 5 unit,
44. Kota Palopo 6 unit,
45. Kab. Toraja Utara 4 unit,
46. Kab. Gowa 5 unit,
47. Kab. Bone 18 unit,
48. Kab. Maros 2 unit,
49. Kab. Bantaeng 3 unit,
50. Kab. Bulukumba 6 unit,
51. Kab. Soppeng 3 unit,
52. Kab. Wajo 6 unit,
53. Kab. Polewali Mandar 5 unit,
54. Kab. Parigi Moutong 1 unit dan
55. Kab. Gorontalo 3 unit.

Realisasi Kegiatan Percontohan Pembangunan Embung/Dam Parit/Longstorage (Pusat) dapat dilihat pada **Lampiran B.6**.

4) Pengarus Utamaan Gender (PUG) (Dana Pusat)

Pada TA 2018, telah dialokasikan anggaran untuk Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsif Gender melalui integrasi ternak kambing, atau itik sebesar Rp3.030.000.000,00 dengan realisasi capaian sebesar 100%, kegiatan dilaksanakan di 5 Propinsi yaitu Sumatera Utara (Kabupaten Tana Karo), Jawa Barat (Kabupaten Bandung, Ciamis, Kuningan, Cirebon), Jawa Tengah (Kabupaten Banyumas, Kebumen, Banjarnegara, Klaten) dan Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Sumbawa). Konsep pengembangan pilot project ini diutamakan mendorong peran aktif petani laki-

laki dan perempuan secara optimal dan proporsional dalam memaksimalkan program pembangunan pertanian khususnya dalam optimalisasi lahan. Adanya integrasi ternak diharapkan petani mendapat nilai tambah tidak hanya dari produksi pertaniannya tetapi hasil dari pengembangan ternaknya. Adapun pemanfaatan kotoran untuk meningkatkan kesuburan lahan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk an organik dan meningkatkan nilai tambah dari pengembangan produk pertanian organik yang lebih sehat dan harga yang menguntungkan.

Dasar Hukum Terbentuknya

- Dasar Hukum: Inpres No.9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional yang mengamanahkan agar program pembangunan pada umumnya dapat merespon potensi, permasalahan, kebutuhan, dan kepentingan sumberdaya manusia yang menjadi subyek pembangunan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan
- Hakekat Pengarusutamaan Gender ;pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dalam hal ini pembangunan pertanian dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.
- Peran Ditjen PSP cukup besar dalam perolehan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2016 menjadi **Tingkat Mentor** dari Tingkat Madya(2014) sehingga peran Ditjen PSP harus ditingkatkan.

Implementasi Analisis Data Terpilah PUG pada Kegiatan PSP

Analisis Data Terpilah adalah salah satu komponen untuk menilai suatu program dalam hal ini program pembangunan pertanian di bidang prasarana dan sarana pertanian responsif gender. Hal ini ditunjukkan oleh adanya keterlibatan kaum laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan program tersebut secara proporsional dan optimal sehingga program tersebut dapat dirasakan manfaatnya baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Adanya isu pembangunan prasarana dan sarana pertanian bias gender karena didominasi oleh kaum perempuan, menuntut adanya identifikasi, inventarisasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan prasarana dan sarana pertanian tidak bias gender tetapi responsif gender. Untuk itu sejak tahun 2014, telah dilakukan kegiatan analisis data terpilah melalui kegiatan sebagai berikut:

- TA 2012-2014: Pengelolaan irigasi partisipatif (PIP) responsif gender dan pilot project optimasi lahan responsive gender;
- Tahun 2015: kegiatan PSP responsive gender adalah PUAP;
- Tahun 2016: kegiatan PSP Responsif Gender adalah UPPO;
- Tahun 2017: kegiatan PSP responsif gender adalah Bantuan Alsin (Rice Transplanter);
- Tahun 2018: kegiatan PSP responsif Gender adalah kegiatan Rehabiltasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)

Pelaksana PUG lingkup Ditjen PSP oleh Kelompok Kerja PUG dengan kegiatan; Penyusunan data terpilah, monitoring dan evaluasi kegiatan PUG responsive gender, pembinaan kegiatan pilot project optimasi lahan responsive gender, workshop, sosialisasi, evaluasi serta koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan PUG Kementan.

Disamping melakukan analisis Data Terpilah, penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG), Ditjen PSP telah mengembangkan implementasi PUG melalui pilot project yang dimulai sejak tahun 2012.

Sosialisasi Optimalisasi Lahan Responsive Gender Tahun 2018

Tujuan : Menyamakan persepsi antar pelaksana kegiatan (Pusat, Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota, dan Kelompok Tani Penerima manfaat) terkait kegiatan optimalisasi lahan responsive gender TA. 2018 melalui integrasi ternak kambing, itik.

Inti workshop :

- Pemaparan arah kebijakan implementasi PUG dalam optimalisasi lahan dari aspek kebijakan oleh KemenPPA dan aspek penganggaran oleh Kepala Biro Perencanaan,
- Pembekalan Budidaya dan Peluang Pasar Kambing PE oleh Kelompok PUG sebelumnya
- Pemaparan dan Fieldtrif pada lokasi sukses story oleh salah satu kelompok penerima bantuan Pilot PUG TA 2018.
- Verifikasi dokumen pemberkasan Banpem Pilot PUG 2018

Pelaksanaan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsif Gender Tahun 2018

Tujuan kegiatan *Pilot Project* Optimalisasi Lahan *Responsive Gender* sebagai berikut:

- a. Optimalisasi lahan pertanian melalui integrasi ternak itik, atau kambing dan pemanfaatan kotoran serta urinenya sebagai pupuk organik;
- b. Menerapkan kegiatan *responsive gender* (partisipasi petani laki-laki dan perempuan) dalam pilot percontohan optimalisasi lahan mendukung Ketahanan Pangan;

Cara Pelaksanaan

Pola pelaksanaan *Pilot Project* Optimalisasi Lahan *Responsive Gender* dilakukan sebesar-besarnya melibatkan partisipasi masyarakat/petani setempat baik laki-laki maupun perempuan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan.

Seluruh komponen dalam kegiatan ini dilaksanakan sepenuhnya melalui mekanisme bantuan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda dengan mendorong swadaya petani.

Adapun kegiatan berupa pengadaan ternak, pembuatan kandang, pemeliharaan ternak, pengelolaan pupuk organik melalui pemanfaatan kotoran dan urin ternak dan optimalisasi lahan pertanian dengan pemanfaatan pupuk organik

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim PUG Ditjen PSP dan oleh Tim Teknis yang ada di Kabupaten setempat. Monitoring lebih diarahkan pada upaya pendampingan kelompok untuk mendorong partisipasi aktif anggota kelompok baik laki-laki maupun perempuan sehingga manfaat program ini dapat dirasakan secara maksimal

Mekanisme Pelaksanaan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsif Gender

1. Sosialisasi
oleh Tim PUG Ditjen PSP. Penetapan CPCL oleh PPK berdasarkan usulan dari Dinas.
2. Verifikasi administrasi penerima manfaat
Proses verifikasi berkas-berkas Proses penyampaian informasi konsep Kegiatan Optimalisasi Lahan Responsive Gender dari Tim PUG Pusat ke Daerah. Informasi yang disampaikan meliputi konsep kegiatan, ruang lingkup kegiatan, dan mekanisme pelaksanaan.
3. Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan CPCL
Proses mengidentifikasi dan memverifikasi usulan calon petani dan calon lokasi penerima manfaat kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsif Gender. Identifikasi dan Verifikasi dilakukan administrasi Kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsif Gender. Berkas administrasi yang diverifikasi meliputi SPK, RAB, SK Pembentukan Tim, KTP, Buku rekening, dll dilakukan oleh Tim PUG Ditjen PSP dan Bagian Keuangan Ditjen PSP.
4. Transfer dana
Proses transfer dana kegiatan PUG dari KPPN ke rekening kelompok.
5. Pelaksanaan
 - a. Pembangunan Kandang Komunal sebagai sarana pemeliharaan ternak.
 - b. Pembelian ternak (kelinci, itik, dan kambing)
 - c. Pemeliharaan Kelompok tani penerima manfaat berkewajiban memelihara dan mengelola usaha ternak yang telah dibeli, termasuk pengelolaan keuangan dan manajemen hasil ternak.
6. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pusat, Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2018 ini kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah terealisasi sebesar Rp3.030.000.000,00 (100%) dari Pagu sebesar Rp3.030.000.000,00. Rincian realisasi penyaluran bantuan pemerintah kegiatan Pengarus utamaan Gender (PUG) Tahun 2018 dapat dilihat pada **Lampiran B.7**.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Bantuan Pemerintah Tahun 2016-2018 Nomor 6/LHP/XVII/02/2019 berupa alsintan pertanian masih ada permasalahan: Bantuan Alsintan Belum Seluruhnya Dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban dan Pemanfaatannya belum Optimal Senilai Rp6.253.139.876.173,75

- a. Ditjen PSP akan terus bekerjasama dengan Itjen untuk menghimpun dokumentasi pertanggungjawaban 2016-2018
- b. Dit. Alsintan telah membuat laporan pemanfaatan alsintan secara berjenjang dari daerah dan dilaporkan oleh setiap Penanggung Jawab (PJ) wilayah melalui WA group Optimalisasi Alsintan yang dipantau langsung oleh Menteri Pertanian. Apabila alsintan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal maka alsin tersebut akan dipindahkan ke daerah lain yang membutuhkan (evindence ada file di folder 10.b)
- c. Implementasi mekanisme perencanaan, penyaluran, pembayaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban bantuan sudah menggunakan system online. Untuk perencanaan dan penyaluran berdasarkan e-proposal, pembayaran menggunakan sistem SAS (system Aplikasi Satker), pelaporan dan pertanggungjawaban menggunakan system aplikasi

BASTB online, untuk kedepannya system aplikasi MPO (Model Pelaporan Online) akan terintegrasi secara online dengan BASTB online.

c. Belanja 526 Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berbentuk uang dengan realisasi sebesar Rp747.359.891.637 atau 89,11% dari pagu sebesar Rp838.673.480.000; terdiri dari kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan Jaringan Irigasi

Beberapa kegiatan 526 untuk jaringan irigasi yaitu:

a) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Rehabilitasi jaringan irigasi merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Selain itu kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk peningkatan jaringan irigasi yaitu kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Sasarannya adalah:

- Terehabilitasi dan/atau meningkatnya fungsi jaringan irigasi tersier di 28 provinsi pada 247 kabupaten/kota.
- Meningkatnya produksi padi melalui penambahan intensitas pertanaman (IP).
- Meningkatnya partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.

Alokasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan dana Tugas Pembantuan di kabupaten pada TA 2018 adalah seluas 134.700 Ha dengan jumlah anggaran sebesar Rp160.007.200.000. Capaian realisasi fisik adalah seluas 134.667 ha (99.98%) dan realisasi keuangan sebesar RpRp160.000.000.000 atau 99.996 %.

b) Pengembangan Embung/DamParit/LongStorage

Pengembangan Embung/DamParit/LongStorage bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplesi air irigasi untuk komoditas. Tanaman Pangan dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan pada lahan usaha tani dimusim kemarau.

Target Pengembangan Embung/DamParit/LongStorage sebanyak 400 unit dengan realisasi anggaran Tahun 2018 atas kegiatan Pengembangan Embung/DamParit/LongStorage Pertanian adalah sebesar Rp47,843,500,000 (399 Unit) atau 99.67% dari target anggaran Rp48,000,000,000.

c) Pengembangan Sumber Air (Irigasi Perpipaan/Perpompaan)

Maksud Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan/Perpipaan adalah kegiatan pemanfaatan sumber air permukaan setempat sebagai suplesi air irigasi, melalui sistem gravitasi (menggunakan pipa) dan/atau pengambilan air (menggunakan pompa).

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

- Terbangunnya sistem irigasi perpompaan/perpipaan sebanyak 322 unit di 27 provinsi untuk mendukung komoditas tanaman pangan, 323 unit di 24 Provinsi

mendukung komoditas hortikultura, 108 unit di 22 Provinsi mendukung komoditas perkebunan, dan 318 unit di 27 Provinsi mendukung peternakan.

- Meningkatnya intensitas pertanaman sebesar 0.5 pada lahan sawah.
- Meningkatnya ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan tanaman pangan.

Target Irigasi Perpipaan/Perpompaan Tahun 2018 sebanyak 1.071 unit dengan Realisasi Anggaran Tahun 2018 Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan/Perpompaan adalah sebesar Rp99.287.993.893 atau 96.68 % dari target anggaran Rp100.760.900.000.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PDDT oleh BPK atas Bantuan Pemerintah berupa irigasi masih terdapat permasalahan: Bantuan Uang Irigasi Belum Seluruhnya Dipertanggungjawabkan Secara Memadai senilai Rp1.463.744.950.628,00. Atas permasalahan tersebut Kementerian Pertanian akan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan daerah yang belum menginput MPO dari tahun 2016– 2018 sebesar Rp1.549.042.563.735,00. dan melakukan pengumpulan eviden yang belum ada senilai Rp287.021.214.429,00.
- b. Ditjen PSP akan menghimpun dokumentasi pertanggungjawaban 2016-2018 dengan supervisi dari Inspektorat Jenderal untuk memverifikasi pertanggungjawaban 2016 sd 2018.
- c. Akan dilakukan evaluasi pencapaian indikator keberhasilan kegiatan irigasi pertanian
- d. Ditjen PSP akan mengimplementasikan mekanisme perencanaan, penyaluran, pembayaran, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan berdasarkan data yang terintegrasi (online).

b. Perluasan Sawah/Cetak Sawah

Kegiatan perluasan sawah meliputi:

a) Perluasan Areal Sawah

Perluasan Areal Sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah. Upaya penambahan baku lahan tanaman pangan melalui perluasan sawah sangat penting dalam upaya mempercepat pencapaian surplus beras dan swasembada beras berkelanjutan. Pada TA. 2018, pembangunan fisik perluasan sawah dilaksanakan dengan pola swakelola dengan instansi pemerintah lainnya yaitu Direktorat Zeni dan Komando Daerah Militer TNI Angkatan Darat dengan target sasaran kegiatan ini adalah terealisasinya kegiatan perluasan sawah seluas 12.000 Ha.

Unit cost per hektar pekerjaan cetak sawah sebesar Rp16.000.000/Ha untuk kabupaten di lingkup Provinsi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara dan sebesar Rp19.000.0000/Ha untuk Kabupaten diluar Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Komponen kegiatan perluasan sawah yang dibiayai terdiri:

- Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah;
- Operasional Kegiatan Perluasan Sawah;
- Dokumen Lingkungan;

- Pengawasan Kegiatan Perluasan Sawah;
- Bantuan Saprodi Mendukung Kegiatan Perluasan Sawah.
Perluasan Sawah/Cetak Sawah dengan jumlah anggaran Rp224.520.380.000,00 dengan realisasi Rp185.578.397.044 (82,66%)
Kegiatan Optimasi lahan dengan jumlah realisasi sebesar Rp238.360.189.100 atau 83,65% dari pagu anggaran sebesar Rp284.950.000.000.-

b) SID Perluasan Sawah

SID Perluasan sawah merupakan rangkaian kegiatan perencanaan perluasan sawah dimulai dari kompilasi usulan, identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) dan kemudian disempurnakan melalui kegiatan survei dan investigasi calon lokasi serta pembuatan desain terhadap lokasi yang layak untuk dijadikan sawah baru. Jumlah pagu anggaran kegiatan SI CPCL dan pemetaan desain beserta pendukungnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp17.750.000.000,00 dengan realisasi Rp14.486.450.500,00 (78,23%) dan tersebar di 5 provinsi (Propinsi Aceh, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau). Dimana senilai Rp715.423.600 merupakan SID dari Dana Pendampingan. Total dari Realisasi tahun 2018 adalah Rp13.771.026.900. Rincian realisasi SID Cetak Sawah TA. 2018 dapat dilihat pada **Lampiran B.8.**

Pelaksanaan kegiatan SI-CPCL dan Pemetaan Desain dapat dilakukan dengan jasa konsultan, swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain (IPL) maupun swakelola dilaksanakan sendiri oleh Penanggung Jawab Anggaran dalam hal ini Dinas Pertanian (swakelola mandiri). Jika pekerjaan swakelola dengan instansi lain atau swakelola mandiri menggunakan tenaga ahli non PNS, maka pengadaannya berpedoman kepada tata cara pengadaan konsultan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Tahapan pelaksanaan kegiatan SID perluasan sawah sebagai berikut:

- Persiapan
- Sosialisasi dan koordinasi
- Pengumpulan data primer dan sekunder
- Tabulasi dan pengolahan data
- Penentuan kelayakan calon lokasi
- Survey dan pengukuran lokasi secara terestris dan pembuatan desain, meliputi pengukuran lapangan, penyediaan peta dasar teknis, pembuatan peta situasi lokasi skala 1 : 1000, Pembuatan peta topografi skala 1 : 1000 dan Pembuatan peta rancangan/desain skala 1 : 1000
- Pembuatan daftar petani pemilik/penggarap
- Analisis harga satuan dan perhitungan biaya konstruksi perluasan sawah

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Bantuan Pemerintah Tahun 2016-2018 Nomor 6/LHP/XVII/02/2019 berupa perluasan sawah/cetak sawah masih terdapat permasalahan: Bantuan Perluasan Sawah Belum Seluruhnya Dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban dan Pemanfaatannya Senilai Rp2.189.021.760.000,00. Atas

permasalahan tersebut Kementerian Pertanian akan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dokumen pertanggungjawaban TA 2016 s.d 2018 dengan supervisi Inspektorat Jenderal untuk melakukan verifikasi pertanggungjawaban tersebut
- b. Melaksanakan evaluasi keberhasilan kegiatan perluasan sawah dari TA 2016 s.d TA 2018
- c. Mengimplementasikan mekanisme perencanaan, penyaluran, pembayaran, pelaporan, dan pertanggung-jawaban bantuan berdasarkan data yang terintegrasi (online).

6. Badan Litbang Pertanian

Sampai dengan 31 Desember 2018, Badan Litbang Pertanian mempunyai kegiatan Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat adalah:

a. Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA)

Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) berbasis pertanian yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian No.20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 yang selanjutnya diubah melalui Peraturan Menteri Pertanian No.27/PERMENTAN/RC.120/5/2018 adalah upaya untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi. Tujuan Program #Bekerja untuk mendiseminasikan inovasi hasil penelitian bibit unggul ayam kampung dan itik lokal dalam rangka melaksanakan pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian. Program #Bekerja merupakan upaya Kementan dalam mengentaskan kemiskinan di tanah air berbasis pertanian dengan tiga tahapan, jangka pendek, menengah, dan panjang. Target Program menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten dan 10 provinsi dengan Jumlah *Day Old Chicken* (DOC) atau *Day Old Duck* (DOD) 3 Juta Ekor. Bibit yang dibagikan merupakan unggas lokal hasil penelitian pemuliaan Balitbangtan yang mempunyai produktivitas telur lebih tinggi, yaitu Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) dan itik master. Untuk pembagian ke masyarakat diberikan masing-masing 50 ekor per Rumah Tangga Miskin (RTM).

Total pagu untuk program BEKERJA adalah senilai Rp262.639.582.000,00 pada 5 Satker dan telah direalisasikan senilai Rp168.426.437.142,00 serta disebar di 57.999 rumah tangga miskin di 6 kabupaten, 17 kecamatan dan 209 desa. Setelah audit BPK terjadi koreksi saldo realisasi menjadi Rp167.812.294.342,00 dikarenakan adanya koreksi realisasi program bekerja di BPTP Lampung yang semula bernilai Rp35.666.134.970 menjadi senilai Rp35.240.552.370, perubahan tersebut dikarenakan adanya revisi SP2D yang pada saat unaudited diusulkan belum diperbaiki di SAIBA namun SIAP sudah mencatat usulan revisinya.

Rincian Pagu dan Realisasi Program bekerja

No	SATUAN KERJA	AKUN	PAGU	REALISASI
1	Puslitbangnak Bogor	526112	627.840.000	606.921.200
		526115	42.793.321.000	30.299.682.373
2	BPTP Jawa Barat	526112	3.285.299.000	2.950.863.400
		526115	53.298.996.000	29.650.648.989
3	BPTP Lampung	526112	965.658.000	913.082.000
		526115	47.508.646.000	35.240.552.370
4	BPTP NTB	526112	2.435.310.000	1.155.813.932
		526115	59.280.052.000	29.390.210.751

No	SATUAN KERJA	AKUN	PAGU	REALISASI
5	Balitnak Ciawi	526112	433.275.000	385.449.050
		526311	52.011.185.000	37.219.070.277
			262.639.582.000	167.812.294.342

Rincian Lokasi dan Jumlah RTM

No	Satuan Kerja	Lokasi	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RTM
1	PUSLITBANGNAK	Indramayu	4	42	12.494
2	BPTPJAWA BARAT	Garut	4	56	12.220
3	BPTP LAMPUNG	Lampung Selatan	2	42	7.865
4	BPTP NTB	Lombok Tengah	2	20	13.173
5	BALITNAK CIAWI	Tasikmalaya	4	48	11.802
		Sukabumi	1	1	445
			17	209	57.999

Untuk mendukung pengadaan 3 juta bibit unggul tersebut Badan Litbang Pertanian melalui DIPA Badan Litbang Pertanian Kantor Pusat Jakarta dengan Pembiayaan Kegiatan dari Anggaran SMARTD (RMP) Komponen Diseminasi Teknologi Akun 5221 sebesar Rp6.762.380.000,00. Anggaran tersebut diberikan kepada satker dengan kontrak kerjasama. Rincian anggaran yang diberikan sebagai berikut:

No	Nama Satuan Kerja	No. dan Tanggal Kontrak	ANGGARAN	
			Pagu	Realisasi
1	BBP2TP	1367.9/PL.040/H.1/09/2018 Tanggal 01-09-2018	445.000	445.000
2	BPTP Jabar	1367.8/PL.040/H.1/09/2018.K tanggal 03-09-2018	1.000.000.000	1.000.000.000
3	BPTP Jateng	1367.2/PL.040/H.1/09/2018.K tanggal 03-09-2018	1.453.900.000	1.453.900.000
4	BPTP Jatim	1367.3/PL.040/H.1/09/2018.K tanggal 03-09-2018	981.000.000	981.000.000
5	BPTP Yogyakarta	1367.7/PL.040/H.1/09/2018.K tanggal 03-09-2018	893.940.000	893.940.000
6	BPTP Banten	1367.6/PL.040/H.1/09/2018.K tanggal 03-09-2018	377.160.000	377.160.000
7	Balitnak	1254.1/PL.040/H.1/08/2018.K tanggal 27-08-2018	2.055.935.000	1.850.341.500
		JUMLAH	6.762.380.000	6.556.786.500

Dari anggaran tersebut menghasilkan beberapa asset Barang Milik Negara (BMN) dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset yang dihasilkan dari support program bekerja

No	Nama Satker	Aset Tetap (Rp)	Aset Lancar/Persediaan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Balitnak	-	584.345.800	584.345.800
2	BPTP Banten	70.000.000	62.400.000	132.400.000
3	BPTP Jawa Barat	747.749.995	170.672.000	918.421.995
4	BPTP Jawa Tengah	463.429.400	7.525.000	470.954.400
5	BPTP Jawa Timur	38.400.000	480.880.000	519.280.000
6	BPTP Yogyakarta	329.187.471	-	329.187.471
	Total	1.648.766.866	1.305.822.800	2.954.589.666

Nilai Barang Milik Negara tersebut telah dicatat dan dilakukan transfer keluar ke satker penerima.

b. Belanja 526 Pembangunan Taman Teknologi Pertanian

Taman Teknologi Pertanian (TTP) merupakan salah satu upaya untuk mempercepat hilirisasi inovasi pertanian hingga ke daerah-daerah. Dengan adanya TTP diharapkan berbagai macam hasil inovasi teknologi pertanian dapat diinformasikan dan diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu Badan Litbang Pertanian membangun dan mengoptimalkan 26 TTP di seluruh Indonesia. Pembangunan TTP dimulai tahun 2015 sebanyak 16 unit, kemudian dilanjutkan pada 2016 sebanyak 10 unit, tahun 2017 tidak ada penambahan unit dan tahun 2018 sebanyak 5 unit dari total yang ditargetkan sebanyak 100 unit hingga 2019.

Rincian Lokasipembangunan TTP Per tahun

No	Satker	Lokasi			
		2015	2016	2017	2018
1	BPATP	Cigombong		Tidak ada penambahan Unit	
2	BPTP NAD	Aceh Besar			
3	BPTP Sumatera Barat	Lima Puluh Kota			
4	BPTP Sumatera Selatan	Banyuasin			
5	BPTP Jawa Barat	Garut			
6	BPTP Jawa Barat	Cirebon			
7	BPTP Jateng	Tegal			
8	BPTP Yogyakarta	Gunung Kidul			
9	BPTP Jawa Timur	Pacitan			
10	BPTP Jawa Timur	Lamongan			
11	BPTP NTT	Timor Tengah Selatan			
12	BPTP Kalimantan Tengah	Bukit Batu			
13	BPTP Kalimantan Selatan	Tapin			
14	BPTP Kalimantan Selatan	Tanah Laut			
15	BPTP Sulawesi Tengah	Banggai			
16	BPTP Sulawesi Selatan	Bone			
17	BPTP Bali		Tabanan		
18	BPTP Jambi		Tanjung Jabung Timur		
19	BPTP Jawa Timur		Gresik		
20	BPTP Kalimantan Timur		Kutai Kartanegara		
21	BPTP NTB		Sumbawa Barat		
22	BPTP Riau		Siak		
23	BPTP Sulawesi Selatan		Pangkep		

No	Satker	Lokasi			
		2015	2016	2017	2018
24	BPTP Sulawesi Tenggara		Bombana		
25	BPTP Sumatera Selatan		Oku		
26	BPTP Sumatera Selatan		Muba		
27	BPTP Lampung				Cahaya Negeri
28	BPTP Yogyakarta				Kulon Progo
29	BPTP Jawa Barat				Bandung Barat
30	BPTP Jawa Timur				Trenggalek
31	BPTP Sulbar				Mamuju Tengah
TOTAL		16 unit	10 Unit		5 Unit

Pengembangan TTP dilakukan bekerja sama dengan daerah, namun atas usulan pemerintah daerah sementara Badan Litbang Pertanian sebagai pendamping baik teknologi maupun sumber daya manusia. Namun demikian, kerja sama dengan daerah hanya bersifat sementara atau selama tiga tahun untuk kemudian pengelolannya diserahkan ke daerah setelah itu.

Di Badan Litbang Pertanian terdapat belanja 526 non TTP dan belanja 526 TTP. Belanja 526 TTP adalah belanja 526 untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk Pembangunan Taman Teknologi Pertanian yang padatahun 2018 sebesar Rp9.085.979.591,00 dari total pagu sebesar Rp9.883.962.000,00. Rincianbelanja 526xxx TTP padatahun 2018 disajikansebagaiberikut:

Satker	Akun	Aggaran	Realisasi
500957	526113	2.746.000.000	2.731.700.000
567364	526112	423.200.000	422.313.800
567364	526113	741.000.000	441.992.880
567364	526114	166.000.000	166.000.000
567460	526114	219.850.000	218.455.000
567495	526115	199.500.000	199.500.000
567627	526112	14.000.000	13.050.000
567627	526113	528.500.000	505.069.000
567627	526115	20.000.000	19.250.000
567702	526112	231.000.000	230.000.000
567702	526113	170.000.000	169.847.000
633975	526112	224.000.000	220.160.050
633975	526113	2.173.450.000	1.762.195.270
633982	526112	85.200.000	84.310.000
633982	526113	400.000.000	397.840.000
634001	526112	192.300.000	190.850.000
634001	526113	288.800.000	288.700.000
634036	526112	164.000.000	163.500.000

Satker	Akun	Aggaran	Realisasi
634036	526113	285.000.000	263.543.000
634040	526112	45.000.000	44.550.000
634040	526113	357.162.000	345.053.591
634040	526114	190.000.000	188.100.000
634040	526311	20.000.000	20.000.000
Total		9.883.962.000	9.085.979.591

Selain memakai belanja 526xxx program TTP memakai anggaran 53xxxx (belanja Modal) sebesar Rp4.028.460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.938.433.100,00. Rincian belanja 53xxx (modal) TTP pada tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

Satker	Akun	Aggaran	Realisasi	keterangan
Puslitbangbun	532111	602.000.000	600.470.000	1. kesalahan penganggaran. 2. aset TTP dalam proses hibah ke Pemda
	532113	4.020.000	4.020.000	
	532118	20.000.000	20.000.000	
	533111	1.772.320.000	1.765.872.000	
	533113	6.120.000	6.120.000	
	533115	94.000.000	92.750.000	
	533118	30.000.000	30.000.000	
			2.528.460.000	
Balittri	533111	649.800.000	607.984.000	1. salah penganggaran output kegiatan. 2. aset akan dipakai sendiri, jadi tidak akan di hibahkan.
	533115	61.590.000	60.575.000	
	533118	25.200.000	25.199.100	
	533121	163.410.000	152.300.000	
	534121	600.000.000	573.143.000	
		1.500.000.000	1.419.201.100	
Total		4.028.460.000	3.938.433.100	

Untuk mendukung kegiatan TTP di tahun 2018 Badan litbang menganggarkan biaya pendukung belanja 526xxx yang akan diserahkan kepada masyarakat. Anggaran biaya pendukung senilai Rp9.328.627.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.273.111.901,00.

Sampai dengan 31 Desember 2018 Badan Litbang Pertanian mencatat dalam neraca aset persediaan yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda TTP senilai Rp61.601.369.101,00. Setelah audit BPK terdapat koreksi untuk nilai yang masih dicatat dalam neraca aset persediaan yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda menjadi senilai Rp60.297.853.101,00. Koreksi tersebut terjadi pada satker BPTP Jawa Timur karena TTP lamongan senilai Rp1.303.516.000,00 telah diserahkan kepada Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan.

Proses penyerahan ke masyarakat/Pemda persentasenya terlihat kecil dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan kendala dalam proses serah terima dan mengakibatkan barang persediaan 526 tersebut masih tercatat dalam neraca.

Permasalahan dan kendalanya antara lain:

1. Proses pembangunan asset persediaan 526 belumselesai 100% dan bersifat *multi years*.
2. Belum dilakukan audit oleh APIP, barang-barang dan aset 526 yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemda
3. Proses pengajuan hibah dan penghapusan membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama.
4. Masih adanya permasalahan dan sengketa hukum di lokasi TTP.
5. Belum dibentuknya tim inventarisasi dan penyerahan barang hibah persediaan 526.
6. Belum bersedianya Pemda menerima Hibah, dll.

c. Belanja 526 Program Kegiatan Denfarm

Pada tahun 2018 badan litbang pertanian melalui satker BB Padi suka mandi melakukan kegiatan Denfarm Pertanian modern berbasis korporasi yang merupakan kegiatan bantuan pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang berlokasi di kecamatan jayakarta,kabupaten karawang. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp21.352.204.000 dan realisasi sebesar Rp14.024.461.860,00 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Pagu	Realisasi
526112	2.620.955.000	2.464.436.000
526113	3.500.000.000	2.593.839.370
526114	11.981.349.000	6.541.945.490
526311	3.249.900.000	2.424.241.000
Total	21.352.204.000	14.024.461.860

Untuk mendukung kegiatan Denfarm Pertanian modern berbasis korporasi, BB Padi menganggarkan biaya pendukung belanja 526xxx yang akan diserahkan pada masyarakat. Anggaran biaya pendukung senilai Rp12.265.413.000 dengan realisasi sebesar Rp10.309.263.585dengan rincian sebagai berikut;

Akun	Pagu	Realisasi
521211	361.394.000	294.595.000
521219	5.518.554.000	4.801.119.000
521811	3.122.165.000	2.437.310.780
522141	300.300.000	188.500.000
522151	424.000.000	224.800.000
524111	2.410.000.000	2.291.078.805
524119	129.000.000	71.860.000
Total	12.265.413.000	10.309.263.585

Total anggaran untuk kegiatan Denfarm Pertanian modern berbasis korporasi yang mempunyai output DenfarmInovasi Perbenihan untuk Pengembangan Benih VUB Padi Rp33.617.617.000 dengan realisasi sebesar Rp24.333.725.445.

Sedangkan nilai aset persediaan diserahkan kepada masyarakat/pemda yang tercatat dalam neraca per 31 desember 2018 dari kegiatan Denfarm Pertanian modern berbasis korporasi adalah sebesar Rp11.600.220.860 dan sudah diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp2.427.774.000. Rincian per akun di sajikan sebagai berikut:

Akun	Nilai aset	Diserahkan masyarakat
117123	-	84.000.000
117124	2.278.462.000	
117126	185.974.000	
117127	79.381.500	
117128	-	2.343.774.000
117129	9.056.403.360	
Total	11.600.220.860	2.427.774.000

Besarnya nilai aset yang belum diserahkan kepada masyarakat/pemda karena kegiatan tersebut masih berlanjut pada kegiatan di tahun 2019, sehingga proses penyerahannya menunggu kegiatan dan proses pengadaan terlaksana 100 %.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Bantuan Pemerintah Tahun 2016-2018 Nomor 6/LHP/XVII/02/2019 berupa TTP masih terdapat permasalahan: Pembangunan Taman Teknologi Pertanian Belum Sepenuhnya Dimanfaatkan Secara Optimal. Atas permasalahan tersebut Kementerian Pertanian akan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Pemda terkait dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan TTP dan pencapaian indikator keberhasilan kegiatan TTP tahun 2016-2018 sebagaimana diatur dalam pedoman terkait.
- b. Menginstruksikan tim monev untuk segera melaksanakan pengendalian kegiatan TTP.

7. Badan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP)

Realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (526) sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp41.162.257.634,00 dari anggaran sebesar Rp47.081.357.000,00 atau 87,43%. Realisasi tersebut seluruhnya dalam bentuk barang, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Bantuan Sarana dan Prasarana P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya)	615,000,000	613,922,500
2	Bantuan Praktek Siswa	7,860,450,000	7,855,262,633
3	Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu (Prov. Banten dan Jawa Tengah)	460,000,000	328,050,000
4	Bantuan Fasilitas Perbanyak Benih (Prov. Banten dan Jawa Tengah)	2,668,308,000	-

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
5	Perbanyak Benih Padi Pokok/Label Ungu menjadi Benih Padi Sebar/Label Biru (Prov. Banten dan Jawa Tengah)	769,500,000	-
6	Pengadaan Benih Padi Dasar/Label Putih dengan BB Padi Sukamandi/BB1	5,000,000	900,000
7	Pengadaan ayam dan pakan Program Bekerja	33,552,099,000	31,267,804,501
8	Bantuan Sarana dan Prasarana untuk SMK PP Negeri Rea Timur, Polewali Mandar	78,280,000	78,280,000
9	Pembangunan dan Rehabilitasi serta Pembangunan RPS Screen House Budidaya Organik SMK-PP Negeri Rea Timur, Polewali Mandar	1,061,720,000	1,007,038,000
10	Pengadaan Handphone untuk Mahasiswa Berprestasi	11,000,000	11,000,000
	Jumlah	47,081,357,000	41,162,257,634

Penjelasan terperinci terkait belanja 526 adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Sarana dan Prasarana P4S

a. Tujuan:

- Meningkatkan kemampuan penyelenggara dalam menyelenggarakan pemberdayaan petani melalui Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)
- Menjamin Penyelenggaraan pemberdayaan petani sesuai dengan prinsip, tahapan, dan peran P4S.

b. Dasar Pelaksanaan:

Permentan No.08/Permentan/HK.140/J/02/16 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)

c. Kriteria Penilaian:

- P4S dengan klasifikasi madya atau utama yang aktif dan berkinerja baik, yang memiliki keunggulan dalam salah satu atau lebih dari 7 (tujuh) komoditas utama.
- P4S belum pernah memperoleh hibah atau dari program sejenis (APBN/APBD)
- Lokasi P4S diutamakan berada di wilayah terluar, terisolir atau tertinggal
- Untuk mengetahui keaktifan dan kinerja P4S dilakukan melalui kegiatan reklasifikasi

d. Penerima:

Empat Puluh Delapan (48) Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S). Daftar penerima Bantuan Sarana dan Prasarana P4S dapat dilihat pada **Lampiran B.9**.

2. Bantuan Praktik Siswa

a. Tujuan:

Memberikan bantuan peralatan praktik kepada siswa SMK PP dan SMK bidang keahlian agri bisnis dan agro teknologi.

b. Dasar Pelaksanaan:

- Inpres No. 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia

- MoU Mentan dan mendikbud nomor 04/MoU/HM.220/12/2013 dan nomor 19/XII/KB/2013 tentang pembinaan Pendidikan menengah kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK PP)
 - Kerjasama antara Badan PPSDMP dengan Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud dan Penjaminan Mutu Pendidikan nomor 6897/KL.210/J/7/2014, nomor 4348/D/DM/2014 dan nomor 15788/J/SK/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Pertanian
 - c. Kriteria Penilaian:
Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMKPP) dan SMK Bidang Keahlian agri bisnis dan agro teknologi seluruh Indonesia yang menjadi binaan Pusat Pendidikan Pertanian, BPPSDMP Kementerian Pertanian.
 - d. Penerima:
Tujuh Puluh Enam (76) Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMKPP) dan SMK Bidang Keahlian agri bisnis dan agro teknologi seluruh Indonesia yang menjadi binaan Pusat Pendidikan Pertanian, BPPSDMP Kementerian Pertanian. Daftar penerima Bantuan Praktik Siswa dapat dilihat pada **Lampiran B.10**.
3. Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu (Propinsi Banten dan Jawa Tengah)
- a. Tujuan:
 - Mengadakan dan mendistribusikan bantuan pemerintah berupa benih padi pokok/label ungu kepada petani peserta sekolah lapang (SL) di Kabupaten Pati, provinsi Jawa Tengah.
 - Mengadakan benih pokok/label ungu untuk digunakan dalam kerjasama NPIU dengan petani penangkar di lokasi IPDMIP di Provinsi Jawa Tengah untuk memperbanyak benih pokok menjadi benih sebar.
 - b. Dasar Pelaksanaan:
Surat keputusan kuasa pengguna anggaran nomor 330/KPA/i/08/18 tanggal 30 agustus 2018 tentang penetapan penerima benih padi dasar dan benih padi pokok pada program pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project) Tahun 2018;
 - c. Kriteria penilaian:
 - Petani anggota kelompok tani calon peserta sekolah lapangan Tahun 2019 yang ditetapkan oleh dinas pertanian kabupaten lokasi proyek IPDMIP.
 - Kelompok tani yang memiliki rekomendasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikat Benih sebagai penangkar benih padi, diusulkan oleh dinas pertanian kabupaten lokasi proyek IPDMIP, dan bersedia melaksanakan perbanyak benih padi pokok menjadi benih padi sebar melalui swakelola.
 - d. Penerima:
60 gapoktan di lokasi pelaksanaan sekolah lapangan di kabupaten pati, provinsi jawa tengah, yang meliputi 526 orang petani peserta sekolah lapangan. Distribusi penyaluran benih di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
 - Benih Inpari 30 yang disalurkan sebanyak 15.975 dengan penerima benih sebanyak 25 gapoktan untuk keperluan sekolah lapangan di 5 kecamatan dan 25 desa dengan luasan lahan 399 Ha. Data penerima sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Nama Ketua Gapoktan	Luas Lahan (Ha)	Keb Benih (Kg)
1	Winong	Panggendisan	Pembangunan	Roekani	10.7	428
2	Winong	Tlogorejo	Putra Jaya	Sudiyono	17.6	702
3	Winong	Bumiharjo	Tunggak Rawa	Supomo	17.8	712
4	Winong	Tanggal	Makmur	Jumni	17	680
5	Winong	Pulorejo	Mekar Jaya	Muh Samirun	27.1	1084
6	Winong	Winong	Sejahtera	Suwawi	20	800
7	Winong	Serut Sadang	Mitra Tani	Mulyono	11.5	460
8	Winong	Klecoregonang	Makmur Jaya	Ali Na'srullah	17.6	704
9	Winong	Tawangrejo	Tani Mandiri	Sururi	15.6	624
10	Winong	Degan	Kelapa Muda	Sukarman	14.7	588
11	Tambakromo	Tambakromo	Sri Utomo	Sujadi	20.2	809
12	Tambakromo	Karangmulyo	Rukun Mulyo	Warsidin	16	641
13	Tambakromo	Sitirejo	Rejo Makmur	Sunarto	16.8	671
14	Dukuhseti	Grogolan	Harapan	Badrut Tamam	10	400
15	Dukuhseti	Ngagel	Sata Kencana	Moh. Soleh	12.7	506
16	Dukuhseti	Dukuhseti	Lohjinawi	Suyono	14.6	585
17	Dukuhseti	Kembang	Sawi Makmur	Sya'roni	15	603
18	Margoyoso	Purworejo	Tani Usaha	M. Nurul Huda H	21.3	852
19	Margoyoso	Purwodadi	Jaya Makmur	Subari	19.8	790
20	Margoyoso	Ngemplak Lor	Dadi Mulyo Manunggal	Sukardi	20	800
21	Margoyoso	Waturoyo	Krido Kismo	Sugiyono	18	720
22	Margoyoso	Semerak	Tani Subur	Hartono	12	482
23	Margoyoso	Margoyoso	Margo Makmur	Subiyono	17	680
24	Gabus	Sugihrejo	Sido Kasil Makmur	Parsudi	6	254
25	Gabus	Mojolawaran	Subur Makmur	H. Iskandar	10	400
Jumlah					399	15975

- Benih Inpari 32 yang disalurkan sebanyak 12.800 dengan penerima benih sebanyak 17 gapoktan untuk keperluan sekolah lapangan di 6 kecamatan dan 17 desa dengan luasan lahan 320,2 Ha. Data penerima sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Nama Ketua Gapoktan	Luas Lahan (Ha)	Keb Benih (Kg)
1	Winong	Guyangan	Rukun Tani	Bakri	17.8	710
2	Winong	Sugihan	Sido Makmur	Suwarno	16.5	660

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Nama Ketua Gapoktan	Luas Lahan (Ha)	Keb Benih (Kg)
3	Winong	Kebolampang	Ngudi Karyo	Damin	16.5	660
4	Winong	Karangsumber	Rukun Santoso	Kirno	15.5	620
5	Winong	Pekalongan	Tani Makmur	Sabari	19.7	786
6	Winong	Danyangmulyo	Tani Mulyo	Akh. Hasan	22	880
7	Winong	Sumbermulyo	Ngudi Makmur	Bedjo	22.2	888
8	Tambakromo	Kedalingan	Tani Makmur	Qoribun	15.7	630
9	Tambakromo	Angkatan Lor	Dadimulyo	Raslan	8.3	335
10	Margorejo	Ngawen	Mekar Jaya	Sartono	18.6	742
11	Margorejo	Margorejo	Margo Makmur	Kahar, SP	22.3	891
12	Margorejo	Penambuhan	Sumber Rejeki	Mustaqim	22.6	902
13	Margorejo	Langenharjo	Langen Tani Makmur	Mulyono	24.4	976
14	Margorejo	Dadirejo	Tani Makmur Abadi	Abdul Rohman	17	678
15	Pati	Blaru	Tani Unggul	Ngadono	27.5	1100
16	Tlogowungu	Wonorejo	Ngudi Lestari	Supardi	18.6	742
17	Wedarijaksa	Bumiayu	Bangun Makaryo	Sarwi	15	600
Jumlah					320,2	12800

- Benih Ciherang yang disalurkan sebanyak 9.405 dengan penerima benih sebanyak 18 gapoktan untuk keperluan sekolah lapangan di 3 kecamatan dan 18 desa dengan luasan lahan 235,1 Ha. Data penerima sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Nama Ketua Gapoktan	Luas Lahan (Ha)	Keb Benih (Kg)
1	Winong	Karangkonang	Rukun Abadi	Sunawi	13.7	548
2	Gabus	Tambahmulyo	Usaha Jaya	Lasno	17	680
3	Gabus	Sunggingwarno	Sido Mukti	Sukarno, SH	10	400
4	Gabus	Penanggungan	Ngudi Makmur	Rochmad, SE	17	680
5	Gabus	Soko	Soko Banteng Tani	Sutejo	9	360
6	Gabus	Gabus	Tani Mulyo	Sholekan	13	520
7	Gabus	Kuryokalangan	Subur Makmur	Abdul Karim	18.6	744
8	Gabus	Plumbungan	Sumber Makmur	Suharto	17	680
9	Gabus	Gempolsari	Tani lestari	Abdul Halim	16.1	645
10	Gabus	Koripandriyo	Subur Makmur	Pazari	13	520
11	Gabus	Babalan	Sumber Makmur	Kasbiyanto	16	640
12	Gabus	Banjarsari	Tani Makmur	Marjuki	11.3	452
13	Jakenan	Sendangsoko	Tani Makmur	Lamijan	9.9	396

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Nama Ketua Gapoktan	Luas Lahan (Ha)	Keb Benih (Kg)
14	Jakenan	Sonorejo	Tani Makmur	Sutono	9.9	396
15	Jakenan	Karangrowo	Karangrowo	Ruslan	11.5	460
16	Jakenan	Kedungmulyo	Tani Mulyo	Markawi, SE	10.7	428
17	Jakenan	Tlogorejo	Karya Makmur	Yakiman	9.9	396
18	Jakenan	Ngastorejo	Tani Rejo	Gunardi	11.5	460
Jumlah					235,1	9405

- 1) Kelompok tani sumber rejeki dan kelompok tani sumber rejeki II di 2 kecamatan, dan 2 desa dengan luasan lahan 17 Ha di kabupaten Banyumas, provinsi Jawa Tengah.

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Varietas	Luas Lahan (Ha)	Keb Benih (Kg)
1	Kebasen	Kebasen	Sumber Rejeki Ketua: Ratal	Situbagendit	10	250
2	Kembaran	Pliken	Sumber Rejeki II Ketua: Sucipto	Situbagendit	4	100
				Mekongga	3	80
Jumlah						430

4. Pengadaan Benih Padi Dasar/Label Putih dengan BB Padi Sukamandi/BBI

a. Tujuan:

Menyediakan bantuan pemerintah berupa benih padi dasar untuk mendukung kegiatan perbanyak benih padi dasar menjadi benih padi pokok yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Proyek Provinsi (Provincial Project Implementation Unit/PPIU) di provinsi lokasi IPDMIP.

b. Output:

- Terlaksananya pengadaan benih padi dasar/label putih dari Balai Besar Padi dan atau Balai Benih Induk
- Tersedianya Benih Padi Dasar/Label Putih sebanyak 75 kg.

c. Dasar Pelaksanaan:

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 330/KPA/I/08/18 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penetapan Penerima Benih Padi Dasar dan Benih Padi Pokok Pada Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project) Tahun 2018

d. Kriteria Penetapan Penerima Benih Dasar:

1. PPIU di 14 provinsi lokasi Proyek IPDMIP (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur).
2. PPIU sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perbanyak Benih Padi Dasar menjadi Benih Padi Pokok (SS/Label Ungu) pada DPA Tahun Anggaran 2018 atau merencanakan perbanyak benih dasar menjadi benih pokok pada tahun 2019.
3. Di lokasi PPIU tersedia BBI/BPTP dan atau penangkar benih padi yang siap memperbanyak benih padi dasar menjadi benih padi pokok.

- e. Penerima:
 1. PPIU Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, sebanyak 25 kg benih dasar, terdiri atas varietas Inpari 30 sebanyak 5 kg, varietas Inpari 33 sebanyak 5 kg, varietas Inpari 43 sebanyak 5 kg, dan varietas Mekongga sebanyak 10 kg.
 2. PPIU Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah
5. Bantuan Sarana dan Prasarana Untuk SMK PP Rea Timur Polewali Mandar
 - a. Tujuan:

Terfasilitasinya prasarana laboratorium komputer untuk praktik bagi siswa SMK-PP Rea Timur
 - b. Dasar Pelaksanaan:

Berdasarkan Hasil Analisa Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh SMK-PP Rea Timur Provinsi Sulawesi Barat Kab. Polewali Mandar
 - c. Penerima:

Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluh Pertanian (SMK-PP) Rea Timur Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat
6. Pembangunan dan Rehabilitasi Serta Pembangunan RPS Screen House Budidaya Organik SMK PP Polewali Mandar.
 - a. Tujuan:

Terfasilitasinya sarana prasarana praktik bidang pertanian bagi siswa SMK PP Negeri Rea Timur
 - b. Dasar Pelaksanaan:

Berdasarkan Hasil Analisa Rencana Anggaran Biaya Yang Diajukan oleh SMK PP Negeri Rea Timur Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Selatan
 - c. Penerima:

Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluhan Pertanian (SMK PP) Rea Timur Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Selatan.
7. Pengadaan Ayam dan Pakan Program BEKERJA
 - a. Tujuan:
 - Membentuk kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi
 - Membentuk gabungan kelompok tani sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usaha tani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro.
 - Membentuk Rumah Tangga Miskin (RTM) pra sejahtera menjadi petani maju.
 - b. Dasar Pelaksanaan:
 - Permentan nomor 27/permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (BEKERJA)
 - Keputusan menteri pertanian nomor 316/Kpts/OT.050/5/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program BEKERJA yang ditetapkan oleh BPPSDMP
 - BPPSDMP mengambil Juknis BEKERJA dengan tema “Program Bedah Kemiskinan Melalui Penguatan Kelembagaan Petani”
 - c. Kriteria:
 - ✓ Kriteria Lokasi

- Desa Miskin sesuai kriteria Kementerian Sosial sebanyak 22 desa di 2 Kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebanyak 43 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan 1 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten.
 - Kecamatan/Cluster diprioritaskan yang ada kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
 - Memiliki potensi usaha di bidang pertanian
 - Lokasi kecamatan ditetapkan melalui SK Bupati berdasarkan hasil verifikasi tim pusat, propinsi dan kabupaten.
 - ✓ Kriteria Calon Penerima Manfaat
 - RTM yang mempunyai usaha utama di bidang pertanian
 - RTM yang belum tergabung dalam kelompok tani
 - RTM yang sudah tergabung dalam kelompok tani
 - d. Penerima:
 - 3595 Rumah Tangga Miskin (RTM) di kecamatan Babalan dan Secanggang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara
 - 5342 Rumah Tangga Miskin (RTM) di 4 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan 1 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten.
8. Pengadaan Handphone Untuk Mahasiswa Berprestasi
- a. Tujuan:

Pemberian hadiah mahasiswa/mahasiswi Polbangtan Yogyakarta-Magelang tahun 2018 sebagai apresiasi untuk mahasiswa/mahasiswi yang telah berhasil mencapai prestasi terbaik dibidang akademik, sikap, bakat dan kreativitas sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan semangat bagimahasiswa/mahasiswi agar dapat meraih prestasi yang baik.
 - b. Kriteria penilaian:
 - Prestasi akademik 2 semester (2017/2018) berturut turut mendapatkan IPK $\geq 3,75$
 - Mempunyai prestasi non akademik pada bidang olahraga, kesenian, dan keilmuan selama 1 (satu) tahun terakhir
 - Mempunyai kredibilitas, kepribadian yang baik dan santun
 - Mempunyai kedisiplinan yang tinggi
 - Aktif dan cakap dalam berorganisasi
 - c. Penerima:
 - Nur fatimah (mahasiswa berprestasi jurusan pertanian)
 - Nadya citra pertiwi (mahasiswa berprestasi jurusan pertanian)

8. Badan Ketahanan Pangan (BKP)

Belanja Mak 526 ini di anggarkan untuk mencapai Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, maka di TA. 2018 dianggarkan sebesar Rp244.245.061.000 yaitu dalam bentuk barang sebesar Rp2.685.061.000 dan dalam bentuk uang Rp241.560.000.000. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp242.953.166.083 yaitu realisasi dalam bentuk barang sebesar Rp2.675.351.600 dan realisasi berupa uang sebesar Rp240.277.814.483. Belanja Mak 526 dianggarkan untuk mendukung kegiatan sebagai berikut:

KETERANGAN	PAGU	REALISASI	%
1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	119,841,636,000	118,645,981,583	99.00

KETERANGAN	PAGU	REALISASI	%
1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	6,284,800,000	6,238,779,500	99.27
1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	118,043,125,000	117,992,915,000	99.96
1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	75,500,000	75,490,000	99.99
Grand Total	244,245,061,000	242,953,166,083	99.47

a. Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat danantisipasi kebutuhan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan.

Alokasi anggaran belanja mak 526 untuk kegiatan tersebut tahun 2018 sebesar Rp119.841.636.000 yang terdiri atas pagu banper barang Rp481.636.000 dan banper uang Rp119.360.000.000 Sampai dengan 31 Desember 2018, dana bantuan yang terealisasi sebesar Rp118.645.981.583 yang terdiri atas realisasi banper barang Rp478.128.120 dan banper uang Rp118.167.853.483.

Berikut Pagu dan Realisasi anggaran per output kegiatan:

KETERANGAN	Grand Total		
	Pagu	Realisasi	%
1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	119,841,636,000	118,645,981,583	99.00
1814.102 Lumbung Pangan Masyarakat	836,000	836,000	100.00
Banper Barang	836,000	836,000	100.00
1814.108 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	119,360,000,000	118,167,853,483	99.00
Banper Uang	119,360,000,000	118,167,853,483	99.00
1814.111 Hasil pemantauan pasokan dan harga pangan	480,800,000	477,292,100	99.27
Banper Barang	480,800,000	477,292,100	99.27

Dana Bantuan tersebut di berikan untuk membantu pelaksanaan kegiatan: (1)Lumbung Pangan Masyarakat, (2) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat-Toko Tani Indonesia (PUPM-TTI), dan (3) Pemantauan pasokan dan harga pangan.

1) Lumbung Pangan Masyarakat

Anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan Lumbung Pangan di tahun 2018 di alokasikan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp836.000 berupa barang yaitu Printer Canon. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp836.000. Bantuan ini di berikan guna menunjang kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat.

2) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Badan Ketahanan Pangan meluncurkan program kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) – Toko Tani Indonesia (TTI). Kegiatan memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat (Gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok tani (Poktan), lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan) dalam melayani Toko Tani Indonesia untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Tujuan PUPM adalah untuk: (1) Menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis; (2) Mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis; dan (3) Memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis yang berkualitas, dengan harga yang wajar.

Anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan PUPM-TTI di tahun 2018 terbagi atas:

- Tahap penumbuhan di alokasikan di 16 Provinsi (Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Bali, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Banten) sebesar Rp80.000.000.000 yang di targetkan pada 500 PUPM @Rp160.000.000
- Tahap pengembangan di alokasikan di di 7 provinsi (Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat) sebesar Rp24.360.000.000 yang di berikan kepada 406 PUPM @Rp60.000.000
- Untuk Pembinaan di alokasikan di 20 Provinsi (Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jambi, Riau, Banten, Gorontalo, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Lampung, Bali, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Maluku Utara) sebesar Rp15.000.000.000 yang di berikan kepada 250 PUPM @Rp60.000.000

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp118.167.853.483, terdiri atas realisasi untuk tahap penumbuhan sebanyak 500 Gapoktan, tahap pengembangan 404 Gapoktan dan pembinaan 249 Gapoktan. Rincian Realisasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) per satker adalah sebagai berikut:

	KETERANGAN	Grand Total		
		Pagu	Realisasi	%
1	1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	119.360.000.000	118.167.853.483	99,00

	KETERANGAN	Grand Total		
		Pagu	Realisasi	%
	1814.108 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	119.360.000.000	118.167.853.483	99,00
	029346 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	22.580.000.000	22.487.414.220	99,59
	039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	18.400.000.000	18.219.984.495	99,02
	049037 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA	2.200.000.000	2.200.000.000	100,00
	059444 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	13.600.000.000	13.472.080.500	99,06
	069027 DINAS PANGAN ACEH	1.280.000.000	1.280.000.000	100,00
	079318 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	5.360.000.000	5.238.216.603	97,73
	089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1.280.000.000	1.188.846.400	92,88
	099426 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU	360.000.000	360.000.000	100,00
	109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	240.000.000	240.000.000	100,00
	119225 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	10.080.000.000	9.952.753.620	98,74
	129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG	10.000.000.000	9.962.404.750	99,62
	139021 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1.900.000.000	1.900.000.000	100,00
	149214 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	240.000.000	240.000.000	100,00
	159192 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.840.000.000	1.553.933.125	84,45
	179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	240.000.000	240.000.000	100,00
	199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN	12.200.000.000	12.087.309.520	99,08
	229164 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	1.520.000.000	1.520.000.000	100,00
	239220 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	3.040.000.000	3.025.135.000	99,51
	269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU	240.000.000	240.000.000	100,00
	289039 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	120.000.000	120.000.000	100,00
	299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	11.240.000.000	11.239.775.250	100,00
	319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	1.400.000.000	1.400.000.000	100,00

Rekapitulasi alokasi dan realisasi Banper PUPM tahun 2018 sebagai berikut:

No	Provinsi	Jumlah LUPM					
		Penumbuhan 2018		Pengembangan 2017		Pembinaan 2016	
		alokasi	realisasi	alokasi	realisasi	alokasi	realisasi
1	Sumatera Selatan	51	51	20	19	12	12
2	Sumatera Utara	26	26			20	20

No	Provinsi	Jumlah LUPM					
		Penumbuhan 2018		Pengembangan 2017		Pembinaan 2016	
		alokasi	realisasi	alokasi	realisasi	alokasi	realisasi
3	DI. Yogyakarta	10	10			10	10
4	Jawa Tengah	76	76	70	70	34	34
5	Aceh	8	8				
6	Bali	8	8			4	4
7	Lampung	43	43	35	35	17	17
8	Bengkulu					4	4
9	Kalimantan Selatan	10	10			4	4
10	Nusa Tenggara Barat	13	13	10	10	6	6
11	Maluku Utara					2	2
12	Sulawesi Selatan	68	68			22	22
13	Jawa Barat	80	80	123	123	40	40
14	Sumatera Barat	8	8				
15	Jawa Timur	55	55	50	49	30	29
16	Gorontalo	8	8			2	2
17	Banten	26	26	98	98	20	20
18	Riau					6	6
19	Jambi					4	4
20	Kalimantan Barat	10	10			5	5
21	Sulawesi Utara					4	4
22	Kalimantan Tengah					4	4
Total		500	500	406	404	250	249

- Untuk Banper Tahap Pengembangan di Provinsi Sumatera Selatan ada 1 Gapoktan yang tidak memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis untuk pencairan dana operasional di tahap pengembangan atau tahun kedua kegiatan yaitu Gapoktan Usaha Bersama, beralamat di Desa Potos Enggal Rejo, Kel. Enggal Rejo, Kec. Air Saleh, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan. Di Provinsi Jawa Timur, ada 1 Gapoktan Sumber Tani, Tuban yang dikembalikan karena Ketua Gapoktan mencalonkan diri menjadi kepala desa yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif jika di cairkan.
- Untuk Banper Tahap Pembinaan di Provinsi Jawa Timur ada 1 Gapoktan yang tidak memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis untuk pencairan dana operasional di tahap pembinaan atau tahun ketiga kegiatan yaitu Gapoktan Bumi Makmur, beralamat di Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi.
- Sampai dengan tanggal 18 April 2019, terdapat sisa dana PUPM Tahun 2018 yang baru disetorkan di tahun 2019 sebesar Rp74.778.985 yaitu:
 1. Provinsi Jawa Timur: Gapoktan Gotong Royong sebesar Rp186.945 yang disetorkan Tanggal 01/03/2019 NTPN : 494AC8LDFAV93P6I
 2. Provinsi NAD: Gapoktan Pemuda Tani Mandiri sebesar Rp4.000.000 yang disetorkan Tanggal 22/03/2019 NTPN : 5FFFD4E3H7QQ9492

3. Provinsi Maluku Utara: Gapoktan Mekar Sari sebesar Rp60.000.000 yang disetorkan Tanggal 18/02/2019 NTPN: B542E5URPNKTA5L9 dikarenakan pengurusan Gapoktan Mekar Sari kurang aktif.
4. Provinsi Banten:

Nama Gapoktan	NTPN	Tanggal	Jumlah
Sangkan Makmur	ABD375TBIU7PNK9I	11-Feb-19	817.400,00
Anugerah Mandiri	706305SKRKFOI99I	11-Feb-19	1.090.000,00
Mitra Tani	ABF195SPJHVSG39I	11-Feb-19	840.000,00
Sri Rumasa	E016F5T4F1VJQT9I	11-Feb-19	257.200,00
Subur makmur	DC9065T9V4FLEI9I	11-Feb-19	1.800.000,00
Abadi Sejahtera	DDCAB5T8LGMB5R9I	11-Feb-19	2.520.000,00
Karya Sejati	056C15T1O1ALKA9I	11-Feb-19	30.000,00
Karya Jaya	88B315T0DHJ9489I	11-Feb-19	150.000,00
Hariang Jaya	D4A765TFC0HESK9I	11-Feb-19	2.445.200,00
Harapan Jaya	756755SRHHMQPG9I	11-Feb-19	642.240,00
Jumlah	Jumlah		10.592.040,00

3) Hasil pemantauan pasokan dan harga pangan.

Untuk menunjang kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan maka di anggarkan bantuan pemerintah berupa barang yang dipergunakan untuk fasilitasi TTIC guna menjaga stabilitasi harga pangan sebesar Rp480.800.000 pada provinsi Jawa Barat , Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Banten dan Gorontalo. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp477.292.100. Dengan perincian sebagai berikut:

KETERANGAN	Grand Total		
	Pagu	Realisasi	%
1814.111 Hasil pemantauan pasokan dan harga pangan	480.800.000	477.292.100	99,27
029346 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	17.500.000	17.110.000	97,77
039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	17.500.000	17.500.000	100,00
049037 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA	69.300.000	69.252.000	99,93
059444 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	22.500.000	21.120.000	93,87
069027 DINAS PANGAN ACEH	150.000.000	149.200.000	99,47
079318 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	9.000.000	9.000.000	100,00
089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	9.750.000	9.735.000	99,85
099426 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU	9.750.000	9.425.100	96,67

KETERANGAN	Grand Total		
	Pagu	Realisasi	%
119225 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	9.750.000	9.700.000	99,49
129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG	9.750.000	9.500.000	97,44
139021 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9.750.000	9.750.000	100,00
159192 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9.750.000	9.500.000	97,44
179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	9.750.000	9.750.000	100,00
199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN	9.750.000	9.750.000	100,00
229164 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	17.500.000	17.500.000	100,00
239220 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	17.500.000	17.500.000	100,00
289039 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	9.750.000	9.750.000	100,00
299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	9.750.000	9.750.000	100,00
319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	62.500.000	62.500.000	100,00

2. Pengembangan Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri sekaligus pengurangan jumlah penduduk rawan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah (1) meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam dan menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun; serta (2) Meningkatnya ketahanan pangan keluarga melalui pengembangan model pemberdayaan masyarakat/Smallholder Livelihood Development (SOLID) yang dilaksanakan bekerja sama dengan International Food for Agricultural Development (IFAD) di 11 kabupaten di provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Alokasi anggaran belanja mak 526 untuk kegiatan tersebut tahun 2018 sebesar Rp6.284.800.000. Sampai dengan 31 Desember 2018, dana bantuan yang terealisasi sebesar Rp6.238.779.500.

Dana Bantuan tersebut di berikan untuk membantu pelaksanaan kegiatan (1) Kawasan Mandiri Pangan; (2) Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan; (3) Dukungan produksi pertanian dan pemasaran

KETERANGAN	PAGU	REALISASI	%
1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	6.284.800.000	6.238.779.500	99,27
1815.106 Kawasan Mandiri Pangan	2.000.000.000	1.962.500.000	98,13
Banper Uang	2.000.000.000	1.962.500.000	98,13

KETERANGAN	PAGU	REALISASI	%
1815.107 Pemantauan Ketersediaan, akses dan Kerawanan Pangan	14.800.000	14.768.500	99,79
Banper Barang	14.800.000	14.768.500	99,79
1815.109 Dukungan Produksi Pertanian dan Pemasaran	4.270.000.000	4.261.511.000	99,80
Banper Barang	2.070.000.000	2.064.050.000	99,71
Banper Uang	2.200.000.000	2.197.461.000	99,88

1) Kawasan Mandiri Pangan (KMP)

Kawasan Mandiri Pangan dikembangkan untuk memantapkan dan mempercepat pengentasan kemiskinan melalui padat karya dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan. Kawasan yang dibentuk terdiri dari 1 (satu) desa yang meliputi 2 (dua) kelompok dengan jenis usaha/komoditas yang sama atau berbeda jenis. Alokasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di 20 kawasan pada 20 kabupaten. Kawasan Mandiri Pangan merupakan kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari desa-desa terpilih, untuk menegakkan masyarakat miskin melalui padat karya dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan menjadi masyarakat mandiri.

Tujuan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yaitu:

- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin melalui padat karya dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat berlandaskan kemandirian;
- Meningkatkan pengelolaan kelembagaan masyarakat untuk ketahanan pangan masyarakat; dan
- Meningkatkan dukungan lintas sektor untuk pengembangan prasarana sarana perdesaan dan perekonomian masyarakat.

Sasaran kegiatan Kawasan Mandiri Pangan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM), prevalensi stunting berdasarkan Data Kemiskinan yang dikeluarkan oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian PPN/Bappenas di wilayah rentan rawan pangan yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan di 20 kawasan pada, 20 kabupaten

Dana bantuan pemerintah tahap pengembangan yang sudah ditransfer ke salah satu rekening kelompok diserahterimakan kepada LKK yang telah dibentuk untuk dikelola lebih lanjut. Dana bantuan pemerintah yang sudah dicairkan selanjutnya dimanfaatkan oleh kelompok sesuai dengan RUK yang diajukan. Pemanfaatan dana dipergunakan untuk usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, ternak (unggas/kambing/domba) dan biaya kerja (HOK). HOK maksimal digunakan sebesar 20 persen dari dana bantuan pemerintah yang diterima. Pemanfaatan dana bantuan pemerintah hanya untuk digunakan di tahun berjalan. Jika terdapat dana yang tidak digunakan harus disetor ke kas negara setelah selesai masa kerjasama atau di akhir tahun yang dituangkan dalam BAST akhir tahun.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan ini di tahun 2018 sebesar Rp2.000.000.000 di targetkan 20 Kawasan pada 20 Kabupaten/Kota di 17 provinsi. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah di realisasikan sebesar Rp1.962.500.000 dengan perincian sebagai berikut:

KETERANGAN	Grand Total		
	Pagu	Realisasi	%
1815.106 Kawasan Mandiri Pangan	2.000.000.000	1.962.500.000	98,13
029346 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	200.000.000	200.000.000	100,00
039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	100.000.000	100.000.000	100,00
049037 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA	100.000.000	100.000.000	100,00
059444 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	100.000.000	100.000.000	100,00
069027 DINAS PANGAN ACEH	100.000.000	100.000.000	100,00
089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	100.000.000	100.000.000	100,00
119225 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	100.000.000	100.000.000	100,00
129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG	200.000.000	200.000.000	100,00
139021 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100.000.000	100.000.000	100,00
159192 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	100.000.000	62.500.000	62,50
189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	100.000.000	100.000.000	100,00
199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN	100.000.000	100.000.000	100,00
229164 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	100.000.000	100.000.000	100,00
239220 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	200.000.000	200.000.000	100,00
249020 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	100.000.000	100.000.000	100,00
269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU	100.000.000	100.000.000	100,00
299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	100.000.000	100.000.000	100,00

Perkembangan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2018 dapat dilihat pada **Lampiran B.11.**

Di provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terdapat 1 (satu) Kawasan yang terdiri dari 2 (dua) Kelompok yaitu Harapan Baru menerima Banper Rp50.000.000 dan Doa Bersama Rp50.000.000 dan telah dicairkan total Rp100.000.000; Kemudian telah mengembalikan ke kas negara sebesar Rp37.500.000 yang dibuktikan dengan SSPB per tanggal 30 November 2018 NTPN: 360C25UHL PUBG6L2

2) Pemantauan Ketersediaan, akses dan Kerawanan Pangan

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan ini di tahun 2018 sebesar Rp15.000.000 di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai dengan 31 Desember

2018 telah di realisasikan sebesar Rp14.768.000. Bantuan ini bertujuan untuk memantau ketersediaan pangan.

3) Dukungan Produksi Pertanian dan Pemasaran

Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan International Food for Agricultural Development (IFAD) yang dilaksanakan di 11 kabupaten di provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Kegiatan ini bertujuan untuk Memperbaiki taraf hidup masyarakat (pendapatan dan ketahanan pangan) dan mengurangi kemiskinan di desa-desa sasaran di dua provinsi SOLID.

Dukungan kegiatan produksi dan pemasaran, diberikan untuk memicu peningkatan hasil produksi, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian baik usaha komoditas pangan dan hortikultur maupun perkebunan. Fasilifasi kegiatan produksi dan pemasaran diharapkan mendorong terjadinya peningkatan nilai tambah usaha masing masing anggota KM dengan membangun kerjasama antar anggota KM yang memiliki pilihan usaha atau komoditas sejenis, baik usaha produksi, penanganan pasca panen maupun pengolahan hasil. Dukungan kegiatan produksi pertanian dan pemasaran, meliputi kegiatan-kegiatan: perencanaan produksi, penyaluran dana bergulir untuk produksi pertanian, pelatihan, peralatan, pemasaran dan prasarana bagi KM.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan ini di tahun 2018 sebesar Rp4.270.000.000, yaitu bantuan Pemerintah berupa barang Rp2.070.000.000 dan bantuan Pemerintah berupa uang Rp2.200.000.000. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018, Realisasi bantuan Pemerintah berupa barang Rp2.064.050.000 dengan perincian sebagai berikut:

1815.109 Dukungan Produksi Pertanian dan Pemasaran	2.070.000.000	2.064.050.000	99,71
219211 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	150.000.000	148.250.000	98,83
219216 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	750.000.000	750.000.000	100,00
289048 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	300.000.000	300.000.000	100,00
289052 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA	150.000.000	149.300.000	99,53
289055 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	150.000.000	150.000.000	100,00
289058 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT	150.000.000	147.500.000	98,33
289184 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	150.000.000	149.000.000	99,33
289191 DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. HALMAHERA UTARA	270.000.000	270.000.000	100,00

Bantuan Pemerintah berupa uang Rp2.197.461.000 dengan perincian sebagai berikut:

1815.109 Dukungan Produksi Pertanian dan Pemasaran	2.200.000.000	2.197.461.000	99,88
210439 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BURU	180.000.000	180.000.000	100,00
219183 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH	335.000.000	333.811.000	99,65
219211 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	35.000.000	35.000.000	100,00
219216 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	140.000.000	140.000.000	100,00
219223 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BURU SELATAN	335.000.000	333.650.000	99,60
289048 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan	35.000.000	35.000.000	100,00
289052 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA	35.000.000	35.000.000	100,00
289055 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	35.000.000	35.000.000	100,00
289058 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT	1.035.000.000	1.035.000.000	100,00
289184 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	35.000.000	35.000.000	100,00

3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Keamanan Pangan
- Gerakan P2KP merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan dan merupakan salah satu kunci sukses pembangunan pertanian di Indonesia. P2KP dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan utama yaitu: (a) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari; (b) Pengembangan Pangan Lokal; serta (c) Promosi dan Sosialisasi P2KP.
- Alokasi anggaran belanja mak 526 untuk kegiatan tersebut tahun 2018 sebesar Rp118.043.125.000. Sampai dengan 31 Desember 2018, dana bantuan yang terealisasi sebesar Rp117.992.915.000

Berikut Pagu dan Realisasi anggaran per output kegiatan:

KETERANGAN	PAGU	REALISASI	%
1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	118.043.125.000	117.992.915.000	99,96
1816.101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan	115.000.000.000	114.950.000.000	99,96
Banper Uang	115.000.000.000	114.950.000.000	99,96
1816.105 Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00
Banper Uang	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00
1816.106 Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar	43.125.000	42.915.000	99,51
Banper Barang	43.125.000	42.915.000	99,51

Dana Bantuan tersebut di berikan untuk membantu pelaksanaan kegiatan, yaitu: (1) Pemberdayaan pekarangan pangan melalui Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal

1) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi sumberdaya alam dan kebutuhan gizi warga setempat. Tujuan dari pelaksanaan KRPL adalah meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral serta pendapatan secara berkelanjutan dan Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA.

Optimalisasi pekarangan ini dikembangkan secara intensif melalui pengembangan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal yang disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (local wisdom), sehingga kelestarian alampun tetap terjaga. Implementasi konsep inilah dikenal dengan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Melalui konsep KRPL, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan menuju kemandirian pangan sekaligus melestarikan sumber daya alam. KRPL dilaksanakan dengan melakukan pemberdayaan intensif kepada ibu rumah tangga yang terwadahi dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan teknologi budidaya tanam pada pekarangan.

Pada tahun 2018 pemberdayaan pemanfaatan pekarangan dilakukan pada 2.300 kelompok wanita/kelompok masyarakat lainnya dengan mendapatkan Dana Bantuan sebesar Rp50.000.000 per desa/kelompok dengan rincian: Kebun Bibit Rp20.000.000, Demplot Rp7.000.000, Pengembangan Pekarangan Anggota Rp15.000.000, Pengembangan Kebun Sekolah Rp5.000.000 dan Praktek pengolahan dan penyediaan menu B2SA Rp3.000.000.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan ini dalam bentuk uang di tahun 2018 sebesar Rp115.000.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah di realisasikan sebesar Rp114.950.000.000, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran B.12.**

- ❑ Terdapat 1 (satu) Kelompok di Kabupaten Aceh Barat - Provinsi Aceh, yaitu Kelompok Bungong Jeumpa telah mengembalikan dana ke kas Negara sebesar Rp50.000.000 pada tanggal 12 Desember 2018 NTPN: 93B505AFBQ07Q0E2.
- ❑ Sampai dengan tanggal 18 April 2019, terdapat sisa dana KRPL tahun 2018 yang baru disetorkan di tahun 2019 sebesar Rp136.774.750, yaitu sebagai berikut:
 - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sebesar Rp58.625.000 terdiri dari: Kelompok Paniisan Kota Tangerang sebesar Rp28.625.000 NTPN: 81D6D2708FEUDMOI tanggal 1 April 2019 dan Kelompok Putri Masingit

Kota Serang sebesar Rp30.000.000 NTPN: 254CE26UPTB7GMOI tanggal 1 April 2019.

➤ Dinas Pangan Aceh:

No	Nama Kelompok Penerima Bantuan	NTPN	Tanggal	Jumlah
1	KWT Ingin Maju	85FC6ON5EL6ONBVG	19/03/2019	20.000.000
2	KWT Barona	BDAOFON5ULD9JAVG	19/03/2019	1.000.000
3	KWT Sejahtera	32164ON551J2T9VG	19/03/2019	2.000.000
4	KWT Ade Beurata	ABC290N5QJOV6CVG	19/03/2019	2.000.000
5	KWT Seulanga	OB51C0N6OD9E20VG	19/03/2019	10.000.000
JUMLAH				35.000.000,00

➤ Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp5.649.750 pada KWT Bukit Gado-gado Indah.

➤ Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua:

No	Nama Kelompok Penerima	NTPN	Tanggal	Jumlah
1	Kelompok Tani Mekar Jaya	DF3568DTTV7KN360	12/04/2019	3.000.000
2	Kelompok Tani Owakomo	17F9702KAI02ERRK	05/04/2019	1.200.000
3	Kelompok Sesawi Lestari	BB1A5236DNFQ2P81	05/04/2019	30.000.000
4	KWT Cendrawasih	E9A2F02JEJTR6074	11/04/2019	1.100.000
5	KWT Wasa	E9EF702JF6HS	11/04/2019	1.100.000
6	KWT Bedu	5288D02JG2FUST74	12/04/2019	1.100.000
JUMLAH				37.500.000

2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal

Penganekaragaman konsumsi pangan khususnya konsumsi karbohidrat harus didukung oleh penyediaan sumber pangannya. Minat masyarakat untuk mengkonsumsi sumber karbohidrat non beras berkurang manakala ketersediannya kurang dan harganya relatif mahal. Oleh karena itu untuk meningkatkan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras perlu didukung upaya pengadaannya yaitu melalui pengembangan pengolahan pangan lokal.

Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning, dan yang lainnya sudah banyak dikembangkan dengan dijadikan tepung. Ke depan diharapkan aneka tepung ini dapat diolah sebagai pangan pokok mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan berbagai olahan pangan yang dapat disandingkan dengan beras sebagai menu makanan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

Melalui kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L) ini diharapkan dapat lebih memasifkan gerakan diversifikasi pangan, khususnya pangan sumber karbohidrat, dalam rangka mendukung pemantapan ketahanan pangan nasional. Gerakan diversifikasi pangan semakin efektif apabila didukung oleh ketersediaan aneka ragam bahan pangan melalui pengembangan usaha pangan lokal dan perilaku konsumen dalam mengonsumsi aneka ragam pangan.

Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal ini bertujuan untuk:

- mengembangkan pangan pokok sumber karbohidrat dengan berbagai bentuk olahannya yang dapat disandingkan dengan beras/nasi, yang berbahan baku sumber pangan lokal;
- membangun kesadaran masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan pokok selain beras serta sosialisasi dan promosi diversifikasi pangan.

Sasaran dari kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal tahun 2018 adalah dilaksanakan di 15 kabupaten di 13 provinsi yang memiliki potensi pangan lokal berupa sagu, jagung, dan umbi-umbian.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan ini di tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000 sampai dengan 31 Desember 2018 telah di realisasikan sebesar Rp3.000.000.000, dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Grand Total		
	Pagu	Realisasi	%
1816.105 Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00
099426 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU	200.000.000	200.000.000	100,00
119225 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	200.000.000	200.000.000	100,00
189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	400.000.000	400.000.000	100,00
209186 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	400.000.000	400.000.000	100,00
219183 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH	200.000.000	200.000.000	100,00
229164 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	200.000.000	200.000.000	100,00
239220 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	200.000.000	200.000.000	100,00
249020 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	200.000.000	200.000.000	100,00
259022 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA	200.000.000	200.000.000	100,00
299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	200.000.000	200.000.000	100,00

Keterangan	Grand Total		
	Pagu	Realisasi	%
319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	200.000.000	200.000.000	100,00
340161 DINAS KETAHAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	200.000.000	200.000.000	100,00
417679 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	200.000.000	200.000.000	100,00

□ Sampai dengan tanggal 18 April 2019, terdapat sisa dana tahun 2018, yang baru disetorkan di tahun 2019 yaitu sebesar Rp30.000.000 terdiri atas setoran dari:

1. Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yaitu Kelompok Tunas Jaya sebesar Rp10.000.000 dengan NTPN: 337922JD8SCL99DG tanggal 19 Februari 2019.
2. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp20.000.000 dengan NTPN: 6E8D86B2SUVHSV30 tanggal 18 Januari 2019 Rp7.175.000 dan NTPN: 0F5273H615VHPORG tanggal 11 Maret 2019 Rp2.825.000 dari kelompok Sambar Gading dan NTPN: B6A1673MDCIEUO26 tanggal 14 Januari 2019 Rp10.000.000 dari kelompok Industri Usaha Sentra Banindo.

3) Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar

Pengawasan pangan segar yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan di Pusat dan Daerah dilaksanakan terhadap pangan segar di peredaran maupun pada proses produksi (*On Farm*).

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan ini di tahun 2018 sebesar Rp43.125.000 sampai dengan 31 Desember 2018 telah di realisasikan sebesar Rp42.915.000, yaitu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat yang di pergunakan untuk membeli peralatan untuk mendukung kegiatan tersebut berupa alat pengukur kadar air, alat pemisah patahan dan timbangan.

4. Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

Kegiatan ini di tujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Bantuan Pemerintah ini terdapat di 4 Provinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Bengkulu dan Gorontalo.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan ini di tahun 2018 sebesar Rp75.500.000, Sampai dengan 31 Desember 2018 telah di realisasikan sebesar Rp75.490.000, dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Grand Total		
	Pagu	Realisasi	%
1817.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	75.500.000	75.490.000	99,99
049037 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA	22.500.000	22.500.000	100,00
209186 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	15.000.000	15.000.000	100,00

Keterangan	Grand Total		
	Pagu	Realisasi	%
269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU	23.000.000	22.990.000	99,96
319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	15.000.000	15.000.000	100,00

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Bantuan Pemerintah Tahun 2016-2018 Nomor 6/LHP/XVII/02/2019, di Badan Ketahanan Pangan masih terdapat permasalahan: Bantuan Program Ketahanan Pangan Senilai Rp681.027.783.038,00 Belum Sepenuhnya Dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban. Atas permasalahan tersebut Kementerian Pertanian akan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

- Melakukan pengumpulan dokumentasi pertanggungjawaban Banper 2016-2018 bersama dengan Itjen di 9 provinsi.
- Melakukan pengolahan data Banper 2016-2018
- Melakukan implementasi mekanisme pengintegrasian data secara online melalui aplikasi monev kegiatan prioritas ketahanan pangan (simonev KP).
- Melakukan penyempurnaan aplikasi monev sesuai dengan hasil evaluasi aplikasi monev tahun 2018.
- Mengimplementasikan mekanisme perencanaan, penyaluran, pembayaran, pelaporan, dan pertanggung-jawaban bantuan berdasarkan data yang terintegrasi (online).

B.5 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp869.175.725.907,00 dan Rp688.340.119.480,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp180.835.606.427,00 atau 26,27% dibandingkan per 31 Desember 2017. Kenaikan Belanja Modal disebabkan kenaikan pagu anggaran Belanja Modal yang bersumber dari APBN untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin maupun belanja modal BLU serta pengadaan hewan ternak sapi.

Tabel B.14 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	% Naik (Turun)
Belanja Modal Tanah	90.749.829.810,00	11.171.772.521	712,31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	344.732.964.179,00	268.640.255.931	28,33
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	340.625.543.830,00	344.729.424.507	(1,19)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.922.004.810,00	48.683.524.095	(20,05)
Belanja Modal Lainnya	23.411.132.534,00	6.026.334.695	288,48
Belanja Modal BLU	31.089.223.300,00	9.908.232.004	213,77
Jumlah Bruto	869.530.698.463,00	689.159.543.753,00	26,17
Pengembalian	(354.972.556,00)	(819.424.273,00)	
Jumlah Netto	869.175.725.907,00	688.340.119.480,00	26,27

Tabel B.15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per Eselon I
(dalam Rupiah)

ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN BELANJA	REALISASI NETTO	REALISASI %
Sekretariat Jenderal	59.705.650.000,00	49.841.764.352,00	0,00	49.841.764.352,00	83,48
Inspektorat Jenderal	2.850.890.000,00	2.813.807.591,00	0,00	2.813.807.591,00	98,70
Ditjen Tan. Pangan	43.111.912.000,00	16.960.011.946,00	200,00	16.960.011.746,00	39,34
Ditjen Hortikultura	4.343.160.000,00	2.400.986.600,00	0,00	2.400.986.600,00	55,28
Ditjen Perkebunan	51.274.009.000,00	47.372.862.996,00	0,00	47.372.862.996,00	92,39
Ditjen PKH	169.705.974.000,00	166.709.437.029,00	263.424.720,00	166.446.012.309,00	98,08
Ditjen PSP	10.998.891.000,00	9.450.140.438,00	0,00	9.450.140.438,00	85,92
Badan Litbang	304.862.432.000,00	286.115.371.164,00	86.427.636,00	286.028.943.528,00	93,82
Badan PPSDMP	117.402.084.000,00	114.563.589.219,00	264.000,00	114.563.325.219,00	97,58
Badan Ket. Pangan	3.758.850.000,00	3.697.974.349,00	2.000.000,00	3.695.974.349,00	98,33
Badan Karantina	170.134.322.000,00	169.604.752.779,00	2.856.000,00	169.601.896.779,00	99,69
JUMLAH	938.148.174.000,00	869.530.698.463,00	354.972.556,00	869.175.725.907,00	92,69

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dapat dilihat pada **Lampiran B.13**.

B.5.1 BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp90.746.973.810,00 dan Rp11.171.772.521,00. Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp79.575.201.289,00 atau 712,29% dibandingkan per 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan Belanja Modal Tanah pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan karena satker Balai Veteriner Maros melakukan pembelian sebidang tanah 50.000 M² yang berlokasi di desa Koya Distrik Arbepura kota Jayapura yang akan dijadikan Kantor Loka Veteriner dikota tersebut.
2. Adanya kenaikan Belanja Modal Tanah pada Badan Karantina Pertanian. Hal ini disebabkan oleh Pengadaan Sarana dan Prasarana berupa pembelian Aset Tanah dalam rangka meningkatkan pelayanan tindak karantina.

Tabel B.16 Perbandingan Belanja Modal Tanah
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

Uraian Belanja Modal Tanah	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	%Naik (Turun)
Tanah	64.309.138.730,00	7.872.093.620,00	716,93
Pembebasan Tanah	0,00	371.810.000,00	(100,00)
Pembayaran Honor Tim Tanah	163.600.000,00	11.750.000,00	1.292,34
Pembuatan Sertifikat Tanah	500.350.000,00	120.910.000,00	313,82
Pengukuran dan Pematangan Tanah	25.759.259.000,00	2.708.231.120,00	851,15
Pengukuran Tanah	2.632.080,00	86.977.781,00	(96,97)

Uraian Belanja Modal Tanah	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	%Naik (Turun)
Perjalanan Pengadaan Tanah	14.850.000,00	0,00	~
Jumlah Bruto	90.749.829.810,00	11.171.772.521,00	712,31
Pengembalian	(2.856.000,00)	0,00	
Jumlah Netto	90.746.973.810,00	11.171.772.521,00	712,29

Tabel B.17 Realisasi Belanja Modal Tanah per Eselon I Tahun 2018

ESELON I	REALISASI NETTO (Rp)
DITJEN PERKEBUNAN	2.794.329.870,00
DITJEN PETERNAKAN & KESWAN	36.833.157.000,00
BADAN PPSDMP	2.730.432.700,00
BADAN KARANTINA	48.389.054.240,00
JUMLAH	90.746.973.810,00

B.5.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp344.648.486.343,00 dan Rp268.264.755.931,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp76.383.730.412,00 atau 28,47% dibandingkan per 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan pagu anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
2. Meningkatnya kebutuhan pengadaan peralatan dan mesin untuk mendukung kegiatan.

Tabel B.18 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

Uraian Belanja Modal Peralatan/Mesin	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	Naik (Turun) %
Peralatan dan Mesin	342.781.685.591,00	265.878.720.261,00	28,92
Bahan Baku Peralatan dan Mesin	15.392.500,00	98.571.000,00	(84,38)
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	177.335.000,00	150.410.000,00	17,90
Perencanaan dan Pengawasan	174.950.250,00	58.658.900,00	198,25
Perjalanan	446.113.838,00	90.780.400,00	391,42
Penambahan Nilai	1.137.487.000,00	2.363.115.370,00	(51,86)
Jumlah Bruto	344.732.964.179,00	268.640.255.931,00	28,33
Pengembalian	(84.477.836,00)	(375.500.000,00)	
Jumlah Netto	344.648.486.343,00	268.264.755.931,00	28,47

Realisasi Belanja Bahan Baku Peralatan dan Mesin adalah pengadaan prototipe sparepart Peralatan Mesin pertanian di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.

Tabel B.19 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Eselon I Tahun 2018

ESELON I	REALISASI NETTO (Rp)
SEKRETARIAT JENDERAL	25.720.461.221,00
INSPEKTORAT JENDERAL	1.254.227.891,00
DITJEN TANAMAN PANGAN	12.555.610.441,00
DITJEN HORTIKULTURA	1.757.620.850,00
DITJEN PERKEBUNAN	27.701.987.176,00
DITJEN PETERNAKAN & KESWAN	58.040.931.413,00
DITJEN PRASARANA & SARANA PERTANIAN	9.350.140.438,00
BADAN LITBANG	108.004.532.549,00
BADAN PPSDMP	32.557.330.869,00
BADAN KETAHANAN PANGAN	2.279.039.149,00
BADAN KARANTINA	65.426.604.346,00
JUMLAH	344.648.486.343,00

B.5.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp340.623.329.830,00 dan Rp344.285.500.234,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.662.170.404,00 atau 1,06% dibandingkan per 31 Desember 2017.

Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pembatasan Belanja Modal untuk pengadaan pembangunan gedung kantor.
2. Tidak terealisasinya pembangunan Gedung kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dikarenakan gagal kontrak.

**Tabel B.20 Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)**

Uraian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	%Naik (Turun)
Gedung dan Bangunan	184.083.826.465,00	203.578.510.984,00	(9,58)
Bahan Baku Gedung dan Bangunan	120.247.000,00	39.142.850,00	207,20
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	732.620.400,00	369.936.600,00	98,04
Perencanaan dan Pengawasan	8.964.986.559,00	9.411.640.859,00	(4,75)
Perizinan	32.308.680,00	38.500.000,00	(16,08)
Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama	0,00	194.830.000,00	(100,00)
Perjalanan	1.340.092.176,00	1.309.967.567,00	2,30
Penambahan Nilai	145.351.462.550,00	129.786.895.647,00	11,99
Jumlah Bruto	340.625.543.830,00	344.729.424.507,00	(1,19)
Pengembalian	(2.214.000,00)	(443.924.273,00)	
Jumlah Netto	340.623.329.830,00	344.285.500.234,00	(1,06)

**Tabel B.21 Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan per Eselon I Tahun 2018**

ESELON I	REALISASI NETTO (Rp)
SEKRETARIAT JENDERAL	23.376.388.945,00
INSPEKTORAT JENDERAL	2.100.000,00
DITJEN TANAMAN PANGAN	3.991.018.305,00
DITJEN HORTIKULTURA	291.191.750,00
DITJEN PERKEBUNAN	16.322.774.630,00
DITJEN PETERNAKAN & KESWAN	15.655.600.916,00
BADAN LITBANG	160.563.538.564,00
BADAN PPSDMP	74.881.693.650,00
BADAN KETAHANAN PANGAN	669.095.000,00
BADAN KARANTINA	44.869.928.070,00
JUMLAH	340.623.329.830,00

B.5.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp38.922.004.810,00 dan Rp48.683.524.095,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp9.761.519.285,00 atau 20,05% dibandingkan per 31 Desember 2017.

Hal ini disebabkan antara lain:

- 1) Adanya penurunan pagu anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 2) Pembatasan Belanja Modal untuk pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

**Tabel B.22 Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)**

Uraian Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	%Naik (Turun)
Jalan dan Jembatan	12.849.672.325,00	14.329.830.832,00	(10,33)
Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	18.260.000,00	27.470.000,00	(33,53)
Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	305.512.000,00	396.613.999,00	(22,97)
Perjalanan Jalan dan Jembatan	0,00	22.893.200,00	(100,00)
Irigasi	5.201.443.380,00	9.139.813.097,00	(43,09)
Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	19.000.000,00	0,00	~
Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	103.739.000,00	88.887.000,00	16,71
Jaringan	4.825.420.290,00	13.128.955.820,00	(63,25)
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0,00	6.500.000,00	(100,00)
Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	0,00	107.300.000,00	(100,00)
Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	13.535.665.485,00	7.028.163.900,00	92,59
Penambahan Nilai Irigasi	697.994.000,00	1.670.581.656,00	(58,22)
Penambahan Nilai Jaringan	1.365.298.330,00	2.736.514.591,00	(50,11)
Jumlah Bruto	38.922.004.810,00	48.683.524.095,00	(20,05)

Uraian Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	%Naik (Turun)
Pengembalian	0,00	0,00	
Jumlah Netto	38.922.004.810,00	48.683.524.095,00	(20,05)

**Tabel B.23 Realisasi Belanja Modal
Jalan. Irigasi. Jaringan per Eselon ITahun 2018**

ESELON I	REALISASI NETTO (Rp)
SEKRETARIAT JENDERAL	156.981.825,00
DITJEN TANAMAN PANGAN	410.893.900,00
DITJEN PERKEBUNAN	409.232.320,00
DITJEN PETERNAKAN & KESWAN	8.592.260.000,00
BADAN LITBANG	15.405.667.315,00
BADAN PPSDMP	3.863.807.000,00
BADAN KARANTINA	10.083.162.450,00
JUMLAH	38.922.004.810,00

B.5.5 BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp23.145.707.814,00 dan Rp6.026.334.695,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp17.119.373.119,00 atau 284,08% dibandingkan per 31 Desember 2017.Hal ini disebabkan antara lain:

- 1) Adanya pengadaan aplikasi dibidang pengawasan dari masing-masing Inspektorat lingkup Itjentan dan Rehap Ruang Kerja yang merupakan Aset Tetap Renovasi karena Gedung B tercatat sebagai asset Gedung dan Bangunan pada neraca Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sehingga penambahan dari ruang kerja yang direnovasi ini akan menambah nilai asset Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- 2) Kenaikan signifikan belanja modal lainnya pada Ditjen Peternakan dan Keswan disebabkan oleh:
 - a. Pembelian ternak sapi potong dan perah pada satker Balai Embrio Ternak Cipelang sebesar Rp1.939.600.000terdiri dari sapi potong sebanyak 14 ekor senilai Rp1.357.720.000, sapi perah sebanyak 6 ekor senilai Rp581.880.000,-
 - b. Pembelian ternak sapi potong dan perah pada Balai Inseminasi Buatan Lembang sebesar Rp7.671.547.400terdiri dari sapi potong sebanyak 56 ekor senilai Rp7.108.310.908, sapi perah sebanyak 7 ekor senilai Rp563.236.492,-
 - c. Pembelian ternak sapi pejantan pada balai besar inseminasi singosari sebesar Rp6.565.943.280 sebanyak 58 ekor.
- 3) Adanya peningkatanpaguanggaran belanja modal untuk pengadaan buku perpustakaan yang menunjangliterasi kegiatan pengkajian dan bahan pendukung penulisan karya tulis ilmiah pada Badan Litbang Pertanian.
- 4) Adanya penambahan aplikasi dalam menunjang operasional dan pelayanan pada Badan Karantina Pertanian.

**Tabel B.24 Perbandingan Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)**

Uraian Belanja Modal Lainnya	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	%Naik (Turun)
Belanja Modal Lainnya	16.711.825.034,00	5.903.639.695,00	183,08
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	6.699.307.500,00	122.695.000,00	5360,13
Jumlah Bruto	23.411.132.534,00	6.026.334.695,00	288,48
Pengembalian	(265.424.720,00)	-	
Jumlah Netto	23.145.707.814,00	6.026.334.695,00	284,08

Tabel B.25 Realisasi Belanja Modal Lainnya per Eselon ITahun 2018

ESELON I	REALISASI NETTO (Rp)
SEKRETARIAT JENDERAL	587.932.361,00
INSPEKTORAT JENDERAL	1.557.479.700,00
DITJEN TANAMAN PANGAN	2.489.100,00
DITJEN HORTIKULTURA	352.174.000,00
DITJEN PERKEBUNAN	144.539.000,00
DITJEN PETERNAKAN & KESWAN	16.234.839.680,00
DITJEN PRASARANA & SARANA PERTANIAN	100.000.000,00
BADAN LITBANG	2.055.205.100,00
BADAN PPSDMP	530.061.000,00
BADAN KETAHANAN PANGAN	747.840.200,00
BADAN KARANTINA	833.147.673,00
JUMLAH	23.145.707.814,00

B.5.6 BELANJA MODAL BLU

Realisasi Belanja Modal BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp31.089.223.300,00 dan Rp9.908.232.004,00. Realisasi Belanja Modal BLU per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp21.180.991.296,00 atau 213,77% dibandingkan per 31 Desember 2017, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU sebesar 389 persen kenaikan belanja yang sangat signifikan yang disebabkan oleh pengadaan peralatan dan mesin pada:
 - satker Pusat Veteriner Surabaya sebesar Rp7.567.240.000,00 berupa:

Peralatan dan Mesin BLU	Jumlah
Autoclave	4,808,870,000
Autoclave	599,500,000
Freze Dryer	541,145,000
Automatic liquid	759,000,000

Peralatan dan Mesin BLU	Jumlah
Laminar air flow	809,775,000
Steam sterilizer	48,950,000
Jumlah	7,567,240,000

-Satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Rp3.260.895.400,00 berupa:

Peralatan dan Mesin BLU	Jumlah
PeralatanPerkantoran	309,510,400
Drone	44,990,000
Slide warmer	29,750,000
RakBukuperpustakaan	15,999,500
standing floor ac	46,860,000
preparation washing machine	45,000,000
I-Sperm	45,000,000
Lemari pendingindinter	44,660,000
Mesin pemotong rumput	10,120,000
Timbangan ternak	41,590,000
Gergajitulang	6,250,000
RFID Chip	35,600,000
Sperm analyzer	1,279,845,000
Bus	689,618,000
Kendaraan Roda 2	17,352,500
Traktor	598,750,000
Jumlah	3,260,895,400

- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU sebesar 758,76 persen, kenaikan yang signifikan yang disebabkan oleh pengadaan pada satker Pusat Veteriner Farma sebesar Rp19.370.861.200,00 berupa Kantor Laboratorium yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No.68-70 Surabaya dan satker Balai Inseminasi Buatan Singosari sebesar Rp589.766.700,00.

**Tabel B.26 Perbandingan Belanja Modal BLU
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)**

Uraian Belanja Modal BLU	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	%Naik (Turun)
Peralatan dan Mesin	10.828.135.400,00	2.211.466.372,00	389,64
Gedung dan Bangunan	19.960.627.900,00	2.324.343.075,00	758,76
Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	191.665.000,00	(100,00)
Lainnya	300.460.000,00	5.180.757.557,00	(94,20)
Jumlah Bruto	31.089.223.300,00	9.908.232.004,00	213,77
Pengembalian	0,00	0,00	
Jumlah Netto	31.089.223.300,00	9.908.232.004,00	213,77

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp348.601.261,00 dan Rp6.915.057.587,00 dengan rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut.

Tabel C.1 Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	70.373.605,00	107.160.969,00	(36.787.364,00)
2	Ditjen Tanaman Pangan	46.276.000,00	477.367.800,00	(431.091.800,00)
3	Ditjen Hortikultura	6.018.000,00	252.334.700,00	(246.316.700,00)
4	Ditjen Perkebunan	105.280,00	40.918.618,00	(40.813.338,00)
5	Ditjen Peternakan dan Keswan	179.973.376,00	381.777.200,00	(201.803.824,00)
6	Ditjen PSP	1.626.000,00	5.403.865.400,00	(5.402.239.400,00)
7	Badan PPSDMP	44.229.000,00	241.132.900,00	(196.903.900,00)
8	Badan Ketahanan Pangan	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)
	Total	348.601.261,00	6.915.057.587,00	(6.566.456.326,00)

Saldo Kas di Bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018 tersebut seluruhnya sudah disetor ke rekening Kas Negara sampai dengan 28 April 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.2 Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam Rupiah)

No	Uraian Eselon I	Saldo per 31 Desember 2018	Penyetoran	Saldo
1	Sekretariat Jenderal	70.373.605,00	70.373.605,00	0,00
2	Ditjen Tanaman Pangan	46.276.000,00	46.276.000,00	0,00
3	Ditjen Hortikultura	6.018.000,00	6.018.000,00	0,00
4	Ditjen Perkebunan	105.280,00	105.280,00	0,00
5	Ditjen Peternakan dan Keswan	179.973.376,00	145.441.080	34.532.296,00
6	Ditjen PSP	1.626.000,00	1.626.000,00	0,00
7	Badan PPSDMP	44.229.000,00	44.229.000,00	0,00
8	Badan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
	Total	348.601.261,00	314.068.965,00	34.532.296,00

Penjelasan atas rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada tabel di atas merupakan saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Tahun 2018 seluruhnya sudah dilakukan penyetoran di Tahun 2019, yang dapat dijelaskan pada beberapa eselon I adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal

Posisi Saldo Sekretariat Jenderal pada pos Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp70.373.605.,00, yang berasal dari Saldo Kas di Satker Atani Roma seluruhnya sudah disetor ke kas negara di bulan Januari 2019.

2. Ditjen Tanaman Pangan

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 padaDitjen Tanaman Pangan sejumlahRp46.276.000,00yaitu berasal dari Satker Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Prov.Papua Barat sebesar Rp46.276.000,00. Sisa Kas tersebut telah disetor ke Kas Negara seluruhnya di bulan Januari 2019.

3. Ditjen Hortikultura

Posisi Saldo Ditjen Hortikultura pada pos Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.018.000,00, dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel C.3Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018
Ditjen Hortikultura
(dalam Rupiah)**

KdBaes1	KdSatker	Nama Satker	Nilai
01804	109005	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Jambi	18.000,00
01804	339156	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Papua Barat	6.000.000,00
Grand Total			6.018.000,00

Berdasarkan tabel diatas, seluruh satker tersebut telah menyetorkan ke kas negara di bulan Januari 2019.

4. Ditjen Perkebunan

Posisi Saldo Ditjen Perkebunan pada pos Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018sebesar Rp105.280,00, yaitu pada Satker di Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTT. Sisa Kas tersebut telah disetor ke Kas Negara seluruhnya di bulan Januari 2019.

5. Ditjen Peternakan dan Keswan

Posisi Saldo Ditjen Peternakan dan Keswan pada pos Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp179.973.376,00, dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel C.4Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018
Ditjen Peternakan dan Keswan
(dalam Rupiah)**

KdBaes1	KdSatker	Nama Satker	Nilai
01806	099317	Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Riau	145.441.080,00
01806	239413	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh Indrapuri	34.532.296,00
Grand Total			179.973.376,00

Berdasarkan tabel di atas, untuk Satker Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Riau kode Satker (099317) seluruhnya sudah disetor ke kas negara di bulan Januari 2019, sedangkan untuk satker Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh Indrapuri sebesar Rp34.532.296,00merupakan saldo kas pada tahun sebelumnya yang disebabkan adanya musibah kecurian pada brankas bendahara. Kas yang hilang pada tahun 2017 saat ini

surat rekomendasi penghapusannya sudah diterbitkan oleh BPK-RI dengan nomor : 28/S/1/07/2018 namun Saldo Kas Dibendahara Pengeluaran Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh Indrapuri belum dapat di keluarkan dari neraca karena masih harus menunggu surat rekomendasi dari direktorat Pengelolaan Kas, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

6. Ditjen PSP

Posisi Saldo Ditjen PSP pada pos Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.626.000,00, yang berasal dari Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur kode Satker (249033) dan sudah disetorkan di bulan Januari 2019.

7. Badan PPSDMP

Posisi Saldo Badan PPSDMP pada pos Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 senilai Rp44.229.000,00 merupakan pengembalian sisa dana Kas Di Bendahara Pengeluaran UP yang terdapat pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogordan telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 4 Januari 2019.

Monitoring penyelesaian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 yang dilakukan di Tahun 2019 disajikan pada **Lampiran C.1**.

C.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.400.000,00 dan Rp651.711.457,00 yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di Bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel C.5 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (dalam Rupiah)

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	0,00	0,00	0,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	0,00	0,00	0,00
4	Ditjen Hortikultura	0,00	0,00	0,00
5	Ditjen Perkebunan	0,00	0,00	0,00
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	0,00	0,00	0,00
7	Ditjen PSP	0,00	0,00	0,00
8	Badan Litbang	1.400.000,00	136.905.000,00	(135.505.000,00)
9	Badan PPSDMP	0,00	135.507.458,00	(135.507.458,00)
10	Badan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
11	Badan Karantina	134.136.237,00	379.298.999,00	(245.162.762,00)
	Total	135.536.237,00	651.711.457,00	(516.175.220,00)

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada tabel di atas, merupakan saldo Penerimaan Negara Bukan Pajak, posisi sampai dengan 28 Februari 2019 sudah disetorkan ke Kas Negara yang terdapat pada Eselon I Badan Litbang, dan Badan Karantina adalah sebagai berikut.

1. Badan Litbang Pertanian sebesar Rp1.400.000,00 yakni terdapat di Satker Loka

Penelitian Sapi Potong, Grati Jawa Timur yang merupakan penjualan sapi afkir yang diterima pada tanggal 31 Desember 2018. Dana tersebut sudah di setor ke Kas Negara pada tanggal 15 Januari 2019.

2. Badan Karantina sebesar Rp134.136.237,00 yakni diantaranya merupakan jasa sensor karantina dan sudah di setor ke Kas Negara pada bulan Januari 2019.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 tersebut seluruhnya sudah disetor ke rekening Kas Negara sampai dengan 28 Februari 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.6 Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan
(dalam Rupiah)

No	Uraian Eselon I	Saldo per 31 Desember 2018	Penyetoran	Saldo
1	Badan Litbang	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2	Badan Karantina	134.136.237,00	134.136.237,00	0,00
	Total	135.536.237,00	135.536.237,00	0,00

Monitoring penyelesaian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 yang dilakukan di Tahun 2019 disajikan pada **Lampiran C.2**.

C.3 KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp16.728.092.179,00 dan Rp31.942.760.365,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Perbandingan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I adalah sebagai berikut.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut.

Tabel C.7 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	12.617.533.940,00	28.658.610.767,00
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	2.476.800.247,00	998.142.602,00
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	100.000.000,00	0,00
Kas Lainnya di BLU	1.533.757.992,00	2.286.006.996,00
Jumlah	16.728.092.179,00	31.942.760.365,00

Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.8 Rincian Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	578.654.143,00	144.624.318,00	434.029.825,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	42.388.400,00	(42.388.400,00)
3	Ditjen Tanaman Pangan	11.296.175.396,00	28.550.741.036,00	(17.274.557.640,00)
4	Ditjen Hortikultura	4.352.500,00	561,00	(561,00)

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/Penurunan
5	Ditjen Perkebunan	0,00	0,00	0,00
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	1.633.757.992,00	2.286.006.996,00	(734.945.004,00)
7	Ditjen PSP	7.585,00	0,00	7.585,00
8	Badan Litbang	3.205.922.913,00	901.046.591,00	2.304.876.322,00
9	Badan PPSDMP	9.221.650,00	17.952.463,00	(8.730.813,00)
10	Badan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
11	Badan Karantina	0,00	0,00	0,00
	Total	16.728.092.179,00	31.942.760.365,00	(15.321.708.686,00)

Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel C.9Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I
(dalam Rupiah)

No	Uraian Eselon I	Jenis Transaksi	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Sekretariat Jenderal	- Kas Lainnya dari Hibah Langsung dari Luar Negeri	578.654.143,00	144.624.318,00
2	Inspektorat Jenderal	- Kelebihan Uang Makan bulan Desember 2017	0,00	33.745.900,00
		- Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.642.500,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	- Jasa Giro yang Belum Disetor ke Kas Negara	0,00	9.536,00
		- Saldo Bantuan Pemerintah dari MAK 526 yang tidak digunakan	19.992.000,00	
		- Saldo Dana rekening penampung lainnya yang belum ditransfer ke norek Poktan	11.258.183.396,00	28.550.731.500,00
		- Pengembalian belanja 526 yang belum disetorkan di TA 2018	18.000.000,00	0,00
4	Ditjen Hortikultura	- Jasa Giro yang Belum Disetor ke Kas Negara	4.352.500,00	561,00
5	Ditjen PKH	- Kas Lainnya di BLU	1.533.757.992,00	2.286.006.996,00
		- Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	100.000.000,00	0,00
6	Ditjen PSP	- Jasa Giro yang Belum Disetor ke Kas Negara	7.585,00	0,00
7	Badan Litbang	- Sisa Dana Hibah Langsung	1.898.146.104,00	853.518.284,00
		- Tunjangan Kinerja yang belum di bayarkan	140.398.573,00	0,00
		- Utang Pajak yang belum disetor ke kas negara	0,00	80.809,00
		- Pengembalian Belanja TAYL dan beban listrik bulan Des 2017	0,00	27.409.498,00
		- Dana Kerjasama	1.167.378.236,00	20.038.000,00
8	Badan PPSDMP	-Jasa Giro	0,00	565.813,00
		-Uang makan pegawai yang belum dibayarkan	9.221.650,00	17.386.650,00
			16.728.092.179,00	31.942.760.365,00

Berdasarkan tabel diatas, rincian jenis Kas Lainnya dan Setara Kas ini dapat dijelaskan pada beberapa Eselon I yakni sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp578.654.143,00 yakni merupakan Kas Lainnya dari Hibah Langsung berada pada Satker Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)

yang merupakan sisa dana hibah dari program *Australian Centre for International Agricultural Research* (ACIAR) yang akan digunakan Tahun 2019.

2. Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp11.296.175.396,00 yang berasal dari beberapa Satker sebagai berikut :
 - Dinas Pertaniandan PeternakanProv. Sulawesi Utara sebesar Rp18.000.000,00 berupapengembalian belanja MAK 526 yang belum disetorkan di TA 2018 sampai dengan 28 Februari 2019 sudah disetorkan ke kas negara di bulan Februari 2019;
 - Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp19.992.000,00 merupakan saldo bantuan Pemerintah yang masih ada di kelompok tani yang tidak digunakan,sampai dengan 26April 2019 sudah disetorkan ke kas negara di bulan Maret 2019;
 - Dinas Pertanian Provinsi Maluku sebesar Rp42.930.000,00 merupakan dana bantuan pemerintah yang masih ada di rekening penampung lainnya sampai dengan 28 Februari 2019 sudah disetorkan ke kas negara di bulan Januari 2019;
 - Kantor Pusat Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp11.215.253.396,00merupakan dana bantuan pemerintah yang masih ada di rekening penampung lainnya atas dana tersebut sampai dengan 28 April 2019 sudah disetorkan ke kas negara di bulan Januari dan Februari 2019 sebesar Rp675.028.100,00 dan sisanya sudah ditransfer ke kelompok tani sebesar Rp10.540.225.296,00.
3. Ditjen Hortikultura sebesar Rp4.352.500,00 berasal dari SatkerDinas Pertanian Kabupaten Magelang (018.04.039069.TP)yang merupakan sisa uang dibendahara berupa uang honor yang terlambat ditarik dari rekening per 31 desember 2018, dan pada 6 Januari 2019 telah ditarik dari rekening dan disampaikan ke penerima honor.
4. Ditjen Peternakan dan Keswan sebesar Rp1.633.757.992,00 yang terdiri dari berupa kas pada satker Badan Layanan Umum yang belum menjadi pendapatan satker untuk itu dicatat sebagai kas lainnya di BLU, yaitu pada Pusat Veteriner Farma Rp122.190.401,00 merupakan penerimaan uang muka penjualan vaksin / antigen yang belum terlayani dan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Rp1.411.567.591,00 merupakan dana titipan pada rekening dana kelolaan selain berupa penerimaan yang belum sepenuhnya menjadi penerimaan Satker BBIB singosari dana kelolaan juga digunakan untuk membiayai ongkos kirim produk layanan dan biaya pengepakan barang, atas nilai Kas BLU sebesar Rp1.533.757.992,00nilai tersebut akan digunakan kembali operasional Tahun 2019 serta pada satker Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang sebesar Rp100.000.000,00 yang merupakan kesalahan transfer dari FAO yang sudah disetorkan kembali pada 07 januari 2019

Kas Lainnya di BLU digunakan menampung dana yang sepenuhnya belum mutlak menjadi penerimaan satker BLU diantaranya adalah penerimaan penjualan layanan yang ada pada satker BLU yang pada saat uang diterima oleh satker BLU namun pelanggan belum menerima secara penuh layanan dari satker BLU selainmenampung penerimaan yang belum bisa diakui menjadi penerimaan satker BLU.Dana kelolaan juga digunakan untuk membiayai biaya yang timbul diluar biaya layanan yang terdapat pada Satker BLU pada seperti biaya ongkos kirim dan biaya pengepakan barang pada satker BLU Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dan selisih lebih atas pembayaran vaksin/antigen yang

nantinya akan diperhitungkan dengan pembelian berikutnya pada satker BLU Pusat Veteriner Farma Surabaya.

5. Ditjen PSP sebesar Rp7.585,00 berasal dari SatkerDinas Peternakan Provinsi Sumsel (018.08.119138.TP) yang merupakan jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara.
6. Badan Litbang sebesar Rp3.205.922.913,00 yang dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel C.10Kas Lainnya dan Setara Kas Badan Litbang Pertanian per 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

Satker	31 Desember 2018	Keterangan
PUSLITBANGNAK	649.349.986,00	Sisa Dana Hibah
BPTP DIY	47.148,00	Sisa Dana Hibah
BPTP SUMSEL	23.468.446,00	Sisa Dana Hibah
BPTP RIAU	71.841.270,00	Sisa Dana Hibah
BPTP NTB	90.029,00	Sisa Dana Hibah
BPTP NTT	450.169,00	Sisa Dana Hibah
BPTP KALTIM	80.646.449,00	Sisa Dana Hibah
BPTP JAWA TIMUR	959,00	Sisa Dana Hibah
BPTP ACEH	34.703.695,00	Sisa Dana Hibah
BALITBU SOLOK	39.097.207,00	Rapel Tukin yang belum dibayarkan
BALIT TANAH	1.666.780,00	Sisa Dana Hibah
	83.666.281,00	dana Tukin yang belum dibayarkan
BALIKLIMAT	17.635.085,00	Rapel Tukin yang belum dibayarkan
BB VETERINER	30.117.100,00	dana kerjasama penelitian KP4S
BB PADI	18.000,00	Sisa Dana Hibah
BB BIOGEN	354.908.874,00	Sisa Dana Hibah
	1.137.261.136,00	dana kerjasama penelitian dengan FAO
BALITBANGTAN KANTOR PUSAT	680.954.299,00	Sisa Dana Hibah
Jumlah	3.205.922.913,00	

Berdasarkan tabel diatas, nilai sebesar Rp3.205.922.913,00 sampai dengan 28 Februari 2019 yang sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp140.398.573,00, merupakan dari rapel tunjangan kinerja sedangkan dari sisa dana hibah dan kerjasama sebesar Rp3.065.524.340,00 yang akan digunakan kembali di tahun 2019.

7. Badan PPSDMP sebesar Rp9.221.650,00 yang berasal dari satker Balai Pelatihan Pertanian Jambi yang berasal dari uang makan pegawai Bulan Desember yang masih belum dibayarkan.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini atas penyetoran ke Kas Negara sampai dengan tanggal 28 April 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.11Rincian PenyetoranKas Lainnya dan Setara Kas Kementan
(dalam Rupiah)

No	Uraian Eselon I	Saldo per 31 Des 2018	Penyetoran	Saldo
1	Sekretariat Jenderal	578.654.143,00	0,00	578.654.143,00

No	Uraian Eselon I	Saldo per 31 Des 2018	Penyetoran	Saldo
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	11.296.175.396,00	755.950.100,00	10.540.225.296,00
4	Ditjen Hortikultura	4.352.500,00	4.352.500,00	0,00
5	Ditjen Perkebunan	0,00	0,00	0,00
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	1.633.757.992,00	100.000.000,00	1.533.757.992,00
7	Ditjen PSP	7.585,00	7.585,00	0,00
8	Badan Litbang	3.205.922.913,00	140.398.573,00	3.065.524.340,00
9	Badan PPSDMP	9.221.650,00	9.221.650,00	0,00
10	Badan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
11	Badan Karantina	0,00	0,00	0,00
	Total	16.728.092.179,00	1.009.930.408,00	15.718.161.771,00

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas pada tabel di atas, merupakan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp16.728.092.179,00 yang sudah disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 28 April 2019 sebesar Rp1.009.930.408,00, dan sudah disalurkan atau ditransfer ke rekening kelompok tani sebesar Rp10.540.225.296,00 serta akan digunakan kembali di tahun 2019 sebesar Rp15.718.161.771,00.

Monitoring penyelesaian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 yang dilakukan di Tahun 2019 disajikan pada **Lampiran C.3**.

C.4 KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp90.650.947.758,00 dan Rp98.303.035.727,00 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab Bendahara BLU yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tupoksi masing-masing satuan kerja. Kas ini tidak disetor ke Kas Negara tetapi akan digunakan untuk bulan berikutnya pada Tahun 2018.

Dari saldo tersebut di atas yang sebesar Rp90.650.947.758,00 merupakan saldo milik satker Pusat Veteriner Farma Surabaya dengan Kode Satker (237551) sebesar Rp27.828.607.751,00 dan satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dengan Kode Satker (411956) sebesar Rp62.822.340.007,00 yang merupakan Satker di bawah Eselon I Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan.

Daftar secara rinci nama satker dan Saldo Kas di Bendahara pada BLU per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel C.12 Perbandingan Rincian Kas dan Bank pada BLU
(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/Penurunan
1	Pusat Veteriner Farma	27.828.607.751,00	45.776.015.775,00	(17.947.408.024,00)
2	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	62.822.340.007,00	52.527.019.952,00	10.295.320.055,00
	Total	90.650.947.758,00	98.303.035.727,00	(7.652.087.969,00)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa saldo Kas pada Badan Layanan Umum pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dan Pusat Veteriner Farma Surabaya merupakan rekening

operasional yang berasal dari penerimaan satker BLU yang sudah mutlak menjadi penerimaan satker BLU.

C.5 BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.199.940.494.192,00 dan Rp1.183.182.121,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel C.13 Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I
(dalam Rupiah)

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/Penurunan
1	Badan Litbang	120.000,00	1.008.307.821,00	(1.008.187.821,00)
2	Badan Karantina	127.711.936,00	174.874.300,00	(47.162.364,00)
3	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda belum dilengkapi dokumentasi pertanggungjawaban pada 8 Eselon I:			
	a. Ditjen Tanaman Pangan	1.098.159.451.870,00	0,00	1.098.159.451.870,00
	b. Ditjen Hortikultura	724.315.539.268,00	0,00	724.315.539.268,00
	c. Ditjen Perkebunan	686.446.567.716,00	0,00	686.446.567.716,00
	d. Ditjen Peternakan dan Kewan	476.723.480.222,00	0,00	476.723.480.222,00
	e. Ditjen PSP	3.817.282.965.670,00	0,00	3.817.282.965.670,00
	f. Badan Litbang Pertanian	190.429.185.793,00	0,00	190.429.185.793,00
	g. Badan PPSDMP	41.022.305.634,00	0,00	41.022.305.634,00
	h. Badan Ketahanan Pangan	165.433.166.083,00	0,00	165.433.166.083,00
	Total	7.199.940.494.192,00	1.183.182.121,00	7.198.757.312.071,00

Berdasarkan tabel di atas, belanja di bayar dimuka sebesar Rp7.199.940.494.192,00 terdapat pada Satker Badan Litbang, Badan Karantina dan di 8 Eselon I, dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel C.14 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Satker
(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/Penurunan
1	Balai Penelitian Tanaman Sayur	0,00	499.208.333,00	(499.208.333,00)
2	BPTP Gorontalo	0,00	3.846.154,00	(3.846.154,00)
3	BPTP Jawa Tengah	0,00	358.650.000,00	(358.650.000,00)
4	BPTP Jawa Timur	0,00	39.936.667,00	(39.936.667,00)
5	BPTP Jambi	0,00	31.666.667,00	(31.666.667,00)
6	BPTP NTB	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan
7	BPTP Sumatera Barat	120.000,00	0,00	120.000,00
8	Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang	0,00	2.316.135,00	(2.316.135,00)
9	Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru	1.121.250,00	1.121.000,00	250,00
10	Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang	2.048.610,00	2.048.610,00	0,00
11	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda	4.731.250,00	0,00	4.731.250,00
12	Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
13	Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak	0,00	261.978,00	(261.978,00)
14	Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	4.793.999,00	4.992.170,00	(198.171,00)
15	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon	0,00	23.754.000,00	(23.754.000,00)
16	Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)
17	Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
18	Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar	4.138.708,00	14.426.397,00	(10.287.689,00)
19	Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram	10.018.080,00	12.900.142,00	(2.882.062,00)
20	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar	5.610.500,00	0,00	5.610.500,00
21	Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	0,00	9.475.000,00	(9.475.000,00)
22	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende	20.249.539,00	18.578.868,00	1.670.671,00
23	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika	50.000.000,00	55.000.000,00	(5.000.000,00)
24	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda belum dilengkapi dokumentasi pertanggungjawaban pada 8 Eselon I	7.199.812.662.256,00	0,00	7.199.812.662.256,00
	Total	7.199.940.494.192,00	1.183.182.121,00	7.198.757.312.071,00

Rincian Belanja Dibayar Dimuka pada tabel di atas, merupakan hak yang masih harus diterima atas barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya sampai dengan per 31 Desember 2018, yang terdapat pada dua Eselon I sebagai berikut.

1. Badan Litbang sebesar Rp120.000,00 yang berasal dari satker BPTP Sumatera Barat merupakan sewa PO BOX alamat pos selama 1(satu) tahun 2019.
2. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp127.711.936,00 yang merupakan sewa gedung dan bangunan di 11satker lingkup Eselon I Badan Karantina Pertanian.
3. Belanja Dibayar Dimuka sebesarRp7.199.940.494.192,00 merupakan belanjaBarang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang belum dilengkapi dokumentasi pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam PMK 168/PMK.05/2019 dan Permentan Nomor 46 Tahun 2017 Kementerian Pertanian berkomitmen melengkapi dokumentasi pertanggungjawaban sampai dengan 31 Desember 2019. Rincian Belanja Dibayar Dimukadapat dilihatpada **Lampiran C.4 dan C.5**.

C.6PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2018 dan31 Desember 2017masing-masing adalah sebesar Rp39.400.000,00 dan Rp798.368.000,00.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel C.15 Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I
(dalam Rupiah)

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/Penurunan
1	Ditjen Peternakan dan Keswan	0,00	70.164.000,00	(70.164.000,00)
2	Badan Litbang Pertanian	0,00	693.700.000,00	(693.700.000,00)
3	Badan PPSDMP	39.400.000,00	34.504.000,00	4.896.000,00
	Total	39.400.000,00	798.368.000,00	(758.968.000,00)

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut.

Tabel C.16 Perbandingan Rincian Jenis Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Pendapatan Penjualan susu bulan Desember 2016	39.400.000,00	34.504.000,00
2	Penjualan Hasil Peternakan dan Pertanian	0,00	58.066.500,00
3	Pendapatan Sewa	0,00	693.700.000,00
4	Hasil Pengujian specimen yang belum tertagih	0,00	12.097.500,00
	Jumlah	39.400.000,00	798.368.000,00

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada tabel di atas, merupakan hak atas pelayanan yang diberikan namun belum terima tagihannya sampai dengan 31 Desember 2018, yang terdapat pada satu Eselon I yakni Badan PPSDMP sebesar Rp39.400.000,00 yang merupakan pendapatan penjualan susu Bulan Desember 2018 pada satker Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Jawa Timur, posisi sampai dengan 28 April 2019 atas penerimaan penjualan susu bulan Desember 2018 sudah dilakukan penyetoran di bulan Januari 2019.

C.7 PIUTANG BUKAN PAJAK

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp101.880.036.002,00 dan Rp1.308.819.636,00, rincian Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian per Eselon I per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Tabel C.17 Perbandingan Piutang PNB per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Sekretariat Jenderal	386.836.306,00	216.008.396,00
2	Inspektorat Jenderal	29.439.600,00	0,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	43.739.206.731,00	40.634.979,00
4	Ditjen Hortikultura	773.700.463,00	12.000.000,00
5	Ditjen Perkebunan	185.471.000,00	21.533.400,00
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	54.924.163.174,00	348.457.031,00

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017
7	Ditjen PSP	218.648.160,00	0,00
8	Badan Litbang	1.278.354.035,00	641.660.830,00
9	Badan PSDMP	147.695.000,00	0,00
10	Badan Ketahanan Pangan	39.025.000,00	0,00
11	Badan Karantina	157.496.533,00	28.525.000,00
	Total	101.880.036.002,00	1.308.819.636,00

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNBPN pada Kementerian Pertanian antara lain berasal dari piutang bukan pajak yakni.

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp386.836.306,00 yang berasal dari satker Biro Umum dan Pengadaan berupa sewa pendapatan sewa ruangan/kantin/auditorium sebesar Rp384.467.824,00 atas temuan BPK Tahun 2016 yang sampai dengan Tahun 2018 belum dibayar dan iuran PVT sebesar Rp2.250.000,00 yang sudah jatuh tempo namun belum dilunasi, dan Satker Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian sebesar Rp118.482,00.
2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp29.439.600,00 merupakan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional sebesar Rp21.080.000,00 dan sisa belanja perjalanan dinas pegawai yang dikembalikan pada tahun 2019 sebesar Rp8.359.600,00.
3. Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp43.739.206.731,00 yang berasal dari beberapa satker yakni:
 - a) Piutang PNBPN pada Satker Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp32.693.706.559,00 merupakan bank garansi dari kegiatan MAK 526 barang di Direktorat PPHTP
 - b) Piutang PNBPN pada Dinas TPH Kab. Lampung Selatan sebesar Rp129.517.900,00 berasal dari temuan itjen
 - c) Piutang PNBPN pada Dinas TPH Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp21.691.091,00 merupakan hasil LHP BPK Tahun 2016 atas PNBPN berupa biaya sertifikasi, baik pengujian lapangan maupun pengujian laboratorium yang belum disetor ke Kas Negara.
 - d) Piutang PNBPN pada Dinas TPH Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp4.255.294.080,00 merupakan temuan Itjen dari kegiatan jagung dan kedelai.
 - e) Piutang PNBPN pada Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp844.878.638,00 merupakan denda keterlambatan
 - f) Piutang PNBPN pada Dinas TPH Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp5.770.273.463,00
 - g) Piutang PNBPN pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara sebesar Rp11.925.000,00 merupakan denda keterlambatan
 - h) Piutang PNBPN pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Gorontalo sebesar Rp11.920.000,00 merupakan temuan itjen
4. Ditjen Hortikultura sebesar Rp773.700.463,00 yang berasal dari beberapa satker, disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel C.18 Piutang Bukan Pajak dari Satker Ditjen Hortikultura
per 31 Desember 2018**

KDBAES1	KDSATKER	Nama Satker	Nilai (Rp)
01804	029047	Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Bandung	31.021.716
01804	029059	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Ciamis	53.386.680
01804	029073	Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Majalengka	2.748.460
01804	029160	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat	11.678.375
01804	032055	Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Temanggung	8.735.920
01804	039069	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Magelang	11.960.000
01804	059059	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kab. Malang	21.126.123
01804	059066	Dinas Pertanian Kab. Probolinggo	87.550.357
01804	099043	Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Kampar	4.071.519
01804	100637	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab. Merangin	14.806.680
01804	129113	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Lampung	28.648.800
01804	179104	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	8.365.869
01804	179221	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kab. Minahasa	18.238.967
01804	199126	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan	248.660.125
01804	219000	Dinas Pertanian Prov. Maluku	8.572.850
01804	249159	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.488.636
01804	289034	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	18.169.909
01804	299005	Dinas Pertanian Dan Peternakan Prov. Banten	35.875.000
01804	319089	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Gorontalo	26.604.473
01804	339156	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Papua Barat	6.680.000
01804	339226	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Papua Barat	12.190.500
01804	625875	Ditjen Hortikultura	112.119.504
Grand Total			773.700.463,00

- Ditjen Perkebunan sebesar Rp185.471.000,00 yang berasal dari satker Dinas Perkebunan Prov Jawa Timur merupakan terdapat pencairan jaminan pembayaran setelah tanggal 31 Desember 2018, yang berasal dari adanya wanprestasi pekerjaan Pengadaan Benih Kopi Arabika Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Bondowoso sesuai kontrak Nomor: 027/6927/121.4/2018 Tanggal 18 Desember 2018.
- Ditjen Peternakan dan Keswan sebesar Rp54.924.163.174,00 yang berasal dari tiga satker yakni.

**Tabel C.19 Piutang Bukan Pajak dari Satker Ditjen Peternakan dan Keswan
per 31 Desember 2018**

KDBAES1	KDSATKER	Nama Satker	Nilai (Rp)
01806	119133	Dinas Peternakan Prov. Sumsel	899.336.654,00
01806	189134	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Prov. Sulteng	51.997.720,00
01806	237856	Balai Penyidikan & Pengujian Veteriner Regional Ili Bandar Lampung	133.072.500,00

KDBAES1	KDSATKER	Nama Satker	Nilai (Rp)
01806	238776	Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan	50.165.850,00
01806	238823	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturaden	8.428.000,00
01806	239015	Balai Besar Veteriner Maros, Sulsel	20.605.072.000,00
01806	239022	Balai Besar Veteriner Denpasar	66.635.000,00
01806	239441	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna & Ayam Sembawa	33.063.023.400,00
01806	239455	Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba, & Itik Pelaihari	693.250,00
01806	319091	Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Gorontalo	1.253.800,00
01806	340143	Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sulbar	35.000.000,00
01806	567275	Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan Bogor	9.485.000,00
Grand Total			54.924.163.174,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan rincian piutang bukan pajak pada Eselon I Ditjen Peternakan dan Keswan yang signifikan sebesar Rp33.063.023.400,00 pada Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa terdiri atas Rp20.507.926.800 berupa klaim Garansi Bank Atas Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Unit Center Kerbau Oleh PT. Indo Dhea Internusa yang sudah di setorkan ke kas negara dengan nomor NTPN CAADE6IL1I9RUA50 tanggal 22 Januari 2019, Rp12.347.520.000 berupa Klaim Garansi Bank atas Pekerjaan Pengadaan Sapi Indukan Impor Oleh P.T Berdikari (Persero) yang sudah disetorkan kekas negara dengan nomor NTPN F723E2P69611NNPO tanggal 11 Januari 2019 dan Rp207.576.600 berupa Klaim Garansi Bank Atas Pekerjaan Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi Oleh PT. Pinangsiang Putra Cemerlang yang sudah disetorkan ke kas negara dengan nomor NTPN F723E2P69611NNPO tanggal 15 Januari 2019.

- Ditjen PSP sebesar Rp218.648.160,00 berada pada Kantor Pusat Ditjen PSP yang merupakan temuan BPK-RI berupa asuransi dimana terdapat 42 polis di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang dalam daftar tagihan *by-name-by-address* mendaftarkan setiap petani dan lahan yang sama minimal dua kali sehingga atas masing-masing peserta dibayarkan dua kali oleh Ditjen PSP. Luas lahan yang dibayarkan oleh Ditjen PSP atas ke-42 polis tersebut yaitu 3023,98 ha, sementara SK Kepala Dinas Pertanian TPH dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan menetapkan dalam SK Nomor 521/1429/433.119/2018 tanggal 16 November 2018 bahwa peserta AOTP dalam 42 polis tersebut hanya atas lahan seluas 1.506 ha. Sehingga terjadi kelebihan bayar atas 1.518,39 ha sebesar Rp218.647.606,08
- Badan Litbang Pertanian sebesar Rp1.278.354.035,00 yang berasal pada sepuluh satker sesuai rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel C.20 Piutang Bukan Pajak dari Satker Badan Litbang Pertanian per 31 Desember 2018

KDBAES1	KDSATKER	Nama Satker	Nilai (Rp)
01809	237238	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi	160.859.600,00
01809	237291	Pusat Penelitian & Pengembangan Perkebunan	16.033.045,00
01809	411971	Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kantor Pusat Jakarta	92.772.880,00
01809	450831	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Banten	1.252.000,00

KDBAES1	KDSATKER	Nama Satker	Nilai (Rp)
01809	500941	Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Bogor	274.316.432,00
01809	567296	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Jabar	60.000.000,00
01809	567364	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Jatim	23.029.900,00
01809	567460	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Riau	462.468.510,00
01809	567495	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sumsel	34.334.515,00
01809	567702	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sultra	1.100.000,00
01809	567783	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. NTT	1.076.400,00
01809	634022	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sulut	31.141.465,00
01809	634036	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sulsel	46.718.000,00
01809	634040	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. NTB	73.251.288,00
Grand Total			1.278.354.035,00

Berdasarkan tabel di atas, piutang PNBPN berasal dari Satker BB Padi, Puslitbangbun, dan BPTP Jabar yang terdiri dari kekurangan penyeteroran hasil samping kegiatan, kekurangan hasil penjualan benih dan dana kerjasama PNBPN 2018 yang belum disetorkan ke kas negara. Selain itu, piutang lainnya berasal dari tujuh satker Badan Litbang Pertanian yaitu Badan Litbang Pertanian Kantor Pusat Jakarta, BPTP Banten, BPTP Sumsel, BPTP Sultra, BPTP NTT, BPTP Sulut, BPTP NTB yang merupakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

9. Badan PPSDMP sebesar Rp147.695.000,00 yang berasal dari beberapa satker yakni :

- PPMKP Ciawi sebesar Rp29.950.000,00 merupakan jasa penggunaan sarana dan prasarana (sewa asrama) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 7 – 9 Desember 2018 yang baru diselesaikan pembayarannya pada tanggal 11 Februari 2019 dengan NTPN F82B021DHRS1629U;
 - Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa Sulsel sebesar Rp91.650.000,00 merupakan koreksi BPK RI karena adanya kurang catat atas piutang dari Bank Garansi atas pengadaan Gedung dan Bangunan;
 - Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Kupang, NTT sebesar Rp26.095.000,00 merupakan koreksi BPK RI karena adanya kurang catat atas piutang dari Bank Garansi atas pengadaan Gedung dan Bangunan.

10. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp39.025.000,00 berada pada satker Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Seram Bagian Barat merupakan denda keterlambatan atas pekerjaan pemerintah.

11. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp157.496.533,00 yang berasal dari beberapa satker yakni :

Tabel C.21 Piutang Bukan Pajak dari Satker Badan Karantina Pertanian per 31 Desember 2018

KDBAES1	KDSATKER	Nama Satker	Nilai (Rp)
01812	237352	Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang	232.020
01812	237483	Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	1.386.380
01812	237788	Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang	8.835.240

KDBAES1	KDSATKER	Nama Satker	Nilai (Rp)
01812	237860	Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung	23.360.296
01812	237910	Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin	1.186.000
01812	237966	Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan	15.045
01812	237970	Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan	331.510
01812	238052	Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	13.500
01812	393012	Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam	105.869.110
01812	499440	Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado	64.100
01812	499480	Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon	8.319.355
01812	499500	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju	31.240
01812	528860	Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta	1.085.310
01812	567322	Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	1.736.076
01812	567371	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan	386.000
01812	567805	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak	5.200
01812	649270	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende	304.590
01812	649441	Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate	4.335.561
Grand Total			157.496.533,00

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Piutang PNB di TA 2018 Badan Karantina Pertanian merupakan pendapatan jasa karantina pertanian akun 425331 sebanyak 969 sertifikasi jasa karantina / kwitansi dari 18 satker dan telah disetor ke kas negara di bulan Januari 2019 sesuai SSBP

Berdasarkan mutasi piutang PNB pada per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2017	Rp1.308.819.636,00
Mutasi tambah:	
- Penambahan Piutang Bukan Pajak	Rp101.320.769.696,00
Mutasi kurang:	
- Pelunasan Tahun 2018	<u>Rp749.553.330,00</u>
Saldo per 31 Desember 2018	<u>Rp101.880.036.002,00</u>

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Total mutasi tambah atas penambahan nilai Piutang Bukan Pajak sampai dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp101.320.769.696,00 berasal dari beberapa Eselon I yakni.

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp192.577.910,00 yang terdiri dari Rp192.459.428,00 pada Biro Umum dan Pengadaan dan Rp118.482,00 pada Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.
2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp29.439.600,00
3. Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp43.708.612.752,00 yang terdiri dari :

129075	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Lampung Selatan	Rp129.517.900,00
159107	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Kalsel	Rp4.255.294.080,00
189132	Dinas Pertanian Daerah Prov. Sulteng	Rp844.878.638,00

199125	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Sulsel	Rp5.770.273.463,00
238251	Ditjen Tanaman Pangan	Rp32.684.803.671,00
289104	Dinas Pertanian Prov. Malut	Rp11.925.000,00
319063	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kab. Gorontalo	Rp11.920.000,00
Jumlah		<u>Rp43.708.612.752,00</u>
4. Ditjen Hortikultura sebesar Rp773.700.463,00 yang terdiri dari :		
029047	Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Bandung	Rp31.021.716,00
029059	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Ciamis	Rp53.386.680,00
029073	Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Majalengka	Rp2.748.460,00
029160	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat	Rp11.678.375,00
032055	Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Temanggung	Rp8.735.920,00
039069	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Magelang	Rp11.960.000,00
059059	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kab. Malang	Rp21.126.123,00
059066	Dinas Pertanian Kab. Probolinggo	Rp87.550.357,00
099043	Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Kampar	Rp4.071.519,00
100637	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab. Merangin	Rp14.806.680,00
129113	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Lampung	Rp28.648.800,00
179104	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	Rp8.365.869,00
179221	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kab. Minahasa	Rp18.238.967,00
199126	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan	Rp248.660.125,00
219000	Dinas Pertanian Prov. Maluku	Rp8.572.850,00
249159	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp2.488.636,00
289034	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	Rp18.169.909,00
299005	Dinas Pertanian Dan Peternakan Prov. Banten	Rp35.875.000,00
319089	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Gorontalo	Rp26.604.473,00
339156	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Papua Barat	Rp6.680.000,00
339226	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Papua Barat	Rp12.190.500,00
625875	Ditjen Hortikultura	Rp112.119.504,00
Jumlah		<u>Rp773.700.463,00</u>

5. Ditjen Perkebunan sebesar Rp185.471.000,00 yang berasal dari Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

6. Ditjen Peternakan dan Keswan sebesar Rp54.688.361.143,00 yang terdiri dari.

119133	Dinas Peternakan Prov. Sumsel	Rp899.336.654,00
189134	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Prov. Sulteng	Rp51.997.720,00
237856	Balai Penyidikan & Pengujian Veteriner Regional Ili Bandar Lampung	Rp133.072.500,00
238776	Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan	Rp50.165.850,00
239015	Balai Besar Veteriner Maros, Sulsel	Rp20.444.332.969,00
239441	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna & Ayam Sembawa	Rp33.063.023.400,00
239455	Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba, & Itik Pelaihari	Rp693.250,00
319091	Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Gorontalo	Rp1.253.800,00
340143	Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sulbar	Rp35.000.000,00
567275	Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan Bogor	Rp9.485.000,00
Jumlah		Rp54.688.361.143,00

7. Ditjen PSP sebesar Rp218.648.160,00 berada pada Satker Kantor Pusat Ditjen PSP.

8. Badan Litbang Pertanian sebesar Rp1.179.742.135,00 yang tersebar pada beberapa Satker sebagai berikut.

237238	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi	Rp160.859.600,00
237291	Pusat Penelitian & Pengembangan Perkebunan	Rp16.033.045,00
411971	Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kantor Pusat Jakarta	Rp92.772.880,00
500941	Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Bogor	Rp274.316.432,00
567460	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Riau	Rp462.468.510,00
567495	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sumsel	Rp34.334.515,00
567783	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. NTT	Rp1.076.400,00
634022	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sulut	Rp31.141.465,00
634036	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sulsel	Rp33.488.000,00
634040	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. NTB	Rp73.251.288,00
Jumlah		Rp1.179.742.135,00

9. Badan PPSDMP sebesar Rp147.695.000,00 yang tersebar pada beberapa Satker sebagai berikut.

237200	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian (Ppmkp) Ciawi	Rp29.950.000,00
238069	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa Sulsel	Rp91.650.000,00
412101	Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Kupang, NTT	Rp26.095.000,00
Jumlah		Rp147.695.000,00

10. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp39.025.000,00 yang berasal dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab.Seram Bagian Barat.

11. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp157.496.533,00 yang tersebar pada beberapa Satker sebagai berikut.

237352	Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang	Rp232.020,00
237483	Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	Rp1.386.380,00
237788	Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang	Rp8.835.240,00

237860	Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung	Rp23.360.296,00
237910	Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin	Rp1.186.000,00
237966	Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan	Rp15.045,00
237970	Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan	Rp331.510,00
238052	Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	Rp13.500,00
393012	Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam	Rp105.869.110,00
499440	Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado	Rp64.100,00
499480	Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon	Rp8.319.355,00
499500	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju	Rp31.240,00
528860	Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta	Rp1.085.310,00
567322	Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	Rp1.736.076,00
567371	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan	Rp386.000,00
567805	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak	Rp5.200,00
649270	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende	Rp304.590,00
649441	Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate	Rp4.335.561,00
Jumlah		<u>Rp157.496.533,00</u>

Total mutasi kurang sebesar Rp749.553.330,00 berasal dari beberapa Eselon I yakni.

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp21.750.000,00 merupakan pelunasan di tahun 2018 pada Satker Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
2. Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp10.041.000,00 merupakan pelunasan di tahun 2018 pada Satker 109083 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Bungo Rp6.020.000,00 dan Satker 239071 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. NTB Rp4.021.000,00.
3. Ditjen Hortikultura sebesar Rp12.000.000,00 pelunasan di tahun 2018 yang berasal dari Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara
4. Ditjen Perkebunan sebesar Rp21.533.400,00 pelunasan di tahun 2018 yang berasal dari Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT.
5. Ditjen Peternakan dan Keswan sebesar Rp112.655.000,00 merupakan pelunasan di Tahun 2018 pada Satker 238823 Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturaden Rp35.588.000,00 dan Satker 239022 Balai Besar Veteriner Denpasar sebesar Rp77.067.000,00
6. Badan Litbang Pertanian sebesar Rp543.048.930,00 merupakan pelunasan di Tahun 2018 pada beberapa Satker sebagai berikut.

450831	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Banten	Rp8.090.000,00
567296	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Jabar	Rp58.300.000,00
567364	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Jatim	Rp446.166.430,00
567563	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Kalbar	Rp7.705.000,00
567673	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sulteng	Rp1.750.000,00
567702	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sultra	Rp4.107.500,00
633996	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Bengkulu	Rp16.930.000,00
Jumlah		<u>Rp543.048.930,00</u>

7. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp28.525.000,00 yang berasal dari Satker Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian.

C.8 BAGIANLANCARTAGIHANTUNTUTANPERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp24.227.611.824,00 dan Rp25.046.109.301,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel C.21 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I
(dalam Rupiah)

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Sekretariat Jenderal	2.126.877.984,00	558.753.951,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	5.280.000,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	5.775.500.693,00	3.820.101.594,00
4	Ditjen Hortikultura	7.708.293.895,00	7.102.483.558,00
5	Ditjen Perkebunan	4.465.124.870,00	5.186.234.771,00
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	574.994.408,00	1.931.793.545,00
7	Ditjen PSP	994.801.750,00	0,00
8	Badan Litbang	2.479.581.553,00	3.598.571.650,00
9	Badan PSDMP	22.050.000,00	2.395.350.000,00
10	Badan Ketahanan Pangan	74.517.671,00	383.033.350,00
11	Badan Karantina	5.869.000,00	64.506.882,00
	Total	24.227.611.824,00	25.046.109.301,00

Tabel C.22 Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Bagian Lancar TP	4.339.722.353,00	8.592.282.790,00
Bagian Lancar TGR	19.887.889.471,00	16.453.826.511,00
Jumlah	24.227.611.824,00	25.046.109.301,00

Sedangkan rekapitulasi mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2017	Rp25.046.109.301,00
Mutasi Tambah	
- TP/TGR	Rp7.676.674.148,00
Jumlah Penambahan	Rp32.722.783.449,00

Mutasi Kurang

- Setoran TP/TGR	Rp8.495.171.625,00
Jumlah Pengurangan	Rp8.495.171.625,00
Saldo per 31 Desember 2018	Rp24.227.611.824,00

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Total mutasi tambah sebesar Rp7.676.674.148,00 berasal dari beberapa Eselon I sebagai berikut.

Sekretariat Jenderal	Rp1.776.869.155,00
Ditjen Tanaman Pangan	Rp2.178.393.975,00
Ditjen Hortikultura	Rp1.893.731.863,00
Ditjen Perkebunan	Rp268.818.268,00
Ditjen Peternakan dan Keswan	Rp50.331.021,00
Ditjen PSP	Rp994.801.750,00
Badan Litbang Pertanian	Rp433.341.445,00
Badan Ketahanan Pangan	Rp74.517.671,00
Badan Karantina Pertanian	Rp5.869.000,00
Jumlah	<u>Rp7.676.674.148,00</u>

Dengan rincian sebagai berikut:

1) Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.776.869.155,00 yang terdiri dari.

418329	Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi	Rp61.442.500,00
451956	Biro Umum &Pengadaan	Rp1.715.426.655,00
	Jumlah	<u>Rp1.776.869.155,00</u>

2) Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp2.178.393.975,00 yang terdiri dari.

079124	Dinas Pertanian Prov. Sumut	Rp2.164.492.500,00
319088	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Prov. Gorontalo	Rp13.901.475,00
	Jumlah	<u>Rp2.178.393.975,00</u>

3) Ditjen Hortikultura sebesar Rp1.893.731.863,00 yang terdiri dari.

Tabel C.23Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 pada Satker Ditjen Hortikultura

Kode Satker	Nama Satker	Nilai(Rp)
029036	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Cianjur	41.742.515,00
029047	Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Bandung	4.813.666,00
029073	Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Majalengka	31.988.360,00
029160	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat	505.310.333,00
039069	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan	20.745.750,00

Kode Satker	Nama Satker	Nilai(Rp)
	Kab. Magelang	
055932	Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro	60.120.915,00
059059	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kab. Malang	280.834.024,00
059066	Dinas Pertanian Kab. Probolinggo	304.811.645,00
089131	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat	7.535.000,00
099043	Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Kampar	35.726.400,00
129113	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Lampung	98.156.880,00
179104	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	13.240.000,00
179221	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kab. Minahasa	170.174.000,00
189224	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Keswan Kab. Donggala	500,00
209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	11.695.125,00
249159	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	34.100.750,00
319002	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Prov. Gorontalo	450.000,00
339226	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Papua Barat	272.286.000,00
Jumlah		1.893.731.863,00

4) Ditjen Perkebunan sebesar Rp268.818.268,00 yang terdiri dari:

299347	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Prov. Banten	Rp61.423.535,00
319090	Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Gorontalo	Rp14.762.959,00
341001	Dinas Perkebunan Prov. Sulbar	Rp192.631.774,00
Jumlah		Rp268.818.268,00

5) Ditjen Peternakan dan Keswan sebesar Rp50.331.021,00 yang terdiri dari:

239455	Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba, & Itik Pelaihari	Rp29.843.804,00
319091	Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Gorontalo	Rp20.487.217,00
Jumlah		Rp50.331.021,00

6) Ditjen PSP sebesar Rp994.801.750,00 yang berasal dari Satker Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah.

7) Badan Litbang Pertanian sebesar Rp433.341.445,00 yang terdiri dari:

Tabel C.24 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 pada Satker Badan Litbang Pertanian

Kode Satker	Nama Satker	Nilai (Rp)
237217	Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang	22.580.745,00
237238	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi	88.779.400,00
237242	Balai Besar Penelitian & Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor	34.257.600,00
237291	Pusat Penelitian & Pengembangan Perkebunan	25.853.789,00
238027	Balai Penelitian Tanaman Palma, Manado	99.839.902,00

Kode Satker	Nama Satker	Nilai (Rp)
450856	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Gorontalo	70.739.355,00
567737	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Maluku	47.281.997,00
567830	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Papua	36.617.356,00
633982	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Bali	890.000,00
648716	Balai Penelitian Tanaman Jeruk & Buah Subtropika Malang	6.501.301,00
Jumlah		433.341.445,00

8) Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp74.517.671,00 yang berasal dari Satker Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab.Seram Bagian Barat.

9) Badan Karantina Pertanian sebesar Rp5.869.000,00 yang berasal dari Satker Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang.

Total mutasi kurang sebesar Rp8.495.171.625,00 berasal dari beberapa Eselon I yaitu:

Sekretariat Jenderal	Rp208.745.122,00
Inspektorat Jenderal	Rp5.280.000,00
Ditjen Tanaman Pangan	Rp222.994.876,00
Ditjen Hortikultura	Rp1.287.921.526,00
Ditjen Perkebunan	Rp989.928.169,00
Ditjen Peternakan dan Keswan	Rp1.407.130.158,00
Badan Litbang Pertanian	Rp1.552.331.542,00
Badan PPSDMP	Rp2.373.300.000,00
Badan Ketahanan Pangan	Rp383.033.350,00
Badan Karantina Pertanian	Rp64.506.882,00
Jumlah	Rp8.495.171.625,00

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp208.745.122,00 merupakan pelunasan TP/TGR yang terdiri dari :

411925	Pusat Data & Sistem Informasi Pertanian	Rp61.443.522,00
451949	Biro Keuangan & Perlengkapan	Rp147.301.600,00
Jumlah		Rp208.745.122,00

2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp5.280.000,00 merupakan pelunasan TP/TGR

3. Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp222.994.876,00 yang merupakan pelunasan TP/TGR terdiri dari.

129075	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Lampung Selatan	Rp129.517.900,00
238251	Ditjen Tanaman Pangan	Rp75.606.976,00
299336	Dinas Pertanian Dan Peternakan Prov. Banten	Rp3.000.000,00
319063	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kab. Gorontalo	Rp14.870.000,00
Jumlah		Rp222.994.876,00

4. Ditjen Hortikultura sebesar Rp1.287.921.526,00 merupakan pelunasan TGR yang terdiri dari:

Tabel C.25 Pelunasan TGR pada Satker Ditjen Hortikultura per 31 Desember 2018

Kode Satker	Nama Satker	Nilai (Rp)
029055	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tasikmalaya	196.686.364,00
029059	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Ciamis	78.386.680,00
049040	Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kab. Sleman	18.566.600,00
069077	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Aceh	32.391.880,00
100637	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab. Merangin	44.798.562,00
109005	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Jambi	12.218.850,00
129000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Lampung	145.347.431,00
139126	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	26.832.650,00
149000	Dinas Pertanian Dan Peternakan Prov. Kalteng	31.089.897,00
149115	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	106.858.210,00
199126	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan	6.110.125,00
209065	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prov. Sultra	4.200.000,00
219000	Dinas Pertanian Prov. Maluku	52.956.550,00
229049	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Tabanan	120.783.950,00
269000	Dinas Pertanian Prov. Bengkulu	11.153.159,00
289034	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	18.169.910,00
299005	Dinas Pertanian Dan Peternakan Prov. Banten	47.558.636,00
299381	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Banten	23.330.700,00
319089	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Gorontalo	28.104.473,00
335134	Dinas Pertanian Dan Peternakan Kota Sorong	17.548.000,00
339156	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Papua Barat	17.680.000,00
419021	Dinas Pertanian Kabupaten Maros	20.620.350,00
625875	Ditjen Hortikultura	226.528.549,00
Jumlah		1.287.921.526,00

5. Ditjen Perkebunan sebesar Rp989.928.169,00 merupakan pelunasan TGR yang terdiri dari:

Tabel C. 26 Pelunasan TGR pada Satker Ditjen Perkebunan per 31 Desember 2018

Kode Satker	Nama Satker	Nilai (Rp)
099316	Dinas Perkebunan Prov. Riau	23.210.000,00
129072	Dinas Perkebunan Prov. Lampung	20.000.000,00
129114	Dinas Perkebunan Prov. Lampung	10.612.800,00
169066	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	4.659.000,00
169114	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	22.769.000,00
189096	Dinas Perkebunan Kab. Toli-Toli	27.841.827,00
209053	Dinas Pertanian Kab. Konawe	185.693.574,00

Kode Satker	Nama Satker	Nilai (Rp)
209109	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prov. Sultra	194.135.731,00
239128	Dinas Perkebunan Prov. NTB	3.300.000,00
259099	Dinas Perkebunan Dan Peternakan Prov. Papua	152.375.000,00
269111	Dinas Perkebunan Prov. Bengkulu	48.212.600,00
289105	Dinas Pertanian Prov. Maluku	59.280.000,00
299045	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kab. Pandeglang	49.152.000,00
299352	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Lebak	14.323.535,00
340217	Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Mamuju	174.363.102,00
Jumlah		Rp989.928.169,00

6. Ditjen Peternakan dan Keswan sebesar Rp1.407.130.158,00 merupakan pelunasan TGR yang terdiri dari:

Tabel C.27 Pelunasan TGR pada Satker Ditjen Peternakan dan Keswan per 31 Desember 2018

Kode Satker	Nama Satker	Nilai (Rp)
029162	Dinas Peternakan Prov. Jabar	40.634.015,00
069135	Dinas Kesehatan Hewan & Peternakan Prov. Aceh	5.000.000,00
089133	Dinas Peternakan Prov. Sumbar	30.285.000,00
099317	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Prov. Riau	5.875.000,00
119133	Dinas Peternakan Prov. Sumsel	899.336.654,00
129115	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Prov. Lampung	4.104.240,00
179106	Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sulut	38.899.050,00
189134	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Prov. Sulteng	51.997.720,00
209110	Dinas Pertanian Prov. Sultra	17.162.884,00
237551	Pusat Veterinaria Farma Surabaya	3.669.475,00
238776	Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan	208.509.070,00
239129	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Prov. NTB	3.275.000,00
239434	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mangatas	40.539.100,00
249161	Dinas Peternakan Prov. NTT	13.707.950,00
299383	Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Banten	3.000.000,00
340143	Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sulbar	41.135.000,00
Jumlah		1.407.130.158,00

7. Badan Litbang Pertanian sebesar Rp1.552.331.542,00 merupakan pelunasan TGR terdiri:

Tabel C.28 Pelunasan TGR pada Satker Badan Litbang Pertanian per 31 Desember 2018

Kode Satker	Nama Satker	Nilai (Rp)
025227	Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hortikultura	22.250.000,00
237380	Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Jakenan Pati, Prov. Jateng	26.089.708,00
237572	Balai Penelitian Tanaman Pemanis & Serat Malang	13.553.100,00
238080	Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros	40.148.977,00

Kode Satker	Nama Satker	Nilai (Rp)
411971	Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kantor Pusat Jakarta	92.772.880,00
412013	Pusat Penelitian & Pengembangan Peternakan Bogor	24.204.600,00
450831	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Banten	24.083.342,00
567296	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Jabar	16.387.684,00
567318	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Jateng	1.500.000,00
567364	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Jatim	294.101.046,00
567428	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sumut	33.470.000,00
567449	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sumbar	4.757.612,00
567495	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sumsel	37.271.216,00
567517	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Lampung	28.750.000,00
567563	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Kalbar	129.057.196,00
567627	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Kaltim	26.043.000,00
567673	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sulteng	79.919.481,00
567702	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sultra	168.286.250,00
633975	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Diy	58.080.400,00
633996	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Bengkulu	25.625.000,00
634015	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Kalsel	119.960.798,00
634022	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sulut	33.741.465,00
634036	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sulsel	157.026.499,00
634040	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. NTB	83.251.288,00
648669	Balai Besar Penelitian & Pengembangan Pascapanen Pertanian Bogor	12.000.000,00
Jumlah		1.552.331.542,00

8. Badan PPSDMP sebesar Rp2.373.300.000,00 merupakan pelunasan TGR pada Satker Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Maluku Utara
9. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp383.033.350,00 merupakan pelunasan TGR terdiri dari :
- | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 079318 | Badan Ketahanan Pangan Prov. Sumut | 82.640.000,00 |
| 089266 | Badan Ketahanan Pangan Prov. Sumbar | 3.424.000,00 |
| 219223 | Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kab. Buru Selatan | 264.483.050,00 |
| 219245 | Badan Ketahanan Pangan Prov. Maluku | 32.486.300,00 |
| Jumlah | | <u>Rp383.033.350,00</u> |
10. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp64.506.882,00 merupakan pelunasan TGR terdiri dari :
- | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 412141 | Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh | 2.499.000,00 |
| 499436 | Balai Uji Terap Teknik Dan Metode Karantina Pertanian Bekasi | 281.150,00 |
| 528860 | Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta | 61.726.732,00 |
| Jumlah | | <u>Rp64.506.882,00</u> |

C.9 PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM

Nilai Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp508.804.231,00 dan Rp2.355.596.525,00. Dari saldo sebesar Rp508.804.231,00 merupakan saldo milik satker Pusat Veteriner Farma Surabaya dengan Kode Satker (237551) sebesar Rp5.341.000,00 dan satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dengan Kode Satker (411956) sebesar Rp503.463.231,00 yang merupakan Satker di bawah Eselon I Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan.

Saldo piutang pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebesar Rp503.463.231,00 terdiri atas piutang tahun 2016 senilai Rp3.870.000,00, tahun 2017 senilai Rp293.148.231,00 dan tahun 2018 senilai Rp206.445.000,00. Umur piutang tahun 2016 dan 2017 mencapai 13 - 26 bulan dan telah dilakukan maksimal 12 kali penagihan.

C.10 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG LANCAR

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp20.195.157.639,00 dan Rp20.435.540.754,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.29 Rincian Penyisihan Piutang Lancar
(dalam Rupiah)

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang Bukan Pajak			
1	Sekretariat Jenderal	303.596.515,00	1.080.042,00
2	Inspektorat Jenderal	147.198,00	0,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	259.271.786,00	1.048.950,00
4	Ditjen Hortikultura	253.353.520,00	60.000,00
5	Ditjen Perkebunan	927.355,00	107.667,00
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	1.378.725.459,00	74.881.750,00
7	Ditjen PSP	1.093.241,00	0,00
8	Badan Litbang	209.800.929,00	235.460.488,00
9	Badan PSDMP	738.475,00	0,00
10	Badan Ketahanan Pangan	195.125,00	0,00
11	Badan Karantina	787.484,00	142.625,00
Jumlah		2.408.637.087,00	312.781.522,00
Bagian Lancar TP/TGR			
1	Sekretariat Jenderal	1.994.661.489,00	252.167.557,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	26.400,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	3.621.830.656,00	3.820.101.594,00
4	Ditjen Hortikultura	5.562.646.817,00	5.630.679.516,00
5	Ditjen Perkebunan	4.370.892.887,00	4.822.831.943,00
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	538.796.404,00	1.652.970.121,00
7	Ditjen PSP	4.974.008,00	0,00

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017
8	Badan Litbang	1.667.722.337,00	1.506.404.328,00
9	Badan PSDMP	22.050.000,00	2.395.350.000,00
10	Badan Ketahanan Pangan	372.588,00	30.127.255,00
11	Badan Karantina	29.345,00	322.535,00
Jumlah		17.783.976.531,00	20.110.981.249,00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU			
1	Ditjen Peternakan dan Keswan	2.544.021,00	11.777.983,00
Jumlah		2.544.021,00	11.777.983,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		20.195.157.639,00	20.435.540.754,00

Rincian tersebut atas Penyisihan Piutang Bukan Pajak disajikan secara lengkap pada **Lampiran C.6**.

Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebagai berikut.

Tabel C.30 Rincian Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR
(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	Nilai Piutang	Nilai Penyisihan
1	Sekretariat Jenderal	2.126.877.984,00	1.994.661.489,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	5.775.500.693,00	3.621.830.656,00
4	Ditjen Hortikultura	7.708.293.895,00	5.562.646.817,00
5	Ditjen Perkebunan	4.465.124.870,00	4.370.892.887,00
6	Ditjen PKH	574.994.408,00	538.796.404,00
7	Ditjen PSP	994.801.750,00	4.974.008,00
8	Badan Litbang	2.479.581.553,00	1.667.722.337,00
9	Badan PPSDMP	22.050.000,00	22.050.000,00
10	Badan Ket.Pangan	74.517.671,00	372.588,00
11	Badan Karantina Pertanian	5.869.000,00	29.345,00
Total		24.227.611.824,00	17.783.976.531,00

Rincian tersebut atas Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR disajikan secara lengkap pada **Lampiran C.7**.

Tabel C.31 Pembagian Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	60.428.457.456	0,50%	302.142.291
Kurang Lancar	61.100.000	10%	6.110.000

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Diragukan	137.128.710	50%	68.564.356
Macet	2.031.820.440	100%	2.031.820.440
Belum disisihkan	39.221.529.396	-	0
Jumlah (A)	101.880.036.002		2.408.637.087
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	5.738.262.048	0,50%	28.691.314
Kurang Lancar	403.046.513	10%	40.304.653
Diragukan	707.934.925	50%	353.967.464
Macet	17.360.099.666	100%	17.360.099.666
Keliru Penghitungan penyisihan	18.268.672		913.434
Jumlah (B)	24.227.611.824		17.783.976.531
Piutang dari Kegiatan BLU			
Lancar	508.804.231	0,50%	2.544.021
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah (C)	508.804.231		2.544.021
TOTAL (A+B+C)	126.616.452.057		20.195.157.639

C.11 PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp889.356.431.578,00 dan Rp553.130.416.941,00.

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini disajikan perbandingan rincian persediaan per tanggal 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel C.32 Rincian Persediaan per Eselon I per tanggal 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Sekretariat Jenderal	1.440.483.905,00	1.486.800.311,00
2	Inspektorat Jenderal	326.731.230,00	308.803.122,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	3.907.487.078,00	8.050.919.658,00
4	Ditjen Hortikultura	2.494.947.102,00	3.092.432.599,00
5	Ditjen Perkebunan	14.350.545.446,00	36.973.900,00
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	174.314.618.842,00	103.206.591.643,00
7	Ditjen PSP	540.091.075.980,00	319.049.317.619,00
8	Badan Litbang	124.272.264.264,00	91.955.118.015,00

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017
9	Badan PSDMP	979.211.071,00	1.221.998.964,00
10	Badan Ketahanan Pangan	548.000,00	31.779.300,00
11	Badan Karantina	27.178.518.660,00	24.689.681.810,00
	Total	889.356.431.578,00	553.130.416.941,00

Berdasarkan tabel C.32 Nilai persediaan pada Ditjen PSP antara lain berupa Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp540.091.075.980,00 yang masih dititipkan di Gudang Penyedia karena dalam dokumen pengadaannya belum menyebutkan masyarakat penerimanya. Nilai Persediaan Diserahkan Kepada Masyarakat pada Badan Litbang antara lain berupa persediaan Taman Teknologi Pertanian senilai Rp52.897.222.114,00 yang masih dalam proses pembangunan fisik maupun proses penyelesaian hibah ke Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 33. Persediaan Taman Teknologi Pertanian
(dalam Rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	Mutasi		Koreksi	Saldo Akhir
		Tambah	Kurang		
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	31,296,584,740.00	16,177,251,093.00	14,306,762,994.00	630,705,750.00	33,797,778,589.00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	3,568,362,100.00	383,220,000.00	440,085,000.00	-	3,511,497,100.00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	10,551,550,475.00	7,254,379,246.00	7,095,541,796.00	-	10,710,387,925.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	6,011,365,250.00	3,129,164,000.00	3,805,715,000.00	630,705,750.00	4,704,108,500.00
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	75,000,000.00	-	-	-	75,000,000.00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	98,450,000.00	19,250,000.00	19,250,000.00	-	98,450,000.00
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	2,219,736,000.00	264,256,050.00	2,483,992,050.00	-	-
Jumlah	53,821,048,565.00	27,227,520,389.00	28,151,346,840.00	-	52,897,222,114.00

Rincian jenis persediaan pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.34 Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Uraian Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Barang Konsumsi	36.272.404.768,00	31.991.558.254,00
Bahan untuk Pemeliharaan	277.407.098,00	378.553.188,00
Suku Cadang	6.232.407.948,00	7.278.650.098,00
Pita Cukai, Materai dan Leges	1.200.000,00	2.280.000,00

Uraian Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	34.185.060.589,00	31.542.686.740,00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	25.644.189.800,00	4.137.236.100,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	571.224.681.136,00	329.013.221.884,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	4.773.604.900,00	6.080.861.650,00
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	260.974.000,00	75.000.000,00
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	79.381.500,00	0,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	31.842.128.525,00	1.218.286.210,00
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	41.539.182.498,00	3.940.624.938,00
Bahan Baku	85.738.829.113,00	90.329.156.768,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	1.248.000,00
Persediaan Lainnya	51.284.979.703,00	47.141.053.111,00
Jumlah	889.356.431.578,00	553.130.416.941,00

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini disajikan penjelasan per akun atas barang persediaan sebagai berikut.

- Persediaan berupa barang konsumsi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp36.272.404.768,00 dan Rp31.991.558.254,00. Mutasi Persediaan berupa barang konsumsi sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2017	Rp31.991.558.254,00
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	Rp4.930.000,00
Hasil Opname Fisik Kurang	Rp60.087.796,00
Koreksi Penyesuaian Persediaan	Rp3.028.062.127,00
Koreksi Tambah	Rp46.500.747,00
Pembelian	Rp191.398.075.505,00
Perolehan Lainnya	Rp703.120.039,00
Reklas Masuk	Rp36.720.882,00
Transfer Masuk	Rp2.273.871.829,00
Total Mutasi Tambah	Rp197.551.368.925,00
Mutasi kurang:	
Barang Rusak	(Rp198.853,00)
Barang Usang	(Rp947.468.697,00)
Hasil Opname Fisik Lebih	(Rp3.278.269.330,00)
Koreksi Kurang	(Rp354.397.283,00)
Pemakaian	(Rp186.386.541.415,00)
Penghapusan Lainnya	(Rp27.810.000,00)
Reklas Keluar	(Rp1.965.004,00)
Transfer Keluar	(Rp2.273.871.829,00)

Total Mutasi Kurang.....	(Rp193.270.522.411,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp36.272.404.768,00
2. Persediaan berupa Bahan untuk Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing – masing sebesar Rp277.407.098,00 dan Rp378.553.188,00. Mutasi Persediaan berupa Bahan untuk Pemeliharaan adalah sebagai berikut:	
Saldo per 31 Desember 2017	Rp378.553.188,00
Mutasi tambah:	
Koreksi Penyesuaian Persediaan	Rp25.636.056,00
Pembelian	Rp5.676.815.831,00
Perolehan Lainnya	Rp20.781.000,00
Total Mutasi Tambah	Rp5.723.232.887,00
Mutasi kurang:	
Pemakaian	(Rp5.729.893.177,00)
Penghapusan Lainnya	(Rp93.867.500,00)
Reklas Keluar	(Rp618.300,00)
Total Mutasi Kurang	(Rp5.824.378.977,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp277.407.098,00
3. Persediaan berupa Suku Cadang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.232.407.948,00 dan Rp7.278.650.098,00. Mutasi Persediaan berupa Suku Cadang adalah sebagai berikut.	
Saldo per 31 Desember 2017	Rp7.278.650.098,00
Mutasi tambah:	
Koreksi Penyesuaian Persediaan	Rp190.881.416,00
Pembelian	Rp25.113.769.950,00
Perolehan Lainnya	Rp1.261.668.800,00
Total Mutasi Tambah	Rp26.566.320.166,00
Mutasi kurang:	
Pemakaian	(Rp27.574.660.816,00)
Penghapusan Lainnya	(Rp37.901.500,00)
Total Mutasi Kurang	(Rp27.612.562.316,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp6.232.407.948,00
4. Persediaan berupa Pita Cukai, Materai, dan Leges per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.200.000,00 dan Rp2.280.000,00. Mutasi Persediaan berupa Pita Cukai, Materai, dan Leges sebagai berikut.	
Saldo per 31 Desember 2017.....	Rp2.280.000,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp48.647.000,00
Total Mutasi Tambah.....	Rp48.647.000,00
Mutasi kurang:	
Pemakaian	(Rp49.117.000,00)

Koreksi Penyesuaian Persediaan	(Rp610.000,00)
Total Mutasi Kurang.....	(Rp49.727.000,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp1.200.000,00
5. Persediaan berupa Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp34.185.060.589,00 dan Rp31.542.686.740,00. Mutasi Persediaan berupa Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut.	
Saldo per 31 Desember 2017.....	Rp31.542.686.740,00
Mutasi tambah:	
Koreksi Tambah	Rp106.593.500,00
Pembelian	Rp118.486.689.208,00
Perolehan Lainnya	Rp141.180.000,00
Reklas Masuk	Rp13.754.445.852,00
Transfer Masuk	Rp141.180.000,00
Selisih Saldo awal di BPTP Jambi	Rp630.705.750,00
Total Mutasi Tambah	Rp133.260.794.310,00
Mutasi kurang:	
Koreksi Kurang	(Rp106.593.500,00)
Koreksi Penyesuaian Persediaan	(Rp3.809.171.000,00)
Penyerahan kepada Masyarakat	(Rp121.101.551.109,00)
Reklas Keluar	(Rp5.263.509.852,00)
Transfer Keluar	(Rp141.180.000,00)
Penyerahan kepada Masyarakat atau Pemda Tugas Pembantuan	(Rp196.415.000,00)
Total Mutasi Kurang	(Rp130.618.420.461,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp34.185.060.589,00
6. Persediaan berupa Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp25.644.189.800,00 dan Rp4.137.236.100,00. Mutasi Persediaan berupa Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut.	
Saldo per 31 Desember 2017	Rp4.137.236.100,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp1.501.751.853.866,00
Koreksi Tambah	Rp6.400.000,00
Perolehan Lainnya	Rp969.682.500,00
Reklas Masuk	Rp291.211.204.700,00
Transfer Masuk	Rp486.257.000,00
Total Mutasi Tambah	Rp1.794.425.398.066,00
Mutasi kurang:	
Barang Rusak	(Rp253.805.500,00)
Koreksi Kurang	(Rp283.957.500,00)
Koreksi Penyesuaian Persediaan	(Rp151.447.095.045,00)
Penyerahan kepada Masyarakat	(Rp1.620.447.329.321,00)

Transfer Keluar	(Rp486.257.000,00)
Total Mutasi Kurang	(Rp1.772.918.444.366,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp25.644.189.800,00

7. Persediaan berupa Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp571.224.681.136,00 dan Rp329.013.221.884,00. Mutasi Persediaan berupa Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2017	Rp329.013.221.884,00
Mutasi tambah:	
Hibah (Masuk)	Rp9.735.000,00
Koreksi Penyesuaian Persediaan	Rp1.771.712.661,00
Pembelian	Rp5.319.483.313.036,00
Perolehan Lainnya	Rp138.750.000,00
Transfer Masuk	Rp138.750.000,00
Total Mutasi Tambah	Rp5.321.542.260.697,00
Mutasi kurang:	
Penghapusan Lainnya	(Rp119.999.500,00)
Penyerahan kepada Masyarakat	(Rp5.078.087.309.266,00)
Transfer Keluar	(Rp138.750.000,00)
Penyerahan kepada Masyarakat atau Pemda Tugas Pembantuan	(Rp984.742.679,00)
Total Mutasi Kurang	(Rp5.079.330.801.445,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp571.224.681.136,00

8. Persediaan berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.773.604.900,00 dan Rp6.080.861.650,00. Mutasi Persediaan berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2017	Rp6.080.861.650,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp1.215.147.000,00
Koreksi Tambah	Rp213.499.000,00
Reklas Masuk	Rp2.329.110.000,00
Total Mutasi Tambah	Rp3.757.756.000,00
Mutasi kurang:	
Koreksi Kurang	(Rp213.499.000,00)
Koreksi Penyesuaian Persediaan	(Rp44.961.000,00)
Penyerahan kepada Masyarakat	(Rp1.938.657.000,00)
Reklas Keluar	(Rp2.237.190.000,00)
Selisih Saldo awal di BPTP Jambi	(Rp630.705.750,00)
Total Mutasi Kurang	(Rp5.065.012.750,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp4.773.604.900,00

9. Persediaan berupa Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp260.974.000,00 dan Rp75.000.000,00. Mutasi Persediaan berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2017	Rp75.000.000,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp536.392.817.387,00
Koreksi Penyesuaian Persediaan	Rp4.173.971.948,00
Total Mutasi Tambah	Rp540.566.789.335,00
Mutasi kurang:	
Penyerahan kepada Masyarakat	(Rp540.380.815.335,00)
Total Mutasi Kurang	(Rp540.380.815.335,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp260.974.000,00

10. Persediaan berupa Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp79.381.500,00 dan Rp0,00. Mutasi Persediaan berupa Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2017	Rp0,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp363.706.976.026,00
Total Mutasi Tambah	Rp363.706.976.026,00
Mutasi kurang:	
Barang Rusak	(Rp873.972.000,00)
Penghapusan Lainnya	(Rp150.131.800,00)
Penyerahan kepada Masyarakat	(Rp362.603.490.726,00)
Total Mutasi Kurang	(Rp363.627.594.526,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp79.381.500,00

11. Persediaan berupa Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp31.842.128.525,00 dan Rp1.218.286.210,00. Mutasi Persediaan berupa Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2017	Rp1.218.286.210,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp1.552.789.586.423,00
Perolehan Lainnya	Rp513.535.000,00
Reklas Masuk	Rp43.490.024.300,00
Transfer Masuk	Rp104.950.000,00
Hasil Opname Fisik Kurang	Rp181.952.587,00
Koreksi Penyesuaian Persediaan	Rp5.395.696.569,00
Total Mutasi Tambah	Rp1.602.475.744.879,00
Mutasi kurang:	
Penghapusan Lainnya	(Rp36.000.000,00)

Penyerahan kepada Masyarakat	(Rp1.571.691.702.564,00)
Reklas Keluar	(Rp19.250.000,00)
Transfer Keluar	(Rp104.950.000,00)
Total Mutasi Kurang	(Rp1.571.851.902.564,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp31.842.128.525,00
12. Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp41.539.182.498,00 dan Rp3.940.624.938,00. Mutasi Persediaan berupa Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses sebagai berikut.	
Saldo per 31 Desember 2017	Rp3.940.624.938,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp230.837.788.860,00
Total Mutasi Tambah	Rp230.837.788.860,00
Mutasi kurang:	
Reklas Keluar	(Rp193.239.231.300,00)
Total Mutasi Kurang	(Rp193.239.231.300,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp41.539.182.498,00
13. Persediaan berupa Bahan Baku per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp85.738.829.113,00 dan Rp90.329.156.768,00. Mutasi Persediaan berupa Bahan Baku sebagai berikut	
Saldo per 31 Desember 2017	Rp90.329.156.768,00
Mutasi tambah:	
Hasil Opname Fisik Kurang	Rp1.407.567.649,00
Koreksi Penyesuaian Persediaan	Rp26.485.548.514,00
Koreksi Tambah	Rp3.859.718.255,00
Pembelian	Rp156.372.831.776,00
Perolehan Lainnya	Rp101.433.847.531,00
Saldo Awal	Rp188.717.125,00
Transfer Masuk	Rp358.040.000,00
Total Mutasi Tambah	Rp290.106.270.850,00
Mutasi kurang:	
Barang Rusak	(Rp1.988.491.170,00)
Barang Usang	(Rp349.559.800,00)
Hasil Opname Fisik Lebih	(Rp2.449.241.247,00)
Hibah Keluar	(Rp65.500.000,00)
Koreksi Kurang	(Rp3.621.535.532,00)
Pemakaian	(Rp278.837.815.174,00)
Penghapusan Lainnya	(Rp6.993.314.000,00)
Reklas Keluar	(Rp33.101.582,00)
Transfer Keluar	(Rp358.040.000,00)
Total Mutasi Kurang	(Rp294.696.598.505,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp85.738.829.113,00

14. Persediaan berupa Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.248.000,00. Mutasi Persediaan berupa Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2017	Rp1.248.000,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp4.880.000,00
Total Mutasi Tambah	Rp4.880.000,00
Mutasi kurang:	
Koreksi Kurang	(Rp1.248.000,00)
Koreksi Penyesuaian Persediaan	(Rp4.880.000,00)
Total Mutasi Kurang	(Rp6.128.000,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp0,00

15. Persediaan berupa Persediaan Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp51.284.979.703,00 dan Rp47.141.053.111,00. Mutasi Persediaan berupa Persediaan Lainnya sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2017	Rp47.141.053.111
Mutasi tambah:	
Hasil Opname Fisik Kurang	Rp1.460.704.650,00
Koreksi Penyesuaian Persediaan	Rp6.335.303.908,00
Koreksi Tambah	Rp20.250.000,00
Pembelian	Rp38.647.477.934,00
Perolehan Lainnya	Rp35.494.632.209,00
Reklas Masuk	Rp8.000.000,00
Saldo Awal	Rp585.823.500,00
Transfer Masuk	Rp154.385.800,00
Total Mutasi Tambah	Rp82.706.578.001,00
Mutasi kurang:	
Barang Rusak	(Rp2.081.250,00)
Barang Usang	(Rp507.001.000,00)
Hasil Opname Fisik Lebih	(Rp2.367.280.600,00)
Hibah Keluar	(Rp2.253.675.000,00)
Koreksi Kurang	(Rp20.250.000,00)
Pemakaian	(Rp63.123.973.059,00)
Penghapusan Lainnya	(Rp9.880.672.700,00)
Reklas Keluar	(Rp253.332.000,00)
Transfer Keluar	(Rp154.385.800,00)
Total Mutasi Kurang	(Rp78.562.651.409,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp51.284.979.703,00

Nilai persediaan tersebut belum termasuk benih tanaman perkebunan hasil kegiatan swakelola tahun 2018 yang masih dalam proses sertifikasi. Kementerian Pertanian belum dapat melakukan penilaian atas persediaan benih tanaman perkebunan tersebut karena Kebijakan Akuntansi Persediaan belum dilengkapi dengan sistem akuntansi yang mengatur rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari identifikasi transaksi keuangan yang akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyajian nilai

persediaan benih/bibit/hewan, penjurnalan baik di buku jurnal maupun buku besar, sampai penyajiannya dalam laporan keuangan. Adapun rincian benih perkebunan tersebut sebagai berikut.

Tabel 35. Persediaan Benih Tanaman Perkebunan

No.	Komoditas	Benih Siap Tanam yang belum disertifikasi di TA 2018 (batang)
1.	Kopi	1,379,010
2.	Kakao	2,191,200
3.	Karet	266,500
4.	Kelapa	172,000
	Jumlah	4,008,710

Informasi Lainnya atas Persediaan 526

Persediaan MAK 526 dapat dilakukan penelusuran terhadap mutasi penambahan dan pengurangan terhadap neraca persediaan. Rincian mutasi persediaan MAK 526 per eselon I atas pencatatan persediaan pada Kementerian Pertanian sampai dengan per 31 Desember 2018 dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel C.36 Rincian Mutasi Persediaan MAK 526 per Eselon I atas Pencatatan Persediaan (dalam Rupiah)

No	Eselon 1	Saldo Awal	Mutasi s.d. per 31 Desember 2018		Saldo Per 31 Desember 2018
			Penambahan	Pengurang	
1	Ditjen Tanaman Pangan	0,00	3.826.880.300.463,00	3.826.880.300.463,00	0,00
2	Ditjen Hortikultura	573.874.000,00	877.124.907.362,00	877.372.703.662,00	326.077.700,00
3	Ditjen Perkebunan	0,00	714.580.246.237,00	700.314.661.006,00	14.265.585.231,00
4	Ditjen Peternakan dan Keswan	2.217.278.938,00	891.800.659.966,00	819.263.867.278,00	74.754.071.626,00
5	Ditjen Prasarana Sarana Pertanian	319.049.317.619,00	3.427.600.452.269,00	3.206.558.693.908,00	540.091.075.980,00
6	Badan Litbang	54.167.446.965,00	208.752.348.475,00	182.818.403.029,00	80.101.392.411,00
7	Badan PPSDMP	0,00	41.162.177.634,00	41.151.177.634,00	11.000.000,00
8	Badan Ketahanan Pangan	0,00	2.627.501.600,00	2.627.501.600,00	0,00
	Total	376.007.917.522,00	9.990.528.594.006,00	9.656.987.308.580,00	709.549.202.948,00

Rincian total dalam disajikan pada **Lampiran C.8**.

PIUTANG JANGKA PANJANG

C.12 TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp9.199.782.860,00 dan Rp927.024.746,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tabel C.37 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I (dalam Rupiah)

No.	Eselon I	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Inspektorat Jenderal	0,00	4.590.000,00
2	Ditjen Tanaman Pangan	9.042.914.825,00	905.869.746,00
3	Ditjen Hortikultura	131.775.535,00	0,00
4	Badan Litbang	25.092.500,00	16.565.000,00
	Jumlah	9.199.782.860,00	927.024.746,00

Sedangkan mutasi (TP/TGR) pada 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2017	Rp927.024.746,00
Mutasi tambah:	
Temuan TP/TGR	Rp8.917.679.282,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan/Setoran TP/TGR	<u>(Rp644.921.168,00)</u>
Saldo per 31 Desember 2018	<u>Rp9.199.782.860,00</u>

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel C.38 Mutasi Tambah TP/TGR pada Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, dan Balitbangtan

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
1		Ditjen Tanaman Pangan	
	119129	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Sumatera Selatan	151.900.000,00
	129112	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Lampung	8.331.546.860,00
	139265	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kab. Sanggau	263.164.387,00
	289104	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	14.200.000,00
2		Ditjen Hortikultura	
	055932	Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro	42.943.510,00
	179221	Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kab. Minahasa	88.832.025,00
3		Balitbangtan	

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
	237238	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi	4.359.500,00
	567830	BPTP Papua	20.733.000,00
Jumlah			8.917.679.282,00

Tabel C.39 Mutasi Kurang TP/TGR (pelunasan/setoran) pada Itjen, Ditjen TP, dan Balitbangtan

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
1	Inspektorat Jenderal		
	238247	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	4.590.000,00
2	Ditjen Tanaman Pangan		
	029159	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	391.763.750,00
	189132	Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	39.017.100,00
	229099	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bali	28.993.718,00
	239126	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	11.991.600,00
	249158	Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	151.500.000,00
	319171	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Pohnuato	500.000,00
3	Balitbangtan		
	648669	Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pascapanen Pertanian	16.565.000,00

C.13. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA PANJANG

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp132.861.669,00 dan Rp77.866.372,00. Penyisihan piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang perhitungan.

Tabel C.40 Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Jangka Panjang
31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

Wilayah		Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Ditjen Tanaman Pangan					
119129	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Sumatera Selatan	Lancar	151.900.000,00	0,50%	759.500,00
129112	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Lampung	Lancar	8.331.546.860,00	0,50%	41.657.734,00
139265	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kab. Sanggau	Lancar	263.164.387,00	0,50%	1.315.822,00
189132	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	Lancar	61.982.000,00	0,50%	309.910,00
239126	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Lancar	12.734.828,00	0,50%	63.674,00
249158	Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara	Lancar	134.287.500,00	0,50%	671.438,00

Wilayah		Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
	Timur				
289104	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	Macet	14.200.000,00	100%	14.200.000,00
319171	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Pohuwatu	Macet	73.099.250,00	100%	73.099.250,00
Ditjen Hortikultura					
055932	Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro	Lancar	42.943.510,00	0,50%	214.718,00
179221	Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kab. Minahasa	Lancar	88.832.025,00	0,50%	444.160,00
Balitbangtan					
237238	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi	Lancar	4.359.500,00	0,50%	21.798,00
567830	BPTP Papua	Lancar	20.733.000,00	0,50%	103.665,00
Jumlah			9.199.782.860,00		132.861.669,00

ASET TETAP

Nilai Aset Tetap Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah masing-masing sebesar Rp17.186.620.379.679,00 dan Rp17.550.822.759.671,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 41. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	31-Desember-2018	31-Desember-2017	Kenaikan/ Penurunan
1	Tanah	11,608,949,370,893,00	11,628,839,367,360,00	(19,889,996,467.00)
2	Peralatan dan Mesin	6,225,890,240,250,00	6,007,283,535,144,00	218,606,705,106.00
3	Gedung dan Bangunan	4,734,934,884,794,00	4,758,157,681,267,00	(23,222,796,473.00)
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	608,350,078,280,00	606,318,041,651,00	2,032,036,629.00
5	Aset Tetap Lainnya	72,295,320,166,00	79,520,885,958,00	(7,225,565,792.00)
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	14,198,879,909,00	22,236,085,173,00	(8,037,205,264.00)
7	Akumulasi Penyusutan	-6,058,717,115,122,00	-5,551,532,836,882,00	(507,184,278,240.00)
Total		17,187,408,746,594,00	17,550,822,759,671,00	(344,921,100,501.00)

Berdasarkan Tabel 41 terdapat aset tetap yang masih dalam proses penelusuran keberadaannya sebesar Rp107.627.222.734,00 dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Aset Tetap	Jumlah
Peralatan dan Mesin	97.736.373.514,00
Gedung dan Bangunan	7.011.414.960,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.672.929.500,00
Aset Tetap Lainnya	206.504.760,00
Jumlah	107.627.222.734,00

Selain itu, terdapat nilai peralatan dan mesin dalam progress proses alih status ke TNI sebesar Rp674.298.428.084,00. Atas nilai tersebut telah dilaksanakan inventarisasi fisik sebesar Rp306.166.197.036,00 berdasarkan berita acara inventarisasi fisik yang

ditandatangani bersama antara pihak PSP dan TNI. Sisanya sebesar Rp368.132.231.048,00 sedang dalam proses inventarisasi.

C.14 TANAH

Tanah yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.608.949.370.893,00 dan Rp11.628.839.367.360,00. Mutasi Aset Tetap Tanah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2017	11.628.839.367.360
Mutasi Tambah	
Jurnal Manual Satker Konsolidasi	34.716.711.670.464
Saldo Awal	153.910.010.000
Pembelian	13.750.000.000
Transfer Masuk	92.747.435.000
Hibah (Masuk)	19.378.800.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	50.231.463.440
Reklasifikasi Masuk	321.039.306.350
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	22.570.550.000
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	3.374.731.425
Pengembangan Nilai Aset	23.454.097.870
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	34.195.638.389.381
Pengembangan Melalui KDP	3.424.557.500
Koreksi Penilaian Kembali BMN	70.847.104.000
Koreksi Kesalahan input IP	10.463.275.521
Total Mutasi Tambah	69.697.541.390.951
Jurnal Manual Satker Konsolidasi	69.051.635.130.895
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	94.596.656.395
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	56.545.462.123
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	849.772.610
Penghapusan	966.890.000
Transfer Keluar	92.747.435.000
Hibah (Keluar)	76.921.284.570
Reklasifikasi Keluar	321.228.306.350
Koreksi Pencatatan	18.320.643.325
Usulan Barang Hibah DK/TP	235.858.725
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	3.383.947.425
Total Mutasi Kurang	69.717.431.387.418
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2018	11.608.949.370.893

Penjelasan mengenai mutasi tambah Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

1. Penambahan dari Jurnal Manual pada aplikasi SAIBA pada satker Konsolidasi yang diri dari transaksi sebagai berikut.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	48.393.574.000.00
------------------------------------------------------------	-------------------

Transfer Keluar		24.156.427.000.00
Revaluasi Aset Tetap		34.495.426.558.419.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		96.656.263.184.00
Beban Kerugian Pelepasan Aset		52.078.847.861.00
Total		34.716.711.670.464.00
2. Penambahan Saldo Awal sebesar Rp153.910.010.000.00 berasal dari Tiga Eselon 1. yakni.		
Tanaman Pangan	079076	153.808.200.000
Perkebunan	179062	800.000
Badan Karantina	649416	101.010.000
Grand Total		153.910.010.000
3. Penambahan Tanah dari transaksi Pembelian sebesar Rp13.750.000.000.00 berasal dari Eselon 1 Ditjen Peternakan dan Keswan pada satker Balai Besar Veteriner Maros. Sulawesi Selatan		
4. Penambahan Tanah dari transaksi Transfer Masuk sebesar Rp 92.747.435.000.00 berasal dari lima Eselon 1. yakni:		
SekJen	418329	23.539.936.000
SekJen Total		23.539.936.000
Perkebunan	059114	499.400.000
Perkebunan	238830	12.818.716.000
Perkebunan	567338	209.213.000
Perkebunan Total		13.527.329.000
Badan Litbang	633975	8.551.170.000
Badan Litbang Total		8.551.170.000
BPSDMP	239654	13.890.000.000
BPSDMP	239675	19.239.000.000
BPSDMP Total		33.129.000.000
Badan Karantina	567741	14.000.000.000
Badan Karantina Total		14.000.000.000
Grand Total		92.747.435.000
5. Penambahan Tanah dari transaksi Hibah Masuk sebesar 19.378.800.000,00 berasal dari yakni.		
SekJen	451949	14.960.000.000
SekJen Total		14.960.000.000
Badan Litbang	450840	2.123.800.000
Badan Litbang	567460	245.000.000
Badan Litbang	567495	2.050.000.000
Badan Litbang Total		4.236.800.000
Grand Total		19.378.800.000
6. Penambahan Tanah melalui transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp 50.231.463.440.00 berasal dari.		
BPSDMP	238069	2.730.432.700
BPSDMP Total		2.730.432.700
Badan Karantina	237352	41.039.677.680

Badan Karantina	237732	471.440.000
Badan Karantina	499434	2.408.626.000
Badan Karantina	499459	1.385.045.000
Badan Karantina	526615	344.990.000
Badan Karantina	649270	1.851.252.060
Badan Karantina Total		47.501.030.740
Grand Total		50.231.463.440

7. Penambahan Tanah dari transaksi **Reklasifikasi Masuk** sebesar Rp 321.039.306.350,00. yang berasal dari :

Perkebunan	029101	3.987.500.000
Perkebunan	567521	526.129.500
Perkebunan Total		4.513.629.500
Badan Litbang	648716	8.921.000.000
Badan Litbang Total		8.921.000.000
BPSDMP	237437	39.175.164.000
BPSDMP	237490	268.429.512.850
BPSDMP Total		307.604.676.850
Grand Total		321.039.306.350

8. Penambahan Tanah dari transaksi **Barang Berlebih Hasil Inventarisasi** sebesar Rp22.570.550.000.00. yakni.

Perkebunan	060100	7.816.928.000
Perkebunan	179062	326.989.000
Perkebunan	567408	685.867.000
Perkebunan Total		8.829.784.000
Nak Keswan	239420	3.164.518.000
Nak Keswan Total		3.164.518.000
Badan Litbang	567392	9.746.291.000
Badan Litbang Total		9.746.291.000
Badan Karantina	238205	829.957.000
Badan Karantina Total		829.957.000
Grand Total		22.570.550.000

9. Penambahan Tanah dari transaksi **Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi** sebesar Rp5.576.598.477.00berasal dari Eselon 1 Perkebunan yakni

Perkebunan	060100	3.161.304.000
Perkebunan	567408	2.415.294.477
Total		5.576.598.477

10. Penambahan Tanah dari transaksi **Pengembangan Nilai Aset** sebesar Rp 23.454.097.870.00berasal dari Eselon 1 Perkebunan yakni

Perkebunan	567408	199.140.870
Perkebunan	567521	96.000.000
Perkebunan Total		295.140.870

Nak Keswan	239015	23.083.107.000
Nak Keswan	239441	50.000
Nak Keswan Total		23.083.157.000
Badan Karantina	237952	49.500.000
Badan Karantina	412172	26.300.000
Badan Karantina Total		75.800.000
Grand Total		23.454.097.870

11. Penambahan Tanah dari transaksi Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset sebesar Rp34.195.638.389.381.00 berasal dari Eselon 1 yakni

SekJen	3	5.073.548.110.000
Tanaman Pangan	4	405.211.894.090
Hortikultura	1	284.292.129.104
Perkebunan	27	852.980.189.052
Nak Keswan	10	8.289.834.907.109
Badan Litbang	27	15.189.854.836.856
BPSDMP	8	3.345.356.721.769
Badan Karantina	26	754.559.601.401
Grand Total	106	34.195.638.389.381

12. Penambahan Tanah dari transaksi Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp305.785.500.00 berasal dari Eselon 1 yakni

Perkebunan	567338	2.612.334.000
Perkebunan Total		2.612.334.000
Badan Karantina	237910	285.938.000
Badan Karantina	237970	155.122.500
Badan Karantina	412172	150.663.000
Badan Karantina	567741	21.000.000
Badan Karantina	649416	199.500.000
Badan Karantina Total		812.223.500
Grand Total		3.424.557.500
Badan Karantina	237970	155.122.500
Badan Karantina	412172	150.663.000
Grand Total		305.785.500

Penjelasan mengenai Mutasi Kurang Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

1. Pengurang dari Jurnal Manual melalui aplikasi SAIBA pada satker Konsolidasi sebesar Rp. 69.051.635.130.711.00 terdiri dari transaksi sebagai berikut.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	98.960.748.000.00
Transfer Masuk	24.156.427.000.00
Revaluasi Aset Tetap	68.771.525.554.711.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	156.992.401.000.00
Total	69.051.635.130.711.00

2. Pengurangan tanah melalui transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya** sebesar Rp94.596.656.395.00terdapat dari Eselon 1 berikut.

Tanaman Pangan	179077	234.795.000
Tanaman Pangan	189097	2.603.796.981
Tanaman Pangan Total		2.838.591.981
Perkebunan		44.655.225.000
Perkebunan	039098	1.352.321.000
Perkebunan	059114	6.622.864.000
Perkebunan	060100	175.275.000
Perkebunan	079077	1.067.271.500
Perkebunan	089083	878.756.625
Perkebunan	099270	4.791.099.979
Perkebunan	129072	81.460.000
Perkebunan	139076	3.289.549.580
Perkebunan	179062	4.532.540.000
Perkebunan	199078	7.344.486.541
Perkebunan	229061	122.040.001
Perkebunan	239072	4.129.561.000
Perkebunan	259060	9.343.812.323
Perkebunan	269065	107.822.365
Perkebunan	329027	3.263.829.500
Perkebunan	340999	150.000
Perkebunan Total		91.758.064.414
Grand Total		94.596.656.395

3. Pengurangan tanah melalui transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas** sebesar Rp55.941.292.343.00 berasal dari Eselon I yakni

Badan Litbang	237217	493.551.000
Badan Litbang	567449	52.343.750.000
Badan Litbang	634036	3.002.981.343
Badan Litbang	237259	604.169.780
Badan Litbang Total		56.444.452.123
Badan Karantina	649416	101.010.000
Badan Karantina Total		101.010.000
Grand Total		56.545.462.123

4. Pengurangan tanah melalui transaksi **Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset** sebesar Rp849.772.610.00berasal dari Dua Esselon 1 yakni.

Perkebunan	029101	807.040.000
Badan Karantina	567790	42.732.610
Grand Total		849.772.610

5. Pengurangan nilai Tanah melalui transaksi **Penghapusan** sebesar Rp966.890.000.00 terdapat di Eselon I Badan Karantina sebagai berikut.

Badan Karantina	238205	966.890.000
Badan Karantina		966.890.000

Total

6. Pengurangan nilai tanah melalui transaksi **Transfer Keluar** sebesar Rp92.747.435.000.00 yang berasal dari tiga Eselon I sebagai berikut.

SekJen	418328	23.539.936.000
SekJen	451949	47.129.000.000
SekJen Total		70.668.936.000
Perkebunan	049058	3.926.670.000
Perkebunan	059114	209.213.000
Perkebunan	060100	1.397.237.000
Perkebunan	269065	7.494.809.000
Perkebunan	567338	499.400.000
Perkebunan Total		13.527.329.000
BPSDMP	237437	8.551.170.000
BPSDMP Total		8.551.170.000
Grand Total		92.747.435.000

7. Pengurangan nilai tanah melalui transaksi **Hibah (Keluar)** sebesar Rp76.921.284.570.00 yang berasal dari Eselon I Perkebunan yakni

Perkebunan	039098	41.040.000
Perkebunan	049058	724.140.000
Perkebunan	109071	5.943.563.540
Perkebunan	129072	74.184.000
Perkebunan	139076	56.318.304.780
Perkebunan	179062	635.522.000
Perkebunan	229061	1.296.521.000
Perkebunan	329027	11.888.009.250
Grand Total		76.921.284.570

8. Pengurangan nilai tanah dari transaksi **Reklasifikasi Keluar** sebesar Rp322.373.208.350.00 yang berasal dari Eselon I yakni.

Perkebunan	029101	3.987.500.000
Perkebunan	567521	526.129.500
Perkebunan Total		4.513.629.500
Badan Litbang	648716	8.921.000.000
Badan Litbang Total		8.921.000.000
BPSDMP	237437	39.175.164.000
BPSDMP	237490	268.429.512.850
BPSDMP	237814	189.000.000
BPSDMP Total		307.793.676.850
Grand Total		321.228.306.350

9. Pengurangan nilai tanah dari transaksi **Koreksi Pencatatan** sebesar Rp18.320.643.325.00 yang berasal dari :

Perkebunan	059114	9.348.623.880
Perkebunan	060100	400.511.500

Perkebunan	089083	1.444.699.405
Perkebunan	129072	44.975.000
Perkebunan	199078	1.185.702.000
Perkebunan	209008	1.071.114.960
Perkebunan	249031	600.000
Perkebunan	340999	941.760.000
Perkebunan	567408	41.998.500
Perkebunan Total		14.479.985.245
Badan Litbang	237217	3.417.658.080
Badan Litbang	412022	423.000.000
Badan Litbang Total		3.840.658.080
Grand Total		18.320.643.325

10. Pengurangan nilai tanah dari transaksi **Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi** sebesar Rp235.858.725.00 berasal dari Perkebunan.

Perkebunan	060100	959.436.948
Perkebunan	179062	9.216.000
Perkebunan	567408	2.415.294.477
Perkebunan Total		3.383.947.425
Grand Total		3.383.947.425

11. Pengurangan nilai tanah dari transaksi **Usulan Barang Hibah DK/TP** sebesar Rp235.858.725.00 berasal dari Perkebunan pada satker Dinas Perkebunan Provinsi Aceh.

Berikut ini disajikan rincian Tanah per Eselon I dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 42. Rincian Tanah berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan
1	SekJen	6.378.352.773.000,00	1.336.973.663.000,00	5.041.379.110.000,00
2	Tanaman Pangan	1.550.221.115.200,00	994.039.613.091,00	556.181.502.109,00
3	Hortikultura	332.457.159.104,00	48.165.030.000,00	284.292.129.104,00
4	Perkebunan	1.843.132.078.267,00	1.091.778.175.299,00	751.353.902.968,00
5	Nak Keswan	13.970.733.154.000,00	5.640.900.571.891,00	8.329.832.582.109,00
6	Badan Litbang	46.967.477.294.602,00	31.804.728.031.428,00	15.162.749.263.174,00
7	Badan SDMP	7.507.906.271.200,00	4.135.430.286.731,00	3.372.475.984.469,00
8	Badan Karantina	1.720.122.996.370,00	903.354.006.339,00	816.768.990.031,00
9	Satker Konsolidasi	-68.661.453.470.850,00	-34.326.530.010.419,00	-34.334.923.460.431,00
Grand Total		11.608.949.370.893,00	11.628.839.367.360,00	-19.889.996.467,00

Berdasarkan tabel di atas terdapat koreksi tanah atas hasil penilaian kembali barang milik negara tahun 2017 dan 2018 yang dilakukan pada Satker Konsolidasi sebesar Rp(68.661.453.470.850.00) yang terdiri dari berbagai transaksi sebagai berikut.

Keterangan	TA 2018	TA 2017	Grand Total
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-50.567.174.000	98.960.748.000	48.393.574.000

Keterangan	TA 2018	TA 2017	Grand Total
Transfer Keluar	24.156.427.000		24.156.427.000
Transfer Masuk	-24.156.427.000		-24.156.427.000
Revaluasi Aset Tetap	-34.276.098.996.292	-34.495.426.558.419	-68.771.525.554.711
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-60.336.137.816	68.131.800.000	7.795.662.184
Beban Kerugian Pelepasan Aset	52.078.847.677	1.804.000.000	53.882.847.677
Grand Total	-34.334.923.460.431	-34.326.530.010.419	-68.661.453.470.850

C.15 PERALATAN DAN MESIN

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp 6.225.890.240.250.00 dan Rp6.007.283.535.144.00 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

Saldo nilai perolehan per 31 Desember 2017 **6.007.283.535.144**

Mutasi tambah:

Saldo Awal	2.552.728.400
Pembelian	331.249.803.003
Transfer Masuk	39.667.918.337
Hibah (Masuk)	39.109.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	20.235.460.656
Reklasifikasi Masuk	14.542.172.820
Perolehan Lainnya	1.168.523.636
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	3.153.609.439
Perolehan Hasil Tindaklanjut Normalisasi	1.894.690.335
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	16.698.000
Pengembangan Nilai Aset	2.406.741.725
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	19.900.000
Pengembangan Melalui KDP	237.339.500
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	447.973.323
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	1.384.948.304
Total mutasi tambah	419.054.578.878

Mutasi kurang:

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	75.076.794.217
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	516.671.237
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	6.315.562.191
Penghapusan	26.274.139.425
Transfer Keluar	39.226.568.337
Hibah Keluar	14.101.579.872
Reklasifikasi Keluar	13.680.228.577
Koreksi Pencatatan	4.179.049.270
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	1.972.239.757
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	120.887.999
Usulan Barang Hibah DK/TP	18.805.701.740
Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/	178.451.150

sebaliknya

Total mutasi kurang	200.447.873.772
Saldo per 31 Desember 2018	6.225.890.240.250
Akumulasi penyusutan	4.700.564.104.242
Nilai Buku per 31 Desember 2018	1.525.326.136.008

Penjelasan mengenai mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

1. Penambahan **Saldo Awal** sebesar Rp2.552.728.400.00 berasal dari enam Eselon 1, yakni:

Setjen	418328	1.028.242.000
Setjen Total		1.028.242.000
Perkebunan	179105	19.950.000
Perkebunan Total		19.950.000
Nak Keswan	238776	81.400.000
Nak Keswan	239434	368.984.350
Nak Keswan Total		450.384.350
Badan Litbang	648669	328.764.250
Badan Litbang	648737	66.413.000
Badan Litbang Total		395.177.250
BPSDMP	238069	4.600.000
BPSDMP	239675	16.314.000
BPSDMP	239701	14.925.000
BPSDMP	412081	223.664.800
BPSDMP	412101	12.000.000
BPSDMP Total		271.503.800
Badan Karantina	237483	14.444.000
Badan Karantina	237966	37.725.000
Badan Karantina	499436	77.952.000
Badan Karantina	499459	10.000.000
Badan Karantina	499471	6.000.000
Badan Karantina	649259	241.350.000
Badan Karantina Total		387.471.000
Grand Total		2.552.728.400

2. Penambahan Peralatan dan Mesin dari transaksi **Pembelian** sebesar Rp331.249.803.003.00 berasal dari 11 Eselon I sebagai berikut:

Setjen	67	24.144.330.508
ItJen	8	1.218.312.891
Tanaman Pangan	18	12.540.611.941
Hortikultura	6	1.754.420.850
Perkebunan	38	26.787.668.355
Nak Keswan	127	65.557.633.343
PSP	9	9.284.398.059
Badan Litbang	274	95.320.464.830
BPSDMP	96	30.779.029.771
BKP	11	2.969.891.849

Badan Karantina	297	60.893.040.606
Grand Total	951	331.249.803.003
3. Penambahan Peralatan dan Mesin dari transaksi Transfer Masuk sebesar Rp29.088.645.761.00 berasal dari 10 Eselon I sebagai berikut:		
Setjen	14	4.418.276.620
ItJen	1	422.680.000
Tanaman Pangan	2	693.272.200
Hortikultura	2	213.233.000
Perkebunan	12	2.467.501.080
Nak Keswan	2	4.135.620.874
PSP	11	205.658.000
Badan Litbang	34	3.888.292.952
BPSDMP	9	7.553.307.005
BKP	2	5.090.804.030
Badan Karantina	60	10.579.272.576
Grand Total	149	39.667.918.337
4. Penambahan Peralatan dan Mesin dari transaksi Hibah Masuk sebesar Rp39.109.000.00 berasal dari dua Eselon I sebagai berikut:		
Hortikultura	625875	22.709.000
Nak Keswan	237551	16.400.000
Grand Total		39.109.000
5. Penambahan Peralatan dan Mesin dari transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp20.235.460.656.00 berasal dari enam Eselon I sebagai berikut:		
SekJen	1	961.614.793
Perkebunan	2	685.847.549
Nak Keswan	3	2.890.414.910
Badan Litbang	14	11.193.290.574
BPSDMP	1	1.182.842.568
Badan Karantina	10	3.321.450.262
Grand Total	31	20.235.460.656
6. Penambahan Peralatan dan Mesin dari transaksi Reklasifikasi Masuk sebesar Rp14.542.172.820.00 berasal dari sembilan Eselon I. sebagai berikut:		
Setjen	7	1.191.810.772
Tanaman Pangan	2	48.111.947
Perkebunan	4	799.491.500
Nak Keswan	2	2.413.514.200
PSP	2	225.140.800
Badan Litbang	14	8.413.869.923
BPSDMP	3	220.315.500
BKP	1	274.640.000
Badan Karantina	6	955.278.178
Grand Total	41	14.542.172.820

7. Penambahan Peralatan dan Mesin dari transaksi **Perolehan Lainnya** Rp1.168.523.636.00 berasal dari tiga Eselon I. sebagai berikut:

Nak Keswan	239420	88.941.500
Badan Litbang	411971	1.074.082.136
BPSDMP	239675	5.500.000
Grand Total		1.168.523.636

8. Penambahan Peralatan dan Mesin dari transaksi **Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap** sebesar Rp3.153.609.439.00 berasal dari sembilan Eselon I. dengan rincian sebagai berikut:

Setjen	451949	63.250
Setjen Total		63.250
Tanaman Pangan	059137	12.000.000
Tanaman Pangan	059477	11.800.000
Tanaman Pangan	199077	367.590.650
Tanaman Pangan	209078	189.786.999
Tanaman Pangan	229067	34.500.000
Tanaman Pangan	319171	131.400.000
Tanaman Pangan Total		747.077.649
Hortikultura	129000	4.367.000
Hortikultura Total		4.367.000
Perkebunan	119081	1.498.956.500
Perkebunan	238830	100.114.000
Perkebunan Total		1.599.070.500
Nak Keswan	110827	13.200.000
Nak Keswan Total		13.200.000
PSP	039014	24.750.000
PSP	039158	273.895.000
PSP	099035	19.470.000
PSP Total		318.115.000
Badan Litbang	237291	27.278.000
Badan Litbang	567830	25.494.000
Badan Litbang Total		52.772.000
BPSDMP	238069	12.998.450
BPSDMP	412075	180.500.000
BPSDMP Total		193.498.450
Badan Karantina	237352	708.211
Badan Karantina	237678	6.000.000
Badan Karantina	412126	128.157.000
Badan Karantina	567741	90.580.379
Badan Karantina Total		225.445.590
Grand Total		3.153.609.439

9. Penambahan Peralatan dan Mesin dari transaksi **Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya** sebesar Rp16.698.000.00 berasal dari Satker Balai Pelatihan Pertanian Lampung pada Eselon IBPSDMP sebagai berikut:

10. Penambahan Peralatan dan Mesin dari transaksi **Pengembangan Nilai Aset** sebesar Rp2.247.228.525.00 berasal dari Eselon I sebagai berikut:

Setjen	8	194.243.220
ItJen	1	3.960.000
Perkebunan	4	236.380.875
Nak Keswan	5	227.975.206
Badan Litbang	28	601.954.843
BPSDMP	2	79.651.081
Badan Karantina	12	903.063.300
Grand Total	60	2.247.228.525

11. Penambahan Peralatan dan Mesin dari transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas** sebesar Rp447.973.323.00 berasal dari empat Eselon I. sebagai berikut:

SekJen	1	51.546.100
PSP	1	30.916.000
Badan Litbang	5	142.590.000
Badan Karantina	25	222.921.223
Grand Total	32	447.973.323

12. Penambahan Peralatan dan Mesin dari transaksi **Penerimaan Aset Tetap Renovasi** sebesar Rp19.900.000.00 berasal dari Satker Biro Keuangan dan Perlengkapan pada Eselon I Sekretariat Jenderal.

13. Penambahan Peralatan dan Mesin dari transaksi **Pengembangan Melalui KDP** sebesar Rp237.339.500.00 berasal dari dua Eselon I. sebagai berikut:

Nak Keswan	239441	149.428.000
Nak Keswan Total		149.428.000
Badan Litbang	237242	10.250.000
Badan Litbang	237259	4.040.000
Badan Litbang	567364	44.805.000
Badan Litbang	633996	28.816.500
Badan Litbang Total		87.911.500
Grand Total		237.339.500

14. Penambahan Peralatan dan Mesin dari transaksi **Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap** sebesar Rp1.384.948.304.00 berasal dari dua Eselon I. sebagai berikut:

SekJen	411925	300.380.000
SekJen Total		300.380.000
Nak Keswan	039154	215.590.443
Nak Keswan	109121	95.984.861
Nak Keswan	119133	112.835.000
Nak Keswan	209110	900.000
Nak Keswan	229102	604.044.000
Nak Keswan	309166	55.214.000
Nak Keswan Total		1.084.568.304
Grand Total		1.384.948.304

15. Penambahan Peralatan dan Mesin dari transaksi **Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi** sebesar Rp491.619.690.00 berasal dari Eselon I. sebagai berikut:

Tanaman Pangan	020072	32.941.000
Tanaman Pangan	069107	10.000.000
Tanaman Pangan	119129	21.842.500
Tanaman Pangan	169073	24.040.000
Tanaman Pangan	339055	55.125.000
Tanaman Pangan Total		143.948.500
Hortikultura	049025	115.314.000
Hortikultura	109005	44.200.000
Hortikultura	109049	91.192.300
Hortikultura	179021	10.000.000
Hortikultura Total		260.706.300
Perkebunan	238830	20.000.000
Perkebunan Total		20.000.000
BPSDMP	412081	420.440
BPSDMP Total		420.440
BKP	289039	66.544.450
BKP Total		66.544.450
Grand Total		491.619.690

Penjelasan mengenai **mutasi kurang** Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

1. Pengurangan Peralatan dan Mesin dari transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya** sebesar Rp75.076.794.217.00 berasal dari sebelas Eselon I dengan uraian sebagai berikut:

SekJen	9	7.307.179.763
ItJen	2	338.460.177
Tanaman Pangan	45	26.330.073.377
Hortikultura	11	4.330.129.427
Perkebunan	8	4.331.537.525
Nak Keswan	12	4.409.083.228
PSP	10	1.061.490.275
Badan Litbang	24	6.359.105.044
BPSDMP	22	2.670.684.476
BKP	6	987.861.300
Badan Karantina	56	16.951.189.625
Grand Total	205	75.076.794.217

2. Pengurangan Peralatan dan Mesin dari transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas** sebesar Rp516.671.237.00 berasal dari delapan Eselon I sebagai berikut:

Setjen	451924	326.170.000
Setjen Total		326.170.000
Nak Keswan	239434	3.169.350
Nak Keswan Total		3.169.350

Badan Litbang	411993	5.737.636
Badan Litbang	634040	78.440.000
Badan Litbang Total		84.177.636
BPSDMP	237160	37.349.950
BPSDMP	237200	1.190.000
BPSDMP	237490	35.850.000
BPSDMP	238069	1.180.371
BPSDMP	239640	5.260.000
BPSDMP	239654	9.536.097
BPSDMP	239661	4.295.100
BPSDMP Total		94.661.518
Badan Karantina	237788	530.500
Badan Karantina	237910	1.560.449
Badan Karantina	237966	2.543.300
Badan Karantina	412110	2.494.984
Badan Karantina	526462	480.000
Badan Karantina	649259	883.500
Badan Karantina Total		8.492.733
Grand Total		516.671.237
3. Pengurangan Peralatan dan Mesin dari transaksi Penghapusan sebesar Rp26.274.139.425.00 berasal dari sembilan Eselon I sebagai berikut:		
SekJen	4	11.819.075.400
Hortikultura	12	5.553.931.424
Perkebunan	4	576.018.224
Nak Keswan	5	1.026.902.000
PSP	3	4.070.416.309
Badan Litbang	2	238.627.000
BPSDMP	4	570.295.000
BKP	6	2.418.874.068
Grand Total	40	26.274.139.425
4. Pengurangan Peralatan dan Mesin dari transaksi Transfer Keluar sebesar Rp39.226.568.337.00 berasal dari sepuluh Eselon I sebagai berikut:		
Setjen	12	2.281.924.680
Tanaman Pangan	2	693.272.200
Hortikultura	1	198.083.000
Perkebunan	15	2.050.501.080
Nak Keswan	1	4.135.620.874
PSP	3	205.658.000
Badan Litbang	12	3.774.696.392
BPSDMP	6	7.372.107.005
BKP	3	5.473.954.030
Badan Karantina	10	13.040.751.076
Grand Total	65	39.226.568.337
5. Pengurangan Peralatan dan Mesin dari transaksi Hibah(Keluar) sebesar Rp14.101.579.872.00 berasal dari sepuluh Eselon I sebagai berikut:		

SekJen	3	1.924.590.378
Tanaman Pangan	6	7.299.255.335
Hortikultura	2	89.202.400
Perkebunan	9	2.054.754.599
Nak Keswan	1	783.900.000
PSP	1	561.000.000
BPSDMP	4	85.107.350
BKP	5	1.303.769.810
Grand Total	31	14.101.579.872

6. Pengurangan Peralatan dan Mesin dari transaksi **Reklasifikasi Keluar** sebesar Rp13.680.228.577.00 dari sembilan Eselon I. yakni.

SekJen	7	1.174.611.872
Tanaman Pangan	1	25.671.947
Perkebunan	2	591.902.000
Nak Keswan	1	2.404.514.200
PSP	1	223.440.800
Badan Litbang	15	7.986.023.993
BPSDMP	3	181.637.087
BKP	1	274.640.000
Badan Karantina	6	817.786.678
Grand Total	37	13.680.228.577

7. Pengurangan Peralatan dan Mesin dari transaksi **Koreksi Pencatatan** sebesar Rp4.179.049.270.00 berasal dari enam Eselon I sebagai berikut:

SekJen	418328	76.786.970
SekJen	451949	114.950.000
SekJen	451956	203.665.200
SekJen Total		395.402.170
Hortikultura	150078	86.900.000
Hortikultura Total		86.900.000
Nak Keswan	239434	368.984.350
Nak Keswan Total		368.984.350
PSP	330506	102.600.000
PSP Total		102.600.000
Badan Litbang	411971	2.866.148.200
Badan Litbang Total		2.866.148.200
Badan Karantina	499436	77.952.000
Badan Karantina	499459	4.499.550
Badan Karantina	649259	276.563.000
Badan Karantina Total		359.014.550
Grand Total		4.179.049.270

8. Pengurangan Peralatan dan Mesin dari transaksi **Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelolasebesar** Rp1.972.239.757.00 berasal dari enam Eselon I sebagai berikut:

Tanaman Pangan	239093	11.950.000
----------------	--------	------------

Tanaman Pangan Total		11.950.000
PSP	039014	308.138.000
PSP	039158	49.120.000
PSP	059004	1.443.260.832
PSP Total		1.800.518.832
BPSDMP	120040	2.082.000
BPSDMP Total		2.082.000
BKP	059444	157.688.925
BKP Total		157.688.925
Grand Total		1.972.239.757

9. Pengurangan Peralatan dan Mesin dari transaksi **Usulan Barang Hilang ke Pengelola** sebesar Rp120.887.999.00 berasal dari Satker Dinas Pertanian, Hortikultura Dan Peternakan Kab. Kolaka (209078) pada Eselon IDitjen Tanaman Pangan.

10. Pengurangan nilai Peralatan dan Mesin dari transaksi **Usulan Barang Hibah DK/TP** sebesar Rp18.805.701.740.00 berasal dari lima Eselon I sebagai berikut:

Tanaman Pangan	16	12.364.938.965
Perkebunan	1	233.942.000
Nak Keswan	3	2.787.043.000
PSP	5	2.458.090.275
BKP	3	961.687.500
Grand Total	28	18.805.701.740

11. Pengurangan nilai Peralatan dan Mesin dari transaksi **Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya** sebesar Rp178.451.150.00 berasal dari Eselon I sebagai berikut:

SekJen	451949	86.510.000
BPSDMP	239661	91.941.150
Grand Total		178.451.150

12. Pengurangan nilai Peralatan dan Mesin dari transaksi **Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap** sebesar Rp6.315.562.191.00 berasal dari Eselon I sebagai berikut:

SekJen	1	7.969.000
Tanaman Pangan	5	132.106.000
Hortikultura	4	260.706.300
Perkebunan	3	44.500.000
Nak Keswan	26	5.720.100.001
Badan Litbang	1	77.766.000
BPSDMP	2	2.070.440
BKP	1	66.544.450
Badan Karantina	1	3.800.000
Grand Total	44	6.315.562.191

Berikut ini disajikan rincian Peralatan dan Mesin per Eselon I dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel C.43 Rincian Peralatan dan Mesin berdasarkan Eselon I
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
dalam Rupiah**

No	Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan / Penurunan
1	SekJen	455.173.704.620	448.188.690.620	6.985.014.000
2	ItJen	24.734.688.637	23.428.195.923	1.306.492.714
3	Tanaman Pangan	518.439.552.275	551.266.528.361	-32.826.976.086
4	Hortikultura	187.613.177.091	195.595.759.092	-7.982.582.001
5	Perkebunan	415.153.809.534	392.421.055.103	22.732.754.431
6	Nak Keswan	1.052.524.263.601	995.710.586.772	56.813.676.829
7	PSP	874.238.166.801	874.657.153.433	-418.986.632
8	Badan Litbang	1.359.864.063.465	1.260.082.786.722	99.781.276.743
9	Badan SDMP	545.561.852.661	516.349.035.872	29.212.816.789
10	BKP	44.260.902.534	47.504.042.288	-3.243.139.754
11	Badan Karantina	748.326.059.031	702.079.700.958	46.246.358.073
	Grand Total	6.225.890.240.250	6.007.283.535.144	218.606.705.106

C.16 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 4.734.934.884.794.00 dan Rp4.758.157.681.267.00. Mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2017	4.758.157.681.267
<u>Mutasi Tambah</u>	
Jurnal Manual Satker Konsolidasi	539.675.606.584
Saldo Awal	1.083.875.000
Pembelian	6.090.460.080
Transfer Masuk	21.011.427.254
Hibah (Masuk)	273.000.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	147.644.790.378
Reklasifikasi Masuk	77.973.234.547
Perolehan Lainnya	936.029.054
Penyelesaian Pembangunan Langsung	7.886.826.992
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	44.227.228.000
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	29.809.324.230
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	18.513.138.827
Pengembangan Nilai Aset	42.340.808.691
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	2.733.091.658
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	1.385.523.042.895
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	4.564.523.550
Pengembangan Melalui KDP	148.221.956.440
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	50.029.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	43.044.005
Koreksi Penilaian Kembali BMN	6.029.422.102

Total Mutasi Tambah **2.484.630.859.287**

Mutasi Kurang

Jurnal Manual Satker Konsolidasi	1.523.949.236.187
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	273.620.755.337
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	2.393.729.069
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	108.008.507.394
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	343.716.437.113
Penghapusan	5.994.822.682
Transfer Keluar	21.011.427.254
Hibah (Keluar)	13.859.723.750
Reklasifikasi Keluar	79.167.347.447
Koreksi Pencatatan	87.254.258.648
Usulan Barang Hibah DK/TP	19.643.759.050
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	25.263.590.677
Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya	1.308.094.569
Koreksi Penilaian Kembali BMN	31.723.432
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	2.342.541.151
Koreksi Kesalahan input IP	287.702.000
Total Mutasi Kurang	2.507.853.655.760
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2018	4.734.934.884.794
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.089.264.819.476
Saldo Nilai Buku Per 31 Desember 2018	3.645.670.065.318

Penjelasan mengenai mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

1. Penambahan nilai dari transaksi Jurnal Manual melalui aplikasi SAIBA pada Satker Konsolidasi senilai Rp. 537.383.852.667.00

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2.256.483.749
Transfer Keluar	4.280.015.450
Transfer Masuk	526.639.000
Revaluasi Aset Tetap	511.879.174.344
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	13.487.530.085
Beban Kerugian Pelepasan Aset	7.245.763.956
Total	539.675.606.584

2. Penambahan nilai dari transaksi **Saldo Awal** Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.173.833.500.00 berasal dari tiga Eselon I sebagai berikut:

Setjen	451949	89.958.500
Nak Keswan	119133	1.063.875.000
Badan Litbang	567517	20.000.000
Grand Total		1.173.833.500

3. Penambahan nilai dari transaksi **Pembelian** sebesar Rp6.090.460.080.00 berasal dari tujuh Eselon I sebagai berikut:

Setjen	4	1.501.822.067
Tanaman Pangan	3	1.034.850.000
Hortikultura	1	198.118.000
Perkebunan	1	66.902.253
Nak Keswan	2	349.732.000
Badan Litbang	15	2.744.185.760
BPSDMP	1	194.850.000
Grand Total	27	6.090.460.080

4. Penambahan nilai dari transaksi **Transfer Masuk** sebesar Rp21.011.427.254.00 berasal dari enam Eselon sebagai berikut:

Setjen	1	9.726.155.700
Perkebunan	5	2.549.405.000
PSP	1	247.280.000
Badan Litbang	12	7.903.763.854
BPSDMP	2	427.852.700
BKP	1	156.970.000
Grand Total	22	21.011.427.254

5. Penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi **Hibah Masuk** sebesar Rp273.000.000.00 berasal dari Satker Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru. Kalsel pada Eselon IBPSDMP.

6. Penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi **Penyelesaian Pembangunan dengan KDP** sebesar Rp147.644.790.378.00 berasal dari tujuh Eselon I sebagai berikut:

SekJen	2	11.163.481.000
Tanaman Pangan	1	513.115.500
Perkebunan	4	10.883.678.462
Nak Keswan	7	20.671.230.200
Badan Litbang	34	52.931.120.916
BPSDMP	17	35.434.400.488
Badan Karantina	33	16.047.763.812
Grand Total	98	147.644.790.378

7. Penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi **Reklasifikasi Masuk** sebesar Rp77.973.234.547.00 terdapat di enam Eselon I sebagai berikut:

Setjen	2	358.841.000
Perkebunan	1	4.478.462.905
Nak Keswan	2	2.185.595.000
Badan Litbang	15	36.201.833.291
BPSDMP	6	30.692.910.875
Badan Karantina	8	4.055.591.476
Grand Total	34	77.973.234.547

8. Penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi **Perolehan Lainnya** sebesar Rp936.029.054.00 terdapat di Eselon I Badan Litbang pada Satker Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kantor Pusat Jakarta.

9. Penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi **Penyelesaian Pembangunan Langsung** sebesar Rp7.886.826.992.00 terdapat diempat Eselon I sebagai berikut:

Nak Keswan	3	582.790.000
Badan Litbang	16	3.747.475.667
BPSDMP	13	1.376.589.000
Badan Karantina	19	2.179.972.325
Grand Total	51	7.886.826.992

10. Penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi **Barang Berlebih Hasil Inventaris** sebesar Rp44.227.228.000.00 berasal dari tujuh Eselon I sebagai berikut:

Tanaman Pangan	1	378.045.000
Hortikultura	1	172.884.000
Perkebunan	3	2.153.908.000
Nak Keswan	3	2.098.067.000
Badan Litbang	7	15.211.512.000
BPSDMP	4	22.345.916.000
Badan Karantina	5	1.866.896.000
Grand Total	24	44.227.228.000

11. Penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi **Reklasifikasi Masuk Hasil Inventaris** sebesar Rp29.809.324.230.00 berasal dari tujuh Eselon I sebagai berikut:

Setjen	451956	6.039.001.500
Setjen Total		6.039.001.500
Tanaman Pangan	259062	1.361.652.000
Tanaman Pangan Total		1.361.652.000
Perkebunan	060100	23.797.000
Perkebunan	567338	419.673.000
Perkebunan	567408	2.588.581.000
Perkebunan Total		3.032.051.000
Nak Keswan	239420	167.600.000
Nak Keswan	239455	2.661.022.308
Nak Keswan	239520	379.520.100
Nak Keswan	411956	904.430.413
Nak Keswan	567282	954.002.214
Nak Keswan Total		5.066.575.035
Badan Litbang	237217	851.811.500
Badan Litbang	237238	303.880.000
Badan Litbang	411993	612.752.000
Badan Litbang	567449	1.997.179.000
Badan Litbang	634001	118.370.000
Badan Litbang Total		3.883.992.500
BPSDMP	239125	172.480.300
BPSDMP	239701	4.238.732.100
BPSDMP	394771	154.200.050
BPSDMP Total		4.565.412.450

Badan Karantina	237767	5.627.278
Badan Karantina	499496	5.855.012.467
Badan Karantina Total		5.860.639.745
Grand Total		29.809.324.230

12. Mutasi tambah Gedung dan Bangunan dari transaksi **Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap** sebesar Rp18.513.138.827.00 berasal dari enam Eselon I sebagai berikut:

Setjen	451949	638.613.500
Setjen Total		638.613.500
Tanaman Pangan	089076	247.451.100
Tanaman Pangan Total		247.451.100
Nak Keswan	029162	8.237.305.972
Nak Keswan	238776	519.002.000
Nak Keswan Total		8.756.307.972
PSP	179024	99.500.000
PSP Total		99.500.000
Badan Litbang	237931	54.373.000
Badan Litbang	238027	20.252.000
Badan Litbang	567563	70.080.600
Badan Litbang	634036	3.047.187.217
Badan Litbang Total		3.191.892.817
Badan Karantina	528860	5.553.232.000
Badan Karantina	537700	26.141.438
Badan Karantina Total		5.579.373.438
Grand Total		18.513.138.827

13. Penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi **Pengembangan Nilai Aset** sebesar Rp41.866.971.520.00 dari tujuh Eselon I sebagai berikut:

Setjen	9	2.631.622.900
Tanaman Pangan	7	2.298.438.580
Perkebunan	10	2.209.397.237
Hortikultura	6	473.837.171
Nak Keswan	15	3.745.563.766
Badan Litbang	47	21.467.788.693
BPSDMP	21	4.442.685.000
Badan Karantina	46	5.071.475.344
Grand Total	161	42.340.808.691

14. Penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas** sebesar Rp2.718.728.158.00 berasal dari empat Eselon I sebagai berikut:

Setjen	418328	76.786.970
Setjen Total		76.786.970
Badan Litbang	237221	425.978.500
Badan Litbang	237572	87.929.200
Badan Litbang	320091	39.880.000
Badan Litbang	412022	26.300.000

Badan Litbang	567296	251.475.739
Badan Litbang	633975	411.199.000
Badan Litbang Total		1.242.762.439
BPSDMP	239675	36.604.250
BPSDMP	412075	148.950.000
BPSDMP Total		185.554.250
Badan Karantina	237483	403.250.499
Badan Karantina	237860	20.240.000
Badan Karantina	237910	14.363.500
Badan Karantina	526615	495.223.000
Badan Karantina	649259	294.911.000
Badan Karantina Total		1.227.987.999
Grand Total		2.733.091.658

15. Penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi **Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset** sebesar Rp1.385.392.832.285.00 terdapat pada sepuluh Eselon 1 sebagai berikut:

Setjen	1	21.338.272.957
Tanaman Pangan	19	33.985.814.730
Hortikultura	10	57.763.165.796
Perkebunan	25	85.192.301.081
Nak Keswan	16	66.697.821.280
PSP	1	45.060.149
Badan Litbang	32	953.103.604.343
BPSDMP	12	139.072.298.451
BKP	3	120.043.005
Badan Karantina	16	28.204.661.103
Grand Total	135	1.385.523.042.895

16. Penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi **Penerimaan Aset Tetap Renovasi** sebesar Rp3.895.428.550.00 yang berasal dari dua Eselon I sebagai berikut:

Setjen	451956	1.992.523.550
Tanaman Pangan	020072	2.572.000.000
Grand Total		4.564.523.550

17. Terdapat penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi **Pengembangan melalui KDP** sebesar Rp147.217.577.440.00 yang berasal dari tujuh Eselon I sebagai berikut.

Setjen	2	7.901.635.206
Tanaman Pangan	1	122.764.225
Perkebunan	4	3.295.693.421
Nak Keswan	6	2.162.759.000
Badan Litbang	40	86.106.541.890
BPSDMP	21	22.324.494.450
Badan Karantina	38	26.308.068.248
Grand Total	113	148.221.956.440

18. Terdapat penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi **Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap** sebesar Rp50.029.000.00 yang berasal dari Eselon I Ditjen Perkebunan pada satker Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
19. Terdapat penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi **Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi** sebesar Rp43.044.005.00 yang berasal dari Eselon I Badan SDM Pertanian pada satker Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (Stpp) Medan
20. Terdapat penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi **Koreksi penilaian kembali BMN** sebesar Rp6.029.422.102.00 yang berasal dari Eselon I

Perkebunan	089083	3.662.399.340
Perkebunan	567717	2.196.699.399
Perkebunan Total		5.859.098.739
Nak Keswan	039154	170.323.363
Nak Keswan Total		170.323.363
Grand Total		6.029.422.102

Penjelasan mengenai **Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan** adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan nilai dari transaksi Jurnal Manual melalui aplikasi SAIBA pada Satker Konsolidasi senilai Rp. 1.522.814.048.583.00 dari transaksi berikut

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	4.981.384.001
Transfer Keluar	526.639.000
Transfer Masuk	4.280.060.446
Revaluasi Aset Tetap	1.449.044.728.251
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	65.028.175.823
Beban Kerugian Pelepasan Aset	88.248.666
Total	1.523.949.236.187

2. Pengurangan Gedung dan Bangunan dari transaksi **Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya** sebesar Rp273.620.755.337.00 berasal dari sembilan Eselon I sebagai berikut:

Setjen	2	17.051.561.809
Tanaman Pangan	24	4.809.898.385
Hortikultura	8	3.262.768.042
Perkebunan	36	86.210.735.485
Nak Keswan	14	27.961.078.414
PSP	5	5.452.698.210
Badan Litbang	17	23.294.812.841
BPSDMP	8	91.457.102.585
Badan Karantina	13	14.120.099.566
Grand Total	127	273.620.755.337

3. **Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas** Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.393.729.069.00 berasal dari empat Eselon I sebagai berikut:

Setjen	2	1.057.251.000
Badan Litbang	2	770.947.350
BPSDMP	14	147.767.158

Badan Karantina	10	417.763.561
Grand Total	28	2.393.729.069
4. Pengurangan Gedung dan Bangunan dari transaksi Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset sebesar Rp108.008.507.394.00 berasal dari sembilan Eselon I sebagai berikut:		
Setjen	1	1.285.014.305
Tanaman Pangan	8	4.976.436.019
Hortikultura	5	1.206.202.331
Perkebunan	4	2.369.356.403
Nak Keswan	10	88.819.428.122
Badan Litbang	4	3.437.483.701
BPSDMP	2	14.581.079
BKP	1	940.259
Badan Karantina	8	5.899.065.175
Grand Total	43	108.008.507.394
5. Mutasi kurang Gedung dan Bangunan dari transaksi Koreksi Semu Hasil Penilaian kembali sebesar Rp343.716.437.113.00 berasal dari sepuluh Eselon I sebagai berikut:		
Setjen	2	8.765.864.314
Tanaman Pangan	27	13.796.653.520
Hortikultura	15	5.219.542.784
Perkebunan	29	32.768.091.724
Nak Keswan	26	45.249.589.556
PSP	1	17.989.149
Badan Litbang	36	128.291.671.555
BPSDMP	14	77.209.165.665
BKP	4	148.805.746
Badan Karantina	24	32.249.063.100
Grand Total	178	343.716.437.113
6. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.994.822.682.00 dari transaksi Penghapusan berasal dari empat Eselon I sebagai berikut:		
Hortikultura	199026	70.200.000
Hortikultura Total		70.200.000
Badan Litbang	450862	984.558.042
Badan Litbang Total		984.558.042
BPSDMP	237814	1.939.717.950
BPSDMP	239675	2.950.596.690
BPSDMP Total		4.890.314.640
BKP	289058	49.750.000
BKP Total		49.750.000
Grand Total		5.994.822.682
7. Transfer Keluar Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.011.427.254.00 yang berasal dari lima Eselon I sebagai berikut:		
Setjen	418328	9.726.155.700

Setjen	451949	345.948.700
Setjen Total		10.072.104.400
Perkebunan	049058	236.821.000
Perkebunan	089102	101.858.000
Perkebunan	189113	1.993.005.000
Perkebunan	249047	168.221.000
Perkebunan	289181	49.500.000
Perkebunan Total		2.549.405.000
PSP	229010	247.280.000
PSP Total		247.280.000
Badan Litbang	237291	1.097.720.000
Badan Litbang	411971	1.117.025.054
Badan Litbang	411987	1.892.223.000
Badan Litbang	412007	90.498.000
Badan Litbang	500941	315.930.000
Badan Litbang	537628	3.219.049.800
Badan Litbang	567627	171.318.000
Badan Litbang	567783	81.904.000
Badan Litbang Total		7.985.667.854
BKP	289109	156.970.000
BKP Total		156.970.000
Grand Total		21.011.427.254

8. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan dari transaksi **Hibah Keluar** Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.859.723.750.00 berasal dari empat Eselon I sebagai berikut:

Tanaman Pangan	039130	249.762.000
Tanaman Pangan	119087	97.689.000
Tanaman Pangan Total		347.451.000
Perkebunan	039098	67.928.000
Perkebunan	049058	95.357.000
Perkebunan	109071	763.079.000
Perkebunan	139076	5.970.679.000
Perkebunan	159064	600.272.000
Perkebunan	179062	437.476.750
Perkebunan	329027	1.022.199.000
Perkebunan	340443	3.325.400.000
Perkebunan Total		12.282.390.750
Nak Keswan	039154	691.512.000
Nak Keswan	229102	340.470.000
Nak Keswan Total		1.031.982.000
BKP	289184	197.900.000
BKP Total		197.900.000
Grand Total		13.859.723.750

9. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan dari transaksi **Reklasifikasi Keluar** sebesar Rp79.167.347.447.00 berasal dari enam Eselon I sebagai berikut:

Setjen	1	287.350.000
Perkebunan	1	4.478.462.905
Nak Keswan	4	3.177.992.000
Badan Litbang	15	36.446.946.191
BPSDMP	6	30.522.885.875
Badan Karantina	9	4.253.710.476
Grand Total	36	79.167.347.447

10. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp87.254.258.648.00 dari transaksi **Koreksi Pencatatan** yang berasal dari tujuh Eselon I sebagai berikut:

Setjen	1	7.155.066.800
Hortikultura	1	1.433.730.750
Perkebunan	9	12.144.080.024
Nak Keswan	6	6.708.894.083
Badan Litbang	28	42.968.527.880
BPSDMP	10	10.796.343.627
Badan Karantina	10	6.047.615.484
Grand Total	65	87.254.258.648

11. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan dari transaksi **Usulan Barang Hibah DK/TP** sebesar Rp19.643.759.050.00 berasal dari lima Eselon I sebagai berikut:

Tanaman Pangan	029102	2.310.613.000
Tanaman Pangan	029159	1.980.693.000
Tanaman Pangan	209075	343.847.000
Tanaman Pangan	209080	39.850.000
Tanaman Pangan	249099	4.126.038.000
Tanaman Pangan	249121	47.405.000
Tanaman Pangan	269078	1.283.126.000
Tanaman Pangan	269088	99.500.000
Tanaman Pangan	319071	193.676.750
Tanaman Pangan	319171	2.772.016.000
Tanaman Pangan Total		13.196.764.750
Perkebunan	060100	213.218.000
Perkebunan	149116	27.310.000
Perkebunan	189133	1.993.005.000
Perkebunan	249031	24.202.000
Perkebunan	249160	168.221.000
Perkebunan Total		2.425.956.000
Nak Keswan	029162	1.776.730.300
Nak Keswan Total		1.776.730.300
PSP	229029	97.980.000
PSP	329030	1.480.788.000
PSP	339027	330.800.000
PSP Total		1.909.568.000
BKP	289052	334.740.000

BKP Total	334.740.000
Grand Total	19.643.759.050

12. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan dari transaksi **Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi** sebesar Rp25.263.590.677.00 berasal dari tujuh Eselon I sebagai berikut:

Setjen	1	6.039.001.500
Tanaman Pangan	1	1.361.652.000
Perkebunan	4	3.331.377.000
Nak Keswan	5	5.406.714.035
Badan Litbang	5	1.966.315.946
BPSDMP	3	4.872.692.450
Badan Karantina	3	2.285.837.746
Grand Total	22	25.263.590.677

13. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan dari transaksi **Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya** sebesar 1.308.094.569.00 berasal dari Eselon I Badan SDM Pertanian pada satker Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku, Sulawesi Selatan

14. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan dari transaksi **Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap** sebesar Rp.239.399.000.00 berasal dari Eselon I Ditjen Peternakan dan Keswan pada satker Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Banten.

15. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan dari transaksi **Koreksi Penilaian Kembali BMN** sebesar Rp.31.723.432.00 berasal dari Eselon I Ditjen Peternakan dan Keswan pada satker Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan.

16. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan dari transaksi **Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi** sebesar Rp.2.342.541.151.00 berasal dari Eselon I

Perkebunan	089083	213.510.260
Perkebunan	567717	1.861.576.160
Perkebunan Total		2.075.086.420
Nak Keswan	039154	213.086.363
Nak Keswan	199128	54.368.368
Nak Keswan Total		267.454.731
Grand Total		2.342.541.151

17. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan dari transaksi **Koreksi Kesalahan input IP** sebesar Rp.287.702.000.00 berasal dari Eselon I Badan SDM Pertanian pada satker Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, Malang Jawa Timur

Berikut ini disajikan rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel C.44 Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
dalam Rupiah

No	Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan
1	SETJEN	834.586.140.740	822.930.598.518	11.655.542.222
2	ITJEN	379.263.000	3.792.630	

No	Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan
3	DITJEN TP	161.507.869.265	157.482.593.804	4.025.275.461
4	DITJEN HORTI	115.893.226.661	68.477.665.601	47.415.561.060
5	DITJEN BUN	342.263.350.588	383.127.365.201	-40.864.014.613
6	DITJEN PKH	698.345.928.436	765.226.875.493	-66.880.947.057
7	DITJEN PSP	2.915.800.999	10.151.496.209	-7.235.695.210
8	BADAN LITBANG	2.597.831.307.868	16.552.857.364	942.545.571.864
9	BPPSDMP	666.031.838.607	626.159.480.586	39.872.358.021
10	BKP	864.181.000	14.762.740	-612.093.000
11	BARANTAN	802.995.197.337	771.865.922.955	31.129.274.382
12	KONSOLIDASI	-1.488.679.219.707	504.405.590.104	-984.273.629.603
Grand Total		4.734.934.884.794	4.758.157.681.267	-23.222.796.473

Berdasarkan tabel di atas terdapat koreksi Gedung Bangunan atas hasil penilaian kembali barang milik negara tahun 2017 dan 2018 yang dilakukan pada Satker Konsolidasi sebesar Rp(-1.488.679.219.707.00) yang terdiri dari berbagai transaksi sebagai berikut.

Keterangan	2018	2017	Grand Total
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-2.724.900.252	4.310.608.373	1.585.708.121
Transfer Keluar	3.753.376.450	-449.906.000	3.303.470.450
Transfer Masuk	-3.753.421.446	449.906.000	-3.303.515.446
Revaluasi Aset Tetap	-937.165.553.907	-510.300.182.734	-1.447.465.736.641
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-51.540.645.738	1.314.255.857	-50.226.389.881
Beban Kerugian Pelepasan Aset	7.157.515.290	269.728.400	7.427.243.690
Grand Total	-984.273.629.603	-504.405.590.104	-1.488.679.219.707

C.17 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp.608.350.078.280 dan Rp.606.318.041.651 Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2017	606.318.041.651
Mutasi Tambah	
Jurnal Manual Satker Konsolidasi	101.104.783.875
Saldo Awal	1.354.290.640
Pembelian	9.012.473.030
Transfer Masuk	2.280.091.417
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	16.126.712.246
Reklasifikasi Masuk	3.742.050.500
Penyelesaian Pembangunan Langsung	2.255.733.240

Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	6.616.337.000
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	1.809.883.707
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	24.041.845.152
Pengembangan Nilai Aset	5.810.951.955
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	81.296.600
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	71.485.077.175
Pengembangan Melalui KDP	17.992.422.085
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	402.859.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	14.934.000
Total Mutasi Tambah	264.131.741.622
Mutasi Kurang	
Jurnal Manual Satker Konsolidasi	90.436.913.769
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	47.931.125.023
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.883.734.785
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	7.214.230.026
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	84.076.581.081
Penghapusan	3.825.196.870
Transfer Keluar	2.091.506.417
Hibah Keluar	1.744.411.000
Reklasifikasi Keluar	2.834.007.800
Koreksi Pencatatan	10.680.733.401
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	5.124.782.114
Usulan Barang Hibah DK/TP	3.022.390.000
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	1.234.092.707
Total Mutasi Kurang	262.099.704.993
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2018	608.350.078.280
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(267.419.208.831)
Nilai Buku Per 31 Desember 2018	340.930.869.449

Penjelasan mengenai mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

1. Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan melalui Jurnal Manual aplikasi SAIBA pada Satker Konsolidasi sebesar Rp101.104.783.875.00 dengan transaksi sebagai berikut.

Revaluasi Aset Tetap	101.099.479.840
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5.290.350
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	13.685
Total	101.104.783.875

2. Penambahan **Saldo Awal** Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.354.290.640 berasal dari Eselon I sebagai berikut.

Nak Keswan	119133	498.750.000
Nak Keswan Total		498.750.000
Badan Karantina	237970	6.000.000
Badan Karantina		397.055.100
Badan Karantina	526462	144.296.540
Badan Karantina	649420	308.189.000
Badan Karantina Total		855.540.640

Grand Total 1.354.290.640 3.

Penambahan Jalan. Irigasi dan Jaringan dari transaksi **Pembelian** sebesar Rp9.012.473.030 berasal dari Eselon I dengan rincian sebagai berikut.

SekJen	649195	74.080.100
SekJen Total		74.080.100
Perkebunan	567338	93.801.280
Perkebunan Total		93.801.280
Nak Keswan	238996	189.500.000
Nak Keswan	239015	6.602.688.000
Nak Keswan	411956	129.685.700
Nak Keswan	567275	199.650.000
Nak Keswan Total		7.121.523.700
Badan Litbang	237291	1.019.830.850
Badan Litbang	450871	150.700.000
Badan Litbang	567364	10.126.600
Badan Litbang Total		1.180.657.450
BPSDMP	120040	44.900.000
BPSDMP Total		44.900.000
Badan Karantina	237369	12.208.500
Badan Karantina	237678	54.650.000
Badan Karantina	237725	23.000.000
Badan Karantina	237767	15.375.000
Badan Karantina	237860	49.940.000
Badan Karantina	237966	173.800.000
Badan Karantina	237970	8.000.000
Badan Karantina	412141	37.875.000
Badan Karantina	499436	44.998.000
Badan Karantina	526615	20.000.000
Badan Karantina	567371	9.900.000
Badan Karantina	567805	32.782.000
Badan Karantina	649437	14.982.000
Badan Karantina Total		497.510.500
Grand Total		9.012.473.030

4. **Transfer Masuk** Jalan. Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.280.091.417 berasal dari Eselon I berikut .

Hortikultura	417656	39.994.417
Hortikultura Total		39.994.417
Perkebunan	029161	188.585.000
Perkebunan	189133	914.490.000
Perkebunan	209109	200.000.000
Perkebunan	289105	199.301.000
Perkebunan Total		1.502.376.000
Badan Litbang	237306	184.300.000
Badan Litbang	237572	368.630.000

Badan Litbang	412022	184.791.000
Badan Litbang Total		737.721.000
Grand Total		2.280.091.417

5. Penambahan Jalan. Irigasi dan Jaringan sebesar Rp16.126.712.246 dari transaksi **Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP** berasal dari Eselon I dengan rincian sebagai berikut.

Tanaman Pangan	020072	268.056.500
Tanaman Pangan Total		268.056.500
Nak Keswan	238823	199.500.000
Nak Keswan	239420	1.002.759.000
Nak Keswan	239441	136.639.000
Nak Keswan Total		1.338.898.000
Badan Litbang	238027	200.400.000
Badan Litbang	412050	1.121.664.500
Badan Litbang	450862	850.000.000
Badan Litbang	567449	1.611.505.388
Badan Litbang	567702	96.000.000
Badan Litbang	567783	447.977.000
Badan Litbang	634015	528.200.000
Badan Litbang Total		4.855.746.888
BPSDMP	237160	351.350.000
BPSDMP	238069	5.237.148.858
BPSDMP	412101	583.009.000
BPSDMP Total		6.171.507.858
Badan Karantina	237860	235.247.500
Badan Karantina	237910	164.988.000
Badan Karantina	237970	91.617.000
Badan Karantina	412157	228.900.000
Badan Karantina	412163	227.033.500
Badan Karantina	412172	149.420.000
Badan Karantina	526615	230.100.000
Badan Karantina	649416	226.915.000
Badan Karantina	649420	1.938.282.000
Badan Karantina Total		3.492.503.000
Grand Total		16.126.712.246

6. **Reklasifikasi Masuk** Jalan. Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.742.050.500 berasal dari empat Eselon I sebagai berikut.

Nak Keswan	237551	49.200.000
Nak Keswan	239001	64.800.000
Nak Keswan	239420	886.397.000
Nak Keswan Total		1.000.397.000
Badan Litbang	237306	253.057.000
Badan Litbang	238027	33.812.000
Badan Litbang	648720	159.223.000

Badan Litbang Total		446.092.000
BPSDMP	237490	2.191.589.000
BPSDMP Total		2.191.589.000
Badan Karantina	237952	60.372.500
Badan Karantina	238052	43.600.000
Badan Karantina Total		103.972.500
Grand Total		3.742.050.500

7. Mutasi tambah Jalan. Irigasi dan Jaringan dari transaksi **Penyelesaian Pembangunan Langsung** sebesar Rp2.255.733.240 yang berasal dari Eselon I sebagai berikut.

Perkebunan	567338	315.431.040
Perkebunan Total		315.431.040
Nak Keswan	239544	59.410.000
Nak Keswan Total		59.410.000
Badan Litbang	537628	535.047.200
Badan Litbang	567449	228.953.000
Badan Litbang	634036	79.880.000
Badan Litbang Total		843.880.200
BPSDMP	237636	99.595.000
BPSDMP	238069	18.302.000
BPSDMP Total		117.897.000
Badan Karantina	237678	232.910.000
Badan Karantina	237800	31.000.000
Badan Karantina	237860	72.370.000
Badan Karantina	412126	20.000.000
Badan Karantina	412157	98.200.000
Badan Karantina	412163	49.995.000
Badan Karantina	412172	30.000.000
Badan Karantina	499436	223.000.000
Badan Karantina	499459	67.640.000
Badan Karantina	499465	14.000.000
Badan Karantina	526615	80.000.000
Badan Karantina Total		919.115.000
Grand Total		2.255.733.240

8. Terdapat penambahan Jalan. Irigasi dan Jaringan melalui **Transaksi Barang Berlebih Hasil Inventaris** sebesar Rp6.616.337.000 berasal dari Eselon I sebagai berikut.

Tanaman Pangan	179103	14.055.000
Tanaman Pangan Total		14.055.000
Hortikultura	029027	147.777.000
Hortikultura Total		147.777.000
Badan Litbang	237238	6.176.960.000
Badan Litbang	648716	59.522.000
Badan Litbang Total		6.236.482.000
BPSDMP	239125	19.853.000
BPSDMP	239675	198.170.000

BPSDMP Total	218.023.000
Grand Total	6.616.337.000

9. Penambahan Jalan. Irigasi dan Jaringan dari transaksi **Reklasifikasi Masuk Hasil Inventaris** sebesar Rp1.809.883.707 berasal dari empat Eselon I sebagai berikut.

Perkebunan	567338	97.000.000
Perkebunan Total		97.000.000
Nak Keswan	239455	580.644.811
Nak Keswan Total		580.644.811
Badan Litbang	237238	786.368.896
Badan Litbang	634001	109.948.000
Badan Litbang Total		896.316.896
Badan Karantina	499496	235.922.000
Badan Karantina Total		235.922.000
Grand Total		1.809.883.707

10. Mutasi tambah Jalan. Irigasi dan Jaringan dari transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap** sebesar Rp24.041.845.152 dari Eselon 1 sebagai berikut.

Tanaman Pangan	139301	939.283.000
Tanaman Pangan Total		939.283.000
Nak Keswan	029162	275.967.261
Nak Keswan	238776	5.412.000
Nak Keswan Total		281.379.261
PSP	039014	91.076.000
PSP	039158	4.898.345.984
PSP	049028	753.638.120
PSP	139032	3.905.603.999
PSP	239011	6.710.184.788
PSP	330506	50.000.000
PSP Total		16.408.848.891
Badan Litbang	567563	1.000.000
Badan Litbang	634036	6.317.071.000
Badan Litbang Total		6.318.071.000
BPSDMP	238069	94.263.000
BPSDMP Total		94.263.000
Grand Total		24.041.845.152

11. Mutasi tambah Jalan. Irigasi dan Jaringan dari transaksi **Pengembangan Nilai Aset** sebesar Rp5.732.261.955 terdapat di Eselon I berikut.

SekJen	649195	156.981.825
SekJen Total		156.981.825
Tanaman Pangan	010082	142.837.400
Tanaman Pangan Total		142.837.400
Hortikultura	625875	78.690.000
Hortikultura Total		78.690.000
Nak Keswan	411956	191.226.000

Nak Keswan Total		191.226.000
Badan Litbang	237263	4.449.750
Badan Litbang	237380	29.800.000
Badan Litbang	412022	1.262.185.000
Badan Litbang	450831	135.826.280
Badan Litbang	537628	802.570.800
Badan Litbang	567563	108.800.000
Badan Litbang Total		2.343.631.830
BPSDMP	237200	150.230.000
BPSDMP	237437	1.000.000
BPSDMP	238069	153.560.000
BPSDMP	239654	150.000.000
BPSDMP	239675	414.718.000
BPSDMP Total		869.508.000
Badan Karantina	237369	1.344.450
Badan Karantina	237483	149.985.000
Badan Karantina	237860	16.490.000
Badan Karantina	237952	9.900.000
Badan Karantina	237966	395.290.000
Badan Karantina	237970	33.299.950
Badan Karantina	238052	198.580.000
Badan Karantina	393012	45.545.500
Badan Karantina	412126	114.985.000
Badan Karantina	412163	50.000.000
Badan Karantina	412172	80.000.000
Badan Karantina	499436	410.502.000
Badan Karantina	526462	200.000.000
Badan Karantina	537700	28.215.000
Badan Karantina	567371	17.800.000
Badan Karantina	649420	181.000.000
Badan Karantina	649437	95.140.000
Badan Karantina Total		2.028.076.900
Grand Total		5.810.951.955

12. Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan dari transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas** sebesar Rp81.296.600 terdapat di Eselon I berikut.

Badan Litbang	237572	33.215.000
Badan Litbang Total		33.215.000
BPSDMP	239675	28.500.000
BPSDMP Total		28.500.000
Badan Karantina	499465	19.581.600
Badan Karantina Total		19.581.600
Grand Total		81.296.600

13. Mutasi tambah Jalan. Irigasi dan Jaringan dari transaksi **Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset** sebesar Rp71.485.077.175 terdapat di Eselon I berikut.

Tanaman Pangan	8	919.345.702
Hortikultura	5	406.835.390
Perkebunan	4	238.727.212
Nak Keswan	20	14.569.372.433
Badan Litbang	43	40.895.004.896
BPSDMP	16	11.908.935.558
Badan Karantina	19	2.546.855.984
Grand Total	115	71.485.077.175

14. Mutasi tambah Jalan. Irigasi dan Jaringan dari transaksi **Pengembangan melalui KDP** sebesar Rp1.562.931.000.00 terdapat di Eselon I berikut

Nak Keswan	4	6.367.581.000
Badan Litbang	8	6.581.741.035
BPSDMP	5	1.897.143.000
Badan Karantina	6	3.145.957.050
Grand Total	23	17.992.422.085

15. Mutasi tambah Jalan. Irigasi dan Jaringan dari transaksi **Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap** sebesar Rp. Rp. 402.859.000.00 terdapat di Eselon I Ditjen Perkebunan pada satker Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. Rp. 269.025.000.00 dan Eselon 1 Ditjen Peternakan pada satker Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. Rp. 133.834.000.00

16. Mutasi tambah Jalan. Irigasi dan Jaringan dari transaksi **Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi** sebesar Rp. Rp14.934.000.00 terdapat di Eselon I Ditjen Perkebunan pada satker Pusat.

Penjelasan mengenai mutasi kurang Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

1. Mutasi kurang Jalan Irigasi dan Jaringan melalui Jurnal Manual aplikasi SAIBA pada Satker Konsolidasi sebesar Rp. 90.436.662.908.00 dengan transaksi sebagai berikut.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	19.383.000.00
Revaluasi Aset Tetap	81.293.745.908.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	9.123.534.000.00
Total	90.436.662.908.00

2. **Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya** sebesar Rp. 47.931.125.023 berasal dari Eselon I sebagai berikut.

SekJen	2	108.542.099
Tanaman Pangan	27	8.346.773.717
Hortikultura	8	929.297.350
Perkebunan	30	15.917.788.448
Nak Keswan	12	3.650.141.058
PSP	10	11.367.304.777
Badan Litbang	10	6.955.665.000

BPSDMP	6	169.284.318
Badan Karantina	8	486.328.256
Grand Total	113	47.931.125.023
3. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Jalan. Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 1.883.734.785 berasal dari Eselon I		
Badan Litbang	238080	1.880.157.485
BPSDMP	237636	3.577.300
Grand Total		1.883.734.785
4. Pengurangan nilai Jalan. Irigasi dan Jaringan dari transaksi Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset sebesar Rp. 7.201.871.556 pada Eselon I sebagai berikut.		
Tanaman Pangan	2	149.014.970
Hortikultura	4	1.584.678.784
Perkebunan	4	129.776.428
Nak Keswan	7	1.686.711.446
Badan Litbang	11	1.471.118.767
BPSDMP	5	1.419.997.245
Badan Karantina	10	772.932.386
Grand Total	43	7.214.230.026
5. Pengurangan nilai Jalan. Irigasi dan Jaringan dari transaksi Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali sebesar Rp. 80.943.479.210 pada Eselon I sebagai berikut.		
Tanaman Pangan	10	762.596.355
Hortikultura	9	671.945.571
Perkebunan	8	597.177.004
Nak Keswan	27	21.860.081.912
Badan Litbang	54	39.170.016.847
BPSDMP	21	13.662.644.133
Badan Karantina	29	7.352.119.259
Grand Total	158	84.076.581.081
6. Mutasi kurang Jalan. Irigasi dan Jaringan dari transaksi Penghapusan sebesar Rp. 3.657.244.370 yang berasal dari Eselon I.		
Hortikultura	029033	134.385.000
Hortikultura	150812	99.545.000
Hortikultura	199026	1.813.641.000
Hortikultura Total		2.047.571.000
Badan Litbang	567428	42.784.800
Badan Litbang Total		42.784.800
BPSDMP	237814	220.530.000
BPSDMP	239675	1.346.358.570
BPSDMP Total		1.566.888.570
Grand Total		3.657.244.370
7. Pengurangan nilai Jalan. Irigasi dan Jaringan dari transaksi Transfer Keluar sebesar Rp. 2.091.506.417 berasal dari Eselon I berikut		
Hortikultura	169045	39.994.417
Hortikultura Total		39.994.417

Perkebunan	189113	914.490.000
Perkebunan	209079	200.000.000
Perkebunan	289181	199.301.000
Perkebunan Total		1.313.791.000
Badan Litbang	237291	737.721.000
Badan Litbang Total		737.721.000
Grand Total		2.091.506.417

8. Pengurangan nilai Jalan. Irigasi dan Jaringan dari transaksi **Hibah keluar** sebesar Rp. 1.744.411.000 berasal dari Eselon I.

Tanaman Pangan	089098	89.602.000
Tanaman Pangan	139077	468.630.000
Tanaman Pangan Total		558.232.000
Perkebunan	109071	99.722.000
Perkebunan	139092	253.237.000
Perkebunan	179062	299.425.000
Perkebunan	191504	441.045.000
Perkebunan	249106	92.750.000
Perkebunan Total		1.186.179.000
Grand Total		1.744.411.000

9. Pengurangan nilai Jalan. Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 2.834.007.800 dari transaksi **Reklasifikasi Keluar** yang berasal dari Eselon I sebagai berikut.

Tanaman Pangan	020072	22.440.000
Tanaman Pangan Total		22.440.000
Perkebunan	238830	14.989.500
Perkebunan	567521	192.600.000
Perkebunan Total		207.589.500
Nak Keswan	237551	49.200.000
Nak Keswan	239001	64.800.000
Nak Keswan Total		114.000.000
Badan Litbang	237306	5.683.000
Badan Litbang	238027	38.894.100
Badan Litbang	567296	38.469.200
Badan Litbang	648720	146.723.000
Badan Litbang Total		229.769.300
BPSDMP	237490	2.191.589.000
BPSDMP	239654	25.275.000
BPSDMP Total		2.216.864.000
Badan Karantina	237767	13.600.000
Badan Karantina	393012	29.745.000
Badan Karantina Total		43.345.000
Grand Total		2.834.007.800

10. Pengurangan nilai Jalan. Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 10.680.733.401 dari transaksi **Koreksi Pencatatan** terdapat dari Eselon I berikut.

SekJen	451956	72.849.260
SekJen Total		72.849.260
Tanaman Pangan	159062	228.238.000
Tanaman Pangan Total		228.238.000
Hortikultura	625875	351.318.000
Hortikultura Total		351.318.000
Perkebunan	139076	296.211.084
Perkebunan	567408	374.476.680
Perkebunan Total		670.687.764
Nak Keswan	119133	498.750.000
Nak Keswan	239455	2.516.145.720
Nak Keswan Total		3.014.895.720
Badan Litbang	237217	12.241.600
Badan Litbang	237238	531.389.000
Badan Litbang	237306	31.873.500
Badan Litbang	238080	1.315.347.500
Badan Litbang	411971	68.405.462
Badan Litbang	450840	28.210.000
Badan Litbang	450856	108.634.545
Badan Litbang	567296	56.908.966
Badan Litbang	567318	168.749.547
Badan Litbang	567570	855.000.000
Badan Litbang	633961	175.250.000
Badan Litbang	634015	28.255.500
Badan Litbang Total		3.380.265.620
BPSDMP	239654	12.816.000
BPSDMP	239661	27.540.000
BPSDMP Total		40.356.000
Badan Karantina	237860	282.964.820
Badan Karantina	238052	1.311.993.967
Badan Karantina	499465	19.581.600
Badan Karantina	499471	149.429.650
Badan Karantina	499496	1.154.975.000
Badan Karantina	526615	3.178.000
Badan Karantina Total		2.922.123.037
Grand Total		10.680.733.401

11. Pengurangan nilai Jalan. Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.5.124.782.114 **Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelolaterdapat** di Eselon I Ditjen PSP pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov Nusa Tenggara Barat.

12. Pengurangan nilai Jalan. Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 3.022.390.000 **Usulan Barang Hibah DK/TP**terdapat di Eselon I dengan rincian sebagai berikut.

Tanaman Pangan	059151	39.380.000
Tanaman Pangan	059568	40.000.000
Tanaman Pangan	139301	939.283.000

Tanaman Pangan	209080	40.000.000
Tanaman Pangan	269078	140.400.000
Tanaman Pangan	319171	44.961.000
Tanaman Pangan Total		1.244.024.000
Perkebunan	189133	907.290.000
Perkebunan	249031	871.076.000
Perkebunan Total		1.778.366.000
Grand Total		3.022.390.000

13. Pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 1.234.092.707 **Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi** terdapat di Eselon I dengan rincian sebagai berikut.

Perkebunan	567338	97.000.000
Perkebunan Total		97.000.000
Nak Keswan	239455	240.775.811
Nak Keswan Total		240.775.811
Badan Litbang	237238	786.368.896
Badan Litbang	634001	109.948.000
Badan Litbang Total		896.316.896
Grand Total		1.234.092.707

Berikut ini disajikan rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Eselon I dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 45. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dalam Rupiah

No	Eselon 1	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan
1	SekJen	19.864.084.438.00	19.814.413.872.00	49.670.566.00
2	Tanaman Pangan	11.719.799.171.00	20.747.540.611.00	-9.027.741.440.00
3	Hortikultura	22.039.716.698.00	27.159.177.513.00	-5.119.460.815.00
4	Perkebunan	9.849.203.726.00	29.216.264.338.00	-19.367.060.612.00
5	Nak Keswan	149.508.055.502.00	147.931.645.244.00	1.576.410.258.00
6	PSP	71.454.000.00	154.692.000.00	-83.238.000.00
7	Badan Litbang	300.541.300.220.00	283.936.555.740.00	16.604.744.480.00
8	BPSDMP	60.841.751.712.00	56.379.096.862.00	4.462.654.850.00
10	Badan Karantina	85.189.649.132.00	82.921.461.896.00	2.268.187.236.00
11	Satker Konsolidasi	-51.274.936.319.00	-61.942.806.425.00	10.667.870.106.00
	Total	608.350.078.280.00	606.318.041.651.00	2.032.036.629.00

Berdasarkan tabel di atas terdapat koreksi Jalan Irigasi dan Jaringan atas hasil penilaian kembali barang milik negara tahun 2017 dan 2018 yang dilakukan pada Satker Konsolidasi sebesar Rp(51.274.936.319.00) yang terdiri dari berbagai transaksi sebagai berikut.

Keterangan	2018	2017	Grand Total
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-19.588.501.00	8.575.000.00	-11.013.501.00

Keterangan	2018	2017	Grand Total
Revaluasi Aset Tetap	19.805.733.932.00	-61.951.381.425.00	-42.145.647.493.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-9.118.275.325.00		-9.118.275.325.00
Grand Total	10.667.870.106.00	61.942.806.425.00	-51.274.936.319.00

C.18 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 72.295.320.166 dan 79.520.885.958. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2017	79.520.885.958
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	201.408.000
Pembelian	2.684.989.233
Transfer Masuk	593.962.500
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	697.680.000
Reklasifikasi Masuk	106.000.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	414.424.000
Pengembangan Nilai Aset	274.220.000
Total Mutasi Tambah	4.972.683.733
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	5.955.230.425
Penghapusan	23.294.550
Transfer Keluar	2.606.386.050
Reklasifikasi Keluar	1.002.338.500
Koreksi Pencatatan	2.611.000.000
Total Mutasi Kurang	12.198.249.525
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2018	72.295.320.166
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.468.982.573)
Nilai Buku Per 31 Desember 2018	70.826.337.593

Penjelasan mengenai **Mutasi Tambah** Aset Tetap Lainnya sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari transaksi **Saldo Awal** sebesar Rp.201.408.000 berasal dari Eselon I Ditjen Peternakan dan Keswan pada Satker Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
2. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari transaksi **Pembelian** sebesar Rp. 2.684.989.233 berasal dari Eselon I sebagai berikut.

SekJen		59.687.000
SekJen	418329	155.062.861
SekJen	451956	182.361.172
SekJen	649195	75.978.500
SekJen Total		473.089.533

ItJen	238247	478.881.000
ItJen Total		478.881.000
Tanaman Pangan	020072	2.489.100
Tanaman Pangan Total		2.489.100
Nak Keswan	567275	24.000.000
Nak Keswan Total		24.000.000
Badan Litbang	237238	48.830.500
Badan Litbang	237259	15.276.860
Badan Litbang	237263	594.000.000
Badan Litbang	567296	15.585.000
Badan Litbang	648673	277.821.240
Badan Litbang Total		951.513.600
BPSDMP	237200	7.260.000
BPSDMP	237437	226.000.000
BPSDMP	239675	49.720.000
BPSDMP	412069	29.961.000
BPSDMP Total		312.941.000
BKP	452332	396.975.000
BKP Total		396.975.000
Badan Karantina	237483	45.100.000
Badan Karantina Total		45.100.000
Grand Total		2.684.989.233
3. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari transaksi Transfer Masuk sebesar Rp. 593.962.500 berasal dari Eselon I sebagai berikut.		
Perkebunan	189133	167.984.000
Badan Litbang	237221	425.978.500
Grand Total		593.962.500
4. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari transaksi Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp. 274.220.000 berasal dari Eselon I Inspektorat Jenderal 2.100.000 dan dari Eselon 1 Badan Ketahanan Pangan pada Satker Pusat sebesar Rp. 272.120.000 .		
5. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp. 697.680.000 berasal dari Eselon I.		
Badan Litbang	411971	194.300.000
Badan Litbang Total		194.300.000
BPSDMP	394771	268.640.000
BPSDMP	412069	234.740.000
BPSDMP Total		503.380.000
Grand Total		697.680.000
6. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari transaksi Reklasifikasi Masuk sebesar Rp. 106.000.000 berasal dari Eselon I Ditjen Peternakan dan Keswan pada Satker Pusat Veteriner Farma.		

7. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari transaksi **Penyelesaian Pembangunan Langsung** sebesar Rp.414.424.000 berasal dari Eselon I Badan Litbang pada satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan

Penjelasan mengenai **Mutasi Kurang** Aset Tetap Lainnya sebagai berikut.

1. Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya pada transaksi **Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya** sebesar Rp. 5.955.230.425 berasal dari Eselon I, yaitu:

SekJen	411925	62.930.000
SekJen	451924	3.000.000
SekJen Total		65.930.000
Tanaman Pangan		1.336.549.000
Tanaman Pangan	179066	31.000.000
Tanaman Pangan Total		1.367.549.000
Hortikultura	029027	31.223.750
Hortikultura Total		31.223.750
Perkebunan	149067	79.338.000
Perkebunan Total		79.338.000
Nak Keswan	239520	1.200.000
Nak Keswan	411956	183.440.000
Nak Keswan Total		184.640.000
Badan Litbang	567495	3.699.203.137
Badan Litbang	567673	246.072.326
Badan Litbang	648673	13.771.412
Badan Litbang Total		3.959.046.875
BPSDMP	412075	50.000.000
BPSDMP	412101	1.000.000
BPSDMP Total		51.000.000
Badan Karantina	237678	899.700
Badan Karantina	393012	15.000.000
Badan Karantina	412110	150.603.100
Badan Karantina	649458	50.000.000
Badan Karantina Total		216.502.800
Grand Total		5.955.230.425

2. Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya pada transaksi **Penghapusan** sebesar Rp. 23.294.550 terdapat pada Eselon I berikut :

Hortikultura	029033	11.000.000
Hortikultura	290106	4.778.000
Hortikultura	299044	7.250.000
Hortikultura Total		23.028.000
Perkebunan	238830	206.550
Perkebunan Total		206.550
BPSDMP	394771	60.000
BPSDMP Total		60.000
Grand Total		23.294.550

3. Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya pada transaksi **Transfer Keluar** Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 2.606.386.050 yang berasal dari tiga Eselon I sebagai berikut.

SekJen	451924	83.086.050
ItJen	238247	480.981.000
Perkebunan	189113	167.984.000
Badan Litbang	025227	425.978.500
BKP	452332	1.448.356.500
Grand Total		2.606.386.050

4. Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya pada transaksi **Reklasifikasi Keluar** sebesar Rp. 1.002.338.500 terdapat pada Eselon I sebagai berikut.

SekJen	451949	14.800.000
Nak Keswan	239420	9.000.000
Badan Litbang	237221	425.978.500
Badan Litbang	634036	414.424.000
Badan Litbang Total		840.402.500
BPSDMP	412101	138.136.000
Grand Total		1.002.338.500

5. Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya pada transaksi **Koreksi Pencatatan** sebesar Rp. 2.611.000.000 terdapat pada Eselon I Sekjen pada Satker Biro Perencanaan.

SekJen	451924	39.000.000
Tanaman Pangan	020072	2.572.000.000
Grand Total		2.611.000.000

Berikut ini disajikan rincian Aset Tetap Lainnya per Eselon I dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel C.46 Rincian Aset Tetap Lainnya per Eselon I per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dalam Rupiah

No.	Eselon I	31Desember2018	31Desember2017	Kenaikan/ Penurunan
1	SETJEN	12.079.866.131	11.809.592.648	270.273.483
2	ITJEN	106.861.055	106.861.055	0
3	DITJEN TP	2.528.046.150	6.465.106.050	-3.937.059.900
4	DITJEN HORTI	501.698.222	555.949.972	-54.251.750
5	DITJEN BUN	16.448.539.737	16.528.084.287	-79.544.550
6	DITJEN PKH	6.047.523.310	5.909.755.310	137.768.000
7	DITJEN PSP	693.876.760	693.876.760	0
8	BADAN LITBANG	12.408.206.531	15.647.418.306	-3.239.211.775
9	BPPSDMP	19.768.129.651	19.141.004.651	627.125.000
10	BKP	600.000	779.861.500	-779.261.500
11	BARANTAN	1.711.972.619	1.883.375.419	-171.402.800
Grand Total		72.295.320.166	79.520.885.958	-7.225.565.792

C.22 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp14.198.879.909.00 dan Rp22.236.085.173.00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2017	22.236.085.173
Mutasi Tambah	
Perolehan/Penambahan KDP	36.289.754.140
Pengembangan KDP	362.242.647.882
Transfer Masuk KDP	38.500.000
Total Mutasi Tambah	398.570.902.022
Mutasi Kurang	
Beban Ekstrakomtabel	56.251.792
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	234.936.106.720
Pengembangan Melalui KDP	169.876.275.525
Koreksi Nilai KDP	1.335.777.512
Penghapusan/ Penghentian KDP	365.195.737
Transfer Keluar KDP	38.500.000
Total Mutasi Kurang	406.608.107.286
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2018	14.198.879.909

Penjelasan mengenai **Mutasi Tambah** Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

- Perolehan/Penambahan KDP** sebesar Rp. 36.289.754.140 berasal dari sembilan Eselon I sebagai berikut.

SekJen	8	332.463.500
Tanaman Pangan	3	63.098.000
Hortikultura	1	93.073.750
Perkebunan	9	786.561.346
Nak Keswan	23	9.384.096.350
Badan Litbang	117	11.801.441.693
BPSDMP	46	5.414.330.296
Badan Karantina	97	8.414.689.205
Grand Total	304	36.289.754.140
- Pengembangan KDP** sebesar Rp. 362.218.389.882 berasal dari tujuh Eselon I:

SekJen	38	19.766.278.999
Tanaman Pangan	10	840.838.225
Perkebunan	26	16.690.992.086
Nak Keswan	38	25.554.596.610
Badan Litbang	389	143.241.736.160
BPSDMP	122	68.847.277.054
Badan Karantina	268	87.276.670.748
Grand Total	891	362.218.389.882
- Mutasi tambah KDP dari transaksi **Transfer Masuk KDP** sebesar Rp. 38.500.000 dari Eselon 1 Ditjen Peternakan dan Keswan pada satker Balai Besar Veteriner Maros. Sulawesi Selatan.

Penjelasan mengenai **Mutasi Kurang** Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

1. **Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP** sebesar Rp239.114.253.706.00 berasal dari lima Eselon I sebagai berikut.

SekJen	3	12.125.095.793
Tanaman Pangan	2	781.172.000
Perkebunan	6	11.569.526.011
Nak Keswan	13	24.900.543.110
Badan Litbang	57	69.174.458.378
BPSDMP	26	46.022.563.614
Badan Karantina	60	70.362.747.814
Grand Total	167	234.936.106.720

2. **Pengembangan KDP** sebesar Rp. 168.871.896.525 berasal dari Eselon I:

SekJen	2	7.901.635.206
Tanaman Pangan	1	122.764.225
Perkebunan	5	5.908.027.421
Nak Keswan	11	8.679.768.000
Badan Litbang	53	92.776.194.425
BPSDMP	27	24.221.637.450
Badan Karantina	50	30.266.248.798
Grand Total	149	169.876.275.525

3. **Koreksi Nilai KDP** sebesar Rp. 1.332.921.512 berasal dari Eselon I:

Badan Litbang	567449	4.757.612
Badan Litbang	567563	2.310.000
Badan Litbang Total		7.067.612
BPSDMP	412101	415.800.000
BPSDMP Total		415.800.000
Badan Karantina	237483	910.053.900
Badan Karantina	499434	2.856.000
Badan Karantina Total		912.909.900
Grand Total		1.335.777.512

4. **Penghapusan/ Penghentian KDP** sebesar Rp. 365.195.737 berasal dari Eselon I:

ItJen	238247	94.545.000
ItJen Total		94.545.000
Nak Keswan	238823	155.356.040
Nak Keswan	411956	16.676.150
Nak Keswan Total		172.032.190
Badan Litbang	633996	15.235.400
Badan Litbang Total		15.235.400
BPSDMP	237160	38.400.000
BPSDMP	239640	44.983.147
BPSDMP Total		83.383.147
Grand Total		365.195.737

5. **Transfer Keluar KDP** sebesar Rp38.500.000 berasal dari Eselon I Ditjen Peternakan dan Keswan pada satker Pusat.

6. Pengurangan melalui Jurnal saiba transaksi **Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin** sebesar Rp. 11.150.000 terdapat dari Eselon I Badan Karantina pada Satker Stasiun Karantina kelas II Manokwari sebesar Rp. 1.100.000 dan pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong sebesar Rp. 10.050.000.
7. Pengurangan melalui Jurnal saiba transaksi **Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung Bangunan** 56.251.792 terdapat dari Eselon I Badan Karantina pada satker Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang sebesar Rp. 21.455.792 dan satker Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin sebesar Rp. 23.646.000

Berikut ini disajikan rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Eselon I dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 47. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Eselon I per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dalam Rupiah

No	Eselon 1	31Desember2018	31Desember2017	Kenaikan/ Penurunan
1	SekJen	72.011.500	0	72.011.500
2	ItJen	0	94.545.000	-94.545.000
3	Tanaman Pangan	0	0	0
4	Hortikultura	142.243.750	49.170.000	93.073.750
5	Perkebunan	6.859.200	6.859.200	0
6	Nak Keswan	1.569.396.500	383.046.840	1.186.349.660
7	Badan Litbang	7.617.448.490	14.525.824.452	-6.908.375.962
8	Badan SDMP	4.393.730.286	875.507.147	3.518.223.139
9	Badan Karantina	397.190.183	6.301.132.534	-5.903.942.351
Total		14.198.879.909	22.236.085.173	-8.037.205.264

Berikut ini disajikan rincian barang yang masuk ke Konstruksi Dalam Pengerjaan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

URAIAN	JUMLAH S/D 1 JANUARI 2018	PENAMBAHAN	KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF	JUMLAH S/D 31 DESEMBER 2018
	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
Tanah Dalam Pengerjaan	44.020.000	53.542.875.940	53.542.875.940	44.020.000
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	291.260.300	19.035.550.239	19.138.718.039	188.092.500
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	21.743.694.073	295.432.455.221	302.868.392.585	14.307.756.709
Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	133.931.300	28.401.982.773	28.876.903.373	-340.989.300
Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	23.179.500	418.564.600	441.744.100	0
Jumlah	22.236.085.173	396.831.428.773	404.868.634.037	14.198.879.909

C.20 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 6.058.717.115.122.00 dan Rp 5.551.532.836.882.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan KDP. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel C.48 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
dalam Rupiah

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	11.608.767.370.893	0	11.608.767.370.893
2	Peralatan dan Mesin	6.225.890.240.250	4.700.564.104.242	1.524.869.641.282
3	Gedung dan Bangunan	4.734.934.884.794	1.089.264.819.476	3.365.370.176.896
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	608.350.078.280	267.419.208.831	335.143.218.839
5	Aset Tetap Lainnya	72.964.415.166	1.468.982.573	71.466.261.846
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.198.879.909	0	11.003.709.923
Total		23.263.126.903.026	6.058.717.115.122	17.186.620.379.679

ASET LAINNYA

C.21 ASET TAK BERWUJUD

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 92.020.243.837,00 dan Rp 91.781.280.244,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.49 Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hak Cipta	29.625.000,00
2	Paten	529.681.000,00
3	Software	25.698.942.833,00
4	Lisensi	2.512.134.390,00
5	Hasil Kajian/Penelitian	24.960.236.864,00
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	38.289.623.750,00
Jumlah		92.020.243.837,00

Tabel C.50 Aset Tak Berwujud per Eselon I per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	17.177.325.307,00	18.306.323.501,00

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
2	Inspektorat Jenderal	1.669.608.040,00	591.009.340,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	810.523.275,00	853.073.275,00
4	Ditjen Hortikultura	777.374.000,00	1.356.986.964,00
5	Ditjen Perkebunan	1.417.133.908,00	1.274.811.303,00
6	Ditjen Peternakan	2.150.757.412,00	1.914.507.412,00
7	Ditjen PSP	33.386.095.100,00	33.352.358.660,00
8	Badan Litbang	29.930.559.829,00	29.844.134.185,00
9	Badan PSDMP	2.242.527.466,00	2.444.462.104,00
10	Badan Ketahanan Pangan	40.000.000,00	40.000.000,00
11	Badan Karantina Pertanian	2.418.339.500,00	1.803.613.500,00
Jumlah		92.020.243.837,00	91.781.280.244,00

Berikut ini disajikan rincian jenis Aset Tak Berwujud per eselon I sebagai berikut :

Eselon I	Hak Cipta	Paten	Software	Lisensi	Hasil Kajian/Penelitian	Aset Tak Berwujud Lainnya
Sekretariat Jenderal			9.617.293.267	2.512.134.390		5.047.897.650
Inspektorat Jenderal			1.669.608.040			
Ditjen Tanaman Pangan			579.227.675			231.295.600
Ditjen Hortikultura			775.724.000			1.650.000
Ditjen Perkebunan			1.034.923.908		249.645.000	132.565.000
Ditjen Peternakan			2.007.932.412			142.825.000
Ditjen PSP			1.230.845.600			32.155.249.500
Badan Litbang	29.625.000	529.681.000	4.197.272.965		24.710.591.864	463.389.000
Badan PSDMP			2.182.775.466			59.752.000
Badan Ket.Pangan			40.000.000			
Badan Karantina			2.363.339.500			55.000.000
Total	29.625.000	529.681.000	25.698.942.833	2.512.134.390	24.960.236.864	38.289.623.750

Berdasarkan tabel diatas, disajikan rincian jenis Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran C9**.

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud pada Kementerian Pertanian sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2017

Rp 91.781.280.244,00

Mutasi tambah:

Saldo Awal	Rp6.115.000,00
Pembelian	Rp2.906.408.373,00
Transfer Masuk	Rp533.392.290,00
Reklasifikasi Masuk	Rp6.360.270,00
Perolehan Lainnya	Rp291.259.500,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp414.423.500,00

Mutasi kurang:

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(Rp2.636.289.120,00)
Penghapusan	(Rp452.386.257,00)

Transfer Keluar	(Rp533.392.290,00)
Koreksi Pencatatan	(Rp296.927.673,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp92.020.243.837,00
Akumulasi Amortisasi sd 31 Desember 2018	(Rp20.491.835.228,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp 71.528.408.609,00

Mutasi tambah berasal dari.

1. Saldo Awal sebesar Rp6.115.000,00 terdapat pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Satker Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang - NTT (412081).
2. Pembelian sebesar Rp2.783.393.373,00 terdapat pada:
 - a. Sekretariat Jenderal Satker Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik (238050) sebesar Rp40.000.000,00 dan Satker Biro Umum dan Pengadaan (451956) sebesar Rp92.422.500,00;
 - b. Kantor Pusat Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.078.598.700,00;
 - c. Kantor Pusat Ditjen Hortikultura sebesar Rp271.840.000,00;
 - d. Kantor Pusat Ditjen Perkebunan sebesar Rp144.539.000,00;
 - e. Kantor Pusat Ditjen Peternakan dan Keswan sebesar Rp175.650.000,00 dan Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan (239441) sebesar Rp46.200.000,00;
 - f. Kantor Pusat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp100.000.000,00;
 - g. Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Rp237.700.000,00
 - h. Tiga Belas Satker Badan Karantina Pertanian sejumlah Rp719.458.173,00. Rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel C.51 Rincian Mutasi Tambah Pembelian Satker Barantan

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
1	238205	Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang	34.900.000
2	412110	Sekretariat Badan Karantina Pertanian	77.500.000
3	412126	Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok	225.000.000
4	412141	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh	25.000.000
5	499436	Balai Uji Terap Teknik Dan Metode Karantina Pertanian	120.000.000
6	499440	Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado	49.500.000
7	499459	Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu	30.000.000
8	499480	Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon	19.878.173
9	526462	Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan	26.000.000
10	649270	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende	7.205.000
11	649416	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong	44.975.000
12	649420	Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya	49.500.000
13	649437	Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo	10.000.000
Jumlah			719.458.173,00

3. Transfer Masuk sebesar Rp533.392.290,00 terdapat pada:
 - a. Ditjen Perkebunan Satker Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat (139127) sebesar Rp4.432.790,00;

- b. Dua Puluh Dua Satker Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sejumlah Rp291.259.500,00. Rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel C.52 Rincian Mutasi Tambah Transfer Masuk Satker Barantan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
1	237217	Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang	12.030.000
2	237238	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi	10.360.000
3	237242	Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor	1.800.000
4	237259	Balai Besar Penelitian Veteriner, Bogor	5.650.000
5	237306	Balai Penelitian Tanaman Rempah Dan Obat, Bogor	21.375.000
6	237380	Balai Penelitian Lingkungan Pertanian	14.675.000
7	237572	Balai Penelitian Tanaman Pemanis Dan Serat Malang	2.200.000
8	237931	Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Banjarbaru	14.245.000
9	238080	Balai Penelitian Tanaman Sereal Maros	140.642.000
10	411987	Balai Penelitian Tanaman Hias, Segunung	2.082.500
11	411993	Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang Dan Umbi Malang	25.675.000
12	412022	Balai Penelitian Tanaman Industri Dan Penyegar	3.625.000
13	537628	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Serpong	4.275.000
14	567449	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat	2.700.000
15	567702	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara	800.000
16	567783	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Ntt	800.000
17	633982	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali	5.650.000
18	634001	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi	800.000
19	648669	Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pascapanen Pertanian	16.075.000
20	648680	Balai Penelitian Tanah, Bogor	4.000.000
21	648694	Balai Penelitian Agroklimat Dan Hidrologi, Bogor	800.000
22	648720	Loka Penelitian Sapi Potong, Grati Jawa Timur	1.000.000
Jumlah			291.259.500,00

- c. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Satker Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor (237160) sebesar Rp237.700.000,00.
4. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp6.360.270,00 terdapat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Satker Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor (237242).
 5. Perolehan Lainnya sebesar Rp291.259.500,00 terdapat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Satker Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Bogor (500941).
 6. Pengembangan Nilai Aset total sebesar Rp414.423.500,00 yaitu:
 - a. Sekretariat Jenderal Satker Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik (238050) sebesar Rp206.000.000,00;
 - b. Kantor Pusat Ditjen Hortikultura sebesar Rp80.334.000,00;

- c. Kantor Pusat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan sebesar Rp14.400.000,00;
- d. Badan Karantina Pertanian Satker Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi (237767) sebesar Rp10.000.000,00, Satker Sekretariat Badan Karantina Pertanian (412110) sebesar Rp57.000.000,00, dan Satker Balai Uji Standar Karantina Pertanian (649259) sebesar Rp46.689.500,00.

Mutasi kurang berasal dari:

- 1. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp2.636.289.120,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Lima Satker Sekretariat Jenderal sejumlah Rp1.461.267.680,00. Rincian pada tabel dibawah ini:

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
1	411925	Pusat Data & Sistem Informasi Pertanian	679.145.500,00
2	418329	Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA)	222.961.980,00
3	451924	Biro Perencanaan	84.305.200,00
4	451949	Biro Keuangan dan Perlengkapan	112.365.000,00
5	451955	Biro Hukum	362.490.000,00
Jumlah			1.461.267.680,00

- b. Kantor Pusat Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp42.550.000,00;
- c. Ditjen Hortikultura sejumlah Rp931.786.964,00. Rincian pada tabel dibawah ini:

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
1	059000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Timur	5.000.000,00
2	139030	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalimantan Barat	15.514.765,00
3	179021	Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sulawesi Utara	2.200.000,00
4	229027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Bali	8.865.580,00
5	229046	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kab. Bangli	2.216.395,00
6	239127	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Nusa Tenggara Barat	1.720.224,00
7	625875	Kantor Pusat Ditjen Hortikultura	896.270.000,00
Jumlah			931.786.964,00

- d. Ditjen Perkebunan Satker Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (149067) sebesar Rp2.216.395,00;
- e. Kantor Pusat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp32.647.560,00;
- f. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Satker Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros (238080) sebesar Rp2.216.395,00, Satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo (450856) sebesar Rp80.916.003,00, Satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau (567460) sebesar Rp75.949.028,00, dan Satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (567495) sebesar Rp4.522.700,00.

- g. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Satker Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan (418021) sebesar Rp2.216.395,00
2. Penghapusan sebesar Rp452.386.257,00 terdapat pada:
- Sekretariat Jenderal Satker Biro Keuangan dan Perlengkapan (451949) sebesar Rp6.153.014,00;
 - Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat (239011) sebesar Rp2.700.000,00;
 - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali (229030) sebesar Rp2.216.395 dan Satker Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (412069) sebesar Rp441.316.848.
3. Transfer Keluar sebesar Rp533.392.290,00 terdapat pada:
- a. Ditjen Perkebunan Satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (139085) sebesar Rp2.216.395,00 dan Satker Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab Kapuas Sulu Provinsi Kalimantan Barat (139090) sebesar Rp2.216.395,00;
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Satker Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Bogor (500941) sebesar Rp291.259.500,00;
 - c. Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar Rp237.700.000,00.
4. Koreksi Pencatatan sebesar Rp296.927.673,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
1	018.08.633656	Kantor Pusat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	30.916.000,00
2	018.09.237259	Balai Besar Penelitian Veteriner, Bogor	2.000.000,00
3	018.09.238080	Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros	6.115.000,00
4	018.09.412013	Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Bogor	33.360.000,00
5	018.09.567495	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan	6.115.000,00
6	018.12.237352	Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang	6.115.000,00
7	018.12.237622	Balai Besar Karantina Pertanian Belawan	6.115.000,00
8	018.12.237732	Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru	6.115.000,00
9	018.12.237788	Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang	50.755.500,00
10	018.12.237800	Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang	6.115.000,00
11	018.12.237860	Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung	6.115.000,00
12	018.12.237881	Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak	6.115.000,00
13	018.12.237966	Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan	6.115.000,00
14	018.12.238205	Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang	6.115.000,00
15	018.12.393012	Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam	6.115.000,00
16	018.12.412157	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon	6.115.000,00
17	018.12.412163	Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura	13.000.000,00
18	018.12.499440	Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado	6.115.000,00

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
19	018.12.499459	Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu	6.115.000,00
20	018.12.499471	Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram	6.115.000,00
21	018.12.499480	Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon	32.366.173,00
22	018.12.499496	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari	6.115.000,00
23	018.12.526615	Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari	6.115.000,00
24	018.12.537700	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu	6.115.000,00
25	018.12.567322	Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	6.115.000,00
26	018.12.649420	Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya	6.115.000,00
27	018.12.649437	Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo	6.115.000,00
28	018.12.649441	Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate	6.115.000,00
Jumlah			296.927.673,00

C.22 ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp716.975.689.013,00 dan Rp366.970.350.022,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.53 Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Sekretariat Jenderal	25.201.833.367,00	16.444.772.883,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	58.808.505.504,00	27.474.850.202,00
4	Ditjen Hortikultura	11.837.678.118,00	7.101.148.950,00
5	Ditjen Perkebunan	247.073.110.541,00	54.114.321.476,00
6	Ditjen Peternakan	75.067.836.426,00	53.313.170.107,00
7	Ditjen PSP	42.768.000,00	18.315.857.623,00
8	Badan Litbang	47.808.994.740,00	32.930.933.592,00
9	Badan PSDMP	261.784.937.834,00	168.770.262.403,00
10	Badan Ketahanan Pangan	2.109.665.706,00	2.602.521.845,00
11	Badan Karantina Pertanian	37.208.627.397,00	89.182.442.314,00
12	Satker Konsolidasi	(49.968.268.620,00)	(103.279.931.373,00)
Jumlah		716.975.689.013,00	366.970.350.022,00

Saldo aset lain-lain tersebut belum termasuk Nilai Tunggakan DPM LUEP pada 20 provinsi yang penagihannya telah dilimpahkan kepada PUPN. Hasil rekonsiliasi antara Kementerian Pertanian (dhi. Badan Ketahanan Pangan) menunjukkan sepuluh provinsi (Jabar, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalsel, Sulsel, Banten, Gorontalo dan Sulbar) telah melaporkan mempunyai nilai saldo tunggakan sd. 31 Desember 2018 sebesar Rp9.950.274.498,39 dan

kas pada rekening penampungan sebesar Rp1.313.184.636,00. Sepuluh provinsi lainnya sedang dalam proses rekonsiliasi.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagaiberikut:

Saldo per 31 Desember 2017	Rp366.970.350.022,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp499.816.850.517,00
Reklasifikasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp53.311.662.753,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(Rp45.708.593.418,00)
Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan)	(Rp4.335.771.651,00)
Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang dihentikan)	(Rp3.334.823.200,00)
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(Rp103.114.522.297,00)
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(Rp629.935.000,00)
Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	(Rp1.428.528.000,00)
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	(Rp3.961.211.362,00)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(Rp38.993.162.301,00)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(Rp1.616.627.050,00)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp716.975.689.013,00
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2018	(Rp267.250.832.428,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp449.724.856.585,00

Mutasi tambah berasal dari.

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp499.816.850.517,00. Reklasifikasi yang signifikan merupakan hasil inventarisasi Aset Tetap sebagai tindak lanjut permasalahan Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya, dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel C.54 Rincian Aset Tetap yang Tidak Diketahui Keberadaannya

No	Eselon I	Jumlah (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	25.994.481.351,00
2	Inspektorat Jenderal	338.460.177,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	43.735.436.460,00
4	Ditjen Hortikultura	9.485.205.533,00
5	Ditjen Perkebunan	198.299.680.267,00
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	36.204.942.700,00
7	Ditjen PSP	17.914.140.822,00
8	Badan Litbang	40.732.233.886,00
9	Badan PPSDMP	94.350.287.774,00
10	Badan Ketahanan Pangan	987.861.300,00
11	Badan Karantina Pertanian	31.774.120.247,00
Jumlah		499.816.850.517,00

2. Reklasifikasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah sebesar Rp53.311.662.753,00 terdapat pada Satker Konsolidasi.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp45.708.593.418,00 dengan rincian sebagai berikut:

Sekretariat Jenderal	Rp638.676.750,00
Ditjen Tanaman Pangan	Rp1.933.811.749,00
Ditjen Hortikultura	Rp4.367.000,00
Ditjen Perkebunan	Rp1.599.070.500,00
Ditjen Peternakan dan Keswan	Rp9.050.887.233,00
Ditjen PSP	Rp16.826.463.891,00
Badan Litbang	Rp9.562.735.817,00
Badan PPSDMP	Rp287.761.450,00
Badan Karantina Pertanian	Rp5.804.819.028,00

2. Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan) sebesar Rp4.335.771.651 dengan rincian sebagai berikut:

Sekretariat Jenderal	Rp300.380.000,00
Ditjen Tanaman Pangan	Rp717.725.000,00
Ditjen Perkebunan	Rp359.829.325,00
Ditjen Peternakan dan Keswan	Rp2.804.071.326,00
Ditjen PSP	Rp149.400.000,00
Badan Ketahanan Pangan	Rp3.116.000,00
Badan Karantina Pertanian	Rp1.250.000,00

3. Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang Dihentikan) sebesar Rp3.334.823.200,00 terdapat di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

4. Penghapusan (BMN yang Dihentikan) sebesar Rp103.114.522.297,00 dengan rincian sebagai berikut.

Sekretariat Jenderal	Rp13.252.376.928,00
Ditjen Tanaman Pangan	Rp5.144.148.213,00
Ditjen Hortikultura	Rp3.385.624.665,00
Ditjen Perkebunan	Rp303.417.410,00
Ditjen Peternakan dan Keswan	Rp2.057.967.822,00
Ditjen PSP	Rp313.128.000,00
Badan Litbang	Rp15.250.003.921,00
Badan PPSDMP	Rp794.372.631,00
Badan Ketahanan Pangan	Rp1.084.076.622,00
Badan Karantina Pertanian	Rp61.529.406.085,00

5. Transfer Keluar (BMN yang Dihentikan) sebesar Rp629.935.000,00 terdapat pada Ditjen Perkebunan Satker Dinas Perkebunan Kab Garut Prov.Jawa Barat (029116) sebesar Rp188.585.000,00 dan Satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Sanggau Prov.Kalimantan Barat (139085) sebesar Rp417.000.000,00, serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Satker Badan Koordinasi Penyuluhan Prov.Gorontalo (319141) sebesar Rp24.350.000,00.

6. Hibah Keluar (BMN yang Dihentikan) sebesar Rp1.428.528.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Sekretariat Jenderal	Rp946.940.000,00
Ditjen Tanaman Pangan	Rp304.311.000,00
Ditjen Perkebunan	Rp173.277.000,00
Badan Ketahanan Pangan	Rp4.000.000,00

7. Koreksi Pencatatan (BMN yang Dihentikan) sebesar Rp3.961.211.362,00 dengan rincian sebagai berikut:

Sekretariat Jenderal	Rp96.450.000,00
Ditjen Tanaman Pangan	Rp2.216.395,00
Ditjen Perkebunan	Rp2.296.961.967,00
Ditjen Peternakan dan Keswan	Rp524.150.000,00
Badan Litbang	Rp1.041.433.000,00

8. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang Dihentikan) sebesar Rp38.993.162.301,00 dengan rincian sebagai berikut.

Sekretariat Jenderal	Rp2.002.597.189,00
Inspektorat Jenderal	Rp338.460.177,00
Ditjen Tanaman Pangan	Rp3.196.046.751,00
Ditjen Hortikultura	Rp858.779.700,00
Ditjen Perkebunan	Rp2.750.000,00
Ditjen PSP	Rp15.563.415.354,00
Badan PSDMP	Rp229.128.262,00
Badan Ketahanan Pangan	Rp389.524.817,00
Badan Karantina Pertanian	Rp16.412.460.051,00

9. Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN yang Dihentikan) sebesar Rp1.616.627.050,00 dengan rincian sebagai berikut :

Ditjen Tanaman Pangan	Rp1.103.522.050,00
Ditjen Hortikultura	Rp499.905.000,00
Ditjen Peternakan dan Keswan	Rp13.200.000,00

C.23 AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp266.127.429.137,00 dan Rp206.095.769.075,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel C.55 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Hak Cipta	29.625.000,00	2.284.022,00	27.340.978,00
2	Paten	529.681.000,00	208.243.356,00	321.437.644,00
3	Software	25.698.942.833,00	19.175.124.192,00	6.523.818.641,00
4	Lisensi	2.512.134.390,00	1.078.410.056,00	1.433.724.334,00
5	Hasil Kajian/Penelitian	24.960.236.864,00	-	24.960.236.864,00
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	38.289.623.750,00	27.773.602,00	38.261.850.148,00
Jumlah		92.020.243.837,00	20.491.835.228,00	71.528.408.609,00
B	Aset Lain-Lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	715.073.637.627,00	245.244.101.082,00	469.829.536.545,00
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1.902.051.386,00	1.514.896.118,00	387.155.268,00
Jumlah		716.975.689.013,00	246.758.997.200,00	470.216.691.813,00
Total		808.995.932.850,00	267.250.832.428,00	541.745.100.422,00

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji sebesar Rp252.880.609.242,00 dan Rp43.191.572.642,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada di bawah ini.

Tabel C.56 Rincian Kewajiban Jangka Pendek
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Utang Kepada Pihak Ketiga	247.540.754.802,00	29.986.921.676,00
Hibah Yang Belum Disahkan	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	4.991.253.179,00	4.111.131.341,00
Uang Muka Dari KPPN	348.601.261,00	6.915.057.587,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	2.178.462.038,00
Jumlah	252.880.609.242,00	43.191.572.642,00

C.24 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp247.540.754.802,00 dan Rp29.986.921.676,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus

segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Pada Kementerian Pertanian, utang kepada pihak ketiga terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar, belanja barang yang masih harus dibayar, belanja modal yang masih harus dibayar, belanja lain-lain yang masih harus dibayar, utang kepada pihak ketiga lainnya dan dana pihak ketiga.

Tabel C.57 Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1.124.328.935,00	806.579.148,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	215.870.054.750,00	5.813.521.502,00
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	426.971.292,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga BLU	350.002.591,00	0,00
Utang Usaha BLU	0,00	6.293.700,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	29.669.397.234,00	23.360.527.326,00
Dana Pihak Ketiga	100.000.000,00	0,00
Jumlah	247.540.754.802,00	29.986.921.676,00

Rincian Utang Pihak Ketiga Kementerian Pertanian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel C.58 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga 31 Desember Tahun 2018

No	Uraian	31 Desember 2018
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1.124.328.935,00
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	215.870.054.750,00
3	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	426.971.292,00
4	Utang Kepada Pihak Ketiga BLU	350.002.591,00
5	Utang Usaha BLU	0,00
6	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	29.669.397.234,00
7	Dana Pihak Ketiga	100.000.000,00
	Jumlah	247.540.754.802,00

- Rincian belanja pegawai yang masih harus dibayar per Eselon I sebagai berikut.

Tabel C.59 Rincian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Per Eselon I

NO	ESELON I	JUMLAH (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	354.210.682,00
2	Inspektorat Jenderal	81.221.400,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	226.925.868,00
4	Ditjen Hortikultura	2.126.000,00
5	Ditjen Perkebunan	0,00
6	Ditjen Peternakan	82.769.900,00
7	Ditjen PSP	0,00
8	Badan Litbang	152.426.558,00
9	Badan PSDMP	20.225.288,00

NO	ESELON I	JUMLAH (Rp)
10	Badan Ketahanan Pangan	4.919.719,00
11	Badan Karantina Pertanian	199.503.520,00
Grand Total		1.124.328.935,00

- a. Rincian belanja pegawai yang masih harus dibayar pada Sekretariat Jenderal berupa uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai di bulan Desember Tahun 2018, dengan rincian:

No	Unit Kerja	Nilai
1	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	32.580.000,00
2	Biro Keuangan dan Perlengkapan	320.007.172,00
3	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	1.623.510,00
Total		354.210.682,00

- b. Rincian belanja pegawai yang masih harus dibayar pada Inspektorat Jenderal sebesar Rp81.221.400,00 terdiri dari kekurangan pembayaran gaji pegawai karena kenaikan pangkat Rp5.714.600,00, kekurangan pembayaran tunjangan struktural Rp4.300.000,00, dan pembayaran uang makan pegawai bulan Desember 2018 Rp71.206.800,00.
- c. Rincian belanja pegawai yang masih harus dibayar pada Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp226.925.868,00 berasal dari Satker Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang Jabar Rp1.993.220,00 dan Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp224.932.648,00.
- d. Rincian belanja pegawai yang masih harus dibayar pada Ditjen Hortikultura berasal dari satuan kerja Kantor Pusat (018.04.625875.KP) berupa kekurangan belanja pegawai yang belum dibayarkan terkait kenaikan pangkat an. Nurul Hudha TMT 1 April 2018 sebesar Rp1.001.600,00 dan Kenaikan Gaji Berkala an. Sri Ernawati TMT 1 Januari 2018 senilai Rp1.124.400,00.
- e. Rincian belanja pegawai yang masih harus dibayar pada Balitbangtan berupa kekurangan pembayaran gaji pegawai. Adapun rincian satkernya:

No	Satker	Jumlah
1	BPTP Jakarta	28.290.200,00
2	Setbadan Kantor Pusat	405.995,00
3	BPTP Yogyakarta	2.514.053,00
4	BPTP NAD	59.273.000,00
5	BPTP Sumatera Barat	1.220.332,00
6	BPTP Jambi	2.122.378,00
7	BPTP Kalimantan Tengah	11.266.200,00
8	BPTP Maluku	10.995.000,00
9	BPTP NTB	11.935.800,00

No	Satker	Jumlah
10	BPTP Bengkulu	23.125.000,00
11	BPTP Kepulauan Riau	1.062.200,00
Total		152.140.158,00

f. Rincian belanja pegawai yang masih harus dibayar pada BPPSDMP terdiri dari:

Kode Satker	Nama Satker	Nilai
018.10.120040	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	2.086.466,00
018.10.239125	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (Stpp) Manokwari, Papua Barat	900.000,00
018.10.239654	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Malang - Jatim	2.856.593,00
018.10.394771	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	2.875.058,00
018.10.412075	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara-Bogor Jabar	2.745.898,00
018.10.412090	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (Stpp) Magelang, Jateng	8.761.273,00
Total		20.225.288,00

g. Belanja pegawai yang masih harus dibayar pada Badan Ketahanan Pangan merupakan kekurangan gaji pegawai berupa SK Kenaikan Pangkat Pegawai yang belum dibayarkan di tahun 2018 sebesar Rp4.919.719,00

h. Rincian belanja pegawai yang masih harus dibayar pada Badan Karantina Pertanian terdiri dari:

Satker	511111	511119	511121	511122	511123	511124	511125	511129	511138	Grand Total
BKP Kls I Semarang	187.300		18.730				181.850			387.880
BKP Kls I Padang								11.120.000		11.120.000
BKP Kls II Tj Pinang					3.520.000					3.520.000
BKP Kls I Jambi								28.694.000		28.694.000
BKP Kls II Pangkal Pinang						3.240.000				3.240.000
BKP Kls I Pontianak								31.117.000		31.117.000
BKP Kls I Kupang								1.723.300		1.723.300
SKP Kls I Ambon								22.969.000		22.969.000
BKP Kls I Jayapura	1.810.800	339	107.520	14.586		3.780.000	23.952		375.000	6.112.197
SKP Bandung						7.320.000	72.650			7.392.650
BUTTM								11.669.000		11.669.000
BKP Kls I Manado						2.520.000				2.520.000
BKP Kls II Cilegon	468.000		46.800	18.720						533.520
SKP Kls I Pare-Pare	131.800	46	13.180	2.636				20.722.000		20.869.662
SKP Kls II Bangkalan	367.800	39	36.780	14.712						419.331
SKP Kls II	172.500	25	17.250			1.980.000				2.169.775

Satker	511111	511119	511121	511122	511123	511124	511125	511129	511138	Grand Total
Ende										
SKP Kls II Tj Balai Karimun								7.575.000		7.575.000
BKP Kls II Palangkaraya	4.381.500	547	353.400	107.178	490.000	2.910.000				8.242.625
BKP Kls II Gorontalo	995.800	780				975.000		27.257.000		29.228.580
Total	8.515.500	1.776	593.660	157.832	4.010.000	22.725.000	278.452	162.846.300	375.000	199.503.520

2. Rincian belanja barang yang masih harus dibayar per Eselon I sebagai berikut.

Tabel C.60 Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Per Eselon I

NO	ESELON I	JUMLAH (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	1.255.018.201,00
2	Inspektorat Jenderal	292.783.732,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	51.176.267.258,00
4	Ditjen Hortikultura	98.659.190,00
5	Ditjen Perkebunan	226.040.291,00
6	Ditjen Peternakan	579.272.906,00
7	Ditjen PSP	159.154.849.872,00
8	Badan Litbang	1.015.364.622,00
9	Badan PSDMP	564.278.905,00
10	Badan Ketahanan Pangan	40.920.852,00
11	Badan Karantina Pertanian	1.466.598.921,00
Grand Total		215.870.054.750,00

a. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.255.018.201,00 berupa tagihan langganan daya dan jasa pemakaian bulan Desember 2018 terdapat pada:

No	Unit Kerja	Nilai
1	Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	1.765.711,00
2	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	25.635.556,00
3	Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA)	55.568.382,00
4	Biro Perencanaan	1.158.249,00
5	Biro Umum dan Pengadaan	1.164.451.504,00
6	Pusat Kerjasama Luar Negeri	1.402.493,00
7	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	5.036.306,00
Total		1.255.018.201

- b. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Inspektorat Jenderal sebesar Rp292.783.732,00 terdiri dari pemakaian telepon bulan Desember 2018 (sudah dibayar bulan Januari 2019) Rp1.721.933,00, kekurangan pembayaran perjalanan dinas biasa Rp288.661.799,00, dan kekurangan pembayaran perjalanan dinas dalam kota Rp2.400.000,00.
- c. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Ditjen Tanaman Pangan terdiri dari tagihan listrik dan telepon bulan Desember 2018 pada satker Kantor Pusat Rp165.944.063,00, tunda bayar pada Kantor Pusat dan Provinsi Jawa Timur Rp51.010.323.195,00.
- d. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Ditjen Hortikultura berasal dari satuan kerja Kantor Pusat (018.04.625875.KP) berupa Beban listrik bulan Desember TA 2018 sebesar Rp92.457.413,00 dan Beban Telepon bulan Desember TA 2018 sebesar Rp6.201.777,00.
- e. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Ditjen Perkebunan, antara lain:
 - 1. Dinas Perkebunan Propinsi Jambi (109120) senilai Rp92.045.004,00 yang merupakan tunda bayar dikarenakan terjadi keterlambatan pengajuan SPM pada akhir tahun anggaran 2018
 - 2. Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan (199127) senilai Rp47.808.000,00 yang merupakan tunda bayar kegiatan pengembangan tanaman jambu mete di kabupaten Jeneponto dikarenakan terjadi keterlambatan pengajuan SPM pada akhir tahun anggaran 2018
 - 3. Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya senilai Rp30.008.146,00 merupakan tunda bayar pemakaian listrik, telepon, dan air.
 - 4. Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan senilai Rp39.389.402,00 merupakan tunda bayar pemakaian listrik, telepon, dan air.
 - 5. Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon senilai Rp16.789.739,00 merupakan tunda bayar pemakaian listrik, dan telepon.
- f. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Ditjen Peternakan dan Keswan, antara lain:
 - 1. Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Rp8.403.916,00,00
 - 2. Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Regional Iii Bandar Lampung Rp56.195.641,00
 - 3. Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Regional V Banjar Baru Rp31.052.069,00
 - 4. Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Rp45.675.428,00
 - 5. Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mangatas Rp6.290.841,00
 - 6. Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor Rp41.196.636,00
 - 7. Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Rp8.442.669,00
 - 8. Balai Veteriner Subang Rp49.350.026,00
 - 9. Balai Veteriner Medan Rp37.879.300,00
 - 10. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Rp29.407.600,00
 - 11. Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali Rp2.640.528,00
 - 12. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden Rp46.619.307,00

- 13 Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa Rp17.787.469,00
- 14 Pusat Veteriner Farma Rp109.340.642,00
- 15 Balai Inseminasi Buatan Lembang Rp22.011.462,00
- 16 Balai Besar Veteriner Maros Rp66.979.372,00
- g. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, antara lain:
1. Satker Ditjen PSP merupakan tunggakan tagihan pencairan kegiatan pengadaan alat dan mesin pertanian senilai Rp159.110.189.567,00 kepada KPPN Jakarta V yang telah ditolak dengan surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-9914/PB/2018 tertanggal 31 Desember 2018 perihal Dispensasi Keterlambatan Pengajuan SPM berupa pengadaan bantuan alsintan dari pihak ketiga yang belum dibayarkan.
 2. Biaya listrik yang belum dibayar senilai Rp35.239.600,00 dan biaya telepon yang belum dibayar senilai Rp9.420.705,00 pada bulan Desember 2018 di Satker Ditjen PSP.
- h. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Balitbangtan, antara lain:

No	Satker	Jumlah
1	BPTP Jakarta	9.218.210
2	Setbadan Kantor Pusat	104.942.585
3	Balitsa	61.558.533
4	BB Padi	92.527.296
5	BBSDLP	51.086.527
6	Puslitbangbun	57.677.346
7	Balingtang	30.514.242
8	BPTP Jawa Tengah	44.977.250
9	BPTP Yogyakarta	32.365.257
10	Balittas Malang	44.238.716
11	Balitkabi	59.960.657
12	Balitjestro	33.290.195
13	BPTP NAD	14.204.671
14	BPTP Sumatera Barat	24.586.459
15	BPTP Jambi	25.880.012
16	Balittra	31.573.000
17	BPTP Kalimantan Selatan	2.706.400
18	BPTP Kalimantan Timur	17.541.052
19	BPTP Sulawesi Utara	22.636.000
20	BPTP Maluku	17.241.712
21	BPTP NTB	13.049.210
22	BPTP Bengkulu	16.463.270
23	BPTP Banten	30.469.000
24	BB Mekanisasi Pertanian	40.146.254
25	BPTP Kepulauan Riau	2.077.900
TOTAL		880.931.754

Setelah Audit BPK terdapat koreksi pencatatan Kredit terhadap saldo akun Belanja Barang yang masih harus dibayar senilai Rp134,432,868.00 pada satker:

1. Koreksi kredit senilai Rp36,092,852.00 pada satker BPTP Sulawesi Selatan karena Tagihan Akrual bulan desember atas listrik dan telepon yang belum dicatat
2. Koreksi kredit senilai Rp98,340,016.00 pada satker Balitsereal karena Tagihan Akrual bulan desember atas listrik, telepon, air dan internet yang belum dicatat sehingga nilai *Audited* per tanggal 31 Desember 2017 untuk akun Belanja Barang yang masih harus dibayar adalah senilai Rp1,015,364,622.00.

i. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada BPPSDMP, antara lain:

Kode Satker	Nama Satker	Nilai
018.10.237160	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (Stpp) Bogor, Jabar	58.814.600,00
018.10.237200	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian (Ppmkp) Ciawi	47.902.757,00
018.10.237437	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (Stpp) Jurusan Penyuluhan Pertanian	21.071.811,00
018.10.237490	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (Stpp) Malang, Jatim	36.201.279,00
018.10.237636	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (Stpp) Medan	24.660.956,00
018.10.237814	Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa/Palembang	3.495.231,00
018.10.237924	Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru, Kalsel	51.624.731,00
018.10.238069	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (Stpp) Gowa, Sulsel	49.307.957,00
018.10.239125	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (Stpp) Manokwari, Papua Barat	17.330.000,00
018.10.239640	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Kalsel	29.967.438,00
018.10.239654	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Malang - Jatim	19.567.419,00
018.10.239661	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku, Sulawesi Selatan	35.771.794,00
018.10.239675	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, Malang Jawa Timur	38.560.745,00
018.10.239701	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang - Jabar	24.603.989,00
018.10.394771	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	38.301.544,00
018.10.412069	Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	12.725.676,00
018.10.412075	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara-Bogor Jabar	9.660.199,00
018.10.412081	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Ntt	29.501.820,00
018.10.412090	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (Stpp) Magelang, Jateng	15.208.959,00
Total		564.278.905,00

- j. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Badan Ketahanan Pangan terdapat pada satker kantor pusat untuk belanja langganan telepon Rp4.982.870,00 dan belanja langganan listrik Rp35.937.982,00.
- k. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Badan Karantina Pertanian, sebagai berikut:

Nama Satker	521111	521114	522111	522112	522113	522119	522191	Grand Total
BKP Kls I Semarang			30.231.003	159.125	5.313.612			35.703.740
SKP Kls I Cilacap			2.977.845		843.550			3.821.395
BBKP Surabaya			72.818.602	24.750.139	3.123.300			100.692.041

Nama Satker	521111	521114	522111	522112	522113	522119	522191	Grand Total
BBKP Belawan			34.718.369	4.916.580		17.025.800		56.660.749
BKP Kls I Padang			18.499.206	355.665		8.800.000		27.654.871
BKP Kls II Tj Pinang			36.444.239	8.068.159	205.650	1.866.500		46.584.548
BBKP Kls I Pekanbaru					76.000			76.000
BKP Kls I Jambi			15.905.581	2.419.855			4.654.375	22.979.811
BBKP Kls I Palembang			20.029.631	2.990.889	2.029.040			25.049.560
BKP Kls II Pangkal Pinang			6.622.303	4.375.376	1.082.500			12.080.179
BKP Kls I Bandar Lampung					606.400			606.400
BKP Kls I Pontianak			19.087.711	8.477.568	1.655.700			29.220.979
BKP Kls I Banjarmasin			23.172.590	1.888.424	2.719.271	15.663.060		43.443.345
SKPKls I Samarinda			11.446.284	2.175.011	1.534.103			15.155.398
BKP Kls I Balikpapan			26.184.956	367.603	1.926.105	10.767.500		39.246.164
BKP Kls II Tarakan			18.719.741	6.494.783	6.594.682	2.104.500		33.913.706
BBKP Makassar			42.116.500	7.812.782	525.000			50.454.282
BKP Kls I Kupang			13.293.072	5.514.025	1.005.000			19.812.097
BKP Kls I Batam			21.640.867	1.113.556	1.391.700			24.146.123
BBKP Tj Priok			112.065.006		11.578.590			123.643.596
SKP Kls I Ambon			10.483.198	4.257.615	212.000			14.952.813
BKP Kls I Jayapura			22.657.100	1.052.900	278.350	4.202.700		28.191.050
SKP Kls I Sorong	1.391.065		11.573.608	1.241.055	155.616			14.361.344
SKP Bandung			11.401.263	427.903	55.200			11.884.366
BUTTM			83.287.805	480.667				83.768.472
BKP Kls I Manado			78.560.081		1.075.760			79.635.841
BKP Kls II Palu					154.100			154.100
BKP Kls I Denpasar			5.026.848	2.122.476				7.149.324
BKP Kls I Mataram			3.531.500	348.313	940.860			4.820.673
BKP Kls II Cilegon			33.373.900	408.297		1.931.850		35.714.047
SKP Kls II Manokwari			4.757.558		422.326			5.179.884
SKP Kls II Mamuju			12.673.858	3.441.414	431.000			16.546.272
BKP Kls II Medan			22.250.930		539.396	8.527.183		31.317.509
SKP Kls I Pare-Pare			13.896.784	3.391.039	307.600			17.595.423
BKP Kls II Kendari			19.120.962	1.337.373		2.745.257		23.203.592
BBKP Soekarno Hatta			153.782.365		10.945.836	1.083.719		165.811.920
SKP Kls I Bengkulu			8.932.482	1.846.283	13.098.000			23.876.765
BKP Kls II Yogyakarta			20.344.880	1.199.490	141.300			21.685.670
SKP Kls II Bangkalan	649.998		6.326.930	298.269	362.400			7.637.597
SKP Kls I Sumbawa Besar		448.000			119.120			567.120
BBUS KP			66.961.823	4.292.923		2.750.000		74.004.746
SKP Kls II Ende					158.992			158.992
SKP Kls II Tj Balai Karimun	1.840.654		9.074.190	315.463	53.500			11.283.807
SKP Kls I Tj Balai Asahan			12.011.762	835.000	488.913			13.335.675
SKP Kls I Entikong			4.595.000	2.511.500	388.500			7.495.000
BKP Kls II Palangkaraya					70.600			70.600
BKP Kls II Gorontalo			5.785.285		695.500			6.480.785
BKP Kls II Temate			41.527.600	2.080.650	3.432.000			47.040.250
SKP Kls I Timika				830.500		899.800		1.730.300
Total	3.881.717	448.000	1.187.911.218	114.598.670	76.737.072	78.367.869	4.654.375	1.466.598.921

3. Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2018 sebesar Rp426.971.292,00 terdapat pada Ditjen Perkebunan Satker Balai Besar Perbenihan Dan

Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) (567338) Surabaya sebesar Rp405.569.292,00, merupakan tunda bayar pekerjaan gedung bangunan berupa pagar nursery di kabupaten Tuban, tendon air dan rumah pompa nursery di kabupaten Garut. Balitbangtang Satker Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros (238080) sebesar Rp21.402.000,00.

4. Utang Kepada Pihak Ketiga BLU Rp350.002.591,00 terdapat pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (411956). Merupakan dana titipan pada rekening dana kelolaan selain berupa penerimaan yang belum sepenuhnya menjadi penerimaan satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari. Dana kelolaan juga digunakan untuk membiayai ongkos kirim produk layanan dan biaya pengepakan barang.
5. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya per Eselon I sebagai berikut:

NO	ESELON I	JUMLAH (Rp)
1	Ditjen Hortikultura	4.352.500,00
2	Ditjen PSP	28.329.668.593,00
3	Badan Litbang	1.326.154.491,00
4	Badan PSDMP	9.221.650,00
Grand Total		29.669.397.234,00

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebagai berikut.

- a. Ditjen Hortikultura senilai Rp4.353.500,00 yang berasal dari satuan kerja Dinas Pertanian Kabupaten Magelang (018.04.039069.TP) yang merupakan sisa uang dibendahara berupa uang honor yang terlambat ditarik dari rekening per 31 Desember 2018, dan pada 6 Januari 2019 telah ditarik dari rekening. Data Dukung berupa Tanda terima Penyerahan Honor kepada Pegawai, rekening koran Januari, BKU Desember 2018 dan LPJ Bendahara.
 - b. Ditjen PSP senilai Rp28.329.668.593,00 berupa ongkos kirim alsintan tahun 2016 dan 2017 yang telah direviu BPKP.
 - c. Balitbangtang senilai Rp1.326.154.491,00 dapat dirinci sebagai berikut:
 1. Balai Penelitian Tanah senilai Rp83.666.281,00, Balitbu senilai Rp39.097.207,00 dan Balitklimat senilai Rp17.635.085,00 merupakan tunjangan kinerja pegawai yang belum dibayarkan pegawai.
 2. BB Biogen senilai Rp1.137.261.136,00 dan Balitvet senilai Rp30.117.100,00 merupakan dana kerjasama penelitian dengan FAO dan KP4S.
 3. BPTP Jatim senilai Rp18.377.682,00 merupakan biaya listrik yang belum dibayar.
 - d. Badan PSDMP Satker Balai Pelatihan Pertanian Jambi (394771) senilai Rp9.221.650,00 merupakan pembayaran uang makan pegawai yang belum dibayarkan di bulan Desember 2018.
6. Dana Pihak Ketiga Rp100.000.000,00 terdapat pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Satker Balai Veteriner Subang (239520). Merupakan kesalahan transfer dari FAO namun sudah disetorkan kembali pada tanggal 7 Januari 2019.

C.25 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.991.253.179,00 dan Rp4.111.131.341,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPyang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Tabel C.61 Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	3.540.322.778,00	3.571.221.674,00
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	267.175.000,00	287.346.000,00
Pendapatan diterima dimuka BLU	1.183.755.401,00	252.563.667,00
Jumlah	4.991.253.179,00	4.111.131.341,00

1. Rincian Eselon I yang memiliki Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut:

NO	ESELON I	JUMLAH (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	2.691.285.847,00
2	Ditjen Hortikultura	6.294.300,00
3	Balitbangtan	610.181.250,00
4	BPPSDMP	224.228.048
5	Badan Karantina Pertanian	8.333.333,00
Grand Total		3.540.322.778,00

Berikut ini penjelasan atas rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

a. Rincian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Sekretariat Jenderal, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018
Biro Umum dan Pengadaan	
PT. Bank Mandiri	1.172.977.554
DPN HKTl	63.294.652
PT. Bank Syariah Mandiri	29.309.165
PT. Teknindo Bangun Sarana	104.475.300
PT. BRI Agroniaga	126.145.739
Bank BRI	362.074.592
Bank BNI	204.927.845
Sewa Auditorium/Pemanfaatan 2019	484.331.000
PUSTAKA	
Sewa Ruang ATM	143.750.000
Jumlah	2.691.285.847

b. Rincian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Ditjen Hortikultura berasal dari Satker Kantor Pusat (018.04.625875.KP) atas sewa tanah, gedung dan bangunan an.

Asosiasi Crop Care Indonesia dari Juli 2017 sampai Juli 2020, dengan total pendapatan di terima dimuka sebesar 12.588.600,00 yang disetor ke kas negara pada tgl 11 September 2017. Pendapatan yang diakui pada TA. 2018 sebesar Rp4.196.200,00 sehingga sisa pendapatan diterima dimuka pada neraca sebesar Rp6.294.300,00.

c. Rincian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Balitbangtan, antara lain:

- Balitnak senilai Rp460.542.750,00 yang merupakan Pendapatan sewa lahan di Desa Cilember selama 5 tahun.
- BPTP Jawa Tengah senilai Rp69.187.500,00 yang merupakan Pendapatan Sewa dimuka Tanah Tumpang Semarang periode April 2018 s/d Maret 2020.
- BPTP Sulawesi Selatan senilai Rp34.974.000,00 yang merupakan pendapatan Sewa ATM BNI Selama 3 tahun (2018 - 2020).
- BB Pengkajian senilai Rp17.555.000,00 yang merupakan pendapatan sewa ATM BNI dan BRI tahun 2019.
- BB Litvet senilai Rp2.000.000,00 yang merupakan Pendapatan Sewa Tanah Cimanglid an. abdulloh dan Mahfudin.

Terdapat koreksi pencatatan Kredit atas temuan BPK terhadap saldo akun Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp24,922,000.00 pada satker Balitsereal dikarenakan adanya pembayaran atas aset tetap yang disewa untuk ATM BRI yang pendapatan sewanya diterima pada tahun 2018 selama tiga tahun (2018 s/d 2020) yang belum dicatat sehingga nilai Audited per tanggal 31 Desember 2018 untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka adalah senilai Rp610,181,250.00

d. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka BPPSDMP sebesar Rp224.228.048,00 sebagai berikut:

Satker	Nilai	Keterangan
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor, Jabar	77.517.917,00	Atm BNI
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Manokwari, Papua Barat	131.313.131,00	Tower BTS Telkomsel
Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku, Sulawesi Selatan	12.277.000,00	Atm Mandiri
Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang - Jabar	3.120.000,00	Atm BRI

e. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Badan Karantina Pertanian sebesar Rp8.333.333,00 terdapat pada satker BBKP Tanjung Priok merupakan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan / MAK 425131 disewa oleh BANK BRI.

2. Rincian Eselon I yang memiliki Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka terdapat pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp232.175.000,00 berupa penerimaan satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi terhadap pelanggan, namun pengujian sampel produk pakan belum dilakukan. Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp35.000.000,00 berupa pendapatan uji sertifikasi di Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) yang disetorkan pada Tahun 2018 namun untuk pengeluaran sertifikat dikeluarkan di Tahun 2019.
3. Pendapatan Diterima Dimuka BLU sebesar Rp1.183.755.401,00 terdapat pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (411956) sebesar Rp1.061.565.000,00 merupakan penerimaan atas pembayaran semen

beku yang belum dikirimkan ke pelanggan/pembeli. Untuk Satker Pusat Veteriner Farma sebesar Rp122.190.401,00 merupakan penerimaan uang muka penjualan vaksin/*antigen* yang belum terlayani.

C.27 UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp348.601.261,00 dan Rp6.915.057.587,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.28 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.178.462.038,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang jangka pendek lain-lain dan utang pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara. Utang Jangka Pendek Lainnya sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00, hal ini disebabkan sebagai berikut :

1. Ditjen Peternakan dan Keswan sebesar Rp2.178.381.229,00 merupakan terjadi pengurangan atas penerimaan yang sudah disahkan dan adanya realisasi pengiriman barang senilai Rp1.385.816.671,00 kemudian masih ada sisa saldo sebesar Rp792.564.558,00, lalu ada penambahan atas penerimaan semen beku yang belum dikirim dan biaya kirim di tahun 2018 sebesar Rp619.003.033,00 ditambah dengan saldo sebesar Rp792.564.558,00 sehingga menjadi nilai dengan total sebesar Rp1.411.567.591,00 yang kemudian direklas menjadi pendapatan diterima dimuka BLU sebesar Rp1.061.565.000,00 atas penerimaan semen beku, dan nilai sebesar Rp350.002.591,00 diakui sebagai utang pada pihak ketiga BLU.
2. Badan Litbang Pertanian sebesar Rp80.809,00 merupakan utang pajak bendahara pengeluaran yang sudah dilakukan penyetoran pada satker Balai Penelitian Tanaman Palma Manado, selanjutnya penyetoran dilakukan pada 30 Januari 2018 sebesar Rp40,409.00 dengan NTPN C6F521GQEV9DN519 dan sebesar Rp40,400.00 dengan NTPN C85641GRUVV8B219.

EKUITAS

C.29 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp25.807.319.732.927,00 dan Rp18.462.335.723.500,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp505.882.376.741,00 dan Rp513.287.349.153,00. Rincian Pendapatan Bukan Pajak Lainnya disajikan pada **Lampiran D.1**.

Tabel D.1 Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2018 (dalam Rupiah)

Uraian Akun	LRA	LO	SELISIH
Pendapatan Negara Bukan Pajak (Kegiatan Operasional)			
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	92.045.000	92.045.000	0
Pendapatan Penyediaan Barang	602.483.743	602.483.743	0
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	34.604.808.938	32.758.016.644	1.846.792.294
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	1.157.147.834	1.157.147.834	0
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	3.637.274.394	3.637.274.394	0
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	50.087.258.273	49.926.239.068	161.019.205
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	42.500.000	42.500.000	0
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	184.911.940	179.961.940	4.950.000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.811.701.422	5.593.359.257	218.342.165
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	101.010.000	101.010.000	0
Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	270.000	270.000	0
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	7.319.626.000	7.349.576.000	(29.950.000)
Pendapatan Perizinan Pertanian	17.046.100.000	17.024.350.000	21.750.000
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	26.307.673.589	26.228.452.389	79.221.200
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	267.493.327.963	267.243.000.497	250.327.466
Pendapatan Pendidikan Lainnya	228.588.100	228.588.100	0
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	5.912.006.000	5.912.006.000	0
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	141.950.000	141.950.000	0
Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	754.370.000	60.670.000	693.700.000
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	12.738.168.445	12.773.305.695	(35.137.250)
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	219.690.700	219.690.700	0
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	4.976.601.063	5.250.917.495	(274.316.432)
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	5.702.545.091	5.708.354.691	(5.809.600)
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	5.516.682.388	5.515.869.588	812.800
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	659.627.700	659.627.700	0
Pendapatan Jasa Lainnya	48.479.690.942	48.479.690.942	0
Pendapatan Bunga Lainnya	2.281.263	2.281.263	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	701.137.694	700.569.369	568.325
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	7.294.322.319	8.198.090.809	(903.768.490)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	25.154.813	25.154.813	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	69.922.810	69.922.810	0
Jumlah	507.910.878.424	505.882.376.741	2.028.501.683

Terdapat perbedaan nilai atas LRA Pendapatan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.028.501.683,00. Rincian penjelasan perbedaan tersebut disajikan pada lampiran **D.2**.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Saldo Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.436.911.825.470,00 dan Rp2.165.764.949.246,00. Rincian Beban Pegawai disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel D.2 Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

URAIAN	31-Desember-2018	31-Desember-2017	%Naik/ Turun
Beban Gaji Pokok PNS	866.700.912.718	893.210.343.093	-2,97%
Beban Pembulatan Gaji PNS	12.465.041	11.802.513	5,61%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	65.149.732.419	62.817.675.981	3,71%
Beban Tunj. Anak PNS	18.498.216.913	17.764.637.639	4,13%
Beban Tunj. Struktural PNS	18.981.454.456	16.977.465.930	11,80%
Beban Tunj. Fungsional PNS	104.402.720.832	98.194.203.807	6,32%
Beban Tunj. PPh PNS	5.515.762.690	6.184.037.424	-10,81%
Beban Tunj. Beras PNS	45.673.736.380	47.404.985.582	-3,65%
Beban Uang Makan PNS	116.833.046.800	114.633.204.565	1,92%
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	2.700.000	2.700.000	0,00%
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	1.763.055.000	1.649.050.000	6,91%
Beban Tunjangan Umum PNS	23.795.396.459	23.782.686.656	0,05%
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	516.126.000	469.997.800	9,81%
Beban Uang Honor Tetap	2.474.363.200	2.078.160.000	19,07%
Beban Uang Lembur	38.795.084.050	34.678.786.890	11,87%
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.122.079.198.164	845.244.968.645	32,75%
Beban Gaji dan Tunjangan	5.717.854.348	660.242.721	766,02%
Jumlah	2.436.911.825.470	2.165.764.949.246	12,52%

Jika dibandingkan dengan TA 2017 pada TA 2018 terdapat kenaikan atas beban pegawai. Hal ini dipengaruhi bertambahnya jumlah pegawai dari penerimaan pegawai baru sejumlah 436 orang, dan kenaikan tunjangan kinerja pegawai lingkup Kementerian Pertanian dengan indeks kinerja 80% dari semula 70% yang diberlakukan mulai bulan Mei 2018.

Tabel D.3 Rincian Mutasi Beban Pegawai 31 Desember 2018

Uraian Mutasi Beban Pegawai	Jumlah (Rp)	Keterangan
Kas dan Bank - BLU	5.717.854.348,00	
Piutang Lainnya	-21.080.000,00	Kelebihan pembayaran tunjangan struktural sebesar Rp3.780.000,00 dan tunjangan fungsional sebesar Rp17.300.000,00 pada Eselon I Inspektorat Jenderal
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	317.749.787,00	

Uraian Mutasi Beban Pegawai	Jumlah (Rp)	Keterangan
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.430.897.301.335,00	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018
Jumlah	2.436.911.825.470,00	

Jika dibandingkan realisasi belanja pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp2.436.615.155.683,00 dengan beban pegawai sebesar Rp2.436.911.825.470,00 terdapat selisih sebesar **Rp296.669.787,00** dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

Piutang Lainnya	Inspektorat Jenderal	-Rp21.080.000,00
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Sekretariat Jenderal	Rp48.368.144,00
	Inspektorat Jenderal	Rp81.221.400,00
	Ditjen Tanaman Pangan	Rp226.925.868,00
	Ditjen Hortikultura	Rp2.126.000,00
	Ditjen Peternakan	Rp35.348.198,00
	Badan Litbang Pertanian	Rp19.231.211,00
	Badan PPSDMP	-Rp46.613.955,00
	Badan Ketahanan Pangan	Rp4.919.719,00
	Badan Karantina Pertanian	-Rp53.776.798,00
		Jumlah

Berdasarkan data selisih di atas, untuk transaksi Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar bernilai negatif merupakan Belanja Pegawai tahun 2017 yang dibayarkan TA 2018. Sedangkan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar bernilai positif merupakan Belanja Pegawai tahun 2018 yang akan dibayarkan TA 2019.

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Saldo Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp534.795.883.074,00 dan Rp701.571.383.247,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut.

Tabel D.4 Perbandingan Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Uraian Beban Persediaan	31-Desember-2018	31-Desember-2017	%Naik/Turun
Beban Persediaan konsumsi	190.836.728.293	257.293.011.512	-25,83%
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	49.117.000	57.896.900	-15,16%
Beban Persediaan bahan baku	279.879.488.772	291.911.769.367	-4,12%
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	222.150.230	-100,00%
Beban Persediaan Lainnya	64.030.549.009	152.086.555.238	-57,90%
Jumlah	534.795.883.074	701.571.383.247	-23,77%

Beban persediaan pada 31 Desember 2018 tersebut belum termasuk atas nilai persediaan benih tanaman perkebunan pada Badan Litbang hasil kegiatan perbanyakan dan produksi pada TA 2017 senilai Rp178.875.204.653,00. Benih hasil kegiatan perbanyakan dan produksi tahun 2017 tersebut belum dicatat sebagai persediaan per 31 Desember 2017 karena belum ada kebijakan akuntansi yang mengatur atas hal tersebut, sehingga pada tahun 2018 tidak ada pencatatan beban persediaan pada saat benih tersebut disalurkan kepada kelompok tani/masyarakat.

Kebijakan akuntansi persediaan telah ditetapkan tahun 2018, namun belum dilengkapi sistem akuntansi yang mengatur rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari identifikasi transaksi keuangan yang akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyajian nilai persediaan benih/bibit/hewan, penjurnalan baik di buku jurnal maupun buku besar, sampai penyajiannya dalam laporan keuangan.

Terdapat perbedaan nilai atas beban persediaan dengan pemakaian barang persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.398.436.426,00, perbedaan tersebut ada pada akun beban persediaan barang konsumsi selisih lebih sebesar Rp4.450.186.878,00, beban persediaan bahan baku selisih lebih sebesar Rp1.041.673.598,00 dan beban persediaan lainnya selisih kurang sebesar Rp906.575.950,00.

Tabel D.5 Perbedaan atas beban persediaan dengan pemakaian barang persediaan per 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

Jenis Beban Persediaan	Nilai Beban Persediaan	Pemakaian Barang Persediaan Berdasarkan Kiriman Lap BMN	Selisih
Beban Persediaan konsumsi	190.836.728.293,00	186.386.541.415,00	4.450.186.878,00
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	49.117.000,00	49.117.000,00	0,00
Beban Persediaan bahan baku	279.879.488.772,00	278.837.815.174,00	1.041.673.598,00
Beban Persediaan Lainnya	64.030.549.009,00	63.123.973.059,00	906.575.950,00
Jumlah	534.795.883.074,00	528.397.446.648,00	6.398.436.426,00

Berdasarkan tabel diatas, selisih perbedaan atas nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Beban Persediaan Konsumsi sebesar Rp4.450.186.878,00, sebagai berikut.

Hasil Opname Fisik Lebih

018.01	411925	Pusat Data & Sistem Informasi Pertanian	Rp7.209.950,00
018.04	029036	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Cianjur	Rp2.170.000,00
018.06	239455	Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba, & Itik Pelaihari	Rp3.267.464.780,00
018.09	412022	Balai Penelitian Tanaman Industri & Penyegar Pakuwon	Rp1.424.600,00

Jumlah I Rp3.278.269.330,00

Hasil Opname Fisik Kurang

018.01	411925	Pusat Data & Sistem Informasi Pertanian	-Rp75.000,00
018.01	451930	Biro Organisasi & Kepegawaian	-Rp7.098.000,00
018.03	238251	Ditjen Tanaman Pangan	-Rp237.250,00

018.04	029036	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Cianjur	-Rp4.910.000,00
018.09	567570	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Kalteng	-Rp1.877.500,00
018.09	567627	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Kaltim	-Rp8.881.000,00
018.09	634040	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Ntb	-Rp8.279.514,00
018.09	648737	Loka Penelitian Kambing Potong, Sei Putih Sumut	-Rp28.692.000,00
018.12	649441	Balai Karantina Pertanian Kelas Ii Ternate	-Rp37.532,00
Jumlah II			-Rp60.087.796,00

Jurnal Umum SAIBA :

a. Persediaan Register :

018.06	238776	Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan	Rp917.689.344,00
018.09	567364	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Jatim	Rp318.516.000,00

a. Koreksi Lainnya :

018.03	238251	Ditjen Tanaman Pangan	-Rp4.200.000,00
---------------	--------	-----------------------	-----------------

Jumlah III	Rp1.232.005.344,00
Jumlah I + II + III	Rp4.450.186.878,00

b. Beban Persediaan Bahan Baku sebesar Rp1.041.673.598,00, sebagai berikut.

Hasil Opname Fisik Lebih

018.06	239455	Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba, & Itik Pelaihari	Rp18.835.000,00
018.09	412022	Balai Penelitian Tanaman Industri & Penyegar Pakuwon	Rp2.148.051.247,00
018.09	412050	Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika Solok, Sumbar	Rp135.775.000,00
018.09	634036	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sulsel	Rp146.580.000,00
Jumlah I			Rp2.449.241.247,00

Hasil Opname Fisik Kurang

018.06	239455	Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba, & Itik Pelaihari	-Rp38.797.000,00
018.09	412022	Balai Penelitian Tanaman Industri & Penyegar Pakuwon	-Rp192.300.000,00
018.09	567296	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Jabar	-Rp440.875.000,00
018.09	567318	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Jateng	-Rp125.839.636,00
018.09	567364	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Jatim	-Rp514.695.000,00
018.09	567627	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Kaltim	-Rp245.000,00
018.09	634036	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Sulsel	-Rp27.330.000,00

018.09	634040	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Ntb	-Rp67.486.013,00
			Jumlah II
			-Rp1.407.567.649,00
			Jumlah I + II
			Rp1.041.673.598,00

c. Beban Persediaan Lainnya sebesar Rp906.575.950,00, sebagai berikut.

Hasil Opname Fisik Lebih

018.04	149000	Dinas Pertanian Dan Peternakan Prov. Kalteng	Rp84.400.500,00
018.06	239455	Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba, & Itik Pelaihari	Rp201.968.100,00
018.09	412050	Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika Solok, Sumbar	Rp2.080.912.000,00
			Jumlah I
			Rp2.367.280.600,00

Hasil Opname Fisik Kurang

018.06	239455	Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba, & Itik Pelaihari	-Rp26.144.650,00
018.09	567364	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Jatim	-Rp11.475.000,00
018.09	634040	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Ntb	-Rp1.423.085.000,00
			Jumlah II
			-Rp1.460.704.650,00
			Jumlah I + II
			Rp906.575.950,00

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Saldo Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.642.207.825.041,00 dan Rp3.382.593.171.889,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada **Lampiran D.3**.

Rincian mutasi beban barang dan jasa per 31 Desember 2018 diuraikan sebagai berikut.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp9.135.284,00
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	Rp3.146.928.265,00
Kas dan Bank - BLU	Rp5.945.518.477,00
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	Rp1.055.350.185,00
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-Rp218.648.160,00
Persediaan yang Belum Diregister	-Rp4.795.874.546,00
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	Rp3.536.368.332,00
Konstruksi Dalam pengerjaan	Rp11.150.000,00
Aset Lainnya yang Belum Diregister	Rp16.891.080.680,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp861.777.602,00
Utang Usaha BLU	-Rp6.293.700,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-Rp10.679.319.917,00
Hibah Langsung yang belum disahkan	Rp87.774.274.340,00
Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp3.538.680.556.808,00

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp1.117.800,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-Rp5.296.409,00
Jumlah	Rp3.642.207.825.041,00

Jika dibandingkan realisasi belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp3.547.773.003.550,00 dengan beban barang dan jasa sebesar Rp3.642.207.825.041,00 terdapat **selisih** sebesar **Rp94.434.821.491,00**, dengan uraian sebagai berikut.

Sekretariat Jenderal	Rp427.923.589,00
Inspektorat Jenderal	Rp33.676.933,00
Ditjen Tanaman Pangan	Rp5.986.174.588,00
Ditjen Hortikultura	Rp28.370.666.541,00
Ditjen Perkebunan	Rp4.613.931.250,00
Ditjen Peternakan	Rp56.702.202.876,00
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	-Rp10.746.872.899,00
Badan Litbang Pertanian	Rp2.683.477.655,00
Badan PPSDMP	Rp1.940.451.411,00
Badan Ketahanan Pangan	Rp4.008.872.586,00
Badan Karantina Pertanian	Rp414.316.961,00
Jumlah	Rp94.434.821.491,00

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Saldo Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp269.415.153.972,00 dan Rp284.894.444.360,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut.

Tabel D.6 Perbandingan Beban Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Uraian Beban Pemeliharaan	31-Desember-2018	31-Desember-2017	%Naik/ Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.278.726.205	99.054.526.271	-18,96%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	7.513.002.895	9.196.177.121	-18,30%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	131.936.510.008	131.482.441.379	0,35%
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	1.661.001.660	1.923.728.057	-13,66%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.784.143.601	7.019.068.734	-17,59%
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	990.762.010	1.256.186.250	-21,13%
Beban Pemeliharaan Irigasi	197.091.000	144.000.000	36,87%
Beban Pemeliharaan Jaringan	3.159.457.976	3.997.292.186	-20,96%
Beban Pemeliharaan Lainnya	2.910.704.932	2.841.086.887	2,45%
Beban Pemeliharaan	1.280.430.100	462.424.179	176,90%

Uraian Beban Pemeliharaan	31-Desember-2018	31-Desember-2017	%Naik/ Turun
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5.729.893.177	7.524.038.711	-23,85%
Beban Persediaan suku cadang	27.574.660.816	19.550.197.435	41,05%
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	398.769.592	443.277.150	-10,04%
Jumlah	269.415.153.972	284.894.444.360	-5,43%

Rincian Mutasi beban pemeliharaan per 31 Desember 2018 diuraikan sebagai berikut.

Kas dan Bank - BLU	Rp1.280.430.100,00
Bahan untuk Pemeliharaan	Rp5.729.893.177,00
Suku Cadang	Rp27.574.660.816,00
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-Rp280.934.400,00
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	Rp99.311.629,00
Jaringan Belum Diregister	-Rp78.690.000,00
Konstruksi Dalam pengerjaan	Rp45.101.792,00
Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp235.046.498.658,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-Rp1.117.800,00
Jumlah	<u><u>Rp269.415.153.972,00</u></u>

Jika dibandingkan realisasi belanja pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp236.326.928.758,00 dengan beban pemeliharaan sebesar Rp269.415.153.972,00 terdapat **selisih** sebesar **Rp33.088.225.214,00**, selisih tersebut terdapat pada Eselon I sebagai berikut.

Sekretariat Jenderal	Rp93.562.650,00
Inspektorat Jenderal	Rp4.262.600,00
Ditjen Tanaman Pangan	Rp1.663.031.379,00
Ditjen Hortikultura	Rp409.613.556,00
Ditjen Perkebunan	Rp68.025.525,00
Ditjen Peternakan	Rp17.743.190.487,00
Badan Litbang Pertanian	Rp11.115.064.097,00
Badan PPSDMP	Rp1.618.404.128,00
Badan Ketahanan Pangan	Rp116.534.000,00
Badan Karantina Pertanian	Rp256.536.792,00
Jumlah	<u><u>Rp33.088.225.214,00</u></u>

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Saldo Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.907.412.856.604,00 dan Rp1.704.224.647.603,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut.

Tabel D.7 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Uraian Beban Perjalanan Dinas	31-Desember-2018	31-Desember-2017	%Naik/ Turun
Beban Perjalanan Biasa	1.251.775.529.660	1.093.179.896.778	14,51%
Beban Perjalanan Tetap	32.015.996.637	30.575.623.326	4,71%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.282.582.397	64.163.852.625	15,77%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	120.665.489.890	113.133.763.525	6,66%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	398.340.088.761	376.455.347.900	5,81%
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	6.007.215.340	2.762.298.827	117,47%
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	23.315.852.486	22.768.634.308	2,40%
Beban Perjalanan	1.010.101.433	1.185.230.314	-14,78%
Jumlah	1.907.412.856.604	1.704.224.647.603	11,92%

Rincian Mutasi Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp18.274.214,00
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	Rp5.006.655.086,00
Kas dan Bank - BLU	Rp1.010.101.433,00
Piutang Lainnya	-Rp8.359.600,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp296.172.899,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp1.901.084.716.163,00
	Rp5.296.409,00
Jumlah	Rp1.907.412.856.604,00

Jika dibandingkan realisasi belanja perjalanan dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp1.907.101.472.682,00 dengan beban perjalanan dinas sebesar Rp1.907.412.856.604,00 terdapat selisih sebesar **Rp311.383.922,00**, selisih tersebut terdapat pada Eselon I sebagai berikut.

Inspektorat Jenderal	Rp282.702.199,00
Ditjen Tanaman Pangan	Rp5.296.409,00
Badan Litbang Pertanian	Rp18.274.214,00
Badan PPSDMP	Rp5.111.100,00
Jumlah	Rp311.383.922,00

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Saldo Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.009.427.912.150,00 dan Rp11.790.239.712.182,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan uang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut.

Tabel D.8 Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (dalam Rupiah)

Uraian Beban Barang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	31-Desember-2018	31-Desember-2017	%Naik/Turun
Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.934.356.342	87.559.690.403	-95,51%
Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.636.258.653.617	4.394.767.341.197	-62,77%
Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	500.000.000	-100,00%
Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.938.657.000	13.003.409.850	-85,09%
Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	993.446.519.739	1.538.786.188.448	-35,44%
Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	175.000.000	-100,00%
Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	13.990.323.808	8.003.588.000	74,80%
Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	205.802.372.926	12.919.195.250	1493,00%
Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	75.876.591.044	224.647.458.374	-66,22%
Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	0	49.027.000	-100,00%
Peralatan dan Mesin Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	984.742.679	0	100,00%
Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	196.415.000	0	100,00%
Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	756.006.438.755	2.338.071.844.576	-67,67%
Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	1.320.992.841.240	3.171.756.969.084	-58,35%
Jumlah	5.009.427.912.150	11.790.239.712.182	-57,51%

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat merupakan beban atas penyerahan bantuan pemerintah berupa barang maupun uang. Mekanisme pembebanan (penyerahan persediaan yang diserahkan ke masyarakat) diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 70/Permentan/PL.200/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan Catatan No C.5 (Belanja dibayar Dimuka) dan Catatan No B.4 (Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda), beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar **Rp5.009.427.912.150,00** atau **40,32%** dari nilai realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp12.425.463.735.663,00. Nilai beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda tersebut merupakan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang telah dilengkapi dokumentasi pertanggungjawaban.

Tabel D.9 Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (dalam Rupiah)

Eselon I	Realisasi	Dilengkapi SPJ	%	Dalam Proses Melengkapi SPJ	%
Ditjen Tanaman Pangan	5.561.553.597.691	4.463.394.145.821	80,25	1.098.159.451.870	19,75
Ditjen Hortikultura	877.599.788.662	153.284.249.394	17,47	724.315.539.268	82,53

Eselon I	Realisasi	Dilengkapi SPJ	%	Dalam Proses Melengkapi SPJ	%
Ditjen Perkebunan	705.751.471.545	19.304.903.829	2,735	686.446.567.716	97,26
Ditjen Peternakan dan Keswan	605.827.396.766	129.103.916.544	21,31	476.723.480.222	78,69
Ditjen PSP	4.199.707.321.489	382.424.355.819	9,106	3.817.282.965.670	90,89
Badan Litbang Pertanian	190.908.735.793	479.550.000	0,251	190.429.185.793	99,75
Badan PPSDMP	41.162.257.634	139.952.000	0,34	41.022.305.634	99,66
Badan Ketahanan Pangan	242.953.166.083	77.520.000.000	31,91	165.433.166.083	68,09
Total	12.425.463.735.663	5.225.651.073.407	42,06	7.199.812.662.256	57,94

D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp771.362.654.956,00 dan Rp727.631.536.035,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut.

Tabel D.10 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Uraian Penyusutan dan Amortisasi	31-Desember-2018	31-Desember-2017	%Naik/Turun
Penyusutan Peralatan dan Mesin	581.991.260.123	571.294.212.770	1,87%
Penyusutan Gedung dan Bangunan	139.545.216.667	120.277.718.133	16,02%
Penyusutan Jalan dan Jembatan	26.624.123.721	16.724.753.053	59,19%
Penyusutan Irigasi	5.784.927.841	5.932.931.696	-2,49%
Penyusutan Jaringan	6.503.478.943	6.724.159.999	-3,28%
Penyusutan Aset Tetap Lainnya	171.535.063	147.391.536	16,38%
Amortisasi Hak Cipta	765.543	471.974	62,20%
Amortisasi Paten	45.887.367	38.470.437	19,28%
Amortisasi Software	2.260.484.177	2.254.229.079	0,28%
Amortisasi Lisensi	251.213.474	271.831.025	-7,58%
Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	22.681.138	5.092.464	345,39%
Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	73.466.000	191.415.238	-61,62%
Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	8.087.614.899	3.768.858.631	114,59%
Jumlah	771.362.654.956	727.631.536.035	6,01%

D.9 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah

masing-masing sebesar Rp2.344.294.870,00 dan Rp11.066.680.048,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut.

Tabel D.11 Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Uraian Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31-Desember-2018	31-Desember-2017	% Naik/ Turun
Penyisihan Piutang PNPB	641.154.239	305.010.808	110,21%
Penyisihan Piutang Lainnya	203.897.829	-16.777.934	-1315,27%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-181.418.028	7.687.650.235	-102,36%
Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	-9.233.962	-17.592.427	-47,51%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	1.691.453.201	3.108.246.097	-45,58%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	-465.168	143.269	-424,68%
Jumlah	2.345.388.111	11.066.680.048	-78,81%

D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel D.12 Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Periode Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Uraian Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	31-Desember-2018	31-Desember-2017	% Naik/ (Turun)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-144.572.660.209,00	-124.792.465.217,00	15,85%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	11.384.732.827,00	5.561.562.258,00	104,70%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	155.957.393.036,00	130.354.027.475,00	19,64%
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00%
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00%
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00%
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	379.054.338.377,00	263.807.534.567,00	43,69%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	760.581.735.377,00	2.370.488.746.357,00	-67,91%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	381.527.397.000,00	2.106.681.211.790,00	-81,89%
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	234.481.678.168,00	139.015.069.350,00	68,67%

D.11. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2018 sebesar Rp144.572.660.209,00. Defisit ini naik sebesar Rp19.780.194.992,00 atau 15,8 persen dari Tahun 2017 yaitu sebesar Rp124.792.465.217,00. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp11.384.732.827,00 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp155.957.393.036,00.

D.12. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2018 adalah sebesar Rp11.384.732.827,00. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp5.823.170.569,00 atau 104,70 persendibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp5.561.562.258,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Eselon I yaitu ketika Pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel D.13. Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per Eselon I Periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ Turun
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	Ditjen Peternakan	4.265.298.000,00	218.077,00	1955767,88%
	Badan Litbang Pertanian	60.328.800,00	986.400,00	6016,06%
	Badan PPSDMP	0,00	25.300,00	-100,00%
	Badan Karantina Pertanian	18.389.000,00	22.930.000,00	-19,80%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Sekretariat Jenderal	242.813.329,00	236.000.000,00	2,89%
	Inspektorat Jenderal	9.285.000,00	0,00	0,00%
	Ditjen Tanaman Pangan	67.327.600,00	0,00	0,00%
	Ditjen Hortikultura	50.000,00	2.863.500,00	-98,25%
	Ditjen Perkebunan	268.737.751,00	41.900.000,00	541,38%
	Ditjen Peternakan	284.318.440,00	40.754.999,00	597,63%
	Badan Litbang Pertanian	376.570.670,00	46.335.145,00	712,71%
	Badan PPSDMP	40.366.000,00	47.400.000,00	-14,84%
	Badan Ketahanan Pangan	9.895.000,00	0,00	0,00%
	Badan Karantina Pertanian	1.178.495.427,00	501.988.764,00	134,77%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Sekretariat Jenderal	184.660.008,00	68.866.000,00	168,14%
	Inspektorat Jenderal	13.500.000,00	62.188.000,00	-78,29%
	Ditjen Tanaman Pangan	0,00	49.250.000,00	-100,00%
	Ditjen Hortikultura	71.106.999,00	133.100.000,00	-46,58%
	Ditjen Perkebunan	192.661.000,00	23.515.000,00	719,31%
	Ditjen Peternakan	2.403.982.624,00	2.999.759.966,00	-19,86%
	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	0,00	48.550.000,00	-100,00%
	Badan Litbang Pertanian	1.148.555.191,00	455.399.599,00	152,21%
	Badan PPSDMP	73.661.044,00	37.771.855,00	95,02%
	Badan Ketahanan Pangan	81.553.453,00	3.850.000,00	2018,27%
Badan Karantina Pertanian	393.177.491,00	737.909.653,00	-46,72%	
Jumlah		11.384.732.827,00	5.561.562.258,00	104,70%

Jika dibandingkan realisasi pendapatan pelepasan aset non lancar pada laporan realisasi anggaran (LRA) periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp11.384.404.027,00 dengan pendapatan pelepasan aset non lancar pada laporan operasional

(LO) sebesar Rp11.384.732.827,00terdapat selisih sebesar Rp328.800,00 dikarenakan terdapat jurnal SAIBA pendapatan dari penjualan tanah, gedung, dan bangunan terhadap pendapatan diterima dimuka pada satker Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kantor Pusat Jakarta (411971) Badan Litbang Pertanian.

Tabel D.14PerbandinganPendapatan Pelepasan Aset Non Lancarpada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per31 Desember 2018 (dalam Rupiah)

Uraian Akun	LRA	LO	SELISIH
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar (Kegiatan Non Operasional)			
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.343.687.000	4.344.015.800	(328.800)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.477.859.217	2.477.859.217	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	4.562.857.810	4.562.857.810	0
Jumlah	11.384.404.027	11.384.732.827	(328.800)

D.13. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2018 adalah sebesar Rp155.889.413.795,00. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp25.535.386.320,00 atau 19,59 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp130.354.027.475,00.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya), karena Satuan Kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset tersebut dapat berupa penghapusan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Perbandingan Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Eselon I untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut.

Tabel D.15. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per Eselon I Periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (dalam Rupiah)

Eselon I	31-Desember-2018	31-Desember-2017	%Naik/Turun
Sekretariat Jenderal	1.600.123.770	2.525.684.954	-36,65%
Inspektorat Jenderal	99.697.936	187.478.206	-46,82%
Ditjen Tanaman Pangan	18.666.974.656	3.846.759.135	385,26%
Ditjen Hortikultura	1.909.685.950	15.228.794.554	-87,46%
Ditjen Perkebunan	91.406.361.592	56.444.331.272	61,94%
Ditjen Peternakan	11.568.046.771	14.917.739.396	-22,45%
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	18.792.395.208	26.583.129.367	-29,31%
Badan Litbang Pertanian	11.742.953.063	1.512.076.160	676,61%
Badan PPSDMP	5.092.317.415	4.448.841.256	14,46%
Badan Ketahanan Pangan	917.218.267	613.549.748	49,49%
Badan Karantina Pertanian	54.580.325.230	6.286.230.813	768,25%
Satker Konsolidasi	-60.418.706.822	-2.240.587.386	2596,56%
Jumlah	155.957.393.036	130.354.027.475	19,64%

Beban pelepasan aset non lancar yang signifikan berasal dari Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp18.666.974.656,00, Ditjen Perkebunan sebesar Rp91.406.361.592,00. Ditjen Peternakan sebesar Rp12.216.118.753,00, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp18.792.395.208,00, Badan Litbang Pertanian sebesar Rp11.742.953.063,00 dan Badan Karantina Pertanian sebesar Rp54.580.325.230,00. Terdapat nilai minus beban pelepasan aset non lancar sebesar Rp60.430.149.837,00 pada satker Konsolidasi dikarenakan *take out* nilai revaluasi.

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2018:

Penghapusan	Sekretariat Jenderal	338.105.975
	Ditjen Hortikultura	1.456.777.280
	Ditjen Perkebunan	1.419.729
	Ditjen Peternakan	53.775.000
	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	131.300.157
	Badan Litbang Pertanian	993.556.667
	Badan PPSDMP	4.843.709.543
	Badan Ketahanan Pangan	57.826.918
	Badan Karantina Pertanian	966.890.000
	Hibah (Keluar)	Sekretariat Jenderal
Ditjen Tanaman Pangan		2.987.365.473
Ditjen Perkebunan		88.326.319.898
Ditjen Peternakan		1.165.817.590
Badan PPSDMP		22.910.338
Badan Ketahanan Pangan		421.860.547
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	4.060.242.048
	Badan Ketahanan Pangan	-320.000
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	Ditjen Tanaman Pangan	15.623.849.791
Usulan Barang Hibah DK/TP	Ditjen Perkebunan	2.935.976.058
	Ditjen Peternakan	1.943.340.106
	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1.639.481.065
	Badan Ketahanan Pangan	437.352.502
Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang dihentikan)	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	2.813.274.878
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Sekretariat Jenderal	18.713.750
	Ditjen Tanaman Pangan	4.723.256
	Ditjen Hortikultura	66.746.267
	Ditjen Perkebunan	72.207
	Ditjen Peternakan	33.026.585
	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	126.271.654
	Badan Litbang Pertanian	1.616.019.296
	Badan PPSDMP	62.265.510
Badan Ketahanan Pangan	498.300	
	Badan Karantina Pertanian	52.086.097.776

Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	Sekretariat Jenderal	768.789.142
	Ditjen Perkebunan	142.573.700
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	Sekretariat Jenderal	460.822.654
	Inspektorat Jenderal	5.152.936
	Ditjen Tanaman Pangan	47.647.981
	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	10.021.825.406
	Badan PPSDMP	58.548.877
	Badan Karantina Pertanian	1.527.337.454
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	Ditjen Tanaman Pangan	3.388.155
	Ditjen Hortikultura	386.162.403
Penghapusan/ Penghentian KDP	Inspektorat Jenderal	94.545.000
	Ditjen Peternakan	172.032.190
	Badan Litbang Pertanian	15.235.400
	Badan PPSDMP	83.383.147
Penghapusan Lainnya	Ditjen Peternakan	8.200.055.300
	Badan Litbang Pertanian	9.118.141.700
	Badan PPSDMP	21.500.000
Take Out Revaluasi	Satker Konsolidasi	-60.418.706.822
JUMLAH		155.957.393.036

D.14 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2018 adalah sebesar Rp379.054.338.377,00. Nilai tersebut naik sebesar Rp115.246.803.810,00 atau 43,69 persen dibanding Tahun 2017 yaitu sebesar Rp263.807.534.567,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp760.581.735.377,00 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp381.527.397.000,00.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp760.581.735.377,00. Nilai tersebut turun sebesar Rp1.609.907.010.980,00 atau 67,91 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp2.370.488.746.357,00. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel D.16. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Uraian	31-Desember-2018	31-Desember-2017	%Naik/ Turun
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	93.017.500	-100,00%
Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.460.500	-100,00%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	2.511.126.563	14.568.785.041	-82,76%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	609.299.042	3.441.908.221	-82,30%

Uraian	31-Desember-2018	31-Desember-2017	%Naik/Turun
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	40.436.856.540	0	0,00%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.955.643.568	1.209.289.425	61,72%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	145.517.223.595	30.615.089.549	375,31%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.451.653.357	1.867.178.399	-22,25%
Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	2.250.000		0,00%
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	7.090.964.721	11.042.934.461	-35,79%
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	8.100.165		0,00%
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	128.576.197	65.407.005	96,58%
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	143.073.009.269	98.271.101.138	45,59%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	417.797.032.360	2.209.312.575.118	-81,09%
Jumlah	760.581.735.377	2.370.488.746.357	-67,91%

Tabel D.17 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2018 (dalam Rupiah)

Uraian Akun	LRA	LO	SELISIH
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	2.056.808.891	2.511.126.563	(454.317.672)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	792.695.545	609.299.042	183.396.503
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	28.015.884.679	40.436.856.540	(12.420.971.861)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.986.773.116	1.955.643.568	31.129.548
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	142.026.744.123	145.517.223.595	(3.490.479.472)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	2.418.618.599	1.451.653.357	966.965.242
Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	2.250.000	2.250.000	0
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	7.090.964.721	7.090.964.721	0
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	8.100.165	8.100.165	0
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	128.576.197	(128.576.197)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	143.073.009.269	(143.073.009.269)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	417.797.032.360	(417.797.032.360)
Jumlah	184.398.839.839	760.581.735.377	(576.182.895.538)

Jika dibandingkan realisasi pendapatan kegiatan non operasional lainnya pada laporan realisasi anggaran (LRA) sebesar Rp184.398.839.839,00 dengan pendapatan kegiatan non operasional lainnya pada laporan operasional (LO) sebesar Rp760.581.735.377,00 periode yang berakhir pada 31 Desember 2018, terdapat selisih sebesar Rp576.182.895.538,00. Selisih tersebut yang signifikan terdapat pada pendapatan perolehan aset lainnya sebesar Rp143.073.009.269,00 dan pendapatan penyesuaian persediaan sebesar Rp417.797.032.360,00 dikarenakan jurnal kiriman dari SIMAK-BMN.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per akun per Eselon I disajikan pada **Lampiran D.4**.

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp381.527.397.000,00. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp1.725.153.814.790,00 atau 81,89 dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp2.106.681.211.790,00. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun2018 dan Tahun2017 adalah sebagai berikut.

Tabel D.18. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Uraian	Eselon I	31-Desember-2018	31-Desember-2017	%Naik/Turun
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	Sekretariat Jenderal	29.804.856	91.621.010	-67,47%
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Sekretariat Jenderal	179.123.731	139.476.934.043	-99,87%
	Inspektorat Jenderal	106.393.217	14.820.287	617,89%
	Ditjen Tanaman Pangan	4.137.316.528	101.243.912.910	-95,91%
	Ditjen Hortikultura	244.445.953	1.140.206.476	-78,56%
	Ditjen Perkebunan	1.327.704.874	20.856.341.458	-93,63%
	Ditjen Peternakan dan Keswan	337.279.362.768	5.997.600.934	5523,57%
	Ditjen PSP	1.700.000	1.812.262.194.609	-100,00%
	Badan Litbang Pertanian	31.840.113.757	16.411.183.890	94,01%
	Badan PPSDMP	152.704.366	347.099.832	-56,01%
	Badan Ketahanan Pangan	150.425.859	37.480.572	301,34%
	Badan Karantina Pertanian	1.027.146.624	7.265.134.073	-85,86%
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	Ditjen Tanaman Pangan	4.780.000	0	0,00%
	Ditjen Hortikultura	1.127.777.500	12.000.000	9298,15%
	Ditjen Peternakan dan Keswan	659.095.300	506.111.500	30,23%
	Badan Litbang Pertanian	2.183.257.920	452.807.300	382,16%
	Badan Karantina Pertanian	947.667.550	500.355.891	89,40%
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Sekretariat Jenderal	128.576.197	65.407.005	96,58%
Jumlah		381.527.397.000	2.106.681.211.790	-81,89%

Besarnya beban dari kegiatan non operasional lainnya yang signifikan terdapat pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp337.279.362.768,00 dan Badan Litbang Pertanian sebesar Rp31.840.113.757,00 yang merupakan penyesuaian nilai persediaan.

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2017 adalah masing-masing sebesar Rp18,462,335,723,500,00 dan Rp16.763.445.775.459,00 .

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Saldo Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp13.833.515.444.469,00 dan Rp20.115.684.106.107,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3.1 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp779.470.625,00 dan Rp7.162.870.680,00.

Tabel E.1 Koreksi Nilai Persediaan Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Uraian Koreksi Nilai Persediaan	31-Desember-2018	31-Desember-2017	% Naik/Turun
Barang Konsumsi	4.930.000	264.940.205	-98,14%
Bahan untuk Pemeliharaan	0	3.164.500	-100,00%
Suku Cadang	0	779.724.950	-100,00%
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	4.800.000	-100,00%
Bahan Baku	188.717.125	744.106.102	-74,64%
Persediaan Lainnya	585.823.500	5.366.134.923	-89,08%
Jumlah	779.470.625	7.162.870.680	-89,12%

E.3.2 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan hasil inventarisasi dan penilaian kembali oleh KPKNL atas aset-aset pada Kementerian Pertanian. Revaluasi Aset Tetap lingkup Kementerian Pertanian sudah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018, namun berdasarkan hasil kesepakatan BPK-RI dan Kementerian Keuangan hasil revaluasi tersebut tidak boleh disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2018, hal ini sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-182/PB/2019 tanggal 11 Februari 2018 perihal Petunjuk Teknis Koreksi Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2018 (*Unaudited*).

E.3.4 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp18.361.046.098,00 dan Rp304.524.144.719,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset

lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada **Lampiran E.1**.

E.3.5 KOREKSI LAIN-LAIN

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar -Rp40.762.028.933,00 dan Rp636.352.573,00. Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada **Lampiran E.2**.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp21.236.843.058.302,00 dan Rp21.502.250.686.176,00. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel E.2 Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Uraian Transaksi Antar Entitas	31-Desember-2018	31-Desember-2017	%Naik/ Turun
Ditagihkan ke Entitas Lain	21.777.766.261.178	21.873.784.231.155	-0,44%
Diterima dari Entitas Lain	-663.600.362.381	-510.918.125.835	29,88%
Transfer Keluar	-112.611.349.311	-267.218.240.083	-57,86%
Transfer Masuk	115.263.799.193	269.430.279.550	-57,22%
Pengesahan Hibah Langsung	117.665.001.391	137.172.559.102	-14,22%
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-9.091.768	-17.713	51228,22%
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	2.368.800.000	0	0,00%
Jumlah	21.236.843.058.302	21.502.250.686.176	-1,23%

E.4.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN / DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain (DDEL/DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar -Rp663.600.362.381,00 sedangkan DKEL sebesar Rp21.777.766.261.178,00.

E.4.2 TRANSFER KELUAR/TRANSFER MASUK

Saldo transfer keluar disajikan sebesar Rp112.611.349.311,00 dan transfer masuk sebesar Rp115.263.799.193,00. Transfer Keluar/Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. Rincian saldo transfer masuk dan transfer keluar dapat disajikan pada **Lampiran E.3** dan **E.4**.

Jika dibandingkan saldo transfer keluar dan transfer masuk dengan tetap memperhitungkan akumulasi penyusutan terdapat selisih sebesar Rp2.652.449.882,00. Selisih tersebut merupakan akumulasi atas selisih transfer keluar dan transfer masuk, Rincian selisih disajikan pada **Lampiran E.5**.

E.4.3 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung secara bruto sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp117.665.001.391,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar -Rp9.091.768,00 yang terdapat pada Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar -Rp125,00 dan Badan Litbang Pertanian sebesar -Rp9.091.643,00 sehingga Pengesahan Hibah Langsung secara netto sebesar Rp117.655.909.623,00.

Tabel E.3Rincian Pengesahan Hibah Langsungs.d. 31 Desember 2018

Eselon 1	Bentuk Hibah	Jumlah (Rp)
Sekretariat Jenderal	a. Tanah, pemberi hibah Pemerintah Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor.3781/PL.130/A/09/2017 yang berupa Tanah bangunan gedung kantor dengan luas 56.000 M2	14.000.000.000,00
	b. Tanah, pemberi hibah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor.225/PL.1310/A/06/2018 Tanggal 8 Juni 2018 dengan luas 15.000 M2	960.000.000,00
	c. Uang, pemberi hibah FAO	997.281.350,00
	JUMLAH :	15.957.281.350,00
Ditjen Tanaman Pangan	Barang dan Jasa, pemberi hibah FAO di Satker Kantor Pusat	5.665.497.414,00
Ditjen Hortikultura	Barang dan Jasa, pemberi hibah JICA –Jepang untuk kegiatan The Public Private Partnership Project For The Improvement of The Agriculture Product Marketing And Distribution System dengan rincian	28.357.080.263,00
	a. Uang	29.249.000,00
	b. Barang	28.386.329.263,00
	JUMLAH :	
Ditjen Perkebunan	Jasa, pemberi hibah United National Development Program (UNDP) berupa kegiatan terkait operasional Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI), pelaksanaan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) utk pekebun kelapa sawit, pengelolaan dan monitoring lingkungan terkait pengelolaan kelapa sawit serta tata kelola dan mediasi konflik dalam sektor kelapa sawit	4.405.829.767,00
Ditjen Peternakan dan Kewan	a. Jasa, berupa Jasa Pelatihan dari Department of Agriculture, Fisheries and Forestry of Australia (DAFF) utk kegiatan Australia Indonesia Improved Animal Welfare Program (IAWP)	18,742,152,373.00
	b. Jasa, pemberi hibah Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) New Zealand untuk kegiatan Indonesia-New Zealand Dairy Excellence Activity (IDEA)	26,685,741,523.00
	JUMLAH :	45.427.893.896,00

Eselon 1	Bentuk Hibah	Jumlah (Rp)
Badan Litbang Pertanian	Uang, pemberi hibah ACIAR (Australia), Research Council of Norway, FAO, Arcadia Bioscience, Inc, OCP Maroko	11.581.196.701,00
	Barang berupa Tanah di Provinsi Sumatera Selatan, pemberi hibah Pemda Provinsi Sumatera Selatan	2.050.000.000,00
	JUMLAH :	13.631.196.701,00
Badan PPSDM Pertanian	Barang (Bangunan Gedung Kantor Lainnya/Aula) dari Pemda Kalimantan Selatan)	273.000.000,00
Badan Ketahanan Pangan	Jasa, pemberi hibah FAO	3.917.973.000,00
Jumlah		117.665.001.391,00
Pengembalian Hibah Langsung		-9.091.768,00
Jumlah Hibah Langsung		117.655.909.623,00

E.4.4 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAHUN ANGGARAN YANG LALU (TAYL)

Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa yang diterima pada tahun 2017 dan/atau tahun-tahun sebelumnya namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah. Pengesahan Hibah Langsung TAYL secara bruto sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.368.800.000,00. Pengesahan Hibah Langsung TAYL tersebut terdapat pada BPTP Bangka Belitung senilai Rp2.123.800.000,00 berupa hibah tanah seluas 15 ha dari Pemda Belitung Timur dan pada BPTP Riau senilai Rp245.000.000,00 berupa hibah 2 bidang Tanah di Kabupaten SIAK kecamatan muara klatan desa lubuk jering dan desa bungkal, dengan luas tanah utk muara klatan 3,5 hektar dan lubuk jering dgn luas tanah 8,7 hektar.

E.5 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp25.807.319.732.927,00 dan Rp18.462.335.723.500,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca sebagaimana tersaji dalam pengungkapan lain-lain.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Monitoring daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut atas temuan BPK Tahun 2018 dijelaskan sebagaimana dalam **Lampiran F.1**.

F.2.2. MONITORING HIBAH

1. Jumlah Proyek Pinjaman

- a. Jumlah proyek Pinjaman (On-Going) lingkup Kementerian Pertanian pada Semester II Tahun Anggaran 2018 sebanyak 5(lima) proyek.

NO	UNIT ESELON 1	PINJAMAN
1	DITJEN PSP	1 PROYEK
2	BADAN LITBANG PERTANIAN	1 PROYEK
3	BADAN PP SDM PERTANIAN	2 PROYEK
4	BADAN KETAHANAN PANGAN	1 PROYEK
	TOTAL	5 PROYEK

- b. Nilai Komitmen Pinjaman (On-Going) lingkup Kementerian Pertanian pada Semester II Tahun Anggaran 2018 yaitu :

NO	UNIT ESELON 1	NAMA PROYEK PINJAMAN	NILAI KOMITMEN PINJAMAN	
1	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)	USD	2,442,156
2	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	Sustainable Management for Agricultural Research Development and Technology Dissemination (SMARTD)	USD	80,000,000
3	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	EUR	53,790,000
		Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI)	USD	39,885,000
4	BADAN KETAHANAN PANGAN	Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia	SDR	30,300,000
TOTAL			EUR	53,790,000
			USD	122,327,156
			SDR	30,300,000

- c. Nilai Realisasi Pinjaman (On-Going) lingkup Kementerian Pertanian pada Semester II Tahun Anggaran 2018 yaitu :

NO	NAMA PROYEK PINJAMAN	PAGU DIPA 2018 (Rp)	REALIASI PAGU DIPA 2018 (Rp)
1	Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)	5.230.000.000	5.035.479.046
2	Sustainable Management for Agricultural Research Development and Technology Dissemination (SMARTD)	248.199.000.000	235.037.944.360
3	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	38.760.000.000	6.068.143.602
4	Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI)	11.204.897.000	3.072.061.110
5	Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia	46.022.400.000	45.644.305.512
TOTAL		349.416.297.000	294.857.933.630

Adapun tujuan proyek Pinjaman (On-Going) lingkup Kementerian Pertanian pada Semester II Tahun Anggaran 2018 yaitu :

NO	NAMA PROYEK PINJAMAN	TUJUAN PROYEK PINJAMAN
1	Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)	Memperbaiki kondisi lahan pertanian di DAS Ciujung dalam hal pengendalian erosi melalui pengelolaan lahan yang lebih baik, teknik konservasi air dan meningkatkan pendapatan petani dari pengelolaan daerah aliran sungai / agroforestri
2	Sustainable Management for Agricultural Research Development and Technology Dissemination (SMARTD)	Meningkatkan kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, dan sistem manajemen penelitian.
3	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	'Meningkatkan nilai pertanian beririgasi secara berkelanjutan
4	Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI)	Tujuan Program READ-SI adalah pemberdayaan rumah tangga di pedesaan di lokasi Program, baik secara individu maupun secara kelompok, dengan keterampilan, membangun rasa percaya diri dan pemanfaatan sumberdaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non-pertanian serta meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.
5	Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia	'Penguatan kelembagaan dan manajemen proyek; Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan; Dukungan terhadap produksi pertanian dan pemasaran; Pemberdayaan masyarakat dan gender

2. Jumlah Proyek Hibah

Berdasarkan Register, jumlah proyek hibah lingkup Kementerian Pertanian pada Semester II Tahun Anggaran 2018 sebanyak 53 proyek Hibah.

Hibah dilingkup Kementerian Pertanian dapat diklasifikasikan berdasarkan sebagai berikut :

- Hibah menurut Jenisnya : Hibah Terencana dan Hibah Langsung.
- Hibah menurut sumbernya : Hibah Luar Negeri dan Hibah Dalam Negeri.
- Hibah menurut bentuknya : Hibah bentuk Uang/Kas dan Hibah bentuk Barang&Jasa.

- a. Perincian klasifikasi hibah, menurut jenisnya yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Hibah	Jumlah Proyek
1.	Hibah Terencana	1 Proyek
2.	Hibah Langsung	52 Proyek
TOTAL		53 Proyek

- b. Perincian klasifikasi hibah, menurut sumber hibah yaitu sebagai berikut :

No.	Sumber Hibah	Jumlah Proyek Hibah
1.	Hibah bersumber dari Luar Negeri	47 Proyek
2.	Hibah bersumber dari Dalam Negeri	6 Proyek
TOTAL		53 Proyek

- c. Perincian klasifikasi hibah, menurut bentuknya yaitu sebagai berikut :

No.	Bentuk Hibah	Jumlah Proyek Hibah
1.	Hibah bentuk Uang/Kas	24 Proyek
2.	Hibah bentuk Barang& Jasa	29 Proyek
TOTAL		53 Proyek

- d. Data Hibah berdasarkan Eselon I disajikan perinciannya sbb :

N O	UNIT ESELON I	HIBAH TERENCANA	JUMLAH HIBAH LANGSUNG	
			Uang	BJS
1	SEKRETARIAT JENDERAL		3 PROYEK	2 PROYEK
2	DITJEN TANAMAN PANGAN			1 PROYEK
3	DITJEN HORTIKULTURA			3 PROYEK
4	DITJEN PERKEBUNAN			1 PROYEK
5	DITJEN PETERNAKAN & KESWAN		0 PROYEK	14 PROYEK
6	BADAN LITBANG PERTANIAN		20 PROYEK	4 PROYEK
7	BADAN PP SDM PERTANIAN			2 PROYEK
8	BADAN KETAHANAN PANGAN	1 PROYEK		2 PROYEK
TOTAL		1 PROYEK	23 PROYEK	29 PROYEK

3. Nilai Komitmen Hibah (Mou).

Jumlah Nilai Komitmen Hibah Tahunan Tahun Anggaran 2018 lingkup Kementerian Pertanian, yaitu sebagai berikut:

a. Nilai Komitmen Hibah, menurut jenisnya, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Hibah	Jumlah Proyek	Nilai Komitmen Hibah
1.	Hibah Terencana	1 Proyek	SDR 675.000
2.	Hibah Langsung	52 Proyek	USD 91.537.856 AUD 3.388.667.360 NOK 794.500 NZD 7.846.000 EUR 13.100.000 JPY 656.108.080 IDR 21.427.943.029
TOTAL		53 Proyek	SDR 675.000 USD 91.537.856 AUD 3.388.667.360 NOK 794.500 NZD 7.846.000 EUR 13.100.000 JPY 656.108.080 IDR 21.427.943.029

b. Nilai Komitmen Hibah, menurut sumbernya yaitu sebagai berikut :

No.	Sumber Hibah	Jumlah Proyek Hibah	Nilai Komitmen Hibah (Currency)
1.	Hibah yang bersumber dari Luar Negeri	47 Proyek	USD 91.537.856 AUD 3.388.667.360 NOK 794.500 NZD 7.846.000 EUR 13.100.000 JPY 656.108.080 IDR 3.826.143.029 SDR 675.000
2.	Hibah yang bersumber dari Dalam Negeri	6 Proyek	IDR 17.601.800.000
TOTAL		53 Proyek	USD 91.537.856 AUD 3.388.667.360 NOK 794.500 IDR 21.427.943.029 NZD 7.846.000 SDR 675.000 EUR 13.100.000 JPY 656.108.000

c. Nilai Komitmen Hibah, menurut bentuknya yaitu sebagai berikut :

No.	Bentuk Hibah	Jumlah Proyek Hibah	Nilai Komitmen Hibah (Currency)
1.	Hibah bentuk Uang/Kas	24 Proyek	USD 1.740.086

			AUD 3.357.422.250 NOK 794.500 IDR 3.826.143.029 NZD 246.000 SDR 675.000
2.	Hibah bentuk Barang& Jasa	29 Proyek	USD 89.797.770 NZD 7.600.000 AUD 31.245.110 EUR 13.100.000 JPY 656.108.080 IDR 17.601.800.000
TOTAL		53 Proyek	USD 91.537.856 AUD 3.388.667.360 NOK 794.500 IDR 21.427.943.029 NZD 7.846.000 SDR 675.000 EUR 13.100.000 JPY 656.108.000

d. Perincian nilai komitmen hibah berdasarkan Unit Eselon I :

NO	UNIT ESELON 1	NILAI KOMITMEN PINJAMAN & HIBAH				
		HIBAH TERENCANA	HIBAH LANGSUNG		BJS	
			KAS			
1.	SETJEN		IDR	3.022.135.099	IDR	14.960.000.000
			AUD	3.354.822.435		
2.	DITJEN TANAMAN PANGAN				USD	434.000
3.	DITJEN HORTIKULTURA				JPY	656.108.080
4.	DITJEN PERKEBUNAN				USD	1.727.580
5.	DITJEN PETERNAKAN & KESWAN				EUR	13.100.000
					AUD	31.245.110
					USD	82.871.593
					NZD	7.600.000
6.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN		AUD	2.599.815	USD	3.154.784
			USD	1.740.086	IDR	2.368.800.000
			NOK	794.500		
			IDR	804.007.930		
			NZD	246.000		
7.	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN				IDR	273.000.000
					USD	97.650
8.	BADAN KETAHANAN PANGAN	SDR	675,000		USD	1.512.163

NO	UNIT ESELON 1	NILAI KOMITMEN PINJAMAN & HIBAH					
		HIBAH TERENCANA		HIBAH LANGSUNG			
				KAS		BJS	
TOTAL		SDR	675.000	USD	1.740.086	USD	89.797.770
				AUD	3.357.422.250	NZD	7.600.000
				NOK	794.500	AUD	31.245.110
				IDR	3.826.143.029	EUR	13.100.000
				NZD	246.000	JPY	656.108.080
						IDR	17.601.800.000

4. Realisasi Hibah lingkup Kementerian Pertanian

Realisasi Hibah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Hibah menurut Jenisnya : Hibah Terencana dan Hibah Langsung.
2. Hibah menurut sumbernya : Hibah Luar Negeri dan Hibah Dalam Negeri.
3. Hibah menurut bentuknya : Hibah bentuk Uang/Kas dan Hibah bentuk Barang&Jasa.

a. Nilai Realisasi Hibah, menurut jenisnya, yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi Hibah Terencana

Jumlah Realisasi Belanja Hibah Terencana lingkup Kementerian Pertanian Semester II Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.983.919.382 dari Total Pagu Hibah Terencana sebesar Rp3.000.000.000, atau setara dengan 99,46%.

2. Realisasi Hibah Langsung

Total Realisasi Hibah yang diterima secara langsung oleh Kementerian Pertanian dari lembaga donor yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri pada Semester II Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk Kas :

- a. Saldo Awal : Rp 998.142.402
- b. Pendapatan : Rp 12.578.478.051
- c. Pagu DIPA Hibah Langsung : Rp 11.721.586.000
- d. Belanja : Rp 11.090.728.638
- e. Saldo Bruto : Rp 2.485.891.815
- f. Setor ke Kas Negara : Rp 9.091.568
- g. Saldo Netto : Rp 2.476.800.247

2. Bentuk Barang&Jasa

- a. Barang : Rp 17.631.049.000
- b. Jasa : Rp 83.368.444.574

b. Nilai Realisasi Hibah, menurut sumbernya, yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi Hibah Luar Negeri

Total Realisasi Hibah yang diterima oleh Kementerian Pertanian dari Luar Negeri pada Semester II Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

1) Hibah Luar Negeri berdasarkan yang sudah direncanakan :

- a. Pagu DIPA : Rp 3.000.000.000
- b. Realiasi Pagu DIPA : Rp 2.983.919.382

2) Hibah yang bersumber dari Luar Negeri yang diterima secara langsung :

- a) Bentuk Kas :

- 1) Saldo Awal : Rp 998.142.402
 - 2) Pendapatan : Rp 12.578.478.051
 - 3) Pagu DIPA Hibah Langsung : Rp 11.721.586.000
 - 4) Belanja : Rp 11.090.728.638
 - 5) Saldo Bruto : Rp 2.485.891.815
 - 6) Setor ke Kas Negara : Rp 9.091.568
 - 7) Saldo Netto : Rp 2.476.800.247
- b. Bentuk Barang&Jasa
- 1) Barang : Rp 29.249.000
 - 2) Jasa : Rp 83.368.444.574

2. Hibah Dalam Negeri

Hibah Dalam Negeri pada Semester II Tahun Anggaran 2018 yang diterima secara langsung yaitu berupa Hibah Barang (tanah dan/atau bangunan) senilai Rp17.601.800.000.

c. Nilai Realisasi Hibah, menurut bentuknya, yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi Hibah bentuk Kas/Uang

Total Realisasi Hibah bentuk kas/uang yang diterima oleh Kementerian Pertanian pada Semester II Tahun Anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Hibah bentuk Kas/Uang yang diterima secara terencana yaitu :
 - a. Pagu DIPA : Rp 3.000.000.000
 - b. Realiasi Pagu DIPA : Rp 2.983.919.382
- 2) Hibah bentuk Kas/Uang yang diterima secara langsung yaitu :
 - a. Saldo Awal : Rp 998.142.402
 - b. Pendapatan : Rp 12.578.478.051
 - c. Pagu DIPA Hibah Langsung : Rp 11.721.586.000
 - d. Belanja : Rp 11.090.728.638
 - e. Saldo Bruto : Rp 2.485.891.815
 - h. Disetor Ke Kas Negara : Rp 9.091.568
 - f. Saldo Netto : Rp 2.476.800.247

Perincian Hibah Langsung bentuk Uang/Kas berdasarkan Unit Eselon I bisa dijabarkan dengan matriks sebagai berikut :

NO	UNIT ESELON I	HIBAH LANGSUNG BENTUK KAS				
		SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR NETTO	SETOR KE KAS NEGARA
1	Sekretariat Jenderal	Rp 144.624.318	Rp 997.281.350	Rp 563.251.400	Rp 578.654.143	Rp 125
2	Badan Litbang.P	Rp 853.518.084	Rp 11.581.196.701	Rp 10.527.477.238	Rp 1.898.146.104	Rp 9.091.443
TOTAL		Rp 998.142.402	Rp 12.578.478.051	Rp 11.090.728.638	Rp 2.476.800.247	Rp 9.091.568

2. Realisasi Hibah bentuk Barang dan Jasa

Total Realisasi Hibah bentuk barang dan jasa yang diterima oleh Kementerian Pertanian pada Semester II Tahun Anggaran 2018 yaitu :

1. Bentuk Barang : Rp 17.631.049.000
2. Bentuk Jasa : Rp 83.368.444.574

Perincian Hibah Langsung bentuk Barang dan Jasa berdasarkan Unit Eselon I bisa dijabarkan dengan matriks sebagai berikut :

NO	UNIT ESELON I	HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG DAN JASA		
		HIBAH BENTUK BARANG	HIBAH BENTUK JASA	TOTAL
1.	Setjen	Rp 14.960.000.000		Rp 14.960.000.000
2.	Ditjen TP		Rp 5.665.497.414	Rp 5.665.497.414
3.	Ditjen Hortikultura	Rp 29.249.000	Rp 28.357.080.263	Rp 28.386.329.263
4.	Ditjen PKH		Rp 45.427.893.896	Rp 45.427.893.896
5.	Balitbangtan	Rp 2.368.800.000		Rp 2.368.800.000
6.	BPPSDMP	Rp 273.000.000		Rp 273.000.000
7.	B.Ketahanan Pangan		Rp 3.917.973.000	Rp 3.917.973.000
TOTAL		Rp 17.631.049.000	Rp 83.368.444.574	Rp 100.999.493.574

5. Data Donor Pemberi Hibah

Data Donor Pemberi Hibah Per 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, yaitu jumlah donor pemberi hibah di lingkungan Kementerian Pertanian pada periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 berjumlah 24 donor yang terdiri dari berbagai Instansi Dalam Negeri, Organisasi Internasional, baik Bilateral maupun Multilateral. Lebih rinci monitoring hibah dapat dilihat pada **Lampiran F.2.**

F.2.3 KEWAJIBAN KONTIJENSI (CONTIJEN LIABILITIES)

Selain kewajiban pemerintah yang tercantum pada akun Utang Pihak Ketiga, terdapat juga kewajiban pemerintah yang mempunyai sifat *Contijen Liabilities* atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja di Tahun Anggaran 2018 namun belum terbayarkan. Kewajiban untuk mengakui adanya kemungkinan terjadinya utang kepada pihak ketiga yang disebabkan adanya tuntutan hukum kepada Kementerian Pertanian yaitu pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan nilai tuntutan material.

Dalam hal ini adalah gugatan yang dilakukan oleh pemenang lelang pengadaan dan penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA. 2012. Dapat diuraikan sebagai berikut :

- No. Gugatan : 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
 Penggugat : Maman Rukmana, bertindak a.n. PT Lestari Cipta Anugerah
 Tergugat : 1. PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida pada Satker Lingkup Direktorat PSP Kementan TA 2012

Nilai	:	2. Menteri Pertanian Rp51.917.600.000,00 terdiri dari Rp50.917.600.000,00 kerugian materiil dan Rp1.000.000.000,00 kerugian immaterial
Ringkasan Kasus	:	PT Lestari Cipta Anugerah merupakan pemenang lelang pengadaan dan penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA 2012 yang telah diikat dalam kontrak kerja sama dengan pihak Tergugat yang termuat dalam Surat Kontrak No.07/PPK/PSP/VII/2012/181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012 tanggal 02 Juli 2012 Kontrak berlaku 77 hari kalender dan berakhir tanggal 16 Sept 2012. Namun tanggal 16 Agustus 2012 pihak Tergugat membatalkan kontrak kerja sama.

Alasan pembatalan lelang adalah adanya dugaan Sertifikat Uji Mutu yang dikeluarkan Unpad Fak.MIPA, Jur.Biologi Laboratorium Mikrobiologi diragukan keabsahannya. Alasan lainnya karena persyaratan stok 40%. Perkara ini masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah melalui Putusan Sela jenis putusan interlukotoir adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara, seperti putusan yang berisi perintah untuk memberikan keterangan ahli, putusan tentang beban pembuktian kepada salah satu pihak agar membuktikan suatu putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*).

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan pihak pengugat, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum dengan mengajukan upaya hukum banding atas putusan A-quo pada tanggal 4 Mei 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Oleh karena lamanya salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang baru diterima 6 bulan setelah putusan di bacakan tepatnya tanggal 28 Oktober 2015, sehingga penyampaian Memori Banding menjadi lama/tertunda dan baru pada tanggal 12 Nopember 2015 mengajukan memori banding atas permohonan banding tanggal 4 Mei 2015, terhadap putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan tertanggal 23 April 2015 nomor : 440/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel. Setelah dilakukan pengadilan tingkat banding, sudah terbit putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 30 Mei 2016 nomor : 238/PDT/2016/PT.JKT dan diperkuat di tingkat kasasi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 7 Februari 2017 nomor : 1849 K/PDT/2017/PT.JKT.

F.2.4. MONITORING PENYELESAIAN SATKER INAKTIF

Daftar rekapitulasi Satuan Kerja inaktif Kementerian Pertanian tahun 2018 mempunyai 185 Satker inaktif dengan rincian penyelesaian sebagaimana tersaji pada **Lampiran F.3**.

F.2.5. PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM APLIKASI E REKON LK

Aplikasi e-Rekon LK menggunakan *database* tunggal (*single database*), data laporan keuangan yang diunggah satker merupakan (sama dengan) data laporan keuangan yang digunakan unit pelaporan jenjang atasnya (wilayah, eselon I, dan kementerian).

Dengan *database* tunggal, seharusnya permasalahan perbedaan data rekonsiliasi (*suspend*) antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian tidak terjadi lagi. Pada Penyusunan Laporan Keuangan TA 2018 (*Audited*) terdapat permasalahan laporan keuangan yaitu :

1. Pengembalian belanja pegawai tanpa pagu sebesar Rp475.000,00 pada satker Stasiun Karantina Kelas I Entikong. Hal ini terjadi akibat pegawai PNS pindahan dari BKP Kls I Jayapura masih menerima gaji dan tunjangan Papua dari BKP Kls I Jayapura, dikarenakan masih dalam proses pemberkasan sehingga dikembalikan lewat potongan SPM gaji sesuai akun tunjangan papua(511138) atas saran KPPN entikong yang diakibatkan mutasi pegawai dari Balai Karantina Kelas I Jayapura. Atas permasalahan tersebut sudah dilakukan koordinasi dengan KPPN Sanggau, dan sudah diterbitkan surat nomor: S-52/WPB.17/KP.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Penjelasan atas Pengembalian Belanja Pegawai Tanpa Pagu sebagaimana pada **Lampiran F.4**.
2. Terdapat Jurnal tidak lazim pada Inspektorat Jenderal, dapat dijelaskan pada **Lampiran F.5**.
3. Jurnal tidak lazim pada Badan Karantina Pertanian, dapat dijelaskan pada **Lampiran F.5**.
4. Berdasarkan e Rekon&LK, pada Inspektorat Jenderal terdapat perbedaan PNBPN antara data SiAP dan SAI pada akun 425911 (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu) pada SAI senilai Rp48.767.197,00 dan pada SiAP senilai Rp48.767.181,00, sehingga terdapat selisih lebih besar di SAI senilai Rp16,00. Selisih senilai Rp16,00 pada SiAP tercatat pada akun 423951 yaitu masih menggunakan akun Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu pada Bagan Akun Standar (BAS) No.187/PB/2017, sedangkan berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) terbaru yaitu No.211/PB/2018 segmen akun berubah menjadi 425911. Terhadap kondisi tersebut telah disampaikan ke KPPN Jakarta V, namun belum ditindaklanjuti oleh kantor pusat.

F.2.6. SATKER KONSOLIDASI

Pada Laporan Keuangan Tahun 2018 (*Audited*) Kementerian Pertanian terdapat transaksi-transaksi yang dilakukan pada satker konsolidasi. Pembentukan satker konsolidasi mengacu pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 perihal Pembentukan Satker Konsolidasi. Satker Konsolidasi dibentuk dalam rangka menyajikan jumlah nilai koreksi atas hasil penilaian kembali (revaluasi) barang milik negara seluruh satker di Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada TA 2017 dan 2018, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-182/PB/2019 tanggal 11 Februari 2018 perihal Petunjuk Teknis Koreksi Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2018 (*Unaudited*). Laporan keuangan Satker Konsolidasi (*Audited*) pada Kementerian Pertanian selain menyajikan nilai koreksi atas hasil penilaian kembali (revaluasi) barang milik negara seluruh satker di Kementerian Pertanian juga menyajikan nilai koreksi akun Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat (526) ke akun Belanja Dibayar Dimuka berdasarkan kesepakatan BPK dengan Kementerian Pertanian dikarenakan dokumen pendukung pertanggungjawaban dalam proses pemenuhan.

Berikut ini disajikan tabel neraca percobaan per 31 Desember 2018 atas Laporan Keuangan Satker Konsolidasi sebagai berikut.

Tabel F.1 Neraca Percobaan Per 31 Desember 2018

Kementerian : 018 Kementerian Pertanian
 Satuan Kerja : 555018 Satker Konsolidasi Kementan

KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)
114111	Belanja Dibayar Dimuka	7.199.812.662.256	0
131111	Tanah	0	68.661.453.470.850
133111	Gedung dan Bangunan	0	1.488.679.219.707
134111	Jalan dan Jembatan	37.836.864.442	0
134112	Irigasi	0	89.111.800.761
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	744.817.151.264
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	117.352.403.688
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	12.095.576.608
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	49.968.268.620
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2.385.288.368
313211	Transfer Keluar	0	30.590.105.292
313221	Transfer Masuk	30.583.987.277	0
391111	Ekuitas	35.575.543.482.098	0
391114	Revaluasi Aset Tetap	35.623.555.757.474	0
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	125.069.286.497	0
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	82.465.543
526111	Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	117.167.194.767
526112	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	3.410.125.295.268
526115	Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	1.166.938.942.317
526122	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	649.950.000
526123	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	30.009.408.545
526124	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	234.790.992.526
526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	1.178.110.868.840
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	1.062.020.009.993
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	109.154.949.320
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	14.094.767.529
591312	Beban Penyusutan Irigasi	0	12.223.245.400
JUMLAH		63.928.213,653.168	63.928.213,653.168

F.2.7. PELAPORAN ASET ANTARA SAIBA DENGAN SIMAK BMN

Pada Laporan Keuangan Tahun 2018 (Audited) Kementerian Pertanian terdapat perbedaan nilai aset antara Pelaporan SAIBA dengan SIMAK BMN.

Tabel F.2 Perbandingan Aset antara Pelaporan SAIBA Dengan SIMAK BMN

(dalam Rupiah)

URAIAN	NILAI LK SAIBA	NILAI LK SIMAK	SELISIH
ASET LANCAR	889.356.431.578	889.356.431.578	-
Persediaan	889.356.431.578	889.356.431.578	-
ASET TETAP	17.205.901.659.170	86.608.717.883.370	- 71.151.346.487.320
Tanah	11.608.949.370.893	80.270.402.841.743	- 68.661.453.470.850
Peralatan dan Mesin	6.225.890.240.250	6.225.890.240.250	-
Gedung dan Bangunan	4.734.934.884.794	6.223.614.104.501	- 1.488.679.219.707
Jalan, Irigasi dan Jaringan	608.350.078.280	735.298.743.483	- 126.948.665.203
Aset Tetap Lainnya	72.295.320.166	72.295.320.166	-
Konstruksi Dalam pengerjaan	14.198.879.909	14.198.879.909	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-4.700.564.104.242	-4.700.564.104.242	-
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 1.089.264.819.476	-1.834.081.970.740	- 744.817.151.264
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	- 267.419.208.831	- 396.867.189.127	-129.447.980.296
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-1.468.982.573	- 1.468.982.573	-
ASET LAINNYA	541.745.100.422	589.328.080.674	- 52.353.556.988
Aset Tak Berwujud	92.020.243.837	92.020.243.837	-
Aset Lain-Lain	716.975.689.013	766.943.957.633	- 49.968.268.620
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	- 245.244.101.082	- 247.629.389.450	- 2.385.288.368
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-22.006.731.346	- 22.006.731.346	-
TOTAL NERACA	18.637.003.191.170	88.087.402.395.622	-71.203.700.044.308

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan atas Laporan Keuangan SAIBA dengan SIMAK BMN Tahun 2018 senilai Rp71.203.700.044.308,00. Perbedaan tersebut disebabkan atas kebijakan koreksi transaksi revaluasi aset tetap berdasarkan kesepakatan BPK dengan pemerintah pusat (Kementerian Keuangan) yang dilakukan pada Laporan Keuangan tingkat Kementerian melalui Satker Konsolidasi.

F.2.8. TUNGGAKAN BELUM TERBAYARKAN DI DITJEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2018

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada TA 2018 memiliki tunggakan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan belum terbayarkan senilai Rp51.010.323.195,00.

Tunggakan berupa Bantuan Pemerintah dalam bentuk transfer uang dan belanja operasional yang terdapat pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp9.991.938.846,00 dan Kantor Pusat Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp41.018.384.349,00, dengan kegiatan berupa Fasilitasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan APBN Pusat Ditjen Tanaman Pangan TA. 2018 Tahap II dan III, Pengadaan Benih Jagung Hibrida Tahun 2018, dan Bantuan APPO.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018. point C. Ketentuan Revisi Anggaran d. Pergeseran Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Tunggakan Tahun-Tahun Sebelumnya bahwa tunggakan dengan nilai Rp200.000.000,00 harus melampirkan surat pernyataan KPA, tunggakan nilai Rp200.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000,00 harus melampirkan hasil verifikasi APIP/KL, dan untuk tunggakan diatas nilai Rp2.000.000.000,00 melampirkan hasil verifikasi BPKP. Rincian nilai tunggakan 2018 pada Kantor Pusat Ditjen Tanaman Pangan yang diusulkan/masuk dalam DIPA 2019 sebagaimana terlampir dalam **Lampiran F.6.**

F.2.8 TUNDA BAYAR/LUNCURAN KEGIATAN TAHUN 2017 DITJEN PSP YANG DIBAYARKAN DI TAHUN 2018

Sesuai dengan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir tahun anggaran 2017. Dalam hal ini ada beberapa satker yang mengalami keterlambatan penyampaian SPM Ke KPPN setempat pada Tahun 2017. Satker tersebut antara lain :

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat II Tahun 2018 Nomor 2018.3.044 dan surat permintaan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi hal Tunggakan kegiatan pengelolaan system penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian atas pengadaan Alsintan TA. 2017 untuk Cultivator sebanyak 14 unit senilai Rp. 202.200.000,00 dan 90 unit Hands Sprayer dengan nilai 51.750.000,00 dengan total senilai Rp. 253.950.000,00 sesuai dengan surat Kepala Dinas Nomor S-2764/DTHP.5.2/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 untuk permohonan pengguguran tanda bintang pada DIPA Satker 109125. Atas usulan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Inspektorat Jenderal telah memverifikasi dan mereviu tunggakan tersebut sesuai dengan rekomendasi kepada Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar mengajukan permohonan ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk diproses pengguguran tanda bintang pada DIPA Satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi untuk selanjutnya diajukan proses permohonan pembayaran ke KPPN atas pengadaan alsintan TA. 2017 sebanyak 14 Unit cultivator senilai Rp. 202.200.000,00 dan 90 Unit Hand Sprayer senilai Rp. 51.750.000,00. dengan mengajukan permohonan untuk revisi blokir anggaran (bintang) pada DIPA Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
2. Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Adanya keterlambatan pengajuan SPM Kontraktual Tahap II 30% Nomor 00297/PSP/APBN/TP/2017 tanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp. 7.200.000,00 untuk kegiatan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Jaringan Irigasi kepada UPKK Gapoktan Usaha Tani Bersama yang berakhir kontraknya tanggal 31 Oktober 2017, disebabkan berkas pengajuan dari kelompok tani UPKK Gapoktan Usaha Tani

Bersama tercecer di petugas verifikasi, maka Dinas mengajukan Dispensasi Pengajuan SPM Kontraktual Tahap II 30% Nomor 00297/PSP/APBN/TP/2017 tanggal 27 Nopember 2017, dengan Surat Pernyataan Keterlambatan Pengajuan SPM oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara
Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat II Tahun 2018 Nomor 2018.3.044 dan surat permintaan dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 521/456 tanggal 28 Maret 2018 untuk permohonan reuiu tunggak bayar cetak sawah TA. 2017 di Kabupaten Muna Barat seluas 58,2 ha senilai Rp. 932.200.000,00 disebabkan pengajuan SPP SPM LS ke KPPN TA. 2017 ditolak karena dokumen pendukung SPM-LS tidak sesuai yaitu adanya kesalahan penulisan tanggal pada berita acara hasil pemeriksaan tim PPHP yang BAST nya tertulis tanggal 29 Desember 2017.
Sesuai dengan hasil reuiu Inspektorat Jenderal Nomor R-241/PW/170/G.3/05/2018 tanggal 14 Mei 2018. Atas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2017 untuk mengajukan permohonan ke Ditjen PSP untuk melakukan revisi blokir anggaran (bintang) pada DIPA Satker Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2018 (TP.08). Selanjutnya diajukan proses permohonan pembayaran ke KPPN setempat atas perluasan cetak sawah TA. 2017 di Kabupaten Muna seluas 58,2 Ha atau senilai Rp. 931.200.000,00 yang tertunggak pembayarannya.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
Sehubungan dengan keterlambatan pengajuan SPM-LS Kontraktual pengadaan kapur dolomit Kabupaten Lingga yang mengakibatkan penolakan SPM-LS oleh KPPN Tanjung Pinang, Kepala Dinas bersurat ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melalui surat Nomor 521/915/DKP2KH/2017 tanggal 10 Nopember 2017, perihal permohonan rekomendasi pencairan dana pengadaan Kapur Dolomit Kab. Lingga senilai Rp. 144.504.000,00. mengajukan permohonan ke Ditjen PSP untuk melakukan revisi blokir anggaran (bintang) pada DIPA Satker Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.

F.2.9 TUNDA BAYAR DITJEN PSP KEGIATAN PENGADAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN TAHUN 2018 AKAN DIBAYARKAN DI TAHUN 2019

Di bulan Desember 2018, Ditjen PSP mengajukan tagihan pencairan kegiatan pengadaan alat dan mesin pertanian senilai Rp,159.110.189.567 kepada KPPN Jakarta V telah ditolak dengan surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-9914/PB/2018 tertanggal 31 Desember 2018 perihal Dispensasi Keterlambatan Pengajuan SPM bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bantuan alat dan mesin pertanian pada TA. 2018, terdapat sejumlah tagihan pengadaan bantuan alsintan dari pihak ketiga yang belum dibayarkan oleh Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Rincian tagihan pengadaan bantuan alsintan TA. 2018 yang belum dibayarkan sebagai berikut :

Tabel F.3 Rekap Data Tagihan Kontrak Pengadaan Bantuan Alsintan Pembayaran Tunda Bayar

NO	NAMA PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	URAIAN	NILAI KONTRAK	NO SPP	TANGGAL SPP	NILAI SPP
1	PT. Probesco Disatama	23.2/PPK.PSP.06/KON TRAK/03/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4 LS47 (45HP)	16.527.520.813	487	23-Nov-18	5.193.970.813
2	PT. Teknik Agro Lestari Jaya	18.2/PPK.PSP.06/KON TRAK/09/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 2 (Yanmar Rotary)	2.846.210.000	512	5 Desember 2018	1.138.484.000
3	PT. Rutan	8.8/PPK.PSP.06/KONTRAK/02/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4 Iseki NT548F	98.688.606.000	518	6 Desember 2018	39.066.693.600
4	PT. Tekno Agri Jaya	8.5/PPK.PSP.06/KONTRAK/02/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4 Yanmar EF494T	97.382.130.000	556	13 Desember 2018	40.468.472.000
5	PT. United Tractors Tbk.	3.2/PPK.PSP.06/KONTRAK/04/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Excavator Komatsu	16.127.588.773	577	18 Desember 2018	16.127.588.773
6	PT. Trakindo Utama	22.2/PPK.PSP.06/KONTRAK/03/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Excavator Mini	7.244.679.546	592	19 Desember 2018	2.054.042.554
7	PT. Rutan	2.11/PPK.PSP.06/KONTRAK/07/2018	Pembayaran Tahap II (50%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Pompa Air Niagara GTO 4"	17.857.844.000	587	19 Desember 2018	7.065.995.100
8	PT. Bina Pertiwi	13.23/PPK.PSP.06/KONTRAK/12/2018	Pembayaran Pelunasan (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4	5.877.900.000	607	20 Desember 2018	5.877.900.000
9	PT. Rutan	2.11/PPK.PSP.06/KONTRAK/07/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Pompa Air Niagara GTO 4"	17.857.844.000	591	20 Desember 2018	7.065.995.100
10	PT. Rutan	14.8/PPK.PSP.06/KONTRAK/12/2018	Pembayaran Pelunasan (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Pompa Air Niagara GTO 4"	2.813.850.000	610	20 Desember 2018	2.813.850.000
11	PT. Rutan	14.2/PPK.PSP.06/KONTRAK/12/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4	24.054.300.000	612	20 Desember 2018	24.054.300.000
12	PT. United Equipment Indonesia	10.2/PPK.PSP.06/KONTRAK/12/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Excavator Hyundai	6.960.981.693	604	20 Desember 2018	3.004.053.547
13	PT. Tanikaya Multi Sarana	19.2/PPK.PSP.06/KONTRAK/09/2018	Pembayaran Tahap II (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Alat Tanam Jagung	10.397.374.000	639	21 Desember 2018	5.178.844.080
			NILAI TOTAL KONTRAK	324.636.828.825		NILAI TOTAL SPP	159.110.189.567

Untuk menyelesaikan tagihan tunda bayar alsintan tahun 2018 tersebut, Direktur Alat dan Mesin Pertanian telah melayangkan nota dinas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PSP hal usulan revisi anggaran untuk pembayaran tagihan pembayaran pengadaan alsintan TA. 2018

sejumlah Rp. 159.110.189.567,00 dengan dipenuhi dari pengurangan unit cost kegiatan bantuan alsintan TA. 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penyelesaian tunda bayar untuk tagihan Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah melayangkan surat sebagai berikut :

1. Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : B-12/RC.210/B/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 kepada Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hal Permohonan Review Tunda Bayar Pengadaan Alsintan;
2. Surat BPKP Nomor S-19/D102/2019 tanggal 21 Januari 2019 kepada Direktur Alat dan Mesin Pertanian menjawab surat Dirjen PSP hal Permohonan Expose Permasalahan Tunda Bayar Pengadaan Alsintan TA.2018. Dalam hal ini, BPKP meminta Direktorat Alsintan melakukan expose/pemaparan atas permasalahan tunggakan pembayaran pengadaan alsintan TA. 2018 dengan BPKP pada kesempatan pertama agar diperoleh informasi yang memadai sebagai dasar BPKP untuk melakukan review.

F.2.10 ONGKOS KIRIM DARI ALAT DAN MESIN PERTANIAN CADANGAN

Pengadaan alat dan mesin pertanian di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dibedakan menjadi dua jenis yaitu alsintan regular (alsintan yang sudah diketahui alokasi/peruntukannya) dan alsintan cadangan (alsintan yang dialokasikan untuk cadangan/belum diketahui alokasi/peruntukannya). Nilai alsintan regular dalam kontrak ditetapkan sebagai harga satuan alsintan ditambah biaya kirim sampai ke lokasi titik bagi. sedangkan nilai alsintan cadangan ditetapkan sebesar harga satuan alsintan tanpa biaya kirim.

Kronologis Adanya Tagihan Ongkos Kirim Bantuan Alsintan

1. Penyaluran bantuan alsintan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Ditjen PSP. dilaksanakan melalui:
 - a. Berdasarkan usulan daerah melalui E-Proposal.
 - b. Usulan kelompok masyarakat melalui aspirasi Komisi IV DPR RI.
 - c. Usulan/permintaan Dinas Pertanian untuk penanganan kegiatan yang bersifat mendesak (kekeringan, banjir, tanam serempak dll)
 - d. Tindak lanjut kunjungan kerja Pimpinan (Presiden, Menteri, Pejabat Eselon I dan Pimpinan lainnya untuk menunjang peningkatan produksi pertanian)
2. Untuk mengakomodir penyaluran bantuan poin 1.b s/d 1.d tersebut di atas membutuhkan penanganan segera. Sehingga diperlukan alsintan dalam bentuk cadangan yang sewaktu-waktu siap untuk disalurkan kepada penerima bantuan.
3. Dengan adanya alsintan cadangan. maka dibutuhkan anggaran pengiriman (ongkir) dari gudang penyedia ke titik bagi (Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota) dimana biaya pengiriman (ongkir) tersebut terpisah dari nilai kontrak pengadaan alsintan.
4. Untuk mengakomodir permintaan yang bersifat mendesak (poin 1.b s/d 1.d), penyaluran alsintan cadangan dari gudang penyedia alsintan dilaksanakan berdasarkan surat perintah pengiriman Direktur Alat dan Mesin Pertanian kepada pihak penyedia. Sedangkan pemberitahuan pengiriman alsintan cadangan disampaikan kepada Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota penerima bantuan dengan surat Direktur Alat dan Mesin Pertanian.
5. Pembayaran biaya pengiriman (ongkir) alsintan cadangan Tahun 2016 disampaikan hal sebagai berikut :
 - a. Pembayaran biaya pengiriman (ongkir) alsintan cadangan oleh Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dilaksanakan setelah adanya bukti penyerahan alsintan cadangan

- sampai ke titik bagi (Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota) yang dibuktikan dengan adanya dokumen BAP-STHP.
- b. Penyampaian BAP-STHP dari pihak penyedia kepada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian terlambat sehingga menyebabkan proses penagihan oleh penyedia menjadi tertunda.
 - c. Pada TA 2016 biaya pengiriman (ongkir) alsintan cadangan yang belum ditagihkan oleh pihak penyedia sebesar Rp38.502.372.182,00 yang terdiri dari 272 SPK (kontrak ongkir) dari 14 penyedia dengan jumlah alsintan cadangan sebanyak 43.555 unit.
 - d. Adanya kebijakan penghematan anggaran Tahun 2016 menyebabkan terjadinya *self blocking* anggaran kegiatan Direktorat Jenderal PSP sehingga Direktorat Alat dan Mesin Pertanian terkena penghematan sebesar Rp1.435.143.787.000,00 terdiri dari kegiatan pengadaan bantuan alsintan dan biaya pengiriman (ongkir) alsintan cadangan.
 - e. Untuk *self blocking* (tunda bayar) kegiatan pengadaan bantuan alsintan telah diusulkan menjadi luncuran pembayaran pada TA 2017. namun demikian untuk biaya pengiriman (ongkir) alsintan cadangan karena dokumen pendukung (BAP-STHP) dari pihak penyedia belum semua disampaikan kepada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sehingga tagihan ongkir 2016 tidak dapat didaftarkan menjadi luncuran pembayaran TA 2017.
6. Upaya yang telah dilakukan terkait dengan pembayaran biaya pengiriman (ongkir) alsintan cadangan TA 2016 sebesar Rp38.502.372.182,00 :
 - a. Pada TA 2018 Direktorat Alat dan Mesin Pertanian telah melakukan inventarisasi dan verifikasi tagihan biaya pengiriman (ongkir) alsintan cadangan TA 2016 sebesar Rp38.502.372.182,00.
 - b. Ditjen PSP mengajukan usulan reviu kepada BPKP melalui surat nomor : B-446/RC.110/B/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 perihal Permohonan Reviu Kontrak Ongkos Kirim TA 2016 sebesar Rp38.502.372.182,00.
 - c. Balasan Surat BPKP kepada Dirjen PSP nomor : S-962/D/2/2018 tanggal 13 November 2018 perihal reviu Kontrak Ongkos Kirim TA 2016. BPKP menyatakan bahwa mengingat terbatasnya waktu yang tersedia maka BPKP meminta penanggungjawab kegiatan dan Inspektorat Jenderal untuk melakukan verifikasi atas kebenaran data dukung sebelum reviu dilakukan oleh BPKP.
 - d. Hasil Verifikasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian bahwa TA 2016 nilai ongkos kirim yang dinyatakan layak bayar sebanyak 264 SPK (52.220 unit) senilai Rp37.237.163.163,00. Berdasarkan surat Dirjen PSP kepada Inspektur Jenderal nomor : B-49/RC.210/B/01/2018 tanggal 19 Januari 2018, Tim Reviu Inspektorat Jenderal juga melakukan verifikasi terhadap tagihan ongkir TA 2018 dan dinyatakan layak bayar sebanyak 105 SPK (27.379 unit) senilai Rp4.237.525.709,00
 - e. Dalam proses verifikasi oleh Tim Reviu Inspektorat Jenderal ditemukan adanya tagihan ongkos kirim yang belum diverifikasi untuk TA 2016 sebanyak 12 SPK (261 Unit) senilai Rp2.015.343.921,00 dan TA 2018 sebanyak 58 SPK (16.797 unit) senilai Rp9.546.548.829,00.
 - f. Ongkos kirim yang telah diverifikasi senilai Rp41.474.688.872,00 terdiri dari TA 2016 senilai Rp37.237.163.163,00 dan TA 2018 senilai Rp4.237.525.709,00. Ongkos kirim yang belum diverifikasi senilai Rp11.561.892.750,00 terdiri dari TA 2016 senilai Rp2.015.343.921,00 dan TA 2018 senilai Rp9.546.548.829,00.
 - g. Hasil verifikasi oleh Tim Inspektorat Jenderal akan segera disampaikan kepada BPKP guna dilakukan reviu terkait keabsahan tagihan ongkos kirim tersebut di atas.
 7. Terdapat penagihan biaya pengiriman alsintan cadangan Tahun 2018 yang belum terbayar senilai Rp13.784.074.085,00 dan biaya pengiriman ongkos kirim alsintan cadangan Tahun 2016 belum terbayar senilai Rp39.252.507.084,00 sehingga jumlah yang belum terbayar senilai Rp53.036.581.169,00.
 8. Anggaran untuk membiayai ongkos kirim hasil reviu BPKP sudah dialokasikan pada Satker Ditjen PSP TA. 2018 senilai Rp. 41.258.628.000,- (posisi masih dalam blokir

Kementerian Keuangan). Pengguguran bintang/blokir akan dilaksanakan setelah hasil rewiu BPKP resmi diterbitkan. Untuk sisa tagihan yang belum di rewiu Itjen dan BPKP, maka Ditjen PSP akan merevisi anggaran untuk kekurangan tagihan ongkos kirim alsintan cadangan senilai 11.777.953.169,00. Sehingga total tagihan ongkos kirim alsintan cadangan tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar Rp. 53.036.581.169,00 dapat terbayar di Tahun 2018.

9. Dirjen PSP telah berkirin surat kepada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonimian dan Kemaritiman BPKP dengan surat Nomor R.333/PW.170/B/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk permintaan rewiu Ongkir TA 2016 dan 2017 yang merupakan hasil tindak lanjut dari hasil perhitungan rewiu Itjen atas Ongkir tahun 2016 dan 2017 tersebut.
10. Dirjen PSP telah berkirin surat kepada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonimian dan Kemaritiman BPKP dengan surat Nomor R.333/PW.170/B/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk permintaan rewiu Ongkir TA 2016 dan 2017 yang merupakan hasil tindak lanjut dari hasil perhitungan rewiu Itjen atas Ongkir tahun 2016 dan 2017 tersebut.
11. ITJEN menyampaikan hasil review ke BPKP. Hasil rewiu BPKP sebanyak 361 SPK senilai Rp41.163.775.264, yang layak bayar sebanyak 352 SPK senilai Rp38.968.296.016, Dari nilai layak bayar menurut BPKP senilai Rp38.968.296.016,00 tersebut, nilai tunggakan layak bayar yang telah diuji BPKP senilai Rp10.638.627.423,00 sedangkan sisanya senilai Rp28.329.668.593,00 akah ditelaah pada tahapan berikutnya (bukti rewiu BPKP terlampir)
12. Biaya ongkos kirim tahun 2016 dan 2017 hasil Rewiu BPKP dan Itjen telah dibayar sejumlah Rp. 10.638.627.423 dengan rincian sebagai berikut ongkir Tahun 2016 sebesar Rp.9.421.583.193 dan ongkir Tahun 2017 sebesar Rp. 1.217.044.280. Sedangkan sisa total yang belum dibayarkan senilai Rp. 42.436.853.954 dengan rincian ongkos kirim tahun 2016 sebesar Rp. 30.442.350.259 dan tahun 2017 sebesar Rp. 11.994.503.695, rencana akan dibayar pada tahun 2019 sesuai hasil rewiu BPKP.
13. Sesuai Surat Tugas BPKP Nomor ST-11/D102/2019 tanggal 11 Januari 2019, Tim BPKP akan melakukan Rewiu terhadap tunggakan ongkos kirim tahun 2016 dan tahun 2017 yang belum dibayar di tahun 2018 sebesar Rp. 28.329.668.593,-
14. Mengantisipasi tidak berulangnya permasalahan tagihan ongkos kirim yang tertunda ini, maka untuk TA. 2018 dilakukan pola kontrak jangka panjang, dimana nilai kontrak pengadaan alsintan didalamnya sudah termasuk ongkos kirim.

F.2.11 Progres Penyelesaian Alih Status TNI

PROGRESS ALIH STATUS TNI
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA 2015 - 2018

TAHUN	NILAI	UNIT	PROGRESS	NOMOR	Tanggal	KET
2015	21.577.335.000	286	SK Penghapusan Alih Status TNI	270/Kpts/PL.320/4/2017	25-Apr-17	Tahap 1
2015	12.444.360.000	25	Pesetujuan Alih Status TNI	S-11/MK.6/WKN.07/2018	13 Februari 2018	
2015	32.182.810.900	1,204	Usulan Persetujuan Alih Status Penggunaan BMN	B-84/PL.310/B/02/2018	28 Februari 2018	Drone 1 unit double usul Rp.170.000.000 (sudah keluar persetujuannya pada S-11/MK.6/WKN.07/2018 tgl 13 Februari 2018)
2016	535.300.982.861	104,26	Usulan Penetapan Status	B-129/PL.130/B/03/2018	13 Maret 2018	629.671.257.184

TAHUN	NILAI	UNIT	PROGRESS	NOMOR	Tanggal	KET
2017	94.370.274.323	12,33	Penggunaan BMN Ke DJKN			
			Ditjen PSP telah Berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat untuk Penyelesaian Alih Status Alat Mesin Pertanian	B-370/SR.440/B/07/2018	16 Juli 2018	
	695.875.763.084	118,105				
Per tgl 10 Desember 2018						
			Penetapan Status Pengguna BMN	B 387/Kpts/PL.310/6/2017	13 Juni 2018	Senilai Rp. 5.881.605.375 sebanyak 1191 unit
			Penetapan Status Pengguna BMN	B416/Kpts/PL.310/5/2018	31 Mei 2018	Senilai Rp. 284.721.888.338
			Surat dari MABESAD terkait dengan SK Penghapusan Alih Status TNI senilai Rp.21.571.335.000	B/3518/X/2018	09 Oktober 2018	Perihal Penatausahaan BMN Alsintan yang diterima dari Kementerian Pertanian
			Surat Ke KASAD terkait dengan Penyelesaian Alih Status Alat Mesin Pertanian Rp. 695.038.028.584	B-370/SR.440/B/07/2018	16 Juli 2018	
			Surat Ke KASAD terkait Permintaan bantuan untuk cek fisik alat dan mesin pertanian	B-576/SR.420/B/11/2018	06 Nopember 2018	
			Surat Perintah KASAD terkait dengan cek Fisik Alsintan	Nomor Sprint/4097/XI/2018	9 Nopember 2018	
Per tgl 31 Desember 2018						
			Penetapan Status Pengguna BMN	Kemenkeu No.361/KM.6/2018	31 Desember 2018	Senilai Rp.337.865.000
			Inventarisasi Alat Mesin Pertanian			Senilai Rp.306.166.197.036
Per tgl 22 April 2019						
			Surat ke Aslog MABESAD TNI AD terkait Penyelesaian Alit Status Alat dan Mesin Pertanian	B-315/HIU.020/B.1/04/2019	22-Apr-19	

Dilakukan Inventarisasi ke Korem dan Kodim sesuai dengan Surat Perintah KASAD terkait dengan cek Fisik Alsintan Nomor Sprint/4097/XI/2018 tanggal Nomor Sprint/4097/XI/2018 ke Korem-Korem sebagai berikut:

No	Nama	Markas	Komando
	TAHAP II	WIL. JAWA	
1	Komando resort militer 051/Wijayakarta	Bekasi	Kodam Jaya
2	Komando resort militer 052/Wijayakrama	Tangerang	Kodam Jaya
3	Komando resort militer 061/Suryakencana	Bogor	Kodam III/Siliwangi

4	Komando resort militer 062/Tarumanegara	Garut	Kodam III/Siliwangi
5	Komando resort militer 063/Sunan Gunung Jati	Cirebon	Kodam III/Siliwangi
6	Komando resort militer 064/Maulana Yusuf	Serang	Kodam III/Siliwangi
7	Komando resort militer 071/Wijayakusuma	Purwokerto	Kodam IV/Diponegoro
8	Komando resort militer 072/Pamungkas	Yogyakarta	Kodam IV/Diponegoro
9	Komando resort militer 073/Makutarama	Salatiga	Kodam IV/Diponegoro
10	Komando resort militer 074/Warastratama	Surakarta	Kodam IV/Diponegoro
11	Komando resort militer 081/Dhirotsaha Jaya	Madiun	Kodam V/Brawijaya
12	Komando resort militer 082/Panca Yudha Jaya	Mojokerto	Kodam V/Brawijaya
13	Komando resort militer 083/Bhaladika Jaya	Malang	Kodam V/Brawijaya
14	Komando resort militer 084/Bhaskara Jaya	Surabaya	Kodam V/Brawijaya
	TAHAP III	WIL. SUMATERA	
1	Komando resort militer 011/Lilawangsa	Lhokseumawe	Kodam Iskandar Muda
2	Komando resort militer 012/Teuku Umar	Meulaboh	Kodam Iskandar Muda
3	Komando resort militer 031/Wirabima	Pekanbaru	Kodam I/Bukit Barisan
4	Komando resort militer 032/Wirabraja	Padang	Kodam I/Bukit Barisan
5	Komando resort militer 033/Wirapatama	Tanjungpinang	Kodam I/Bukit Barisan
6	Komando resort militer 041/Garuda Emas	Bengkulu	Kodam II/Sriwijaya
7	Komando resort militer 042/Garuda Putih	Jambi	Kodam II/Sriwijaya
8	Komando resort militer 043/Garuda Hitam	Bandar Lampung	Kodam II/Sriwijaya

Rekapitulasi inventarisasi dari masing-masing korem tersebut diatas :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH/UNIT	HARGA PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN
1	2	4	5	6
1	Traktor Roda 2	35	682.095.000	2015
2	Traktor Roda 2	1747	41.365.758.000	2016
3	Traktor Roda 2	105	2.418.815.000	2017
4	Pompa Air	535	5.791.530.000	2015
5	Pompa Air	831	14.506.996.500	2016
6	Pompa Air	84	1.738.015.000	2017
7	Rice Transplanter	318	19.828.500.000	2015
8	Rice Transplanter	479	30.576.905.000	2016
9	Rice Transplanter	65	5.019.000.000	2017
10	Traktor Roda 4	11	3.438.960.000	2015
11	Traktor Roda 4	195	56.895.855.000	2016

12	Traktor Roda 4	96	29.039.805.000	2017
13	Excavator	9	6.752.790.000	2015
14	Excavator	87	64.159.148.448	2016
15	Excavator	22	16.552.259.384	2017
16	Hand Sprayer	4555	2.283.233.500	2016
17	Hand Sprayer	215	110.187.500	2017
18	Tray	66250	1.897.215.000	2016
19	Tray	7500	234.675.000	2017
20	Cultivator	17	198.895.000	2017
21	Corn Planter	59	1.505.708.704	2017
22	Grain Seeder	5	1.169.850.000	2017
TOTAL		83.220	306.166.197.036	

Untuk selanjutnya akan dilakukan Inventarisasi di tahun 2019

Rencana Pelaksanaan Inventarisasi Alsintan
Ditjen Psp Tahun 2019

No	Nama Korem	Markas	Komando	Bln
WIL. SUMATERA				
1	Komando resort militer 022/Pantai Timur	Pematangsiantar	Kodam I/Bukit Barisan	Februari
	Komando resort militer 023/Kawal Samudera	Sibolga		
2	Komando resort militer 044/Garuda Dempo	Palembang	Kodam II/Sriwijaya	Februari
	Komando resort militer 045/Garuda Jaya	Pangkalpinang	Kodam II/Sriwijaya	
WIL. KALIMANTAN				
3	Komando resort militer 091/Aji Surya Natakesuma	Samarinda	Kodam VI/Mulawarman	Maret
	Komando resort militer 101/Antasari	Banjarmasin	Kodam VI/Mulawarman	
4	Komando resort militer 102/Panju Panjung	Palangkaraya	Kodam XII/Tanjungpura	Maret
	Komando resort militer 121/Alambhana Wanawai	Pontianak	Kodam XII/Tanjungpura	
WIL. SULAWESI				
5	Komando resort militer 131/Santiago	Manado	Kodam XIII/Merdeka	Maret
	Komando resort militer 132/Tadulako	Palu	Kodam XIII/Merdeka	
6	Komando resort militer 143/Haluoleo	Kendari	Kodam XIV/Hasanuddin	Maret
7	Komando resort militer 141/Todopuli	Watampone	Kodam XIV/Hasanuddin	Maret
	Komando resort militer 142/Taroda Tarogau	Mamuju	Kodam XIV/Hasanuddin	
WIL. BALI DAN NTT				

No	Nama Korem	Markas	Komando	Bln
8	Komando resort militer 162/Wirabhakti	Mataram	Kodam IX/Udayana	Maret
	Komando resort militer 163/Wirasatya	Denpasar	Kodam IX/Udayana	
9	Korem 161/Wira Sakti	Kupang	Kodam IX/Udayana	April
WIL. MALUKU				
10	Komando resort militer 151/Maluku Selatan	Ambon	Kodam XVI/Pattimura	April
	Komando resort militer 152/Maluku Utara	Ternate	Kodam XVI/Pattimura	
WIL. PAPUA				
11	Komando resort militer 174/Anim Ti Wanninggap	Merauke	Kodam XVII/Cenderawasih	April
12	Komando resort militer 172/Praja Wira Yakti	Jayapura	Kodam XVII/Cenderawasih	April-Mei
13	Komando resort militer 173/Praja Wira Braja	Biak	Kodam XVIII/Kasuari	April-Mei
14	Komando resort militer 171/Praja Wira Tama	Sorong	Kodam XVIII/Kasuari	Mei

Lampiran Data Stok Opname Persediaan per 31 Desember 2018

Rekap Stock Opname Alsintan
Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian
Tahun Anggaran 2018

No	Nama Penyedia	Nama Barang	Merk/Type	Unit	Nilai
1	Tanikaya Multi Sarana	Rice Transplanter Riding	RTR 68 H Tipe Riding	18	5.308.200.000
2	Tanikaya Multi Sarana	Pompa Air	4 " TWP-100 + Honda 9 HP	241	2.903.568.000
3	Tanikaya Multi Sarana	Pompa Air	6" TWP - 150 + Honda 13 HP	158	2.839.307.400
4	Intraco	Excavator	Bob Cat E45	14	8.869.671.580
5	Wahana Inti Selaras	Traktor Roda 4 Rotary	Jhon Deere 5045 DMFWD, 3416 RT	80	23.240.000.000
6	Satrindo	Traktor Roda 4	Kioti DK4510	100	23.225.900.000
7	Lambang Jaya	Disc Plough	Lambang Jaya Disc Plough 2x22	100	1.330.000.000
8	Sahabat Agritama	Rotary	Howard Rotavator B16/155	100	3.679.000.000
9	Maxi Utama Energy	Traktor Roda 4	Deutz-Fahr Agrolux 50	60	14.040.000.000
10	Lambang Jaya	Disc Plough	Lambang Jaya Disc Plough 2x22	60	1.152.000.000
11	Sahabat Agritama	Rotary	Howard Rotavator B16/155	60	2.207.400.000

12	Bina Pertiwi	Traktor Roda 4	Kubota L4400	21	5.877.900.000
13	Karya Jaya Lestari	Disc Plough	Karya Jaya Lestari 2x22 inci	21	306.999.000
14	Sahabat Agritama	Rotary	Howard Rotavator B16/155	21	772.590.000
15	Prima Agra Kencana	Traktor Roda 4	Class/Talos 120	103	29.427.100.000
16	Rutan	Disc Plow, Rotary Cultivator	Crown IADP 325, Crown CRV-160	103	6.630.110.000
17	Karya Hidup Sentosa	Traktor Roda Empat Dish Plough Rotary	Quick A360, 3x22 Inch, 1,65 m	85	21.377.500.000
18	Pindad	Traktor Roda Empat	Pindad PTM 45	30	18.375.000.000
19	Pindad	Excavator Standard 20 Ton	Pindad Excava 200	60	83.274.000.000
20	United Tractor	Excavator Standard 20 Ton	Komatsu PC 200-8 MO	140	245.938.000.000
21	Rutan	Traktor Roda Empat Dish Plow Rotary Cultivator	Iseki NT540 F, Crown IADP 325, Crown CRV 160	90	24.054.300.000
22	Rutan	Pompa Air	Niagara GTO 4" Kubota RD85DI-1 S	363	6.737.280.000
23	Rutan	Pompa Air	Niagara GTO 6" Diamond DI 1100 H	117	2.813.850.000
24	Garda Nusantara	GrainSeeder	Dompeng Gatra GS 808	4	1.026.400.000
25	Garda Nusantara	Traktor Roda Empat	Dongfeng Gatra GT3498	5	2.253.000.000
26	Adi Setia Utama Jaya	Rota Tanam	Gunung Biru RTM 180	8	2.432.000.000
JUMLAH				2162	540.091.075.980

F.2.12 PROGRES SERTIFIKASI TANAH

Perkembangan proses sertifikasi tanah lingkup Kementan per 31 Desember 2018 berdasarkan aplikasi SIMANTAP sebagai berikut :

Eselon I	Bersertipikat		Belum Bersertipikat		Total	
	Jml	Luas	Jml	Luas	Jml	Luas
Sekretariat Jenderal	40	403.171	20	31.408	60	434.579
Ditjen Tanaman Pangan	34	532.131	4	27.800	38	559.931
Ditjen Hortikultura	3	25.125	-	-	3	25.125
Ditjen Perkebunan	132	364.124	777	4.826.484	909	5.190.608
Ditjen Nakeswan	60	21.551.760	2	47.880	62	21.599.640
Balibang Pertanian	344	49.543.627	21	12.116.689	365	61.660.316
BPPSDM Pertanian	60	4.152.897	2	319.612	62	4.472.509
Barantan	262	775.869	17	140.832	279	916.701
Total	935	77.348.704	843	16.301.311	1.778	94.859.409

F.2.13 DAFTAR JURNAL KOREKSI TAKEOUT REVALUASI BMN PADA SATKER KONSOLIDASI TAHUN 2018

Sesuai dengan kesepakatan BPK dengan Pemerintah Pusat nilai revaluasi barang milik negara yang tersaji pada seluruh satker harus dilakukan *takeout* pada Satker Konsolidasi setiap K/L. Kementerian Pertanian sudah melaksanakan kebijakan tersebut, berikut ini disajikan rincian jurnal revaluasi pada Satker Konsolidasi sebagaimana pada **Lampiran F.7**.

F.2.14 MONITORING DAFTAR PENGHAPUSAN DAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BMN KEMANTAN TAHUN 2018

Selama Tahun 2018 telah diterbitkan Keputusan Penghapusan BMN, dapat disajikan rekapitulasi daftar penghapusan per Eselon I dan per Satker sebagaimana pada **Lampiran F.8**. dan rekapitulasi Persetujuan Pemindahtanganan BMN per Eselon I dan per Satker disajikan pada **Lampiran F.9**

F.2.15 MONITORING DAFTAR PEMANFAATAN BMN KEMANTAN TAHUN 2018

Selama Tahun 2018 telah dilakukan usul pemanfaatan BMN, dapat disajikan rekapitulasi daftar usul pemanfaatan per Eselon I sebagaimana pada **Lampiran F.10**.

F.2.16 MONITORING DAFTAR PERKARA GUGATAN BMN KEMANTAN TAHUN 2018

Selama Tahun 2018 telah dilakukan penyelesaian BMN yang bermasalah, dapat disajikan rekapitulasi daftar perkara gugatan BMN per Eselon I sebagaimana pada **Lampiran F.11**.

F.2.17 MONITORING BANK GARANSI ATAU PEKERJAAN KEMANTAN YANG DILANJUTKAN MENGGUNAKAN ANGGARAN TAHUN 2019

Selama Tahun 2018 terdapat penyelesaian pekerjaan yang menggunakan Bank Garansi per tanggal 31 Desember 2018 atau pekerjaan yang dilanjutkan menggunakan anggaran Tahun 2019 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Ditjen Tanaman Pangan
Dalam proses pengadaan alsintan terdapat mekanisme penggunaan Bank Garansi dan sudah tercatat sebagai piutang lainnya senilai Rp.31.790.258.740,00 terdiri dari Bank Garansi senilai Rp.31.705.748.876,00 dan piutang pajak lainnya senilai Rp.6.696.842.565,00
2. Ditjen Perkebunan
Pada Tahun Anggaran 2018 Piutang Bukan Pajak tercatat pada Satker 059180 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur senilai Rp185.471.000,00 dikarenakan terdapat pencairan jaminan pembayaran setelah tanggal 31 Desember 2018, yang berasal dari adanya wanprestasi pekerjaan Pengadaan Benih Kopi Arabika Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Bondowoso sesuai kontrak Nomor: 027/6927/121.4/2018 Tanggal 18 Desember 2018. Telah dilakukan pencairan jaminan pembayaran senilai Rp185.471.000,- pada tanggal 15 Januari 2019 dan penyeteroran ke kas negara dengan bukti setor NTPN: ECCC3664PR5REIPO.
3. Ditjen PKH
Bank Garansi atas pekerjaan Pembangunan Urugan, Talud, dan Struktur Loka Veteriner Papua senilai Rp2.964.630.000,00 tidak dapat diakui sebagai piutang karena pada aplikasi SIMAK-BMN sudah dicatat sebagai Kontruksi dalam Pekerjaan.

BAST Program Bekerja pada satker BBVET Maros yang terealisasi sebesar Rp57.474.500.000,00 sudah diserahkan pada TA.2018 sebesar Rp53.061.260.000,00, pada 31 Desember 2018 sudah tercatat sebagai piutang lainnya dan sudah diserahkan pada TA. 2019 sebesar Rp4.413.240.000,00.

4. Litbang

a. BPTP Jatim

Bank garansi senilai Rp23.029.900,00 sudah tercatat sebagai akun piutang bukan pajak. Nilai piutang tersebut telah disetorkan ke kas Negara tanggal 8 Januari 2019 Rp23.029.900,00 NTPN E32DC0TFOGIHL7EI.

b. BPTP Sulsel

Bank garansi senilai Rp28.080.000,00 sudah tercatat sebagai akun piutang bukan pajak. Nilai piutang tersebut telah disetorkan ke kas Negara tanggal 8 Januari 2019 Rp28.080.000,00 NTPN 7BC15JMISURKDBE.

5. BPPSDMP

Satker SMK PP Kupang terdapat Bank garansi senilai Rp.26.095.000,00 sudah tercatat sebagai akun piutang bukan pajak dikarenakan kekurangan volume pekerjaan.

F.2.17 MONITORING TUNGGAKAN DPM-LUEP BERDASARKAN HASIL REKON KPKNL PADA BADAN KETAHANAN PANGAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi perkembangan data tunggakan DPM-LUEP hasil rekon KPKNL sampai dengan tanggal 18 April 2019 sebesar Rp15.129.655.725 yang berada di 16 propinsi. Masih terdapat 3 propinsi yaitu Jawa Timur, Riau dan Aceh yang belum menyampaikan hasil rekon data tunggakan DPM LUEP dengan KPKNL. Rekapitulasi sisa tunggakan DPM-LUEP disajikan pada **Lampiran F.12**.

F.2.18 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI (LK PHLN) TAHUN 2018

Berdasarkan data pada e-Rekon&LK terdapat transaksi yang bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), berikut ini dapat disajikan rincian Ikhtisar LK PHLN pada **Lampiran F.13**

F.2.19 INFORMASI RINCIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2018

Berdasarkan nilai aset tetap yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung & Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Lain-Lain. Dari uraian dimaksud, nilai yang tersaji pada tabel dibawah ini tidak termasuk nilai *Satker Konsolidasi Kementan*, dapat dilihat sebagai berikut :

No	Aset Tetap	Nilai
1	Tanah	80.270.402.841.743
2	Peralatan dan Mesin	6.225.890.240.250
3	Gedung dan Bangunan	6.223.614.104.501
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	659.625.014.599
5	Aset Tetap Lainnya	72.295.320.166
Total		93.451.827.521.259

Dari hasil rincian Barang Milik Negara tersebut dapat disajikan pada **Lampiran F.14**.

F.2.20 INFORMASI RINCIAN BARANG MILIK NEGARA HENTI GUNA TAHUN 2018

Berdasarkan nilai Aset henti guna sebesar Rp765.041.906.247,00, nilai tersebut tidak termasuk nilai *Satker Konsolidasi Kementan* dapat disajikan rincian barang henti guna pada **Lampiran F.15.**